BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders).* Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 dan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan periode lima tahun dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Sumatera Utara dan mensinergikan program strategis Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara.

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan :

a. *Top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
b. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara
c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
e. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS, selain itu penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (riskbased planning), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

a. Persiapan Penyusunan RKPD
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
c. Penyusunan Rancangan RKPD
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan RKPD

1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesuia Tahun 20214 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor…. Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang mana RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Rencana Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang disinergikan dengan RPJMN menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2025 yang diselaraskan dengan landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada skema hubungan antar dokumen berikut:

Gambar 1.2
Skema Hubungan Antar Dokumen

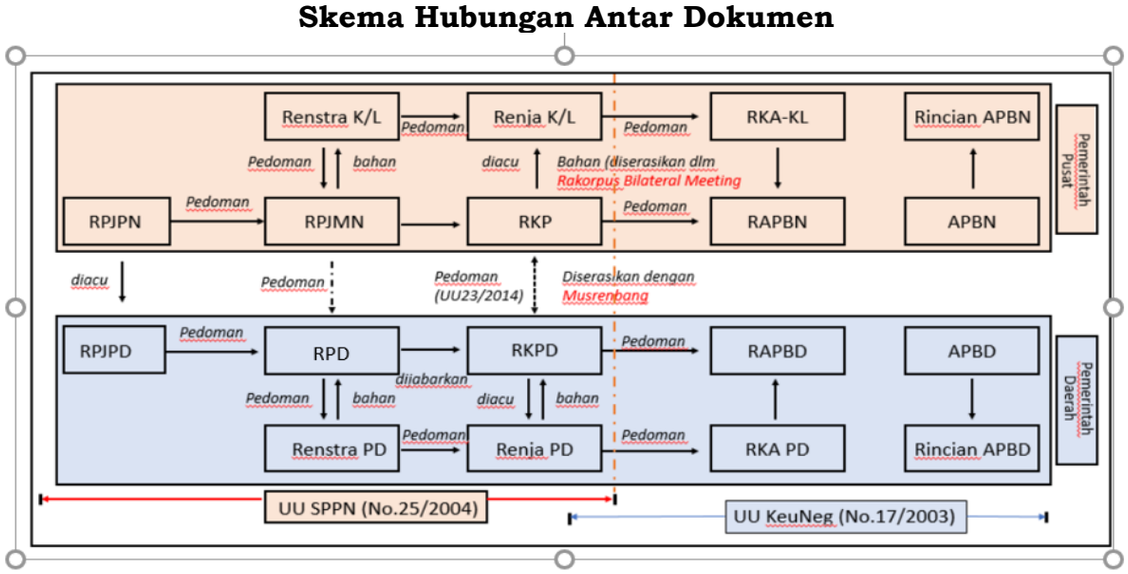

Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- **Hubungan dengan RKP tahun 2025**
  RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2025 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

- **Hubungan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026**
  RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target indikator kinerja tahun 2025;

- **Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025**
  RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang digunakan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2025.

- **Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2025**
  RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara (R-APBD) Tahun 2025. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan program,

kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

- **Hubungan dengan RTRW**
  Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- **Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**
  Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

- **Hubungan dengan SPM**
  Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyelarasan program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebagai peedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu Strategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2025.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025**.**

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera terletak pada garis lintang dan garis bujur yaitu 0º 50' Lintang selatan - 4º 40' lintang utara dan 96º 40' - 100º 50' bujur timur, memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur yang berdasarkan karakteristik wilayah terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan wilayah lain yaitu:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Timur : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sumatera Utara berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi keuntungan geografis menjadi penghubung jalur perdagangan internasional, yang dampaknya akan menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di pulau Sumatera.

Berdasarkan Badan Informasi Geospasial Tahun 2021 dan Revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2022, total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara kurang lebih sebesar 11.131.141,3 Ha(111.311,41 km²) yang terdiri dari luas daratan 7.246.258,89 Ha (65,10%) dan luas lautan sebesar 3.884.882,38 Ha (34,90%).

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2023, secara administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 kabupaten/kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 455 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan. Jika dilihat dari luas wilayah daerah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas wilayah daerah terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah daratan terluas yaitu: 6.449,94 Ha (6.449,94 km²) atau 8,90% dari total wilayah daratan Sumatera Utara diikuti Kabupaten dengan wilayah daratan terluas kedua yaitu: 614.003,51 Ha (6.140,04 km²) atau 8,47% dari total wilayah daratan Sumatera Utara, sedangkan wilayah daratan terkecil adalah Kota Sibolga dengan luas 1.232,09 Ha (12,32 km²) atau sekitar 0,02% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 4 zona wilayah berdasarkan karakteristik geografis kewilayahan, yakni:

1. Wilayah Pantai Timur
2. Wilayah Pantai Barat
3. Wilayah Dataran Tinggi

4. Wilayah Kepulauan Nias

Pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografisnya bertujuan untuk memudahkan dalam hal menentukan tema pembangunan pada tiap wilayah yang dikelompokkan.

Selanjutnya rincian luas wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec.	Desa	Kel.	Luas Wilayah (Km2)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01. Nias	Gido	10	170	0	902
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.547
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	15	211	37	4.201
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.308
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.896
06. Toba	Balige	16	231	13	2.292
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.772
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.738
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.601
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	2.084
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.207
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.581
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.140
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	2.532
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.352
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.366
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	1.850
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.949
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	888
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.946
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.914
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.080
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.686
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.238
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	464
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	11

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kec.	Desa	Kel.	Luas Wilayah (Km2)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
27. Tanjung Balai	Tanjung Balai	6	0	31	60
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	76
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5	0	35	39
30. Medan	Medan	21	0	151	279
31. Binjai	Binjai	5	0	37	94
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	159
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	209
SUMATERA UTARA		**455**	**5417**	**693**	**72.461**

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2023

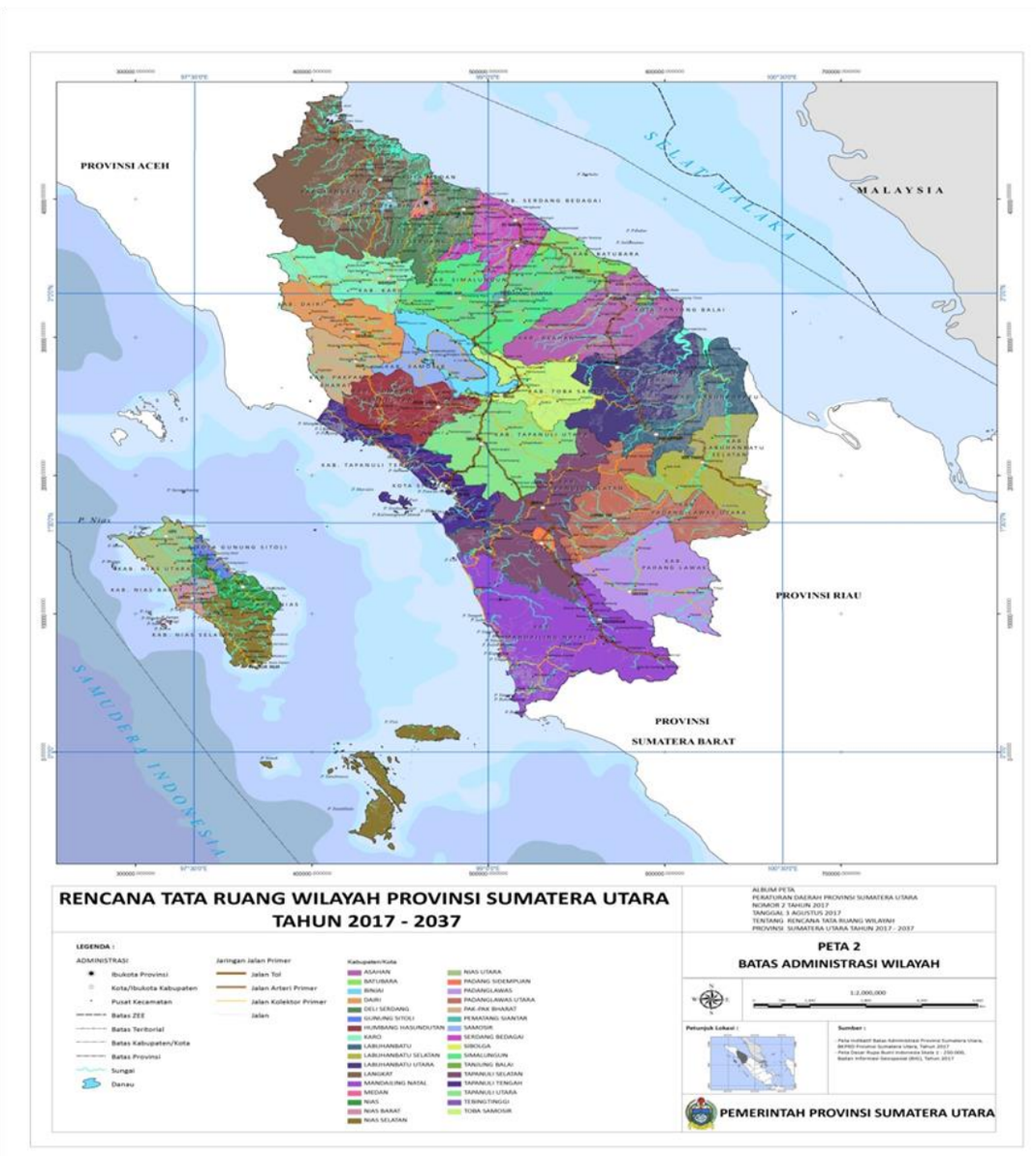

Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan karakteristik geografis wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 (empat) kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Dataran Tinggi dan Kepulauan Nias. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Terdapat Danau Toba yang luasnya mencapai 112.986,15 ha atau 1,57 persen dari total luas wilayah Sumut.

Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai serta Kawasan Kepulauan Nias meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, kepulauan, daratan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 (enam puluh delapan) kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 (dua puluh tiga) kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 (tiga puluh satu) kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kepulauan Nias. Kondisi kepulauan meliputi 229 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di wilayah Pantai Barat. Kondisi daratan terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran rendah, Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0–12 persen seluas 47.810 Km2, antara 12–40 persen seluas 6.305 Km2 dan di atas 40 persen seluas 17.719 Km2.

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0–2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian di atas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

3. Geologi

Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah Timur dan lempeng Australia di sebelah Barat. Formasi batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:

- Batuan beku hasil pendinginan magma dengan daya dukung batuan tinggi;

- Batuan beku hasil erupsi gunung api dengan daya dukung cukup tinggi;
- Batuan *malihant* atau *metamorf*, dengan daya dukung kuat tidak berlapis;
- Batuan sedimen dari *non clastic*, dengan daya dukung kecil atau sedang; dan
- Batuan sedimen dengan porositas kecil.

Kondisi batuan hasil aktivitas tektonik dan vulkanik di Wilayah Sumatera Utara, memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan agraris, pertambangan mineral, dan pariwisata.

4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 360 DAS meliputi dari 67 DAS yang masuk dalam pengelolaan BPDAS Wampu Sei Ular, dan 293 DAS yang masuk BPDAS Asahan Barumun. Daerah Aliran Sungai di Sumatera Utara dikelompokkan menjadi dua kelompok prioritas penanganan berdasarkan kondisi daya dukungnya, yaitu: DAS Prioritas (DAS yang dipulihkan daya dukungnya) sebesar 11,67 persen dan DAS Prioritas II (DAS yang dipertahankan daya dukungnya) sebesar 88,33 persen. DAS yang perlu penanganan adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya. Di Provinsi Sumatera Utara, ada 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk penanganannya, yakni:

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Toba
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Nias
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, dan
7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Padang

Pengelompokan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 11 (sebelas) WS, yakni:

Tabel. 2.2
Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Debit Andalan M3/DTK	Keterangan
1	Alas – Singkil	8	21.36	Lintas Provinsi
2	Batang Natal – Batang Batahan	40	18.55	Lintas Provinsi
3	Rokan	15		Lintas Provinsi
4	Belawan – Ular – Padang	11	29.23	Strategis Nasional
5	Toba – Asahan	1	1.48	Strategis Nasional
6	Batang Angkola – Batang Gadis	5	5.93	Lintas Kab/Kota
7	Wampu – Besitang	13	1.32	Lintas Kab/Kota
8	Bah Bolon	5	8.76	Lintas Kab/Kota
9	Barumun – Kualuh	3	83.70	Lintas Kab/Kota
10	Nias	43	0.54	Lintas Kab/Kota

No	Wilayah Sungai	Jumlah DAS	Debit Andalan M3/DTK	Keterangan
11	Sibundong – Batang Toru	16	19.66	Lintas Kab/Kota
12	Lain-lain	200		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumun, Sungai Silau, Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Belawan, Sungai Padang, Sungai Mola dan Sungai Batang Gadis yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku irigasi, air bersih dan air minum selain itu juga sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA), sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan menjaga tutupan hutan dan pengendalian kegiatan budidaya di Daerah Aliran Sungai.

Di samping sungai Provinsi Sumatera Utara juga memiliki danau dengan debit air cukup besar yang berpotensi bagi pengembangan sistem pengairan, penyediaan air baku dan sumber energi baru terbarukan. Selain itu terdapat potensi air tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Sumatera Utara yang tersebar yakni:

Tabel. 2.3
Imbuhan Air Tanah di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama CAT	Luas CAT (Km2)	Lokasi
1	Medan	19.786	Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo, Kab Simalungun,
2	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah
3	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
4	Samosir	648	Kab. Samosir
5	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir
6	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara
7	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Selatan dan Kab Tapanuli Utara
8	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara
9	Padangsidimpuan	240	Kab. Tapanuli Selatan

Sumber: RTRW Provsu Tahun 2017- 2037

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sumber daya air permukaan berupa rawa, data rawa sebagai air permukaan dan sebagai tutupan lahan diberikan oleh tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Sumber Daya Air Permukaan

NO	TUTUPAN LAHAN (RAWA)	LUAS (Ha)
1.	Belukar Rawa	31.617
2.	Hutan Rawa Sekunder	18.928
3.	Rawa	4.548
TOTAL		**55.093**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari luasan tutupan lahan berupa rawa tersebut, mampu mengairi Daerah Irigasi seluas 78.871 Ha dengan jumlah 51 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari: 6 DI kewenangan Pemerintah, 14 DI kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 31 DI kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. *(Sumber: SK Menteri PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi).*

5. Klimatologi

Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Pasat dan angin Muson. Dikutip dari Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2020 berdasarkan Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan pengamatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Suhu/*Temperature* minimum sebesar 22,2-23,2,8 derajat *celcius* sementara suhu maksimum: 34,8-33,2 derajat *celcius* atau rata-rata sebesar 27,4-26,7, kelembaban/ *humidity* minimum sebesar 43-53 persen dan kelembaban maksimum 98 persen atau rata-rata sebesar 86.9 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar 13-23 meter per detik, sementara rata-rata tekanan udara berkisar antara 1005,0-1007,1 mb, jumlah curah hujan 208-319 milimeter dengan jumlah hari hujan 12-24 hari dan penyinaran matahari sebesar 2,70-4,51 persen.

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan seluas 2.946.512 Ha atau sekitar 41 persen dan hutan seluas 2.381.013 Ha atau sekitar 33 persen. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57 persen dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti: industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

Sementara itu luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara) adalah seluas 3.055.795 Ha atau ±42,87% dari luas total daratan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas

±427.008 Ha; Hutan Lindung seluas ±1.206.881 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ±641.769 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ±704.452 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ±75.684 Ha.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Potensi Pengembangan wilayah Sumatera Utara di berbagai sektor yang bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dan sosial. Berikut adalah beberapa potensi pengembangan untuk menjadi fokus antara lain:

1. Infrastruktur

- Transportasi: Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara, pelabuhan, jalan tol, dan rel kereta api untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang. Contoh spesifiknya adalah pengembangan Bandara sebagai hub internasional dan pengembangan Pelabuhan.
- Konektivitas Digital: Peningkatan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung konektivitas digital, terutama di daerah pedesaan.

2. Ekonomi

- Industri: Pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Pertanian dan Perkebunan: Modernisasi sektor pertanian dan perkebunan, termasuk pengembangan tanaman unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.
- Perikanan dan Kelautan: Optimalisasi potensi perikanan laut dan budidaya ikan air tawar.

Luas areal perkebunan adalah 1.880.086,412 ha atau 10,3 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara atau sebesar 26,37 persen dari luas total daratan Provinsi Sumatera Utara, dengan produksi sebesar ±20.318.622,73 ton untuk 23 komoditas seperti sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Komoditas kopi akan diprioritaskan pengembangan kawasan sebagai amanat Kepmentan Nomor 472 Tahun 2018 di Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Dairi dan Karo. Untuk sektor peternakan, wilayah pantai timur potensial untuk dikembangkan khususnya ternak sapi potong dan sapi perah. Selain itu Pengembangan kerbau dan kuda potensial dilakukan di wilayah Dataran Tinggi. Sementara ternak kecil seperti kambing dan domba potensial diarahkan pemeliharaannya di wilayah pantai timur. Selain itu terdapat juga pengembangan ternak unggas, ayam pedaging, ayam petelur dan ternak itik.

Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat dan perairan umum seperti sungai, danau, tambak. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai

Timur) sebesar 276.030 ton per tahun dengan potensi jenis ikan unggulan seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75 persen, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dengan potensi jenis ikan unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79 persen. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

3. Pariwisata

- Destinasi Wisata: Promosi dan pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, dan Pulau Samosir. Penambahan fasilitas wisata dan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
- Ekowisata dan Pariwisata Budaya: Pemanfaatan potensi ekowisata dan pariwisata budaya untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.

Sumatera Utara telah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, dibagi dalam 12 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Berbagai tempat pariwisata di Sumatera Utara yang patut dikunjungi para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara seperti kawasan ekowisata yang berada di Sumatera Utara antara lain:

a. Kawasan Ekowisata Tangkahan

   Tangkahan terletak di antara dua desa yaitu Namo Sialang dan Sei Serdang yang juga berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di Kabupaten Langkat. Selain panorama alam yang dapat dinikmati, di kawasan ekowisata Tangkahan juga terdapat tempat Rehabilitasi Satwa Langka Orangutan Sumatera serta konservasi Gajah. Selain itu juga terdapat kawasan Bahorok, sekitar 75.7 km dari Medan atau 3 (tiga) jam dengan mobil.

b. Kawasan Ekowisata Karo.

   Kabupaten Karo terletak sekitar 77 Km dari Kota Medan. Banyak tujuan wisata dapat dikunjungi di wilayah ini, yaitu wisata Agro Berastagi, Tongging, Gundaling Peak, Danau Lau Kawar, Mata Air Panas alami Lau Sidebuk, dan banyak lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah disusun dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi (Ripparda) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan perwilayahan. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)
b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)

4. Sosial

- Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah, universitas, dan pusat pelatihan. Fokus pada pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan dan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

5. Lingkungan

- Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati.
- Pengendalian Bencana: Penguatan sistem mitigasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat.

6. Energi

- Energi Terbarukan: Pengembangan potensi energi terbarukan seperti energi panas bumi, tenaga air, dan biomassa untuk mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut, perlu adanya rencana strategis yang melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil antara lain:

- Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan wilayah.
- Penyediaan insentif bagi investor lokal dan asing.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
- Penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah di Sumatera Utara.

Dengan fokus pada potensi-potensi tersebut dan implementasi rencana strategis yang tepat, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk berkembang secara signifikan pada tahun 2025 dan seterusnya.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung api. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 (empat) ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan Angkola dan patahan Barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Perhitungan Indeks Risiko Bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu: bahaya, kerentanan dan kapasitas. Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah 40% dari komponen bahaya, 30% dari komponen kerentanan, dan 30% dari komponen kapasitas.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa kejadian bencana di

Sumatera Utara yang dapat dilihat dari Indeks Risiko per Ancaman diantaranya:

1. Banjir

Banjir masih menjadi ancaman di Provinsi Sumatera Utara, di mana terdapat 22 (dua puluh dua) daerah dengan resiko tinggi, 3 (tiga) daerah dengan resiko sedang, dan 1 (satu) daerah dengan resiko rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel. 2.5
Indeks Risiko Bencana Banjir

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Mandailing Natal	36.00	Tinggi
2	Nias Utara	36.00	Tinggi
3	Nias	36.00	Tinggi
4	Nias Barat	36.00	Tinggi
5	Labuhanbatu Utara	36.00	Tinggi
6	Labuhanbatu	36.00	Tinggi
7	Labuhanbatu Selatan	36.00	Tinggi
8	Batubara	36.00	Tinggi
9	Langkat	36.00	Tinggi
10	Padang Lawas	35.03	Tinggi
11	Nias Selatan	34.96	Tinggi
12	Tapanuli Tengah	33.90	Tinggi
13	Tanjung Balai	30.37	Tinggi
14	Gunungsitoli	29.48	Tinggi
15	Serdang Bedagai	28.02	Tinggi
16	Karo	25.58	Tinggi
17	Deli Serdang	24.75	Tinggi
18	Tapanuli Selatan	23.78	Tinggi
19	Padang Lawas Utara	23.75	Tinggi
20	Asahan	21.39	Tinggi
21	Medan	16.76	Tinggi
22	Tebing Tinggi	14.37	Tinggi
23	Binjai	12.00	Sedang
24	Padangsidimpuan	10.00	Sedang
25	Dairi	6.92	Sedang
26	Pakpak Bharat	3.66	Rendah

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan nilai indeks risiko bencana banjir tertinggi di Sumatera Utara dengan nilai skor 36.00 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai skor 3.66.

2. Gempa Bumi

Ancaman bencana Gempa Bumi terjadi di semua 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Kelas Risiko Tinggi terdapat pada 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Kota Tanjung Balai dengan kelas Risiko Rendah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 2.6
Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Mandailing Natal	32.40	Tinggi
2	Nias Utara	32.40	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
3	Nias	32.40	Tinggi
4	Nias Barat	32.40	Tinggi
5	Padangsidimpuan	32.40	Tinggi
6	Tapanuli Utara	32.40	Tinggi
7	Toba	32.40	Tinggi
8	Padang Lawas Utara	32.40	Tinggi
9	Humbang Hasundutan	32.40	Tinggi
10	Gunungsitoli	32.40	Tinggi
11	Padang Lawas	31.53	Tinggi
12	Nias Selatan	31.47	Tinggi
13	Dairi	23.37	Tinggi
14	Karo	23.02	Tinggi
15	Sibolga	21.60	Tinggi
16	Labuhanbatu Utara	21.60	Tinggi
17	Labuhanbatu	21.60	Tinggi
18	Batubara	21.60	Tinggi
19	Langkat	21.60	Tinggi
20	Labuhanbatu Selatan	21.60	Tinggi
21	Toba	21.60	Tinggi
22	Binjai	21.60	Tinggi
23	Pematangsiantar	21.60	Tinggi
24	Simalungun	21.60	Tinggi
25	Tapanuli Selatan	21.40	Tinggi
26	Tapanuli Tengah	20.34	Tinggi
27	Serdang Bedagai	16.83	Tinggi
28	Pakpak Bharat	16.49	Tinggi
29	Deli Serdang	14.85	Tinggi
30	Tebing Tinggi	14.37	Tinggi
31	Asahan	12.84	Tinggi
32	Medan	10.83	Sedang
33	Tanjung Balai	10.80	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan nilai indeks risiko bencana Gempa Bumi tertinggi di Sumatera Utara dengan nilai skor 32.40 sedangkan Kategori Sedang pada Kota Tanjung Balai dengan nilai skor 9.76.

3. Tsunami

Berdasarkan ancaman Bencana Tsunami di Sumatera Utara, diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan kelas Risiko Tinggi dan 1 (satu) kabupaten/kota dengan kelas risiko rendah.

Tabel. 2.7
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Mandailing Natal	24.00	Tinggi
2	Nias Utara	24.00	Tinggi
3	Nias	24.00	Tinggi
4	Nias Barat	24.00	Tinggi
5	Sibolga	24.00	Tinggi
6	Nias Selatan	23.31	Tinggi
7	Tapanuli Tengah	22.60	Tinggi
8	Gunungsitoli	21.06	Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
9	Tapanuli Selatan	7.40	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi ancaman Risiko Tinggi terhadap Tsunami dengan skor 24.00 sedangkan Tapanuli Selatan dengan Kelas Risiko Sedang dengan skor 7.40.

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara hampir terjadi di semua Kabupaten/Kota dengan kelas resiko tinggi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.8
Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Sibolga	36.00	Tinggi
2	Labuhanbatu	36.00	Tinggi
3	Padang Sidempuan	36.00	Tinggi
4	Humbang Hasundutan	35.56	Tinggi
5	Binjai	33.60	Tinggi
6	Pematang Siantar	33.60	Tinggi
7	Tanjung Balai	30.37	Tinggi
8	Gunungsitoli	29.48	Tinggi
9	Karo	25.58	Tinggi
10	Deli Serdang	24.75	Tinggi
11	Mandailing Natal	24.00	Tinggi
12	Nias Utara	24.00	Tinggi
13	Nias	24.00	Tinggi
14	Nias Barat	24.00	Tinggi
15	Labuhanbatu Utara	24.00	Tinggi
16	Batu Bara	24.00	Tinggi
17	Langkat	24.00	Tinggi
18	Labuhanbatu Selatan	24.00	Tinggi
19	Tapanuli Utara	24.00	Tinggi
20	Toba Samosir	24.00	Tinggi
21	Simalungun	24.00	Tinggi
22	Padang Lawas	23.35	Tinggi
22	Nias Selatan	23.31	Tinggi
24	Tapanuli Tengah	22.60	Tinggi
25	Toba Samosir	21.60	Tinggi
26	Asahan	21.39	Tinggi
27	Padang Lawas Utara	21.38	Tinggi
28	Pakpak Bharat	18.32	Tinggi
29	Dairi	17.31	Tinggi
30	Serdang Bedagai	16.83	Tinggi
31	Medan	16.76	Tinggi
32	Tapanuli Selatan	15.85	Tinggi
33	Tebing Tinggi	14.90	Tinggi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

5. Tanah Longsor

Ancaman kejadian tanah longsor di Provinsi Sumatera Utara dengan kelas resiko tinggi ada di 21 Kabupaten/Kota, 11 dengan Kelas Risiko Sedang dan 1 (satu) Kelas Risiko Rendah, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.9
Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
1	Nias	36.00	Tinggi
2	Nias Barat	36.00	Tinggi
3	Nias Selatan	34.96	Tinggi
4	Gunungsitoli	29.48	Tinggi
5	Mandailing Natal	24.00	Tinggi
6	Nias Utara	24.00	Tinggi
7	Sibolga	24.00	Tinggi
8	Labuhanbatu Utara	24.00	Tinggi
9	Langkat	24.00	Tinggi
10	Tapanuli Utara	24.00	Tinggi
11	Toba Samosir	24.00	Tinggi
12	Simalungun	24.00	Tinggi
13	Humbang Hasundutan	23.71	Tinggi
14	Padang Lawas	23.35	Tinggi
15	Tapanuli Tengah	22.60	Tinggi
16	Toba Samosir	22.40	Tinggi
17	Padang Lawas Utara	22.17	Tinggi
18	Pakpak Bharat	18.32	Tinggi
19	Dairi	17.31	Tinggi
20	Karo	17.05	Tinggi
21	Tapanuli Selatan	15.85	Tinggi
22	Asahan	14.26	Sedang
22	Labuhanbatu	12.00	Sedang
24	Batu Bara	12.00	Sedang
25	Labuhanbatu Selatan	12.00	Sedang
26	Kota Padang Sidempuan	12.00	Sedang
27	Kota Binjai	11.20	Sedang
28	Kota Pematang Siantar	11.20	Sedang
29	Kota Tanjung Balai	10.12	Sedang
30	Serdang Bedagai	8.73	Sedang
31	Deli Serdang	8.25	Sedang
32	Kota Tebing Tinggi	7.45	Sedang
33	Kota Medan	5.59	Rendah

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Nias memiliki potensi ancaman Risiko Tinggi terhadap Bencana Tanah Longsor dengan skor 36.00 sedangkan Risiko Rendah pada Kota Medan dengan skor 5.59.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Provinsi Sumatera Utara masuk ke kategori sedang dan mengalami penurunan dengan skor 140,73, di mana sebelumnya pada Tahun 2022 berada pada skor 142,51. Walau dalam kategori sedang, bencana hidrometeorologi di Sumut cukup tinggi, yaitu bencana terkait atmosfer, air, laut yang mengakibatkan intensitas hujan tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut Data dan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana banjir, Tanah Longsor dan kebakaran hutan dan lahan. Sumatera Utara tercatat mengalami 84 kali laporan puting beliung dan 1 guncangan gempa bumi. Sebanyak 6.429 unit rumah rusak, 29 rumah peribadatan, 15 fasilitas pendidikan, 14 fasilitas umum dan 2 fasilitas kesehatan. Berikut nilai Indeks Risiko Bencana

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023:

Tabel. 2.10
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2015-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	MANDAILING NATAL	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	214.80	TINGGI
2	NIAS UTARA	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
3	NIAS	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	210.71	211.70	211.70	TINGGI
4	NIAS BARAT	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	210.80	TINGGI
5	KOTA GUNUNGSITOLI	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	215.60	207.67	TINGGI
6	NIAS SELATAN	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	187.94	191.83	190.52	TINGGI
7	TAPANULI TENGAH	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	191.20	187.85	TINGGI
8	KOTA SIBOLGA	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
9	LABUHANBATU UTARA	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
10	TAPANULI SELATAN	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	176.35	165.84	152.95	TINGGI
11	PADANG LAWAS	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	152.76	152.76	TINGGI
12	LABUHANBATU	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	151.20	TINGGI
13	ASAHAN	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	146.85	146.85	TINGGI
14	BATU BARA	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
15	LANGKAT	155.20	148.50	143.54	140.68	138.62	138.62	137.23	142.62	142.62	SEDANG
16	PADANG LAWAS UTARA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.57	SEDANG
17	LABUHANBATU SELATAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
18	KOTA PADANG SIDEMPUAN	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	SEDANG
19	HUMBANG HASUNDUTAN	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	127.33	127.66	SEDANG
20	DELI SERDANG	155.20	113.00	108.28	121.73	121.73	121.73	128.13	127.51	121.26	SEDANG
21	SERDANG BEDAGAI	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	124.57	124.92	120.18	SEDANG
22	TAPANULI UTARA	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	SEDANG
23	SAMOSIR	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
24	KARO	154.00	136.71	125.24	120.99	120.99	120.99	117.09	112.15	112.97	SEDANG
25	DAIRI	127.60	127.60	127.60	127.60	127.60	127.60	119.44	111.21	111.21	SEDANG
26	KOTA TANJUNG BALAI	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	110.72	SEDANG
27	TOBA	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
28	KOTA BINJAI	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	103.20	SEDANG
29	PAKPAK BHARAT	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	107.72	101.05	SEDANG
30	KOTA PEMATANGSIANTAR	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
31	KOTA MEDAN	155.20	103.55	100.61	93.77	93.77	93.77	93.77	97.68	90.05	SEDANG
32	KOTA TEBING TINGGI	101.60	101.60	101.60	101.60	101.60	101.60	100.04	94.77	86.61	SEDANG
33	SIMALUNGUN	95.20	75.03	73.59	73.59	73.59	73.59	80.07	80.07	80.07	SEDANG

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Grafik nilai indeks risiko Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023

Grafik 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

2.1.1.4 Kondisi Umum Demografi

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data terbaru yang tersedia hingga 2023, jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan sekitar 15 juta jiwa. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar, diikuti oleh beberapa kabupaten dan kota lainnya seperti Deli Serdang, Langkat, dan Pematang Siantar.

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk di provinsi ini berada pada kisaran 1-2% per tahun. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara:

1. Kelahiran: Angka kelahiran yang cukup tinggi di beberapa daerah pedesaan.
2. Migrasi: Kota Medan dan daerah sekitarnya mengalami migrasi masuk yang tinggi, terutama karena urbanisasi dan peluang kerja yang lebih banyak.
3. Angka Kematian: Angka kematian yang menurun seiring dengan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Distribusi penduduk di Sumatera Utara tidak merata. Beberapa daerah dengan konsentrasi penduduk tinggi meliputi:

- **Kota Medan**: Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Medan menarik banyak penduduk dari berbagai daerah.
- **Kabupaten Deli Serdang**: Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan memiliki perkembangan infrastruktur yang pesat.
- **Kota Pematang Siantar**: Salah satu kota besar di Sumatera Utara dengan aktivitas ekonomi yang signifikan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Sumatera Utara pada Tahun 2020 sebanyak 14.80 juta jiwa Jumlah penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP 2020 dibandingkan dengan SP 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 1.82 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 181.72 ribu jiwa setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28 persen per tahun. Terdapat percepatan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.06 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2000-2020 yang sebesar 1,22 persen. Perkembangan Jumlah dan Laju Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sumber: Sensus Penduduk 2020

Grafik 2.2
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara

Sementara jumlah penduduk jumlah penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.11
Jumlah Penduduk Sumatera Utara
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2023 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sumatera Utara	7.665.326	7.721.314	15.386.640
Nias	78.595	75.063	153.658
Mandailing Natal	249.164	247.811	496.975
Tapanuli Selatan	155.200	157.340	312.540
Tapanuli Tengah	191.809	195.086	386.895
Tapanuli Utara	161.320	161.782	323.102
Toba	106.943	106.907	213.850
Labuhan Batu	253.109	260.717	513.826
Asahan	396.946	405.617	802.563
Simalungun	514.658	521.262	1.035.920
Dairi	161.819	162.928	324.747
Karo	212.199	208.600	420.799
Deli Serdang	1.003.535	1.014.629	2.018.164
Langkat	527.889	538.822	1.066.711
Nias Selatan	190.195	192.344	382.539
Humbang Hasundutan	102.127	102.573	204.700
Pakpak Bharat	27.282	27.890	55.172
Samosir	70.685	70.648	141.333
Serdang Bedagai	339.056	343.862	682.918
Batu Bara	213.984	216.549	430.533
Padang Lawas Utara	135.073	140.375	275.448
Padang Lawas	137.142	138.506	275.648
Labuhanbatu Selatan	162.142	168.655	330.797
Labuhanbatu Utara	198.158	203.705	401.863
Nias Utara	78.415	77.458	155.873
Nias Barat	48.909	46.425	95.334
Sibolga	45.426	45.839	91.265
Tanjung Balai	90.455	92.715	183.170
Pematangsiantar	138.920	135.918	274.838
Tebing Tinggi	89.889	89.025	178.914
Medan	1.242.493	1.231.673	2.474.166
Binjai	151.645	151.627	303.272
Padangsidimpuan	116.989	119.228	236.217
Gunungsitoli	73.155	69.735	142.890

Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023

Selain itu jumlah Penduduk Sumatera Utara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.12
Jumlah Penduduk Sumatera Utara
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2023

Golongan Umur	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	724.516	693.077	1.417.593
5 - 9	698.187	668.413	1.366.600
10 - 14	688.985	654.812	1.343.797
15 - 19	677.795	636.902	1.314.697
20 - 24	670.234	633.969	13.04.203
25 - 29	659.704	629.672	1.289.376
30 - 34	620.457	598.771	1.219.228
35 - 39	574.125	560.441	1.134.566
40 - 44	526.153	522.728	1.048.881
45 - 49	472.762	479.873	952.635
50 - 54	407.514	424.353	831.867
55 - 59	337.906	363.354	701.260
60 - 64	265.770	294.723	560.493
65+	397.206	504.238	901.444
Jumlah	7.721.314	7.665.326	15.386.640

Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara,2023

2. Kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin penduduk menurut jenis kelamin

Tabel. 2.13
Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten Kota	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	
	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Sumatera Utara	212.34	100.73
Nias	170.28	95.51
Mandailing Natal	75.91	99.46
Tapanuli Selatan	74.40	101.38
Tapanuli Tengah	167.66	101.71
Tapanuli Utara	82.94	100.29
Toba	93.32	99.97
Labuhan Batu	185.34	103.01
Asahan	214.71	102.18

Kabupaten Kota	Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	
	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Simalungun	225.13	101.28
Dairi	155.86	100.69
Karo	190.68	98.30
Deli Serdang	781.86	101.11
Langkat	173.73	102.07
Nias Selatan	151.10	101.13
Humbang Hasundutan	87.05	100.44
Pakpak Bharat	40.40	102.23
Samosir	76.39	99.95
Serdang Bedagai	350.36	101.42
Batu Bara	484.76	101.20
Padang Lawas Utara	69.81	103.93
Padang Lawas	70.42	100.99
Labuhanbatu Selatan	107.42	104.02
Labuhanbatu Utara	109.02	102.80
Nias Utara	125.90	98.78
Nias Barat	205.36	94.92
Sibolga	7956.15	100.91
Tanjung Balai	3049.17	102.50
Pematangsiantar	3620.15	97.84
Tebing Tinggi	4567.63	99.04
Medan	8858.77	99.13
Binjai	3234.21	99.99
Padangsidimpuan	1482.86	101.91
Gunungsitoli	684.72	95.32

Sumber: Badan Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023

3. Distribusi/Persebaran Penduduk

Distribusi penduduk di Sumatera Utara tidak merata, dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di beberapa daerah dibandingkan daerah lainnya. Sebaran Penduduk Sumatera Utara masih terkonsentrasi di Kota Medan. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 0,36 persen wilayah Sumatera Utara, namun Kota Medan dihuni oleh 2,44 juta penduduk atau 16,46 persen penduduk Sumatera Utara. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduk sebanyak 1,93 juta orang atau sebesar 13,05 persen. Sementara Kabupaten Langkat, Simalungun dan Asahan mempunyai sebaran masing-masing sebesar 6,96 persen, 6,69 persen dan 5,20 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumut tahun 2023 berdasarkan besaran PDRB **ADHB mencapai Rp 1.050,99 triliun** dan **ADHK mencapai Rp 602,23 triliun**. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen, lebih tinggi jika dibanding pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,73 persen.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semua Kabupaten/Kota di tahun 2021, sebelumnya pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis akibat pandemi covid-19 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2019-2023 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Mandailing Natal	5.30	-0.94	3.20	4.34	4,93
Tapanuli Selatan	5.23	0.39	3.24	4.78	5,11
Tapanuli Tengah	5.18	-0.76	2.56	4.18	4,23
Tapanuli Utara	4.62	1.50	3.54	4.25	4,75
Toba	4.88	-0.27	2.92	4.24	4,93
Labuhan Batu	5.07	0.09	3.85	4.80	5,03
Asahan	5.64	0.21	3.73	4.66	4,87
Simalungun	5.20	1.01	3.70	4.68	5,07
Dairi	4.82	-0.94	2.05	4.21	5,04
Karo	4.60	-0.80	2.25	4.22	5,06
Deli Serdang	5.18	-1.78	2.23	4.70	5,34
Langkat	5.07	-0.86	3.08	4.69	4,93
Nias Selatan	5.03	0.61	2.02	3.08	3,65
Humbang Hasundutan	4.94	-0.13	2.02	4.21	4,38
Pakpak Bharat	5.87	-0.18	2.54	4.27	5,10
Samosir	5.70	-0.59	2.65	4.48	5,03
Serdang Bedagai	5.28	-0.44	2.87	4.46	5,03
Batu Bara	4.35	-0.31	2.35	4.07	4,08
Padang Lawas Utara	5.61	1.14	3.26	4.12	4,92
Padang Lawas	5.64	1.18	3.83	4.61	5,14
Labuhanbatu Selatan	5.35	0.80	3.82	4.74	4,94
Labuhanbatu Utara	5.15	0.27	3.83	4.62	4,76
Nias Utara	4.65	1.58	2.02	3.03	3,79
Nias Barat	4.82	1.66	2.26	3.01	3,72
Sibolga	5.20	-1.36	2.10	4.15	4,20
Tanjung Balai	5.79	-0.47	2.35	3.94	4,86
Pematangsiantar	4.82	-1.89	1.25	3.47	4,22
Tebing Tinggi	5.15	-0.70	2.51	4.01	3,98
Medan	5.93	-1.98	2.62	4.71	5,04
Binjai	5.51	-1.83	2.23	4.18	4,75
Padangsidimpuan	5.51	-0.73	2.75	4.77	5,09

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Gunungsitoli	6.05	0.38	2.25	3.11	3,69
Sumatera Utara	5.22	-1.07	2.61	4.73	5,01
Nias	5.04	1.80	2.21	3.06	3,82

Sumber: BPS Sumut 2023

Pada Tahun 2023 Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Deli Serdang dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,34 persen, sedangkan untuk Kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Padang Sidempuan sebesar 5,09 persen.

Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,12 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 9,55 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 3,02 persen. Sedangkan Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 3,44 persen dan 5,81 persen.

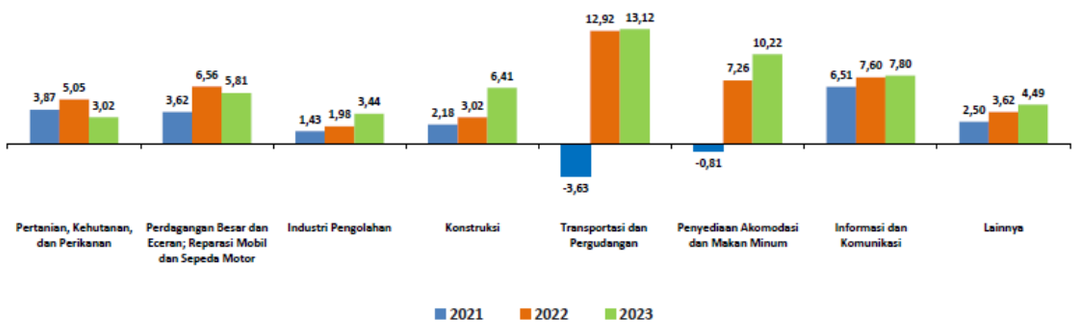

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut No No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024

Grafik 2.3
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 9,27 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,59 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,48 persen dan Komponen PK-P sebesar 3,98 persen. Sementara itu Komponen Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi sebesar 0,40 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB terkontraksi sebesar 1,70 persen.

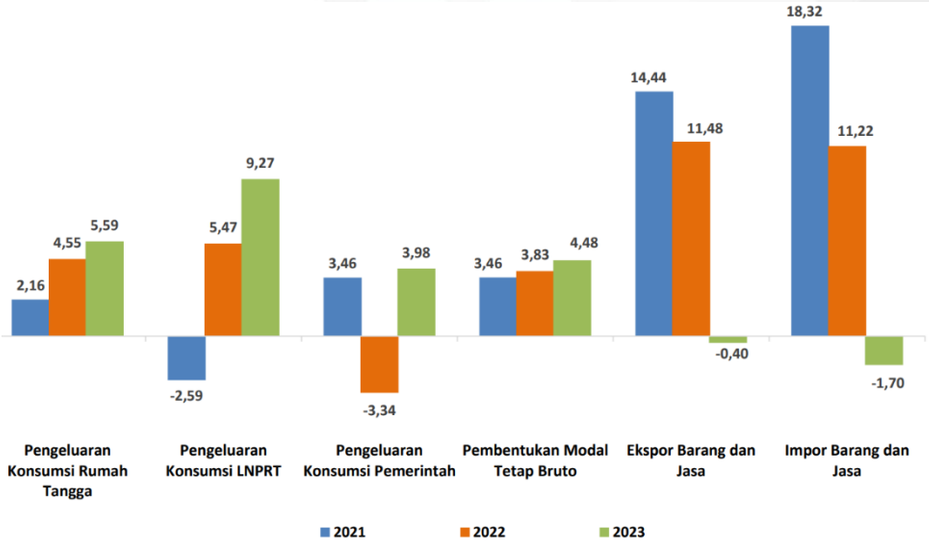

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024

Grafik 2.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (y-on-y)

2. PDRB Provinsi Sumatera Utara

- **Kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran**

  Struktur Ekonomi lapangan usaha sebagian masyarakat Sumatera Utara masih didominasi olek sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pada Tahun 2023 kontribusi terbesar penyumbang PDRB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 23,59 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,08 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 18,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Utara masih bergantung kepada produk hulu yang kurang bernilai tambah.

Tabel. 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (ADHK 2010)
dan Kontribusi PDRB Lapangan Usaha (ADHB)
Provinsi Sumatera Utara 2021-2023

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,87	5,05	3,02	22,04	22,98	23,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69	3,46	1,25	1,21	1,17
C.	Industri Pengolahan	1,43	1,98	3,44	19,53	19,13	18,44
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81	2,16	0,11	0,11	0,10
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,89	0,10	0,09	0,09
F.	Konstruksi	2,18	3,02	6,41	13,46	13,23	13,20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,56	5,81	18,91	18,99	19,08
H.	Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,92	13,12	4,17	4,54	5,05
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,26	10,22	2,05	2,04	2,11
J.	Informasi dan Komunikasi	6,51	7,60	7,80	2,34	2,33	2,30
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,50	2,97	2,97	2,88
L.	Real Estate	2,50	4,52	3,20	5,11	4,88	4,66
M,N	Jasa Perusahaan	-0,14	8,77	6,68	1,03	1,05	1,06
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	-0,74	1,93	3,54	3,17	3,00
P.	Jasa Pendidikan	3,05	5,13	7,39	1,86	1,77	1,75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	4,82	6,43	0,99	0,95	0,94
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,43	8,65	9,55	0,54	0,55	0,58
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024

Sedangkan menurut Sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki andil paling besar yaitu sebesar 50,72 persen, diikuti oleh sektor Ekspor Barang Jasa sebesar 37,62 persen dan selanjutnya sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,52 persen.

Tabel. 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (ADHK 2010)
dan Kontribusi PDRB Pengeluaran (ADHB)
Provinsi Sumatera Utara 2021-2023

Komponen		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,16	4,55	5,59	50,76	50,49	50,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	9,27	0,86	0,85	0,88
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	3,98	6,80	6,00	5,84
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	3,83	4,48	30,57	29,57	29,52
5	Perubahan Inventori	-	-	-	1,73	1,87	1,91
6	Ekspor Barang dan Jasa	14,44	11,48	-0,40	38,72	41,77	37,62
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	18,32	11,22	-1,70	29,43	30,56	26,48
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Dikutip Dari : BRS BPS Sumut No. 11/02/12/Th.XXVII, 5 Februari 2024

- **PDRB Per kapita**

  PDRB Per kapita Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 37,05 juta (ADHK 2010) dan RP 54,9 juta (ADHB) pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 39,14 juta (ADHK 2010) dan Rp. 68,31 juta (ADHB), peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dengan semakin meningkatnya nilai PDRB Per kapita Provinsi Sumatera Utara mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera Utara juga semakin meningkat.

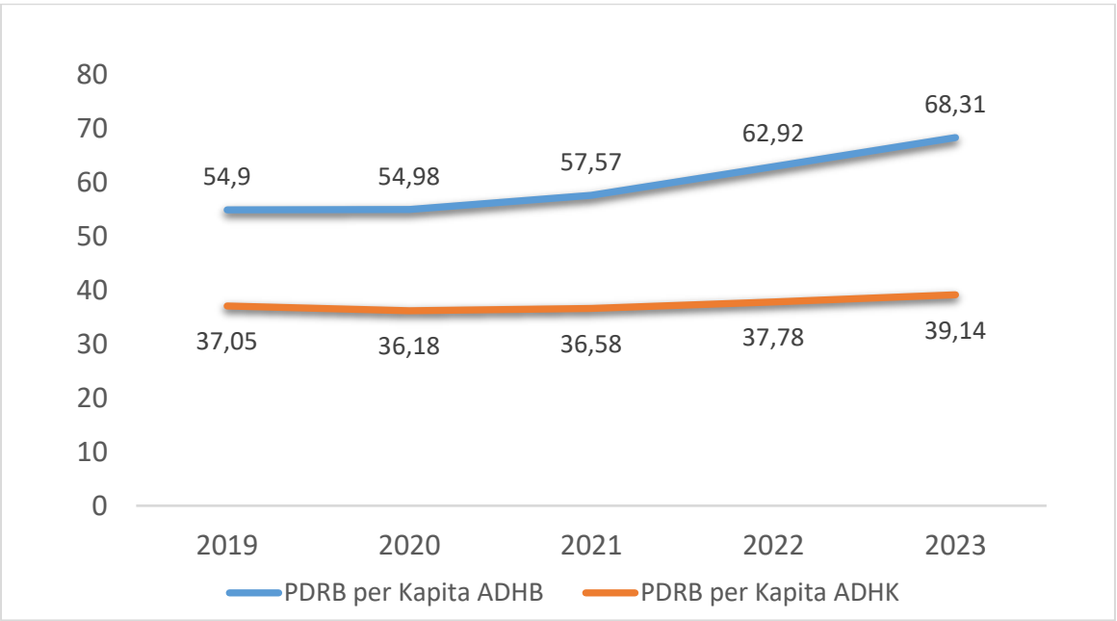

Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah), 2023

Grafik 2.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) dan Atas Dasar Konstan 2010 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

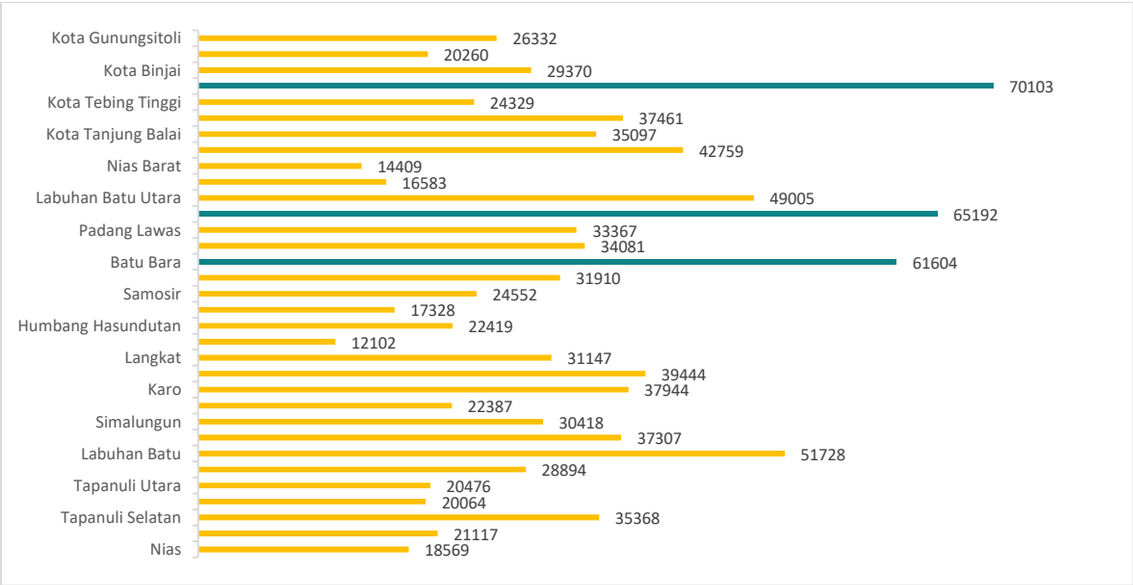

Sumber: BPS Sumatera Utara (data diolah), 2023

Grafik 2.6

Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) Atas Dasar Konstan 2010
Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara Tahun 2023

Untuk Tingkat Kabupaten/Kota, PDRB Per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Medan yaitu sebesar Rp. 70,10 juta diikuti Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu sebesar Rp. 65,19 Juta dan Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 61,60 juta.

3. Laju Inflasi

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,79 persen; kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,36 persen.

Dari delapan Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara, inflasi YoY tertinggi terjadi di Padangsidimpuan sebesar 4,13 persen dengan IHK sebesar 107,78 poin dan terendah terjadi di Pematangsiantar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 106,95 poin.

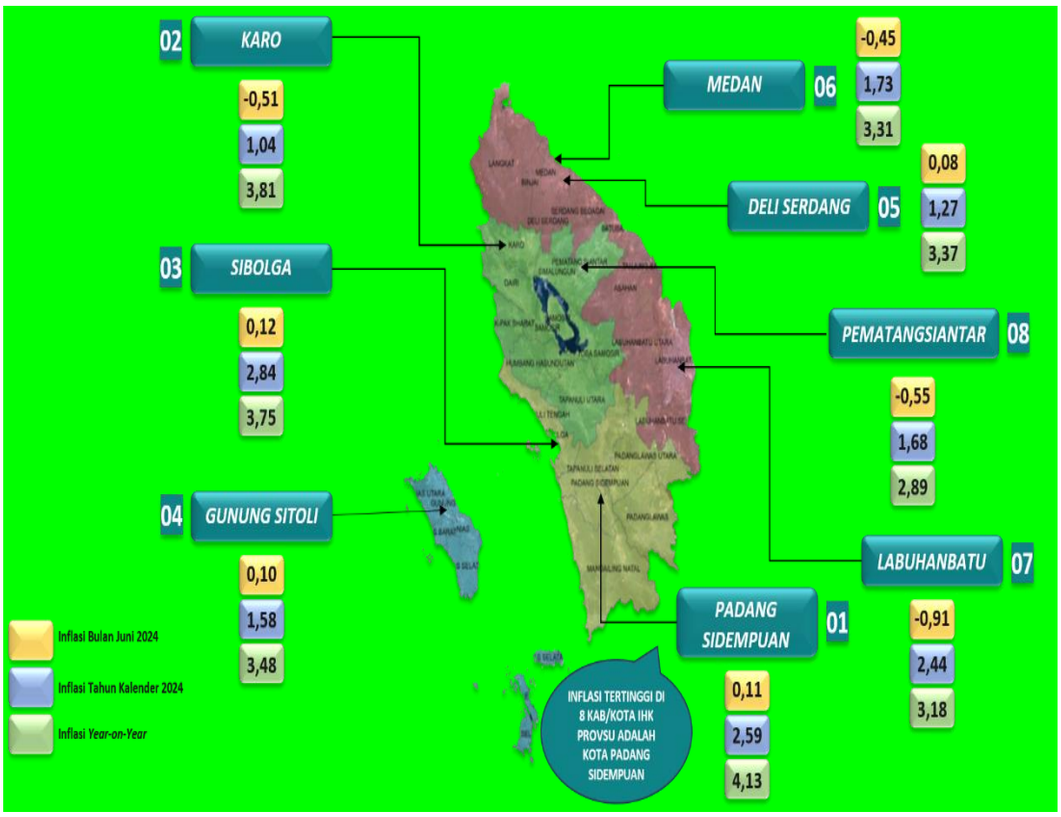

Gambar 2.2
Tingkat Inflasi 8 Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara Mei 2024
Sumber : BPS, data diolah

4. Indeks Gini

Gini Ratio perkotaan pada Provinsi Sumatera Utara tercatat 0.340 lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio nasional perkotaan (0.380)

pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan Sumut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi lain, Gini Ratio pedesaan Sumut (0.242) lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional pedesaan (0.261) pada Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan Sumut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

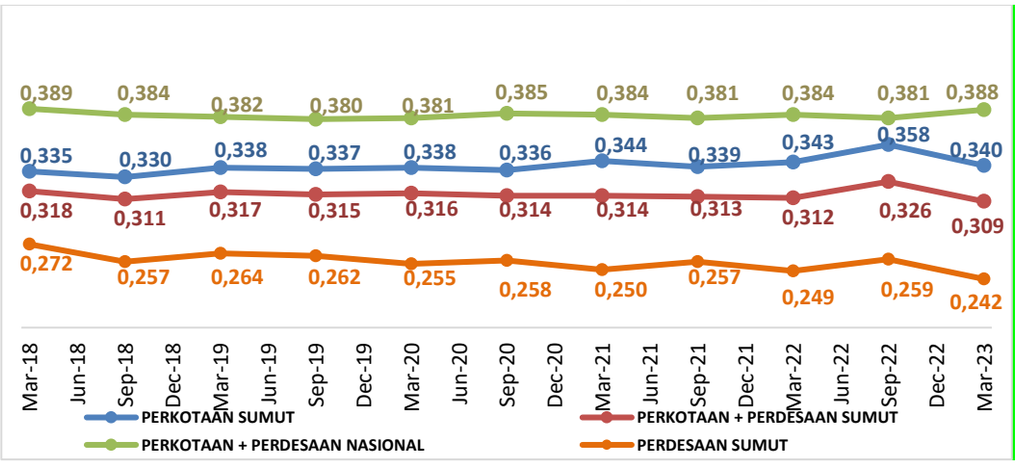

Sumber :
Nasional, BRS No.48/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023
Sumut, BRS No. 37/07/12/Th.XXVI, 17 Juli 2023

Grafik 2.7
Perkembangan Gini Ratio Perdesaan dan Perkotaan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Selain itu perkembangan Gini Ratio Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 2.17
Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sumatera Utara	0.3165	0.3161	0.3145	0.3120	0,309
Nias	0.2740	0.2512	0.2452	0.2750	0,279
Mandailing Natal	0.2623	0.2478	0.2403	0.2440	0,249
Tapanuli Selatan	0.2467	0.2022	0.2564	0.2090	0,219
Tapanuli Tengah	0.3090	0.3350	0.2917	0.2330	0,241
Tapanuli Utara	0.3065	0.2867	0.2766	0.2420	0,262
Toba	0.2753	0.2903	0.2719	0.3050	0,295
Labuhan Batu	0.2767	0.2715	0.2564	0.2780	0,244
Asahan	0.2793	0.2605	0.2441	0.2550	0,260
Simalungun	0.2738	0.2950	0.2641	0.2620	0,295
Dairi	0.2873	0.2706	0.2268	0.2210	0,241
Karo	0.2642	0.2706	0.2327	0.2360	0,240
Deli Serdang	0.2732	0.3120	0.2628	0.2700	0,295
Langkat	0.2660	0.2378	0.2381	0.2600	0,257
Nias Selatan	0.3186	0.2865	0.2411	0.2230	0,261
Humbang Hasundutan	0.2893	0.2464	0.3043	0.2580	0,256
Pakpak Bharat	0.2791	0.2475	0.2421	0.2740	0,251
Samosir	0.3010	0.3175	0.2735	0.2980	0,251
Serdang Bedagai	0.2571	0.2620	0.2287	0.2400	0,225
Batu Bara	0.2773	0.2592	0.2396	0.2430	0,255
Padang Lawas Utara	0.2702	0.2283	0.2547	0.2450	0,241

Kabupaten Kota	GINI RATIO MENURUT KABUPATEN/KOTA				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padang Lawas	0.2313	0.2653	0.2525	0.2270	0,225
Labuhanbatu Selatan	0.2497	0.1935	0.2317	0.2470	0,231
Labuhanbatu Utara	0.2668	0.2624	0.2431	0.2760	0,238
Nias Utara	0.2844	0.2506	0.2359	0.2390	0,228
Nias Barat	0.2578	0.2339	0.2238	0.2100	0,228
Sibolga	0.2718	0.2912	0.2764	0.3460	0,246
Tanjung Balai	0.2678	0.2716	0.2477	0.2450	0,238
Pematangsiantar	0.3298	0.3362	0.3076	0.3210	0,329
Tebing Tinggi	0.3237	0.3337	0.3440	0.3340	0,317
Medan	0.3519	0.3199	0.4020	0.3990	0,373
Binjai	0.3511	0.3244	0.2903	0.3020	0,318
Padangsidimpuan	0.3098	0.3538	0.3101	0.2750	0,267
Gunungsitoli	0.3183	0.3223	0.3166	0.3030	0,308

Sumber: BRS BPS, 2023

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Kondisi Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,18 poin yaitu dari 8,33 persen pada September 2022 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin di Sumut mengalami sedikit penurunan pada periode Maret 2023 dibandingkan September 2022. Namun, jika dibandingkan dengan September 2023, terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Berikut datanya:

Tabel. 2.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah Tempat Tinggal 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2019	665,46	8,39
September 2020	756,24	9,25
September 2021	725,04	8,68
September 2022	736.35	8.63
Maret 2023	709.78	8.23
Perdesaan		
September 2019	595,04	9,14
September 2020	600,48	9,14
September 2021	548,03	8,26
September 2022	525.74	7.96
Maret 2023	529.73	8.03
Perkotaan + Desa		
September 2019	1.260	8,63
September 2020	1.356	9,14
September 2021	1.273	8,49
September 2022	1.262	8.33
Maret 2023	1.239	8.15

Sumber: BRS BPS, 2023

Meskipun angka kemiskinan di Sumut menunjukkan sedikit penurunan, garis kemiskinan mengalami kenaikan. Hal ini menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Tabel. 2.19
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

Daerah/Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
September 2019	366 831	139 706	506 538
September 2020	378.679	141.850	520.529
September 2021	409.313	147.124	556.437
September 2022	458.089	157.137	615.227
Maret 2023	468.660	158.122	626.782
Perdesaan			
September 2019	367 379	103 166	470 545
September 2020	378.550	108.091	486.642
September 2021	399.971	114.016	513.987
September 2022	438.098	125.685	563.783
Maret 2023	447.262	126.238	573.500
Perkotaan + Desa			
September 2019	367 105	123 015	490 120
September 2020	378.617	126.619	505.236
September 2021	404.860	132.451	537.310
September 2022	448.623	143.402	592.025
Maret	458.706	144.293	602.999

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Pada periode Maret 2022 – September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan (P2) menunjukkan adanya penurunan. P1 naik dari 1,365 pada Maret 2022 menjadi 1,411 pada September 2022 dan P2 selama periode Maret 2022 – September 2022 tetap sama yakni sebesar 0,339. P1 mengindikasikan adanya kecenderungan Penurunan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan bertambah. Selanjutnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, turunnya indeks ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif sama sepanjang enam bulan terakhir, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran semakin tidak merata.

Tabel. 2.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019 – 2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	1,335	1,653	1,480
September 2020	1,540	1,671	1,599
September 2021	1,400	1,513	1,450
September 2022	1.441	1.372	1.411
Maret 2023	1.235	1.294	1.261
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,316	0,440	0,372
September 2020	0,386	0,535	0,453
September 2021	0,342	0,432	0,382
September 2022	0.333	0.346	0.339
Maret 2023	0.310	0.342	0.324

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk miskin terbanyak ada di Kota Medan yaitu sebanyak 187,74 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di Kabupaten Pakpak-Bharat sebanyak 4,52 ribu jiwa. Sementara persentase penduduk miskin tertinggi ada di Kabupaten Nias Utara dan Nias Barat masing-masing sebesar 23,4 dan 24,75 persen dan persentase terendah ada di Kabupaten Deli Serdang 3,62 persen. Capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.21
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
Se Sumatera Utara, Bulan Maret 2023

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota(000) (Jiwa)
Sumatera Utara	8.15	1239.71
Nias	15.10	21.99
Mandailing Natal	8.86	41.04
Tapanuli Selatan	7.01	20.09
Tapanuli Tengah	11.50	47.09
Tapanuli Utara	8.54	26.39
Toba	8.04	14.94
Labuhan Batu	7.99	42.58
Asahan	8.21	61.69
Simalungun	7.87	69.21
Dairi	7.47	21.42
Karo	7.98	35.65
Deli Serdang	3.44	82.75
Langkat	9.23	98.16

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota(000) (Jiwa)
Nias Selatan	16.39	54.29
Humbang Hasundutan	8.69	17.14
Pakpak Bharat	7.54	4.01
Samosir	11.66	14.86
Serdang Bedagai	7.44	45.88
Batu Bara	11.38	49.18
Padang Lawas Utara	8.79	26.17
Padang Lawas	7.89	24.51
Labuhanbatu Selatan	8.06	29.83
Labuhanbatu Utara	9.08	34.13
Nias Utara	21.79	30.78
Nias Barat	22.81	18.86
Sibolga	11.42	10.02
Tanjung Balai	12.21	22.45
Pematangsiantar	7.24	18.96
Tebing Tinggi	9.49	16.36
Medan	8.00	187.28
Binjai	4.79	13.85
Padangsidimpuan	6.85	16.15
Gunungsitoli	14.78	22.03

Sumber: BPS Sumut 2023

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2022–Maret 2023 antara lain adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 5,45 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2022 yang sebesar 5,86 persen.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 110,85, meningkat dibandingkan September 2022 yang sebesar 106,82.
3. Laju inflasi menunjukkan penurunan. Inflasi pada periode September 2022–Maret 2023 sebesar 1,32, lebih rendah jika dibandingkan inflasi pada periode Maret 2022–September 2022 sebesar 3,60.
4. Konsumsi rumah tangga Triwulan I-2023 dibandingkan Triwulan III-2022 meningkat sebesar 2,21 persen.
5. Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I-2023 mencapai 89,3 persen, sementara pemanfaatan bansos Sembako tahap 1 telah mencapai 86,5 persen.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2019, status pembangunan manusia Sumatera Utara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2019–2023, IPM Sumatera Utara rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 71,74 pada tahun 2019 menjadi 75,13 pada tahun 2023. Dan capaiannya lebih baik dari nasional.

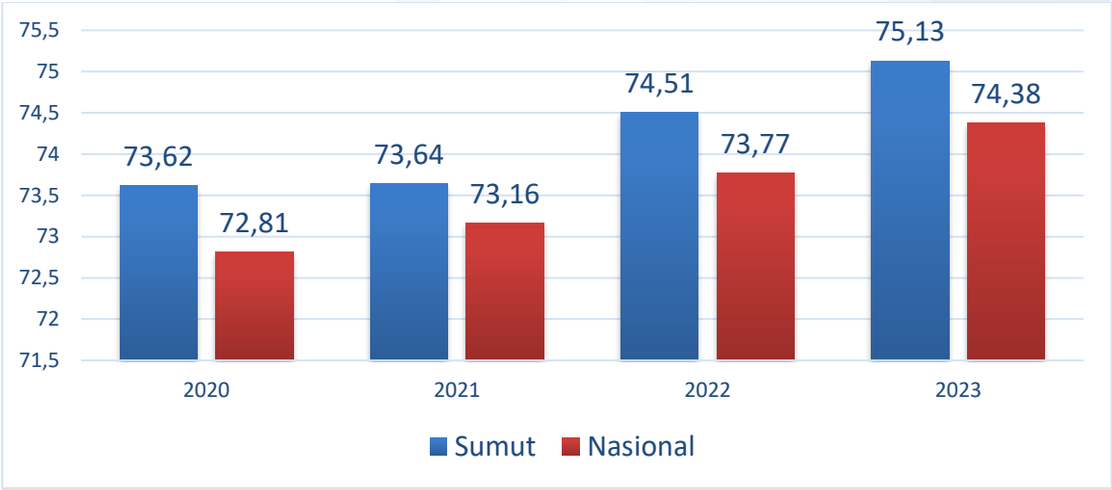

Sumber : BPS Sumatera Utara (UHH Hasil Long Form SP2020) 2023

Grafik 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023

Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Satu dari empat indikator penyusun IPM mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang tumbuh 1,28 persen pada tahun 2023 dan hanya tumbuh 0,30 persen di tahun 2022.

Sementara tiga indikator lain mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang tumbuh 0,40 persen di tahun 2022 dan hanya tumbuh 0,38 persen tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tumbuh dari 1,36 persen pada tahun 2022 dan hanya tumbuh 1,13 persen di tahun 2023, serta Pengeluaran Riil per Kapita yang tumbuh sebesar 3,32 persen tahun 2022 kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan 1,85 persen di tahun 2023. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen
2020-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,00	73,10	73,39	73,667
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,58	9,71	9,82
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10,420	10,499	10,848	11,049
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,62	73,84	74,51	75,13

Sumber : BPS Sumatera Utara (UHH Hasil Long Form SP2020) 2023

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kota Pematang Siantar meningkat dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”, dengan capaian IPM

80,46. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah Kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan status “sangat tinggi” (IPM ≥ 80) menjadi sebanyak 2, yaitu Kota Medan & Kota Pematang Siantar, Kabupaten/kota dengan status pembangunan “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 27, Kabupaten/kota dengan status pembangunan “sedang” (60 ≤ IPM < 70) sebanyak 4, dan tidak ada Kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan “rendah” (IPM < 60).

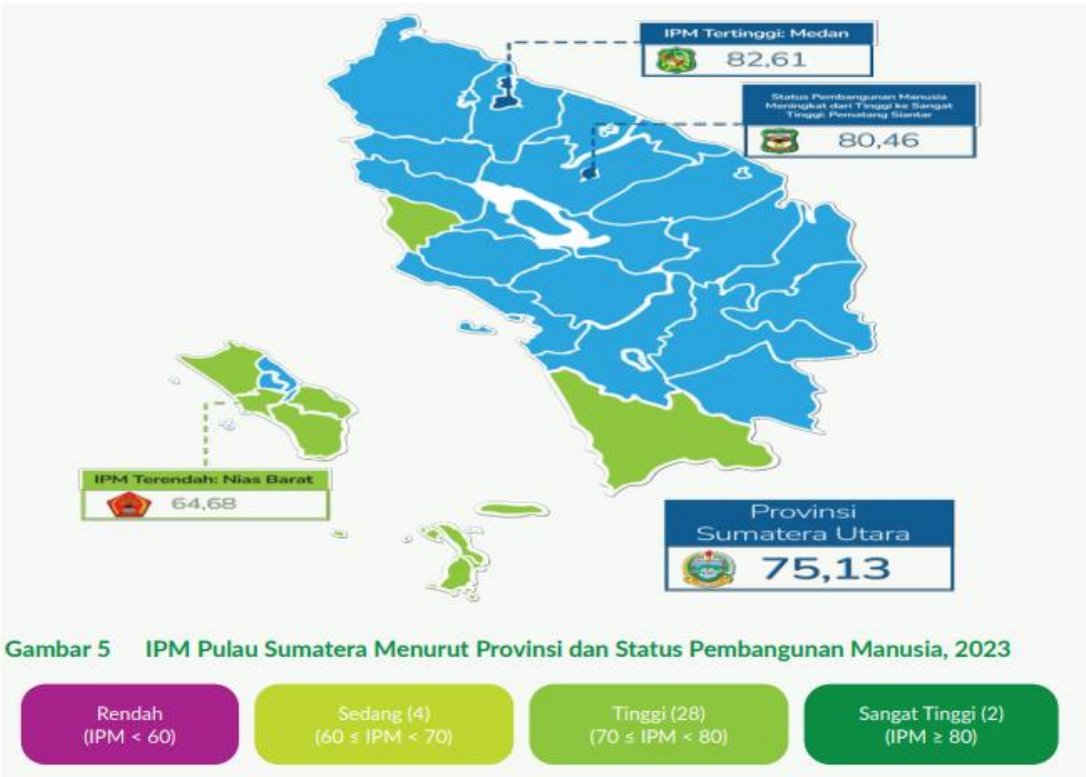

Gambar 5 IPM Pulau Sumatera Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia, 2023

Pada Tahun 2023 masih terdapat 19 Kabupaten Kota yang capaian IPMnya masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, kondisi IPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

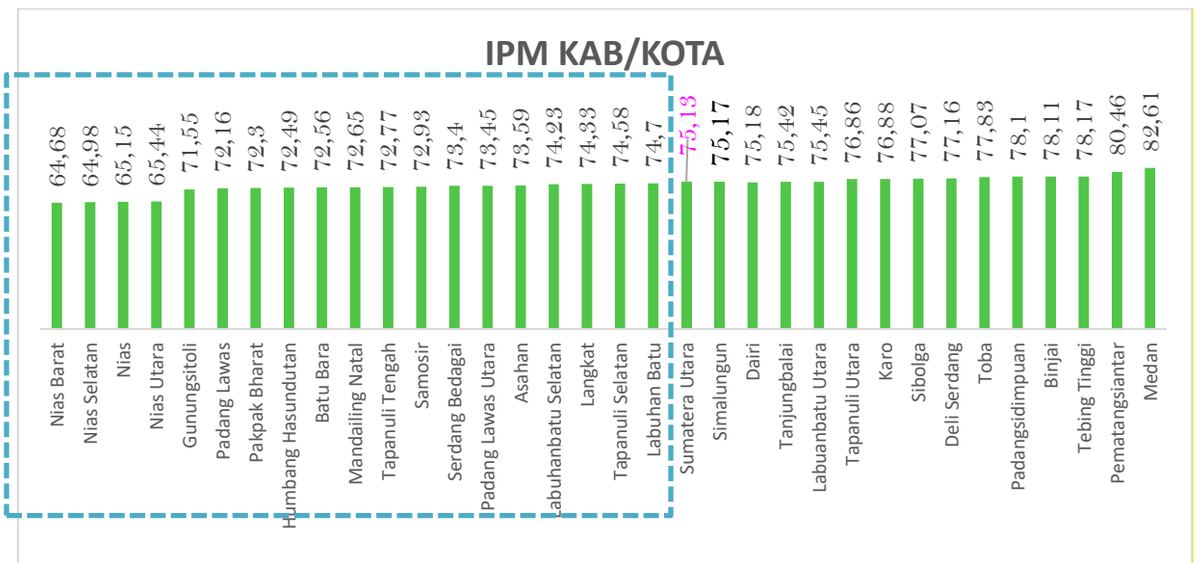

Grafik 2.8
IPM Kabupaten/Kota, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pada 2023, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Utara telah mencapai angka 91,31 persen. Pembangunan gender di Sumatera Utara kembali meningkat hingga 2019 namun pada 2020 kembali mengalami penurunan. Meskipun demikian, pada 202 hingga 2023 IPG kembali meningkat, Peningkatan IPG di 2023 ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode 2021-2023. Dibandingkan 2021, IPM perempuan pada 2023 meningkat 0,82 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada 2023 yang meningkat 0,62 poin, namun capaian IPG Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah Nasional sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

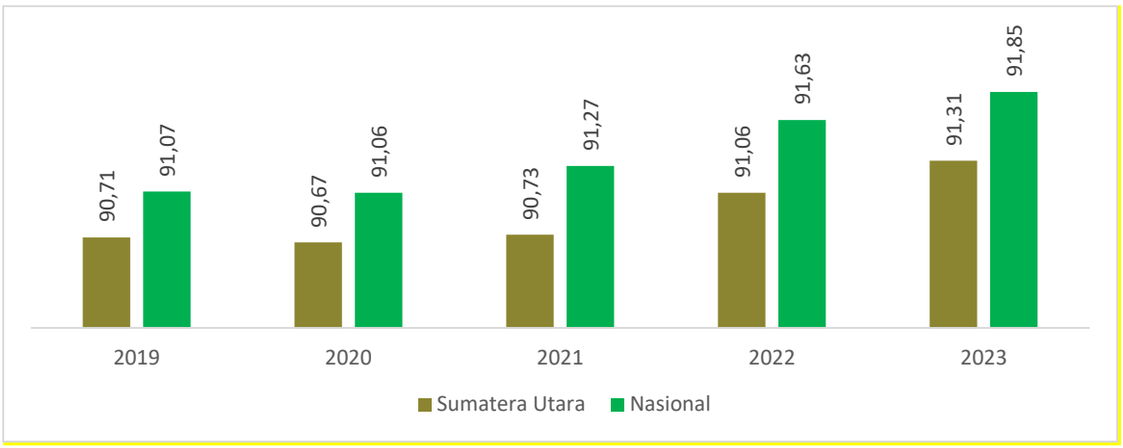

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia 2023

Grafik 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023

Jika dilihat dari capaian Kabupaten/Kota, maka masih terdapat 11 Kabupaten kota yang capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di bawah provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

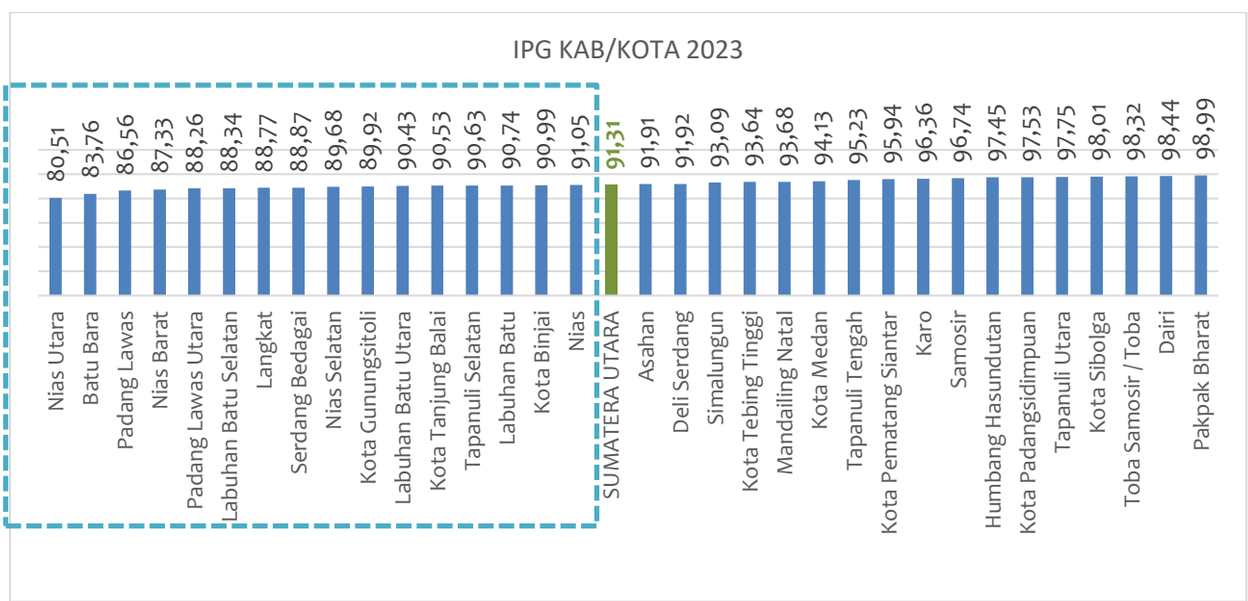

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota, 2023

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Sumatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 69.18. Pada tahun 2022 IDG mencapai 69,33%, meningkat dari sebelumnya 67,79% tahun 2021. Penurunan IDG di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa peran perempuan belum maksimal dalam kebijakan arah pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. dan capaian IDG Sumatera Utara masih berada di bawah capaian Nasional, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

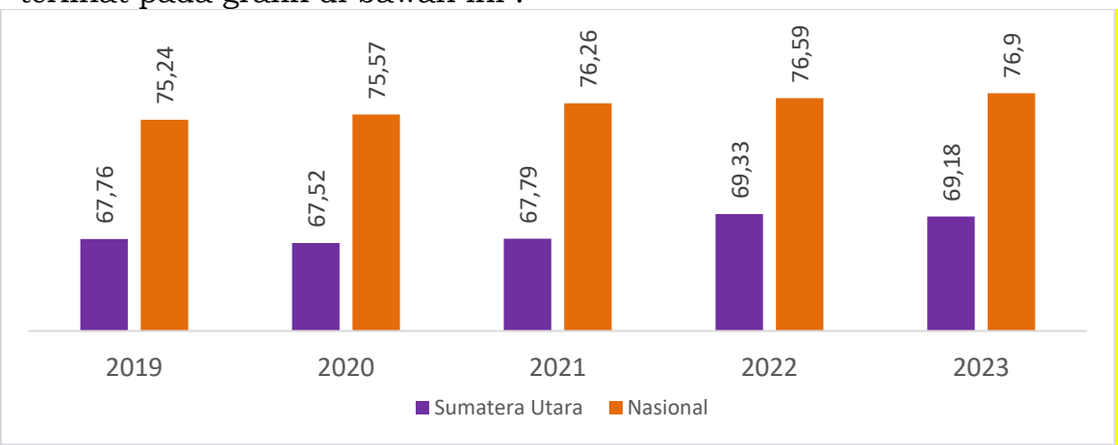

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Grafik 2.16
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumatera Utara dan Nasional 2019-2023

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota, sebanyak 12 Kabupaten/Kota telah mencapai IDG di atas capaian Provinsi Sumatera Utara. Capaian IDG tertinggi ada di Kabupaten Karo dan terendah ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana terlihat pada Grafik di bawah ini :

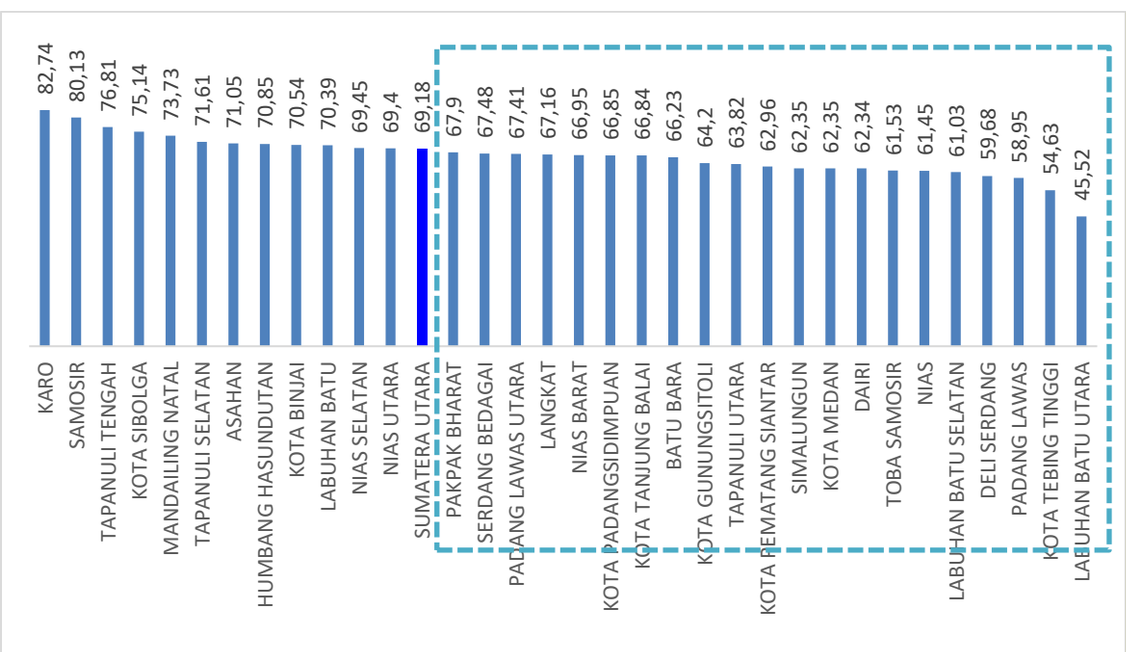

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2023

Grafik 2.16
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten/Kota 2023

5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender di Sumatera Utara selama Empat tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2020 hingga 2023, IKG Sumatera Utara berkurang sebesar 0,04 poin, rata-rata turun 0,008 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Selama kurun waktu 2020 -2023 terjadi perbaikan capaian IKG di tingkat kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender setiap tahunnya. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Binjai (0,142), diikuti oleh Kabupaten Pakpak Bharat (0,152), Kabupaten Langkat(0,231), Kota Medan (0,232), dan Kabupaten Samosir (0,244). Dari 33 Kabupaten/Kota, ada sebanyak 27 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Dari 27 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan ketimpangan gender, sebanyak 16 Kabupaten/Kota yang memiliki IKG di bawah IKG Sumatera Utara. Kabupaten Langkat mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,193 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Langkat terjadi pada setiap dimensi, penurunan terbesar terutama didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Pada dimensi kesehatan reproduksi, penurunan terutama didorong oleh proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 0,070 poin dan proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang turun sebesar 0,006 poin.

6. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai Bangga berkisar antar 0-100 dengan kategori nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 (kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik/berkembang, begitu juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

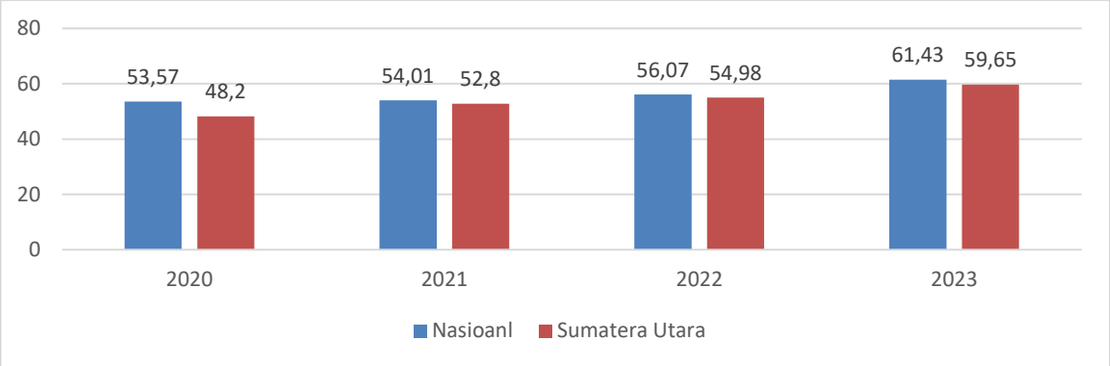

Grafik 2.39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Sumatera Utara dan Nasional 2020-2023

Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari upaya pemerintah diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan perkawinan dan pendampingan calon pengantin serta penyediaan konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga.

7. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Utara meningkat sebesar 0,67 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Utara sebesar 73,00 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,67 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,27 persen per tahun).

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 15 Kabupaten/Kota yang capaiannya berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, dimana capaian terendah ada di Kabupaten padang Lawas sebesar 71.52 tahun dan tertinggi ada di Kota Medan.

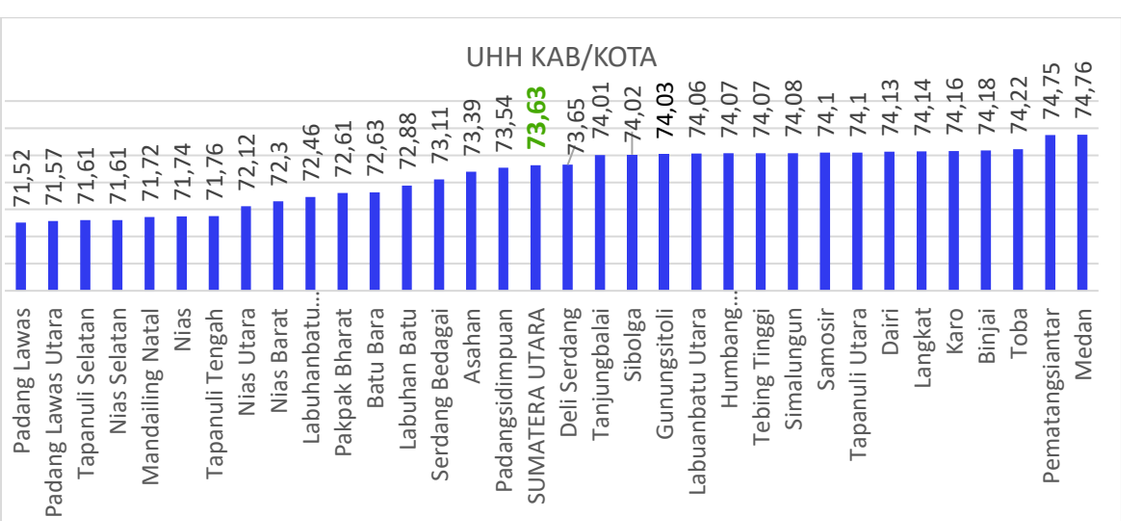

Sumber: BPS Sumatera Utara 2023 (UU hasil Long Form SP 2020)

Grafik 2.19
Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota, 2023

8. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Sumatera Utara rata -rata meningkat 0,63 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,97 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,17 tahun (1,28 persen) dibandingkan tahun 2022, meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,30 persen). Jika dibandingkan dengan Nasional maka capaian Sumatera Utara sejak 4 tahun terakhir berada di atas capaian Nasional.

Tabel 2.26
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Sumatera Utara dan Nasional, 2019-2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	
	Nasional	Sumatera Utara	Nasional	Sumatera Utara
2019	12.95	13.15	8.34	9.45
2020	12.98	13.23	8.48	9.54
2021	13.08	13.27	8.54	9.57
2022	13.10	13.31	8.69	9.71
2023	13.15	13.48	8.77	9.82

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Indonesia dan Sumatera Utara 2023

9. Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan terhadap resiko yang dimunculkan dihadapi para pekerja, baik pekerja formal ataupun informal.

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 5,52 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,48 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin sedangkan TPT Perempuan mengalami penurunan sebesar 1,85 persen poin apabila dibandingkan dengan Tahun 2023.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 11,379 juta orang, naik sebanyak 90 ribu orang jika dibandingkan Tahun 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,874 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 3,279 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 8 juta orang penduduk yang bekerja dan 408 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun

sebanyak 20 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 146 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 64 ribu orang.

Tabel. 2.22
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2019-2023

Kondisi	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
Penduduk Usia Kerja	10532	10703	10870	11031	11289
-Laki-Laki	-	5305	5391	5475	-
-Perempuan	-	5398	5479	5556	-
Angkatan Kerja	7411	7350	7511	7670	8022
-Bekerja	7012	6842	7036	7200	7550
-Pengangguran	399	508	475	473	472
Bukan Angkatan Kerja	3121	3353	3359	3361	3267
Dikutip dari : BRS No.60					
TPT	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89
-Laki-Laki	-	6,82	6,18	5,90	5,58
-Perempuan	-	7,03	6,53	6,55	6,33
TPAK	70,37	68,67	69,1	69,53	71,06
-Laki-Laki	84,19	81,41	81,9	83,9	84,40
-Perempuan	56,8	56,15	56,5	55,4	57,81

Dikutip dari : BPS, Mei 2024

Jika dilihat dari perkembangan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada di Kota Pematangsiantar sebesar 9.36 persen, kemudian Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, masing-masing sebesar 8.89 dan 8.79 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka terendah ada di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0.26 dan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0.42 persen. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota dapat dilihat di bawah ini:

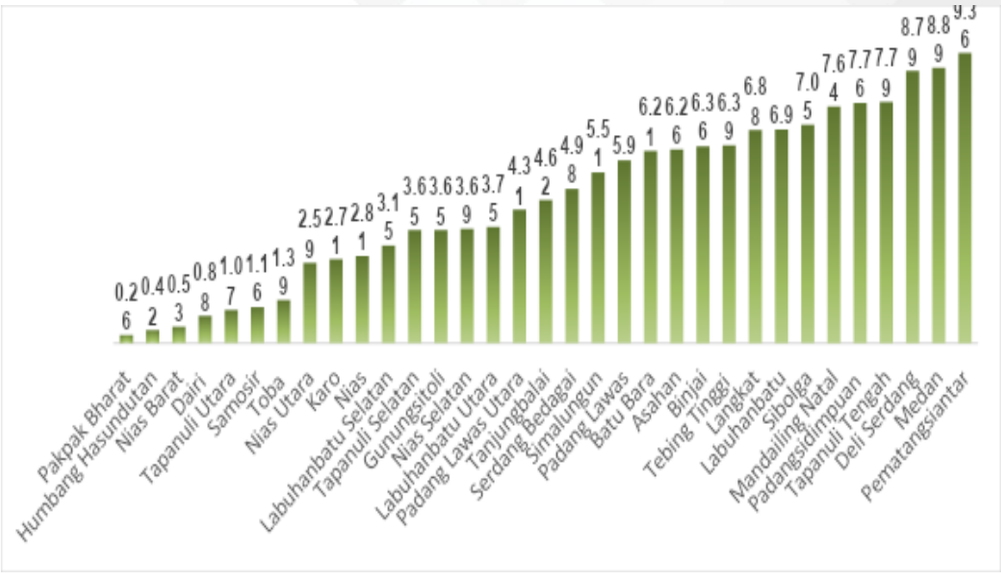

Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Utara 2023

Grafik 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2023

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di Provinsi Sumatera Utara ditandai dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel. 2.23
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	20	55	6	3	3
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	8	10	2	11	11
3	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	88	16,83	92	96,87	96,87
4	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	68	16,83	79	57,53	57,53

Sumber: Disbudpar dan Dispora Provsu, 2023

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya indikator Olahraga telah memenuhi target yakni Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi dengan capaian Tahun 2019 sebesar 88 dari target 88, Tahun 2020 sebesar 16,83 dari target sebesar 90, Tahun 2021 sebesar 92 dari target 92 dan pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 96,87 persen.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. PENDIDIKAN

Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Sumatera Utara adalah melalui Indeks Pendidikan. Dimana Indeks Pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memantau kemajuan dan perbandingan

antar negara atau wilayah dalam mencapai tujuan pendidikan, serta untuk merancang kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Indeks Pendidikan sering kali mencakup berbagai faktor, seperti:

1. Aksesibilitas: Persentase anak-anak usia sekolah yang terdaftar di institusi pendidikan, tingkat partisipasi siswa dari kelompok-kelompok rentan, dan jarak fisik antara sekolah dengan rumah siswa.
2. Kualitas Pengajaran: Ini mencakup kualifikasi guru, rasio siswa-guru, dukungan pembelajaran, dan pembaruan kurikulum.
3. Hasil Akademik: Nilai tes standar, tingkat kelulusan, tingkat kelulusan, dan pencapaian siswa lainnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan akademik.
4. Kesetaraan: Ini mencakup kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan, serta kesetaraan dalam hasil pendidikan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
5. Efisiensi: Efisiensi sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran pendidikan, fasilitas fisik, dan waktu pengajaran.
6. Inklusivitas: Sejauh mana sistem pendidikan mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk siswa dengan disabilitas.

Terdapat peningkatan Indeks Pendidikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,52 poin, Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,21 poin, tahun 2021 sampai 2022 meningkat sebesar 0,55 point dan 2022-2023 meningkat sebesar 0,84 point. Kenaikan indeks pendidikan periode 2020- 2021 lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik covid-19 yang terjadi sehingga aktivitas sangat terganggu. Namun di tahun 2022 sampai tahun 2023 meningkat diposisi tertinggi selama 5 tahun terakhir. Kondisi Indeks Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

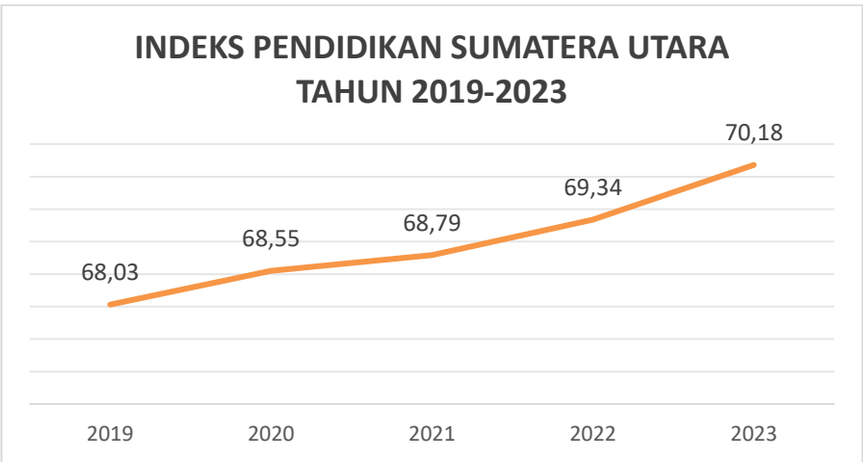

Sumber: BPS Sumatera Utara dan Indonesia 2022

Grafik 2.11
Indeks Pendidikan Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Selain indeks pendidikan tersebut di atas beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.24
Indikator Kinerja Pendidikan Tahun 2019-2023

Indikator	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
APK SM Sederajat	100.83	105.12	106.07	97,23	105
APM SM Sederajat	80.61	73.69	72.53	68,27	71,72
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	90.14	96.61	96,80	100	100
Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	52.07	48.97	49,46	54,30	54,30
Persentase Guru SMK berkualifikasi Akademik S1/D4	90.48	93.55	94,33	100	100
Persentase Guru SMK bersertifikasi	40.77	38.72	41,34	45,50	49,77

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, maka hampir semua capaian Indikator Pendidikan Provinsi Sumatera Utara capaiannya berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, terdapat 1 (satu) indikator yaitu APK SM sederajat yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106.07 persen.

Selain itu sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

SPM Bidang Pendidikan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah:

a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun.
b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas.

Capaian indikator pendidikan yang meliputi pemenuhan SPM Pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel. 2.25
Capaian SPM Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi					Status					Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	100	100	100	96,10	97,35	98,10	100	96,97	**Mencapai Target**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi					Status					Ket
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100	100	100	100	100	34,9	34,9	16,55	100	97,74	**Belum Mencapai Target**

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4

2. KESEHATAN

a. Dinas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator pendukung adalah Indeks Kesehatan, Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan perbaikan, walau agak sedikit melambat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.26
Indeks Kesehatan Tahun 2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kesehatan	-	75,54	75,74	76,32	76,32

Sumber: Hasil Evaluasi TW 4

Selain itu derajat kesehatan juga dilihat dari Capaian Indikator Utama Pembangunan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel. 2.27
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023

Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	4,50	2,61	4,30	2,39	2,44	2,28	2.32	2.19	2,20	3,60
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	80,1	66,76	75,1	62,5	93,49	89.18	79.40	47.06	67,39	72,82
Angka Kesakitan (Morbiditas)	11,01	11,97	10,99	12,24	12,24	8,78	12.22	12.98	12,20	10,10
Prevalensi *Stunting* (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak di bawah 5 Tahun	31,50	30,70	30,50	29,20	28,50	25,80	27.50	21.10	26,50	21,10

Sumber: Dinas Kesehatan Provsu

Terkait kondisi kesehatan di Sumatera Utara mengalami beberapa kemajuan dan tantangan selama periode 2019-2023. Berikut beberapa poin penting:

- Angka Kematian Bayi (AKB): AKB di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023.
- Harapan Hidup: Harapan hidup di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 68,8 tahun pada tahun 2019 menjadi 70,2 tahun pada tahun 2023.
- Status Gizi: Prevalensi *Stunting* pada anak balita di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 37,4% pada tahun 2019 menjadi 33,2% pada tahun 2023.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019–2023 cenderung berfluktuasi. Begitu juga halnya dengan jumlah kematian ibu. Penyebab utama kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara antara lain ibu hamil dan melahirkan banyak yang terpapar COVID-19, ibu hamil ragu memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas karena takut tertular COVID-19 sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil secara lengkap sesuai standar. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap Angka Kematian Ibu menjadi 47.06 per 100.000 Kelahiran Hidup, Salah satu penyebab turunnya angka kematian ibu di Sumatera Utara adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, namun pada tahun 2023 terjadi lagi peningkatan Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara penyebab tertinggi kematian Ibu di Sumatera Utara Tahun 2023 adalah Hipertensi, pendarahan, komplikasi non obstetri, infeksi, kehamilan dengan komplikasi abortus dan lain-lain, sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

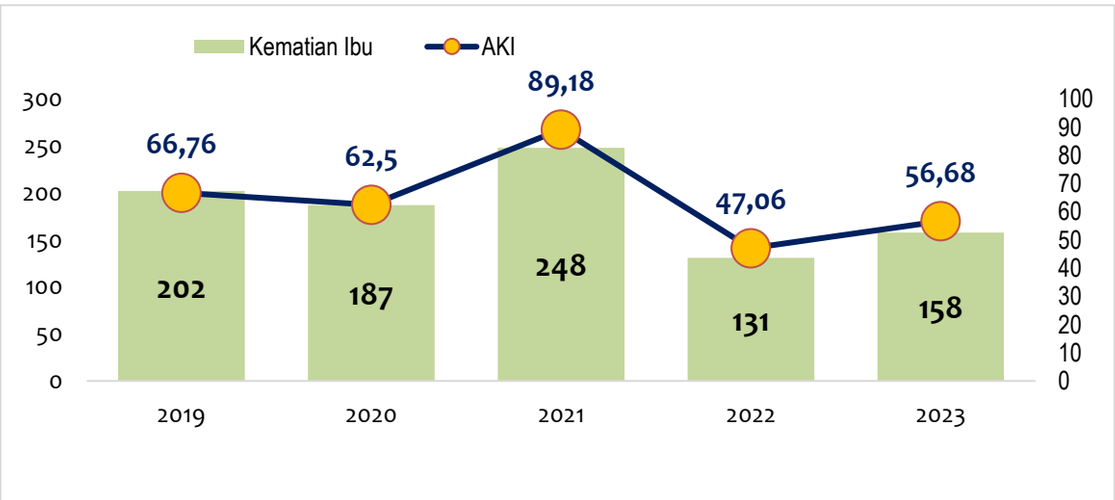

Grafik 2.12
Tren Jumlah Kematian Ibu dan AKI
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – Oktober 2023

Selain itu, jika dilihat dari Kabupaten/Kota, jumlah kematian ibu tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 25 jiwa, kota Medan sebanyak 19 jiwa, Mandailing Natal dan Simalungun masing-masing 10 jiwa. Penyebab tingginya kematian ibu di daerah tersebut salah satunya minimnya pengetahuan dalam proses kehamilan, persalinan dan perencanaannya serta diakibatkan oleh

faktor gaya hidup. Jumlah kematian Ibu Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

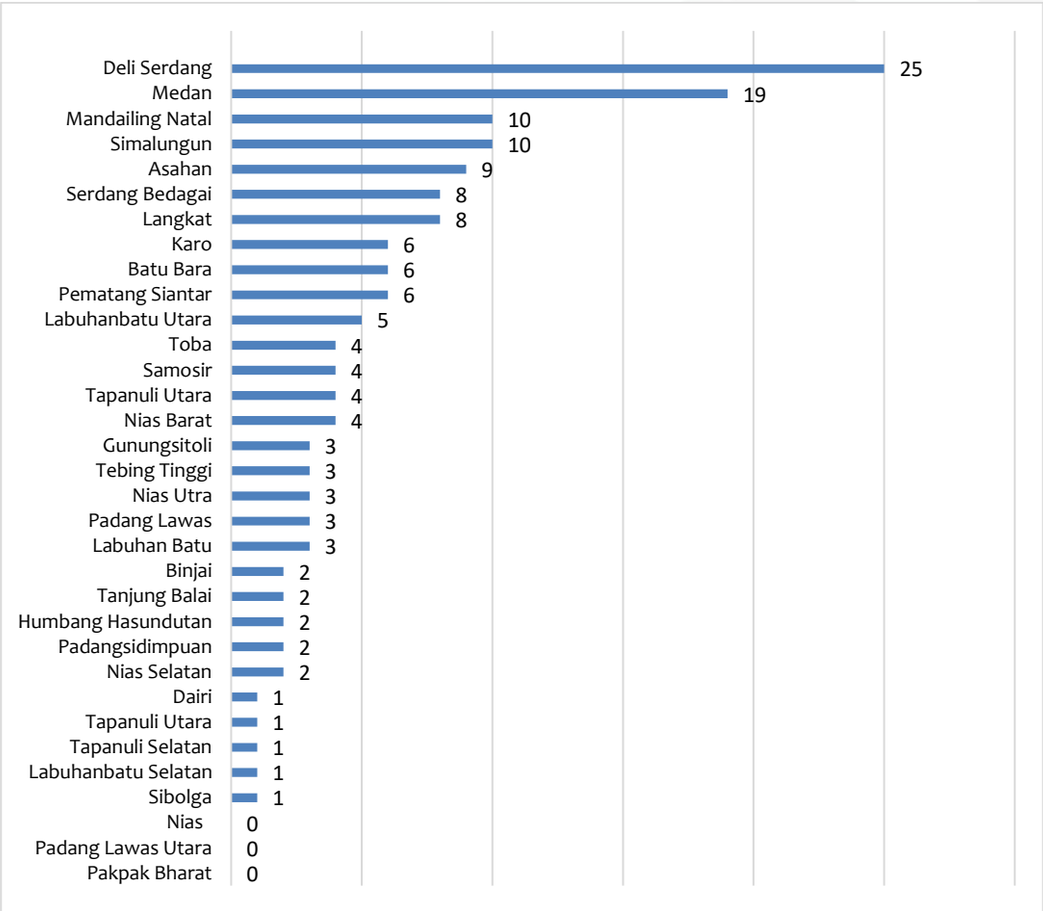

Grafik 2.13
Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober 2023

Selanjutnya jika dilihat dari Angka Kematian Bayi, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terjadi penurunan baik jumlah maupun angka kematian per 1000 Kelahiran Hidup. Kematian bayi tertinggi disebabkan oleh Asfiksia (178 jiwa) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 159 jiwa, Infeksi (31 jiwa) dan lain sebagainya, tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

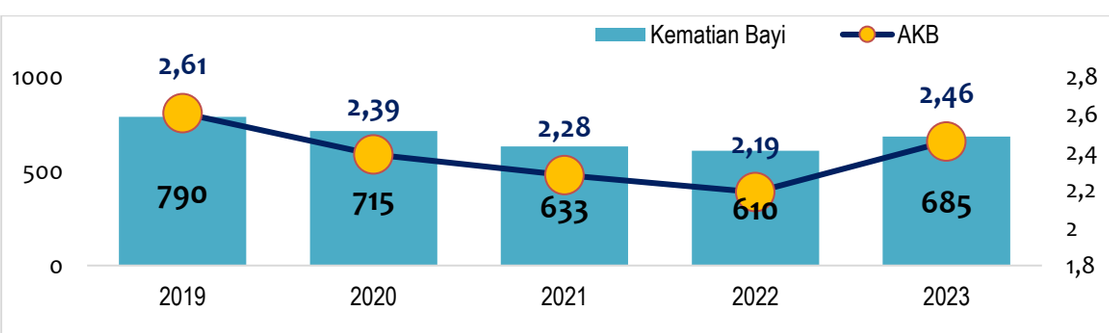

Grafik 2.14
Tren Jumlah Kematian Bayi dan AKB
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – Oktober 2023

Untuk Kabupaten Kota, Kematian Bayi tertinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 94 jiwa, disusul Kota Medan sebanyak 67 jiwa, dan Mandailing Natal 53 jiwa. Kontributor penyebab tingginya AKI di Kabupaten/Kota antara lain adalah akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang optimal, kemampuan deteksi dini pada kehamilan dan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal masih belum optimal. Sehingga perhatian terhadap akses, layanan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan bagi Kabupaten/Kota yang capaiannya masih tinggi perlu menjadi perhatian.

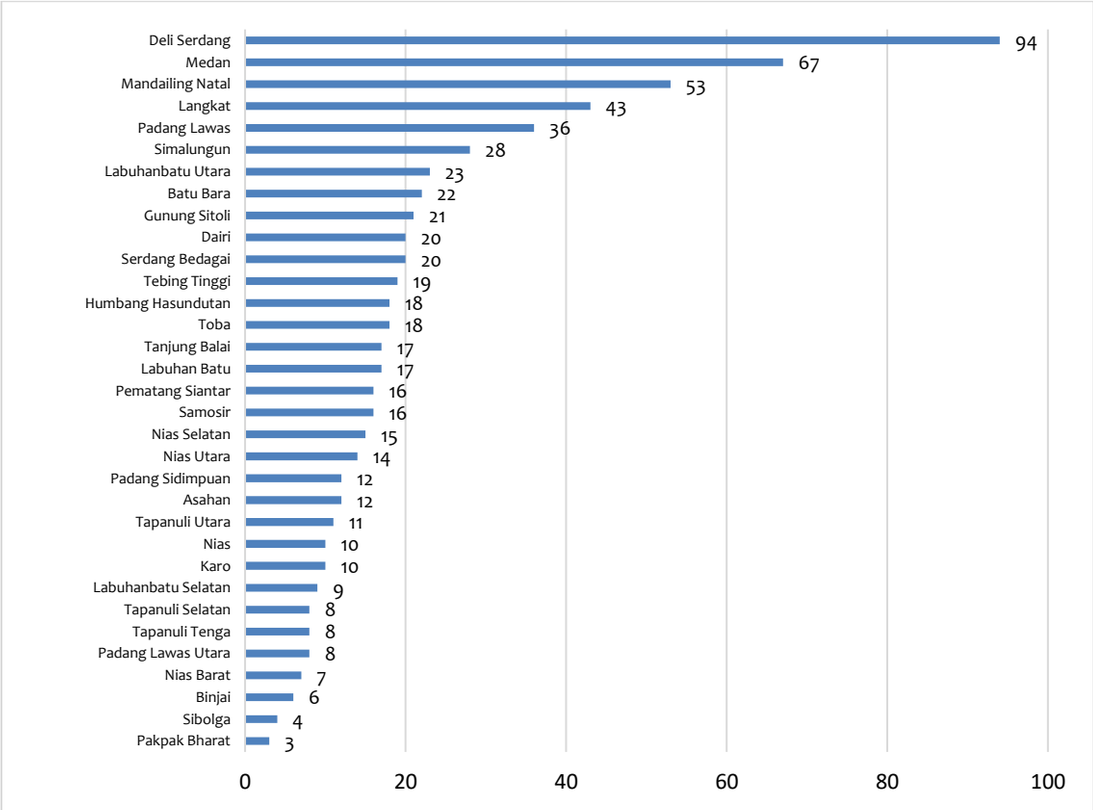

Grafik 2.15
Jumlah Kematian Bayi per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Oktober 2023

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi sehat-sakit karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dijumpai di Provinsi Sumatera Utara adalah Stunting,

Terjadi fluktuasi penurunan Stunting pada Kabupaten/Kota, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan Prevalensi Stunting pada tahun 2023 jika dibandingkan tahun 2022 diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara dari 7.3 (2022) meningkat 9.6 (2023), Kabupaten Simalungun dari 17.4 (2022) meningkat 17.7 (2023), Kota Gunungsitoli dari 17.7 (2022) meningkat 18.9 (2023), Kota Binjai dari 18.7 (2022) meningkat 19.4 (2023), Kabupaten Nias Utara dari 11.9 (2022) meningkat 20.3 (2023), Kabupaten Toba dari 24.8 (2022) meningkat 28.0 (2023), Nias Selatan dari 27.2 (2022) meningkat 31.8 (2023), Kabupaten

Dairi dari 28.6 (2022) meningkat 32.6 (2023) dan Kabupaten Deli Serdang dari 13.9 (2022) meningkat 33.8 (2023).

Peningkatan yang paling signifikan terdapat di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.28
Tren Capaian Stunting Kabupaten/Kota 2022 dan 2023

CAPAIAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 - 2023				
NO	Kabupaten/Kota	2022	2023	Keterangan
1	Kota Tanjung Balai	26.9	5.7	↓
2	Kota Medan	15.4	5.8	↓
3	Kota Pematang Siantar	14.3	7.7	↓
4	Labuhan Batu Utara	7.3	9.6	↑
5	Kota Tebing Tinggi	19.6	10.4	↓
6	Kota Sibolga	14.5	10.6	↓
7	Asahan	15.3	11.0	↓
8	Serdang Bedagai	21.1	14.4	↓
9	Tapanuli Selatan	39.4	15.6	↓
10	Labuhan Batu Selatan	26.4	16.0	↓
11	Langkat	18.6	16.9	↓
12	Simalungun	17.4	17.7	↑
13	Batu Bara	21.7	17.7	↓
14	Padang Lawas	35.8	17.7	↓
15	Humbang Hasundutan	29.6	18.4	↓
16	Kota Gunung Sitoli	17.7	18.9	↑
17	Kota Binjai	18.7	19.4	↑
18	Labuhan Batu	23.9	20.2	↓
19	Nias	25.3	20.3	↓
20	Nias Utara	11.9	20.3	↑
21	Mandailing Natal	34.2	20.7	↓
22	Padang Lawas Utara	29.2	21.8	↓
23	Samosir	26.3	22.4	↓
24	Tapanuli Tengah	30.5	23.8	↓
25	Karo	24.9	24.7	↓
26	Kota Padangsidampuan	28.8	26.1	↓
27	Tapanuli Utara	27.4	27.4	–
28	Toba	24.8	28.0	↑
29	Pakpak Bharat	30.8	28.9	↓
30	Nias Barat	29.4	28.9	↓
31	Nias Selatan	27.2	31.8	↑
32	Dairi	28.6	32.6	↑
33	DeliSerdang	13.9	33.8	↑
	SUMATERA UTARA	21.1	18.9	↓

Pada tahun 2023 terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Tertinggi yaitu Kabupaten Deli Serdang, Dairi, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Nias Barat Toba, Tapanuli Utara, Karo, Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan, sebagaimana grafik berikut:

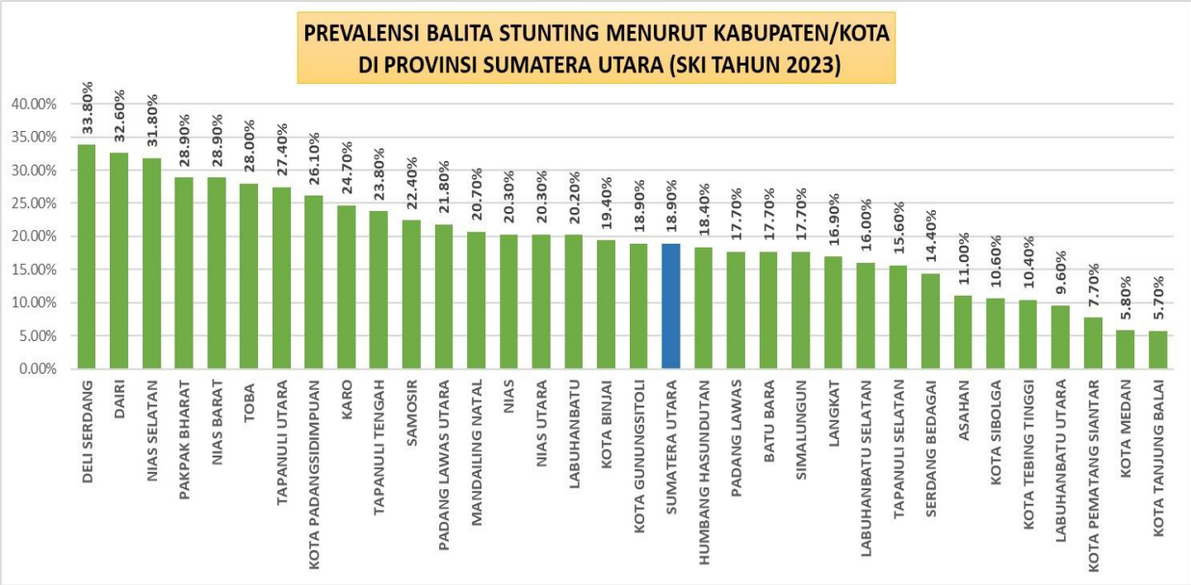

Grafik 2.16
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota tahun 2023

b. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Selain itu pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara terlihat dari pelayanan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara melalui dua indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*) Rumah Sakit Jiwa dan Rata-rata LOS (*Length of Stay*) Rumah Sakit Jiwa. Capaian Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.29
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Provsu Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian Persentase Bed Occupancy Rate (BOR)	65	73,85	61	65,24	80	60,65	82	68,63	85	95,51
2	Capaian Average Length Of Stay (ALOS)	100	70,59	95	87,02	62	76,87	52	67,25	42	70,00

Sumber : Hasil Evaluasi RKPD TW IV

Kondisi pelayanan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara telah berkembang, walau masih banyak tantangan yang harus dihadapi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengubah stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa dan RSJ. namun ada juga beberapa kemajuan yang telah dicapai. Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSJ dan menjamin akses pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan fasilitas RSJ, seperti ruang perawatan, tempat kegiatan, dan peralatan medis.

c. Rumah Sakit Haji Medan

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan adalah salah satu Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei

2014 tentang Penetapan RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai BLUD. Jika dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haji terkait sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan, maka capaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.30
Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	46	27	40	62,50	79
2	Length Of Stay (LOS)	Hari	4	4	5	5	5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	-	2,28	77	85,20

Sumber : Rumah Sakit Haji Medan, 2022

Selain capaian indikator di atas, SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan target Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%) dan Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%). Capaian SPM kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.31
Capaian SPM Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2023 *) Angka Sementara*

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan pada Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan maka salah satu ketercapaian dapat dilihat dari Indeks Infrastruktur sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.32
Indeks Infrastruktur 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur	-	0.69	0.71	0.74	0,75

Sumber : Bappelitbang, 2023 (data diolah)

Dari data dapat disimpulkan bahwa indeks infrastruktur belum mencapai target yang diharapkan, hal itu dikarenakan karena kondisi kemantapan jalan dan kondisi indeks kinerja sistem irigasi yang menurun

Selain indikator di atas, beberapa indikator lain yang mendukung prioritas pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.33
Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI											
1	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	82,1	76,37	78,55	85,08	82,19	82,27	82,27	82,27	78,13
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	84,26	83,8	86,29	88,77	91,26	83,71	84,06	84,06	84,15	83,45
3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	-	10,88	15,00	19,11	23,23	10,71	10,88	10,88	15,22	16,52
	DINAS PSDA											
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	52,54	54,19	56,92	57,82	64,75	52,54	54,19	56,55	57,45	58,62
2	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	50,20	52,82	57,17	57,94	62,92	50,20	52,82	56,51	57,52	59,77
3	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	61,25	61,04	61,26	62,81	63,44	61,2	61,04	61,26	62,81	66,74
4	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	34,46	36,99	41,81	46,02	50,24	34,46	36,99	36,98	36,98	NA
5	Luas permukiman pengembangan sistem drainase perkotaan yang terlayani	Ha	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.598,4	2.598,4	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.545,6	2.598,4
6	Luas permukiman yang tertata infrastrukturnya	Ha	7,35	7,35	8,65	15,65	15	7,35	7,35	7,6	18,6	15
7	Persentase instansi Pemerintah yang mendapatkan advice Pengelolaan Gedung	Persen	69,30	74,25	79,20	89,10	100	69,30	74,25	75,05	124	100
8	Peningkatan luas penataan bangunan dan lingkungannya yang tertata	Ha	3,4	3,4	3,4	2,43	12,43	3,4	3,4	3,4	5,4	NA
9	Persentase terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	Persen	94	94	94	100	100	94	94	100	100	80,61

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas PSDA, 2023

Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel. 2.34
SPM Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023*
1.	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100	100	100	100	100
2.	Penyediaan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas PUPR, 2023 *) Angka Sementara*

Pada tahun 2022 capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sudah mencapai 100%, yaitu dengan terbitnya Perda No. 2 tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037. Kemudian untuk mengatur tata ruang laut, juga sudah diterbitkan Perda No. 4 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2039. Pada tahun 2022 sudah dilakukan revisi RTRW dan juga perubahan RZWP3K, dimana selanjutnya tata ruang darat dan tata ruang laut akan diintegrasikan menjadi satu Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk Capaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota untuk tahun 2022 sudah mencapai 100%. Sampai dengan tahun 2023 ada 19 (Sembilan belas) Kabupaten/Kota yang sedang melakukan proses revisi RTRW dan 3 (tiga) Kabupaten/kota yang sedang melakukan peninjauan kembali (PK). Pada berikut dijelaskan progres RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

Tabel. 2.35
Progres RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status tahun 2023
1	Kabupaten Karo	Perda No. 4 Tahun 2022	-
2	Kota Medan	Perda No. 1 Tahun 2022	-
3	Kabupaten Deli Serdang	Perda No. 1 Tahun 2021	-
4	Kabupaten Serdang Bedagai	Perda No.12 Tahun 2013 yang Telah Diubah Dengan Perda No. 1 Tahun 2021	-
5	Kota Binjai	Perda No. 05 Tahun 2020	-
6	Kabupaten Batubara	Perda No. 11 Tahun 2020	-

No.	Kabupaten/Kota	Nomor Perda	Status tahun 2023
7	Kabupaten Humbang Hasundutan	Perda No. 1 Tahun 2018	-
8	Kabupaten Padang Lawas	Perda No. 2 Tahun 2018	Revisi
9	Kota Sibolga	Perda No. 2 Tahun 2018	-
10	Kabupaten Samosir	Perda No. 3 Tahun 2018	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
11	Kabupaten Tapanuli Utara	Perda No. 3 Tahun 2017	-
12	Kabupaten Tapanuli Selatan	Perda No. 5 Tahun 2017	-
13	Kabupaten Labusel	Perda No. 4 Tahun 2017	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
14	Kabupaten Toba	Perda No. 12 Tahun 2017	Revisi
15	Kabupaten Labuhanbatu	Perda No. 3 Tahun 2016	Revisi
16	Kabupaten Mandailing Natal	Perda No. 8 Tahun 2016	Revisi
17	Kabupaten Pakpak Bharat	Perda No. 9 Tahun 2016	Revisi
18	Kabupaten Nias Utara	Perda No. 1 Tahun 2015	Revisi
19	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Perda No. 5 Tahun 2015	-
20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Perda No. 3 Tahun 2015	Revisi
21	Kabupaten Nias Selatan	Perda No. 6 Tahun 2014	Revisi
22	Kabupaten Nias	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi
23	Kabupaten Dairi	Perda No. 7 Tahun 2014	Revisi
24	Kota Padangsidimpuan	Perda No. 4 Tahun 2014	Revisi
25	Kabupaten Nias Barat	Perda No. 12 Tahun 2014	Revisi
26	Kota Tanjung Balai	Perda No. 2 Tahun 2013	Revisi
27	Kabupaten Tapanuli Tengah	Perda No. 8 Tahun 2013	Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Menteri ATR/BPN
28	Kabupaten Langkat	Perda No. 9 Tahun 2013	Revisi
29	Kabupaten Asahan	Perda No. 12 Tahun 2013	Revisi
30	Kota Pematangsiantar	Perda No. 1 Tahun 2013	Revisi
31	Kota Gunungsitoli	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi
32	Kota Tebing Tinggi	Perda No. 4 Tahun 2012	Revisi
33	Kabupaten Simalungun	Perda No. 10 Tahun 2012	Revisi

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, 2022

Pada tahun 2022, kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara berada pada rangking 21 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai akhir 75,61 (klasifikasi SEDANG) berdasarkan penilaian dari Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dari Kementerian

ATR/BPN. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian kelima aspek penyelenggaraan penataan ruang pada Tabel 2.5, dimana aspek pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera nilainya masih 0 (nol) dengan klasifikasi Buruk.

Tabel. 2.36
Kinerja Pengaturan Penataan Ruang,
Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1	Pengaturan Penataan Ruang	90	Baik
2	Pembinaan Penataan Ruang	92	Baik
3	Perencanaan Tata Ruang	100	Baik
4	Pemanfaatan Ruang	100	Baik
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	Buruk
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang		76,33	Sedang

Sumber: Dirjen Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan untuk menaikkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **aspek pengendalian pemanfaatan ruang.** Dimana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari: Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, Perwujudan RTR (Rencana Tata Ruang), Penerapan Insentif Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan Penanganan Sengketa.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.37
Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	2019	2020	2021	2023	2023
1	Akses Rumah Layak Huni (%)	94,10	95,77	67.44	31.12	70,95
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	88	28,40	16.27	10.16	18,52
3.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU)	3.491	482	100	100	NA

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum tercapai.

Selain indikator di atas, capaian SPM juga menjadi prioritas provinsi Sumatera Utara, dimana capaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.38
SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	N/A
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	N/A

Sumber : Evaluasi TW IV, 2023

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.39
Capaian Indikator Satpol PP Provsu 2019-2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	97	90.25	96.51	100	97
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	59	31.25	100	100	75

Sumber : Satpol PP Provsu 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Tahun 2023 tercapai dengan realisasi 97%. Begitu juga halnya dengan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan, pada tahun 2023 capaian kinerja dicapai sebesar 100%. Terjadi peningkatan Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA yang ditegakkan pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 meningkat menjadi 43%, Pencapaian kinerja ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat meningkat.

b. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.40
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelapor Pemilih Cerdas	Orang	400	-	450	470	800
Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Ormas	31	85	74	120	112
Menahan Laju Angka Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumut	Persen	6.5	6.5	6.5	6.5	N/A
Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Laporan	9	10	18	8	N/A
Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan (org)	Orang	1.300	-	1459	1550	2.1e60

Sumber : Bakesbangpol Provsu 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian pada jumlah pelapor pemilih cerdas di tahun 2022, dapat dilihat juga hampir semua target pada tahun 2022 mencapai target, kecuali masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan belum mencapai target yaitu 1.275 orang.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas Provinsi

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Jenis Pelayanan Dasar Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi. Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa. Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100%.

Tabel. 2.41
Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100%	100%	100%	100%	102%

Sumber : Hasil Evaluasi SPM, 2023

c. Penanggulangan Bencana

Provinsi Sumatera Utara terletak di bagian utara Pulau Sumatera yang memiliki ibu kota provinsi di Kota Medan. Secara geografis, wilayahnya terbagi menjadi 3 kelompok kawasan yaitu, pantai barat, dataran tinggi dan pantai timur. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Tahun 2022, bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah bencana puting beliung, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 142,51

Ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara adalah Gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan.

Capaian Indikator Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.42
Kondisi Penanggulangan Bencana Provsu 2019-2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023*
Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	33	33
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	3	33	33
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	0	0	0
Indeks Resiko Bencana	145.18	145.18	143.83	142.51	140.73

*Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2023 *) Angka Sementara*

6. SOSIAL

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial melalui upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dan dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Masyarakat Sumatera Utara, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.43
Capaian Indikator Sosial Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

NO	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persen	2345/ 100%	2345/ 100%	1997/ 100%	1997/ 100%	2025/ 100%
2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	1202/ 0,09%	1468/ 0,11%	15072/ 1,13%	104694/ 7,84%	31680/ 0,37%

*Sumber : Dinas Sosial Provsu 2023 *) Angka Sementara*

Selain indikator di atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian target SPM bidang sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Unit Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis. Melalui tabel di bawah ini akan tergambar proses realisasi pencapaian SPM dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam tabel di bawah ini tergambar persentase target pencapaian SPM tahun 2020-2021 dan realisasi pencapaiannya pada tabel berikut:

Tabel. 2.44
Capaian SPM Sosial Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penyandang Disabilitas	Persen	2345/ 100%	2345/ 100%	1997/ 100%	1997/ 100%	2025/ 100 %

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti						
2	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	1202/ 0,09%	1468/ 0,11%	15072/ 1,13%	104694/ 7,84%	31680/ 0,37%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Penyandang Disabilitas yang ada di dalam panti semuanya mendapatkan pelayanan. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dimaksud adalah melalui sistem "panti" dan "luar panti". Sistem panti memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam suatu lokasi unit pelayanan teknis dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sistem luar panti memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial di lokasi tempat tinggal mereka dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. TENAGA KERJA

Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari 7 (tujuh) indikator yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Capaian Indikator Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.45
Capaian Indikator Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Utara 2019-2022

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0.20	4.46	0.28	0.047	0.047
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp juta/pekerja)	5.36	19.73	5.51	19.3	19.3
3	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	75.76	93.94	84.85	93.33	93.33
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	0.05	16.58	10.12	10.12

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	7.72	0.42	7.94	7.85	7.85
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	50.12	64.18	50.10	81.34	81.34
7	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	79 SP / lokasi	-	79 SP / lokasi	-	-

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara *) Angka Sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) IKU yang memenuhi target dan 3 (tiga) IKU yang belum memenuhi target yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja, dimana pada Tahun 2019 sebesar 96,97 persen, Tahun 2020 sebesar 93,94, Tahun 2021 sebesar 93,94 persen dan pada Tahun 2022 menurun sebesar 33,33 persen. Selain itu Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi juga belum tercapai , dimana pada Tahun 2019 sebesar 72,16 Persen, Tahun 2020 sebesar 80 persen, Tahun 2021 sebesar 5 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 12 persen dan yang belum memenuhi target adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan (dalam RKPD), dimana pada Tahun 2019 sebesar 8,33, Tahun 2020 sebesar 0,52, Tahun 2021 sebesar 0,42 dan pada Tahun 2022 sebesar 7,85 persen.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Perkembangan capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 2.46
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%)	73%	98%	98%	94%	N/A
2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan (/100.000)	5	5	5	9	N/A
3	Rasio kekerasan terhadap Anak (/10.000)	11	12	12	19	N/A
4	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi	-	-	N/A	70%	N/A

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
	mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju) (%)					
5	Total *Fertility Rate* (TFR)	3.04	3.04	3.04	2.6	2.39

*Sumber : Dinas P3AKB 2022 *) Angka Sementara*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 lebih baik, namun pada persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) (%), masih belum mencapai target tahun 2021 sebesar 76 persen, namun terjadi peningkatan di tahun 2022 untuk itu perlu perhatian khusus agar target yang telah ditentukan bisa tercapai. selain itu dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2021 dan 2022 indikator *Total Fertility Rate (TFR)* telah mencapai target yang ditetapkan dalam P-RPJMD dari 3,04 menjadi 2,60.

3. PANGAN

Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu dari 87.2 poin menjadi 90.8.2 poin, tren ini terus meningkat setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan utama, kenaikan skor PPH dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam hal diversifikasi pangan atau penganekaragaman konsumsi pada masyarakat di Sumatera Utara.

Tabel. 2.47
Capaian Indikator Ketahanan Pangan dan Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

No.	Indikator	Realisasi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,60	83,77	85	87.2	90.9
2	Produksi Daging (ton)	256,325.14	219,545.30	222,421.07	248,825.52	277,221.71
3	Produksi Telur (ton)	264,172.44	472,653.56	479,436.25	516,701.64	564,676.86
4	Produksi susu (ton)	3.489,84	5.150,72	8,745.02	8,953.31	9,234.42

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2023
**) Angka Sementara*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023 produksi daging dari tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang cukup baik hanya pada tahun 2020 produksi daging mengalami penurunan yang diakibatkan penurunan konsumsi daging akibat pandemi *covid* 19 yang membuat masyarakat lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan pangan utama, dapat dilihat pada tahun 2019 produksi daging sebesar 256.325.14 Ton mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 219.545.30 Ton pada tahun 2021 produksi daging kembali membaik

dengan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 222.421.07 Ton, pada tahun 2022 produksi daging kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 248.825 Ton dan pada tahun 2023 produksi daging meningkat 11 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 277,221.71 Ton.

Untuk produksi telur dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan produksi yang baik dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 produksi telur sebesar 264,172.44 Ton dan dari tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebesar 472,653.56 Ton dikarenakan salah satunya adanya perubahan penghitungan produksi dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2021 produksi telur mencapai 479,436.25 Ton meningkat dibandingkan capaian tahun 2020, pada tahun 2022 produksi telur terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 516,701.64 Ton, dan pada tahun 2023 produksi telur meningkat 9 persen menjadi sebesar 564,676.86 Ton. Kemudian untuk produksi susu juga terus mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tahun 2019 produksi susu sebesar 3.489,84 Ton dan pada tahun 2023 produksi susu meningkat menjadi sebesar 9,234.42 Ton, dari data di atas menunjukkan bahwa kebutuhan untuk ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik.

4. LINGKUNGAN HIDUP

Ketercapaian Pembangunan Lingkungan Hidup di dukung oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana IKLH Pada Tahun 2019 IKLH mencapai sebesar 68,20 poin dari 68,00 poin, pada Tahun 2020 mencapai 71,15 terus mengalami perbaikan 71,15 dan terus mengalami perbaikan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 74,11 poin, dan pada tahun 2023 IKLH mengalami penurunan sedikit menjadi sekitar 72,80 poin. Nilai IKLH Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.48
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	IKLH	68,2	69,37	71,15	74,11	72,80
2	IKU	86,6	89,30	89,55	89,69	90,90
3	IKA	78,8	80	53,72	61,20	60,27
4	IKTL	46.45	46.45	48,84	48,69	49,77
5	IKAL	-	-		85,19	68,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	21.08	22.07	24,99	25,16	29,05

Sumber : Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2023
**) Angka Sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator indeks kualitas lingkungan hidup mengalami fluktuasi peningkatan baik dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara maupun indeks kualitas tutupan lahan. Untuk indeks kualitas air laut, dihitung mulai tahun 2021 dengan memperhatikan parameter yang dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk tahun 2023 ada beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu indikator kualitas air dan indikator kualitas air laut, seperti indikator kualitas air pada tahun 2023 mencapai 60,27 poin capaian ini menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022

sebesar 61,20 poin, indikator kualitas air laut pada tahun 2023 mencapai 68,56 poin menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 85,19 poin.

Indikator kualitas udara dan indikator kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan capaian pada tahun 2022 ini dapat dilihat pada indikator kualitas udara pada tahun 2023 mencapai 90,90 poin meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang hanya mencapai 89,69 poin, dan untuk indikator kualitas tutupan lahan pada tahun 2023 mencapai 49,77 poin meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 48,69 poin.

5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.49
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2019-2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023*
Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	91.78	88.89	85.32	84.75	84.75
Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	91.78	98.91	95.83	92.96	92.96
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 10-18 Tahun	75.33	78.63	85,93	90.55	90.55
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada semua Individu yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100	100	100
Persentase Penerbitan KIA dalam Pelayanan Admin duk	-	-	30%	25	25
Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi untuk Pelayanan Publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK	30%	32%	65.30	85.71	85.71

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023*
Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3	3
Pemanfaatan Data Kependudukan	30%	32%	65.30% (32 OPD)	42	42

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu 2021 *) Angka Sementara*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian berada di bawah target provinsi Sumatera utara yang telah ditetapkan di dalam dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, dan terdapat 4 (empat) target yang telah memenuhi target pada tahun 2021. Sementara di tahun 2022 terdapat 6 (enam) target indikator yang telah terpenuhi. Belum terpenuhinya target capaian secara menyeluruh adalah karena kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja provinsi dan masih perlu untuk ditingkatkan, serta pentingnya dorongan membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen admin duk. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana admin duk di Kabupaten/Kota juga masih menjadi perhatian.

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. Capaian indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.50
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023*
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang aktif	-	19	34	30	30
Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	-	26	36.22	4.63	4.63
Jumlah BUMDES maju	-	21	25	25	25
Jumlah Desa Mandiri		4	7	31	31

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2022
**) Angka Sementara*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pada tahun 2021 tidak tercapai hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja penyelenggara yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota selain itu untuk BUMDES maju masih kurangnya antusias daripada masyarakat dan OPD Kabupaten dalam meningkatkan perekonomian di desa melalui pengembangan BUMDES

yang ada di desa. Namun pada tahun 2022 target untuk indikator Desa Mandiri telah tercapai, sebaliknya jika dilihat indikator lainnya pada tahun 2022, secara realisasi targetnya belum tercapai. Adapun hambatan dalam pencapaian ini adalah masih rendahnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes, SDM aparatur desa dan kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, khususnya di desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

7. PERHUBUNGAN

Untuk mengukur ketercapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi dapat dilihat dari ketercapaian beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel. 2.51
Capaian Indikator Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	39.32	39.32	39.92	60.63	60,63
2	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	-	-	33,33	23,08	23,08
3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	-	-	71,99	79.22	79.22
4	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	-	-	8,35	73,81	73,81

*Sumber : Dinas Perhubungan Provsu, 2022 *) Angka Sementara*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2021 - 2022 tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penyerahan aset yang menjadi kewenangan provinsi, belum maksimalnya perencanaan masing-masing sektor perhubungan dan minimnya integrasi pelayanan antar Moda, belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta belum tersedianya perencanaan kebutuhan Fasilitas keselamatan jalan.

8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sektor Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung pencapaian *clean goverment* dan *good goverment* melalui *e-goverment*. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi diberi tugas untuk melaksanakan 2 (dua) sub urusan, yaitu Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika, Capaian Indikator komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.52
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023

1	Persentase Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	89	74	92	98	100
2	Persentase Rasio sistem pelayanan berbasis *Online*	20	44	57	75	92,80

Sumber : Dinas Kominfo Provsu, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun 2019 - 2023 target dan capaian indikator terus meningkat sehubungan dengan peningkatan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika yang hampir merata di perkotaan Provinsi Sumatera Utara.

A. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE telah ditetapkan. SPBE mempunyai tujuan utama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis, efektif, transparan dan akun tabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berdasarkan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nilai Indeks SPBE Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2022 dengan nilai indeks sebesar 2,81 menjadi 3,21 pada tahun 2023 yang termasuk ke dalam kategori predikat “Baik”.

Tabel. 2.53
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,96	2,96	2,77	2,81	3,21

Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kementerian PAN dan RB, 2023

B. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan ukuran standar tingkat pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur GAP digital atau kesenjangan digital antarwilayah serta mengukur potensi pembangunan TIK.

Dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 sub indeks yaitu sub indeks akses dan infrastruktur TIK, sub indeks penggunaan TIK, dan sub indeks keahlian TIK. Pembangunan TIK Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2021 dengan nilai indeks IP-TIK sebesar 5,75 poin meningkat dengan nilai menjadi 5,9 poin pada tahun 2022.

Tabel. 2.54
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,94	5,19	5,44	5,75	5,9	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022

9. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian Indikator usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.55
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil Menengah

No.	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023*	
1	Pertumbuhan Wirausaha Baru (dalam RKPD)	1.000	1117	213 Usaha Mikro, 155 Usaha Kecil dan 77 Usaha Menengah	250 Usaha Mikro, 250 Usaha Kecil dan 80 Usaha Menengah	200	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 21 Usaha Menengah	250	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 21 Usaha Menengah	250	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 21 Usaha Menengah
2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya (dalam RKPD)	5,00	6,31 (1206, 2)	1,50	1,5	2,00	7,87	2,50	7,87	2,50	7,87
3	Persentase Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang difasilitasi usahanya (dalam RKPD)	5,00	2 (40)	3,50	2,1	2,00	8,79	2,50	8,79	2,50	8,79
4	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan.	5,00	-	-	-	2,00	-	2,50	7,91	2,50	-
5	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal, dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	50	64	-	-	20	164	25	164	25	164
6	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	60,00	39,86 (66,43)	-	-	25,00	27,7	35,00	27,7	35,00	27,7
7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan	35,00	23,46 (67,03 0	-	-	30,00	19,24	35,00	19,24	35,00	19,24

No.	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023*	
	Rapat Anggota Tahunan										

*Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu, 2022 *) Angka Sementara*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Capaian Koperasi Sumatera Utara mengalami peningkatan, dan persentase koperasi Aktif di Sumatera Utara mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 41,12 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya koperasi aktif tahun 2021 yaitu sebesar 40,05 persen. Hal ini disebabkan oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian masyarakat akibat upaya-upaya yang dilakukan pasca pandemi Covid-19.

10. PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Perkembangan Penanaman modal (Investasi) di Provinsi Sumatera Utara baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Capaian Indikator Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.56
Capaian Indikator Penanaman Modal 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Investor PMDN (dalam RKPD)	Investor	1.243	4.220	4.186	9.146	17.278
Investor PMA (dalam RKPD)	Investor	805	1.465	690	1.613	3.036
Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	19,74	18,18	18,48	22,78	21,57
Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	5,63	14,03	8,47	18,88	17,48
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	10.265	25.880	22.568	25.682	67.373
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	4.739	5.297	6.118	6.702	8.857
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	19,5	37	1,62	23,29	-5,31
Jumlah Izin yang terbit (dokumen izin)	Dokumen	3527	2694	1.511	1.565	2.065

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator penanaman modal Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp. 39,057 triliun, menurun 6,28% dibandingkan tahun 2022 (*year-on-year*) dengan capaian sebesar Rp. 41,675 triliun. Sementara itu, terjadi peningkatan pada jumlah tenaga kerja Indonesia PMDN dengan capaian 67.373 orang (meningkat sebesar 162,33%) dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebanyak 25.682 orang, dan jumlah tenaga kerja Indonesia PMA tercatat sebanyak 8.857 orang (meningkat sebesar 32,15%) dibandingkan tahun 2022 dengan capaian sebanyak 6.702 orang.

11. KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Tujuan pembangunan kepemudaan adalah menjadikan pemuda yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk membentuk karakter dan kompetensi/daya saing maka diperlukan pendidikan yang baik dan

berkualitas. Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.57
Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga 2019-2023

Indikator	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	12.6	17.8	73	10,50	23,15
Persentase Wirausaha Muda	12	17	38	16,40	5
Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	54.9	53,7	53,7	0,97	92,31
Persentase Pelatih yang bersertifikat	-	-		21.63	
Persentase Pembinaan Atlet Pelajar	70	71	60.06	57.53	51,67

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu persentase Pembina cabang olahraga berprestasi, sementara indikator lain pada tahun 2022 belum menunjukkan perkembangan yang membaik, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target pada tahun berikutnya.

12. STATISTIK

Sektor Statistik mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mendukung kebijakan pelaksanaan satu data yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Kebijakan satu data ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan statistik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan dalam hal pelaksanaan Statistik Sektoral yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan (tren) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Untuk capaian pelaksanaan statistik sektoral di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.58
Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023

1	Data Statistik Sektoral	69	69	69	92	100

Sumber : Diskominfo Provsu, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan Data Statistik Sektoral pada tahun 2022 sebesar 92% telah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian ini diperoleh dari jumlah data sektoral pembangunan Sumatera Utara yang telah dihimpun dari 34 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

13. PERSANDIAN

Setelah diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi menangani sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan yaitu :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi melalui: (a) Pembelajaran dan Peningkatan Kapabilitas mengenai Sandi dan Sistem Keamanan Informasi dan; (b) Pengumpulan, Pemutakhiran dan Peningkatan Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah provinsi, melalui Pengumpulan, Pemutakhiran dan Penyelarasan Sandi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.59
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengamanan Informasi dan Persandian

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pintasi Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	10	10	10	61	100

Sumber : Diskominfo Provsu, 2022

Capaian ini berasal dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memahami dan menggunakan keamanan informasi sebanyak 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah antara lain Dinas Kominfo Provsu, BPKAD, Bappeda, BKD dan Inspektorat. Indikator ini juga merupakan bagian yang penting dalam mendukung penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

14. KEBUDAYAAN

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara langsung berdampak terhadap program dan kegiatan terkait dengan kebudayaan. Penyelenggaraan festival, seni dan budaya yang menghimpun masyarakat banyak dibatalkan, sehingga jumlah penyelenggaraannya pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. berkurangnya aktivitas masyarakat, ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan pemeliharaan beda, situs dan Kawasan

cagar budaya. Terbatasnya kunjungan masyarakat di Kawasan budaya menjadi momentum untuk memperbaiki benda, situs dan Kawasan cagar budaya di Sumatera Utara. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.60
Capaian Indikator Kebudayaan

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	55	10	10	6	8
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	-	-	2	7	10
3	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	10	2	2	13	14

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, 2022

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya di Sumatera Utara menunjukkan bahwa adanya indikasi bahwa kecenderungan/ minat penduduk yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena "pasar budaya lokal" di Sumatera Utara belum memberikan *reward* yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni.

15. PERPUSTAKAAN

Pada tahun 2020, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi instrumen kajian IPLM adalah pemerataan layanan perpustakaan, perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP), ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, anggota perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Capaian Indikator perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.61
Capaian Indikator Perpustakaan 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	9.75	0.4	20.7	16.5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 tercapai 100% dengan target 16.5 poin dan realisasi 16,5 poin. Selain itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan tren peningkatan pada 2023 terhadap 2020, dan kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023.

16. KEARSIPAN

Kearsipan atau *Records Management* adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi. Sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Efektif atau tidaknya suatu sistem kearsipan tergantung pada rancangan sistem itu. Rancangan sistem mengidentifikasi dan menyeleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta menerapkan cara pengaturan dan pencarian Kembali. Capaian Indikator Kearsipan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.62
Capaian Indikator Kearsipan, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	20	6.12	47	49	50
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	15.432	65	71	86	103

Sumber : Dinas Perpustakan dan Arsip, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik/baku dan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2023, pada Tahun 2022 hingga 2023 telah mengalami Peningkatan sebanyak 2.04% pada masing-masing indikator dan kondisi ini telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

1. PARIWISATA

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel. 2.63
Kontribusi sektor Pariwisata

No.	Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023

1	Kontribusi sektor Pariwisata	7,46	6,66	6,22	6,47	3,83

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata di Sumatera Utara masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata yang terdampak antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran.

Selain hal tersebut di atas terdapat indikator kinerja yang mendukung sektor pariwisata. Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.64
Capaian Indikator Pariwisata 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	7,46 %	6,66 %	6,23 %	6,47 %	7,16 %
Lama Kunjungan Wisata	1,38 hari	1,15 hari	1,30 hari	1,48 hari	1,51 hari
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	236.198 orang	45.902 orang	240 orang	27.336 orang	197.015 orang
Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan	2 DPP	1 DPP	10 DPP	10 DPP	10 DPP

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata, BRS BPS Sumatera Utara 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada Tahun 2023 sebanyak 197.015 orang. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 - 2022 (masa pandemi *covid* 19). Akan tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebelum pandemi (236.198 orang). Sejalan dengan itu, Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7,16% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 – 2022 (masa pandemi). Akan tetapi mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 (7,46%). Sementara itu, rata-rata lama kunjungan wisata Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1,51 hari, paling tinggi dibanding Tahun 2019 – 2022.

2. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

Capaian Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.65
Indikator Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

PRODUKSI (TON)	2019	2020	2021	2022	2023*)
PADI	4.693.562,74	4.200.112,30	3.925.505,47	3.992.474,00	4.049.437,81
JAGUNG	1.960.423,85	1.965.444,22	1.701.235,36	1.801.145,00	1.898.955,34
KEDELAI	9.626,73	4.003,26	1.612,58	8.214,00	15.692,72
CABAI MERAH	155.834,60	154.008,30	193.861,69	216.191,00	217.917,27

CABAI RAWIT	39.825,90	49.245,90	61.160,11	40.541,72	86.880,23
BAWANG MERAH	16.336,80	18.071,66	29.222,12	41.235,00	65.585,18
BAWANG PUTIH	58,7	974,9	1338,7	20,5	6.119,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura, 2023
**)Angka Sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 7 komoditi Produksi pada Tanaman Pangan dan Hortikultura, dapat dilihat pada tahun 2019-2023 produksi tanaman pangan dan hortikultura terus mengalami perkembangan yang cukup baik hanya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan ini dapat dilihat pada tahun 2020 dan tahun 2021, faktor yang menyebabkan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mengalami penurunan antara lain seperti adanya perubahan iklim seperti banjir yang menyebabkan beberapa daerah mengalami gagal panen, kemudian serangan hama yang juga menyebabkan produksi yang tidak maksimal, walaupun mengalami penurunan namun tetap dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mulai mengalami peningkatan seperti komoditas padi produksi pada tahun 2022 mencapai 3.992.474,00 Ton meningkat dibandingkan capaian produksi pada tahun 2021 yang mencapai 3.925.505,47 Ton dan pada tahun 2023 produksi padi meningkat 1,4 persen menjadi sebesar 4.049.437,81 Ton. Untuk komoditas jagung juga meningkat terlihat dari produksi pada tahun 2022 mencapai sebesar 1.801.145,00 Ton meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 1.701.235,36 Ton, dan pada tahun 2023 meningkat 5,4 persen menjadi sebesar 1.898.955,34 Ton. Selanjutnya untuk komoditas Hortikultura seperti cabai merah pada tahun 2022 produksinya mencapai 216.191,00 Ton meningkat dibandingkan capaian produksi pada tahun 2021 yang sebesar 193.861,69 Ton, dan pada tahun 2023 produksi cabai merah meningkat 0,7 persen menjadi sebesar 217.917,27 Ton. Produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura kembali mengalami peningkatan salah satunya dikarenakan intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan benih dan penanganan masalah hama pertanian.

3. PERKEBUNAN

Dari luas areal perkebunan adalah 2.167.639,02 Ha sebesar 1.189.207,48 Ha merupakan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan kelapa. Sementara itu capaian perkebunan dapat dilihat dari keberhasilan indikator sebagai berikut:

Tabel. 2.66
Capaian Indikator Perkebunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023

Indikator (Ton)	2019	2020	2021	2022	2023*)
Produksi	7,953,702.74	7,766,705.00	8,025,099.87	8,370,649.09	8,561,276.50
Kelapa Sawit	7,006,986.36	7,199,750.00	7,451,890.91	7,789,009.11	7,969,081.82
Karet	309,973.00	310,016.00	310,018.00	310.020,00	310,700.00
Kopi Arabika	66,831.00	67,469.00	71,588.00	76,528.00	79,401.00
Kopi Robusta	8,091.00	9,128.00	9,283.00	9,922.00	10,578.00
Kelapa	99,132.00	99,972.00	100,036.00	101.964,96	102,717.45
Kakao	34,792.00	35,696.00	36,310.00	35,299.43	37,912.00

Indikator (Ton)	2019	2020	2021	2022	2023*)
Komoditi Lainnya	44,190.34	44,674.00	45,973.96	47,905.60	50,886.23
Produktivitas komoditi Perkebunan (%)	2.02	3.71	2,02	2,12	0.29
NTP (poin)	95.13	125.02	145.58	152.28	159.17
PDRB (%)	10.58	10.08	10,58	10,68	13.92

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu 2023
**)Angka sementara*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perkebunan rakyat secara umum dari tahun 2019 sampai tahun 20223 mengalami perkembangan yang cukup baik, dari data di atas produksi kelapa sawit, karet, kopi dan kelapa terus mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit produksinya mencapai 7,006,986.36 Ton dan pada tahun 2023 produksi kelapa sawit sudah mencapai 7,969,081.82 Ton, untuk komoditas karet pada tahun 2019 produksi mencapai 309,973.00 Ton, dan pada tahun 2023 produksi karet mencapai 310.020,00 Ton, untuk komoditas kopi baik kopi arabika dan kopi robusta produksinya terus mengalami peningkatan ini dilihat pada tahun 2019 produksi kopi arabika sebesar 66,831.00 Ton dan pada tahun 2023 produksinya meningkat menjadi sebesar 79,401.00 Ton, dan untuk kopi robusta pada tahun 2019 produksinya sebesar 8,091.00 Ton dan pada tahun 2023 produksi kopi robusta mencapai sebesar 10,578.00 Ton. Khusus untuk komoditas kakao produksi dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi dikarenakan salah satunya masih adanya penyakit yang menyerang kakao sehingga membuat buah yang dihasilkan tidak maksimal, sehingga menurunkan minat petani menanam tanaman kakao.

Permasalahan utama pada sektor perkebunan adalah umur tanaman perkebunan di Sumatera Utara sudah tidak lagi muda, sehingga diperlukan adanya peremajaan pada tanaman perkebunan melalui *replanting*, kemudian karena serangan penyakit pada tanaman perkebunan yang membuat hasil produksi perkebunan tidak maksimal. Selain itu tanaman perkebunan rakyat di Sumatera Utara khususnya kelapa sawit belum memiliki standar ISPO. Hal ini perlu menjadi perhatian Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

4. KEHUTANAN

Berdasarkan penetapan lahan kritis Provinsi Sumatera Utara seluas 1.338.810 Ha (sesuai SK MENLHK No. 306/2018) dan program perhutanan sosial seluas 592.438 Ha (sesuai SK MENLHK No. 3511/2018). pada tahun 2018 hutan di Sumatera Utara yang harus direhabilitasi untuk lahan kritis seluas 825.754,60 Ha, namun pada tahun 2019 Sumatera Utara dapat melakukan rehabilitasi sebanyak 275.711 Ha, pada tahun 2020 rehabilitasi hutan sebanyak 275.233, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis terus menurun dan pada tahun 2023 capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 271.056 Ha.

Sedangkan untuk penanganan kerusakan kawasan hutan pada tahun 2019 kerusakan kawasan hutan di Sumatera Utara seluas 60.500 Ha turun pada tahun 2023 penanganan kerusakan hutan sudah mencapai seluas 54.350 Ha. Hal ini merupakan upaya untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pemantapan kawasan hutan dan pengusahaan hutan yang akan

berdampak pada perbaikan iklim yang terkendali. Adapun capaian Indikator Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.67
Capaian Indikator Kehutanan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (Ha)	275.711	275.233	275.251	271.666	271.056
Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	60.500	59.895	57.455	55.976	54.350
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0,8	0,83	0,78	0,74	0,73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu 2023

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Provinsi Sumatera Utara berada di jalur pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki wilayah Cekungan air tanah, pegunungan dan wilayah pesisir. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Utara memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti potensi panas bumi, potensi *hydro*, Potensi biomassa baik dari limbah pabrik kelapa sawit maupun limbah pabrik tapioka dan potensi limbah ternak, semua potensi tersebut dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi.

Capaian indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.68
Kondisi Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,8	100	99.99	99.99	99.99
2	Persentase Desa yang teraliri Listrik (%)	98,22	98,66	98,50	99.52	98.89
3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda (%)	8.74	72,95	75,82	80,16	64,12

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi & Sumber Daya Mineral Provsu Tahun 2022

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara sebesar 98.22%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 98.66% namun pada tahun 2021 Rasio Elektrifikasi mengalami penurunan yang mana dikarenakan adanya perubahan perhitungan sehingga pada tahun 2022 menurun menjadi 99,99% dan pada tahun 2023 rasio elektrifikasi tidak mengalami perubahan tetap pada 99,99%. ini merupakan gabungan dari Rasio Elektrifikasi PLN dan Non PLN. Begitu juga untuk Desa berlistrik juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 98,22 persen, persentase tertinggi di tahun 2022 sebesar 99,52 persen dan mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 98,89 persen.

6. PERDAGANGAN

Pembangunan Perdagangan dalam Perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga kompetitif, penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan serta pemerataan pendapatan. Sektor Perdagangan saling berkaitan dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri, dan perdagangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Capaian Indikator Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.69
Capaian Indikator Perdagangan

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	6,93	-1,87	3,62	6,56	5,81
2	Ekspor Non Migas	1,23	8.086.221	8.086.221	8,092,923	9.678,85

Sumber : Disperindag ESDM Provsu 2024

Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,81%, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 8,00%, Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu menjadi 3,62%, kondisi ini terus membaik hingga 2022 mencapai 6,4 persen.

7. PERINDUSTRIAN

Pertumbuhan Perindustrian di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari capaian Indikator Perindustrian sebagai berikut:

Tabel. 2.70
Capaian Indikator Perindustrian

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	1,23 (37,6)	-0,84 (25,5)	1,43	1,98	3,44
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	8,00	-1,87	NA	NA	5,43

Sumber : Disperindag Provsu

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat Pada Tahun 2023 Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar -3,44%, Kondisi ini meningkat Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,23% dan menjadi nilai tertinggi di antara lima tahun terakhir.

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Capaian indikator kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.71
Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap	434,254.10	486,955.13	439.657,63	449.571,71	482.343,25
2	Produksi Perikanan Budidaya	221,198.2	227,235.2	214,135.6	217.945,5	215,044.4
3	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	46.91	45.5	47,84	49.15	49.79
4	Nilai Tukar Nelayan	102	100	104,28	106,39	106.06

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provsu 2023

Produksi perikanan tangkap Sumatera Utara dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan yang sebesar 439.657,63 Ton menurun dibandingkan capaian produksi pada tahun 2020 yang mencapai 486,955.13 Ton, namun pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap kembali meningkat menjadi sebesar 449.571,71 Ton dan pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap meningkat 7 persen menjadi sebesar 482.343,25 Ton. Namun untuk produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2022, pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya mencapai sebesar 215,044.4 Ton menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 217.945,5 Ton, penurunan produksi ini dikarenakan mulai ditertibkannya keramba jaring apung (KJA) di kawasan Danau Toba. kemudian untuk angka konsumsi ikan juga mengalami perkembangan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan karena awal tahun 2020 nelayan tidak melaut selama 4 bulan dan pembudidaya ikan tidak menjalankan budidaya ikan karena harga pakan yang tinggi, selain itu daya beli masyarakat untuk konsumsi ikan juga menurun namun dari tahun 2021 angka konsumsi ikan kembali mengalami peningkatan dan sampai pada tahun 2023 angka konsumsi ikan mencapai 49.79 Kg/Kap/Thn, capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 49.15 Kg/Kap/Thn. Peningkatan angka konsumsi ikan ini salah satunya diakibatkan dengan semakin digalakkan promosi gemar makan ikan di masyarakat sehingga mampu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.

2.1.3.4 Urusan Penunjang

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan akan bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akun tabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.72
Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2019-2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	78	85	85	85	95

2	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	-	-	100	100	

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Utara, 2022

2. KEUANGAN

Provinsi Sumatera Utara memantapkan komitmennya untuk mencapai *good goverment* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera hingga 2021, kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian Indikator Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.73
Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Provsu

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi	-	-	29,63	13	22,84
Persentase laporan Aset daerah yang disusun	100	100	100	75	100
Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	-	-	100	70	100

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan P. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, pada indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Penetapan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota tercapai. Pada Indikator Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang Disertifikasi belum mencapai target yang ditentukan pada P. RPJMD Tahun 2019 – 2023 yaitu 22,84%, demikian juga pada indikator Persentase laporan Aset Daerah yang disusun belum mencapai target. Selain itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/9/KPTS/2022 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Sumatera Utara Bermartabat – 2023 Nomor 34 yaitu Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera

utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah (GWPP), sampai dengan tahun 2021 diketahui 25 atau 75,75 persen dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

3. PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.74
Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator	2019	2020	2021	2022)*	2023
Persentase PAD terhadap Pendapatan	44,05	42.,82	45,62	57,60	56,82
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	-4,72	-5,80	14,95	12,60	-0,015
Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun sebelumnya	1,15	-8,67	32,10	16,15	0,126
Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	42,34	9,89	-31,32	297,46	-0,278
Persentase Kenaikan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	-3,13	33,40	-4,55	14,74	-0,021

Sumber : BKAD LRA Provsu TA 2018 – 2019 (Data diolah);
) LRA Sementara TA. 2023 Un Audited*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat gambaran pencapaian target indikator pengelolaan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019 – 2022 dapat tercapai.

4. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu upaya dalam membentuk ASN yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja serta loyalitas kerja. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5ibawah ini:

Tabel. 2.75
Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam)	-	-	9 JP	23,71 JP	23.2 JP

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen)	17.49	19.2	19.2	132,50% (477 Org)	83
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	24%	148,74% (12.643 Org)	106,36

Sumber : BPSDM Provsu 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen) masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sementara Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan (jam) telah tercapai.

- **KEPEGAWAIAN DAERAH**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui Indikator Nilai Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Capaian Indikator Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.76
Capaian Indikator Kepegawaian Daerah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sistem Merit (Poin)	-	97.5	263.5 (B)	333.5	333.5

Sumber : BKD Provsu 2023

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dimana pada tahun 2021 capaian nilai sistem merit adalah 263.5 (B) dan telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Pada Tahun 2022 target Nilai Sistem Merit yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis 2019-2023 adalah sebesar 300 poin. Pada Desember 2022 KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit di seluruh Instansi, Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 333.5 poin dengan kategori sangat baik.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian pengembangan (*Research & Development*) didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.77
Capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	20	20	30	75	60
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	50	50	40	90	57

Sumber : Bappelitbang, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ini mempunyai formulasi yaitu perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kelitbangan yang renja perangkat daerah dikali 100%. Untuk Tahun 2022 target penelitian yang ditindak lanjuti adalah 2 (dua) dari 4 (empat) penelitian yang dilaksanakan yang harus dicapai oleh Balitbang Provsu, dan dari hasil kegiatan penelitian untuk Tahun 2022 ada 3 (tiga) kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti sehingga Balitbang sudah melampaui dari target yang ditetapkan dan penelitian tersebut adalah : 15 1. Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap keberhasilan pengelolaan desa wisata dan peningkatan jumlah desa mandiri, hasil penelitian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara. 2. Optimalisasi *Link n Match* SMK dengan Dudi dalam menghasilkan lulusan yang mandiri. Ini merupakan hasil penelitian di Tahun 2021 dan untuk Tahun 2022 adalah pengembangannya yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. 3. Sistem Informasi Cagar Budaya di kawasan *Geopark* Kaldera Toba yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Sistem informasi cagar budaya juga dapat ditemukan di laman cagarbudaya.sumutprov.go.id yang berisikan tentang informasi objek-objek cagar budaya dan objek diduga cagarbudaya di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena Kawasan Geopark Kaldera Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan untuk mengaplikasikan amanat UU CB dan UU Pemajuan Kebudayaan ini apakah telas diimplementasikan dengan baik.

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan formulasi jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Target untuk Tahun 2022 adalah 50% yaitu ada 15 inovasi dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk tahun ini ada 27 inovasi yang terealisasi yaitu 90%, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan dan ini merupakan usaha keras bersama OPD untuk mencapai target yang ditetapkan karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah pada BAB V Pasal 10 ayat 2 menerapkan 2 (dua) inovasi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN. 27 inovasi tersebut yaitu :

1) Integrasi pelayanan digital Sumatera Utara melalui Smart Portal Sumut *Smart Province* Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi

Sumatera Utara;

2) Si Anak Dara Sumut (Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan Dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3) SKP (Sasaran Kerja Pegawai) ONLINE Dikembangkan Menjadi KAREJO Kinerja Badan Kepegawaian Daerah;
4) Relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2091 (Covid-19) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
5) Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6) Bakti Kesehatan Bermartabat Dinas Kesehatan;
7) Progres Repot Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2Sumut) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
8) Sicekatan kampung KB - Sistem Informasi Cepat Kinerja temukan masalah dan intervensi kampung KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9) Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Secara Digital) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10) E-Samsat Sumut Bermartabat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
11) Peranan Dinsos Provsu sebagai *team* Satgas Pemula saran dalam Penanganan COVID-19 Dinas Sosial;
12) Integrasi Penanggulangan Bencana Sumatera Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13) Reformasi Pengawasan Spesialis Ketenagakerjaan (RESPEK) Dinas Tenaga Kerja;
14) Kolaborasi Percepatan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan;
15) Aplikasi e-Absensi SumutBadan Kepegawaian Daerah;
16) SiRaja Sumut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu;
17) Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (SIMPEL ORMAS) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
18) Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19) Toko Online Perempuan Sumatera Utara (TOP SUMUT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20) Bantuan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan;
21) PETERPAN (Pegawai Terpilih dan Panutan) Inspektorat;
22) E-Anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip;
23) Virtual Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
24) Biro Adpim Elektronik Notulen (Baleno) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu;
25) Implementasi Desa Inovasi Tanjung Rejo Badan Penelitian dan Pengembangan;
26) Pelayanan Kesehatan Bergerak Dinas Kesehatan;
27) Dokter Terbang Dinas Kesehatan.

6. BADAN PENGHUBUNG

Capaian indikator Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.78
Capaian Indikator Badan Penghubung

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Hubungan Antar Lembaga	82%	82%	82%	82%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	79%	79%	80%	85,20

Sumber : Badan Penghubung Provsu

7. PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam arti pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.79
Capaian Indikator Pengawasan 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota se-Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip ≥ B	-	73	73	90,96	97,62
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	81,67	83,64	82	74,67	N/A
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	100	100	100	100
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3 Terdefinisi	Level 3	Level 3 BPK RI Perwakilan	Level 3
Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 2 menuju level 3	Level 2 plus	Level 2	Level 3	Level 3
Pengaduan Masyarakat	52,4	74,5	55	79	
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	-	20	25	64,90	36

Sumber : Inspektorat Provsu 2022

2.1.3.5 Urusan Penunjang

1. SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Capaian Indikator Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.80
Capaian Indikator Sekretariat Dewan 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase capaian tingkat kepuasan dan fasilitasi sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100	100

Sumber : Setwan Provsu 2022

2. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Capaian Indikator Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.81
Capaian Indikator Sekretariat Daerah 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	OPD
Persentase penyelesaian batas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2.783	2.792	2	2,7	2,93	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase Kerjasama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	-	-	86	63.23	87	Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	-	-	70	98.85		Biro Kesejahteraan Rakyat
Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	-	-	100%	100%	216	Biro Hukum
Persentase rancangan Produk Hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	-	-	100%	100%	114	Biro Hukum
Persentase Penanganan perkara hukum dan perlindungan HAM	-	-	100%	100%	176	Biro Hukum
Persentase kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	-	-	99.01%	100%	100	Biro Perekonomian
Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	-	-	100%	100%	100	Biro Perekonomian
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	100%	100%	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Terbitnya Peraturan/ Kebijakan terkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD	-	-	100%	100%		Biro Administrasi Pembangunan
Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	-	-	100%	100%	100	Biro Administrasi Pembangunan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B (62.79)	B (63.89)	B	68,85	Biro Organisasi
Indeks Pelayanan Publik	3,00 (C)	3,68(B)	3.80	3,99	3,51	Biro Organisasi
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	Biro Organisasi
Nilai capaian pelaporan kinerja	11.64	9.11	11.75	14		Biro Organisasi
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	-	-	100%	100%	100	Biro Umum

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	OPD
Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	-	-	100%	100%	92,39	Biro Umum
Persentase Bahan Materi Pimpinan yang disiapkan	-	-	100%	100%	100	Biro Administrasi Pimpinan
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber : Sekretariat Daerah Provsu 2022

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III-2022 dibanding Triwulan III-2021 (YoY) tumbuh sebesar 4,97 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,63 persen. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani, Nilai NTP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019, dimana pada tahun 2019 Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 98.08 poin dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 109.83 poin, pada tahun 2021 Nilai Tukar Petani meningkat menjadi sebesar 119,52 poin dibandingkan capaian tahun 2020, untuk tahun 2022 Nilai Tukar Petani kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 121, 78 poin, dan pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani meningkat menjadi sebesar 125, 73 poin. Dimana sektor yang berkontribusi besar dalam peningkatan skor Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 94,75 poin dan pada tahun 2023 Nilai Tukar Petani Perkebunan meningkat signifikan menjadi sebesar 159,17 poin. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.82
Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Tukar Petani	98,09	109,82	119,52	121,78	125,73
	- Peternakan	114,81	98.67	103,18	101,13	97,05
	- Pangan	93,20	96.90	96,77	95,44	98,92
	- Hortikultura	92,86	97.28	95,40	93,15	88,33
	- Perikanan	103,40	99.52	104,28	106,39	106,06
	- Perkebunan	94,75	125.05	145,58	147,36	159,17

Sumber : BPS Sumatera Utara 2022, Data diolah

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah, capaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.83
Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	82,19	82,10	76,37	80,57	76,5
2	Rasio Elektrifikasi	99,11	98,8	99,99	97,98	97,98
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81,82	83,28			
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	73,90	76,95		100	63,77
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	76,96	-		100	N/A

Sumber : Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi, Dinas ESDM dan Dinas SDA, CK, TR

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.704; 1.015; dan 850. Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.84
Angka Kriminalitas

Indikator	2019	2020*	2021	2022	2023
Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara	2,40 (per 1000 orang)	37.050 kasus	33.392 kasus	N/A	

Sumber : BPS Provsu/ Kesbang Pol/Poldasu
**) Tingkat Kriminalitas berdasarkan jumlah tindak pidana*

Tingkat kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibanding periode tahun 2020. untuk jumlah tindak pidana (JTP) yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 37.051 kasus, turun menjadi 33.392 kasus di tahun 2021. Penurunan jumlah kasus kejahatan di tahun 2021 ini cukup berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tengah terjadi. Di mana selama pandemi kegiatan masyarakat yang cukup banyak berkurang.

2. Jumlah Dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.85
Indikator Pengelolaan dan Retribusi Daerah

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	20	20			
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	49,47	51	99,21	57,63	56,82

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 10,532 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,703 juta orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 68,67 persen atau 7,35 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 6,842 juta orang penduduk bekerja dan 508 ribu orang pengangguran.

Tabel. 2.86
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Sumatera Utara

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	10.532	10.703		10.532	10.532
2	Angkatan Kerja (ribu orang)	7.411	7.350		7,411	

Sumber : BPS Provsu, Agustus 2020

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 61 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 68,67 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 (70,37 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2020 masih mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 37,2 persen. Walaupun

demikian, mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 4,5 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan status pekerjaan utama yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pekerja keluarga/tak dibayar meningkat 2,28 persen poin, dan pekerja bebas di non pertanian yang meningkat sebesar 1,55 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan utama tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2020, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 4,079 juta orang (59,62 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 2,763 juta orang (40,38 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019.

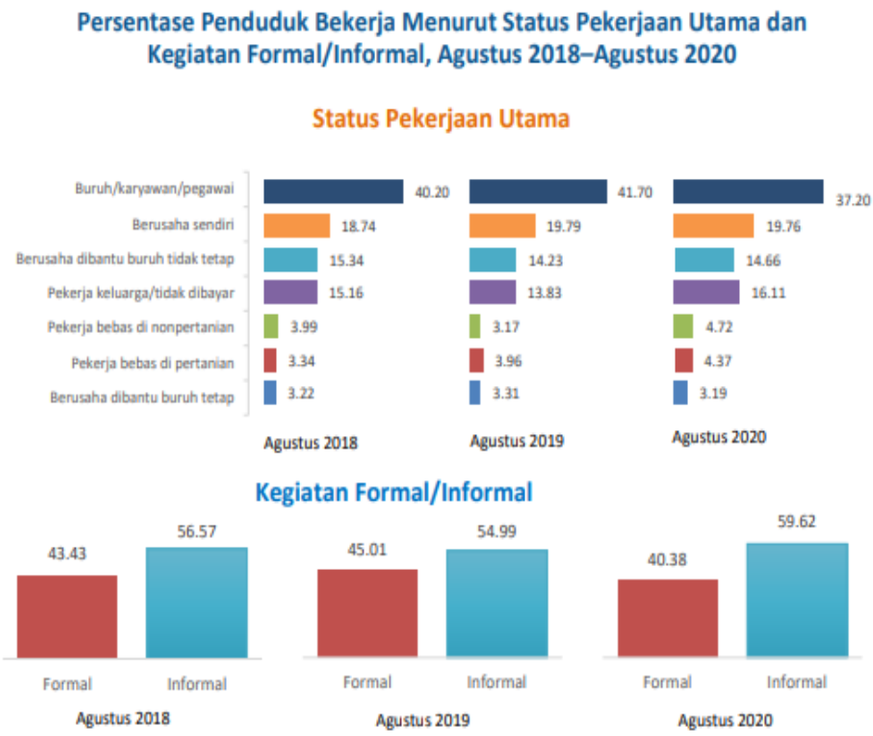

Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik 2.17
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

3. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan merupakan salah satu indikasi terhadap kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan cenderung semakin tinggi juga keahlian dan produktivitas yang dimiliki. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 26,86 persen pada Agustus 2020. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas hanya sebesar 12,46 persen pada Agustus 2020.

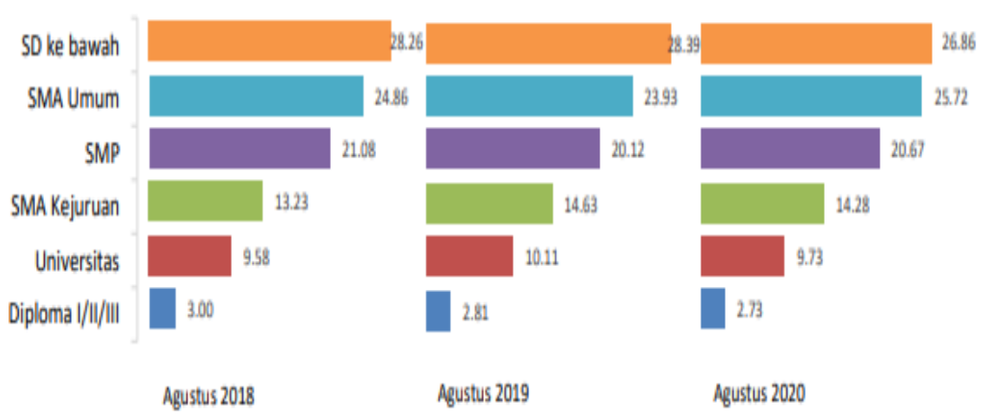

Sumber : BRS BPS Provsu, Agustus 2020

Grafik 2.18
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2018-Agustus 2020

Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,53 persen poin), Universitas(0,38 persen poin), SMA Kejuruan (0,35 persen poin) dan DI/II/III (0,08 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMA, dan SMP mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 1,79 persen poin.

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk itu telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022, sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/150/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 sebesar 62,07 poin dan tahun 2022 naik menjadi 67,83 poin dan masuk pada kategori "B", tahun 2023 masih perdikat B dengan nilai 68,83. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 2.87
Indeks Reformasi Birokrasi Sumatera Utara

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B

Sumber : Biro Organisasi Provsu

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

5. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2022 sebesar 67,65 dalam skala 0 sampai 100, berada di bawah IDI Nasional sebesar 74,92. Capaian IDI Sumatera Utara ini masuk pada kategori "sedang". Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 4,00 poin (dari 76,54 menjadi 72,54), (2) Hak-Hak Politik turun 1,02 poin (dari 62,61 menjadi 61,59), dan (3) Lembaga-Lembaga Demokrasi Naik 19,43 poin (dari 51,69 menjadi 71,12). Perkembangan IDI Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.88
Perkembangan IDI Sumatera Utara

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Indeks Demokrasi Indonesia	67.65	65.13	77,6	79,53	79,53*

Sumber : BPS Sumatera Utara 2021-2022
**) Data Belum Rilis, memakai data tahun sebelumnya*

1. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRB)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam Menyusun penjelasan peta risiko.

Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melakukan Tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Jika dilihat dari perkembangan daerah Pulau Sumatera, maka rata kelas risiko dinyatakan tinggi termasuk Sumatera Utara, sedangkan kelas Resiko sedang berada pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, capaian Indeks Risiko Bencana di Wilayah Sumatera dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.89
Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023

NO	PROVINSI	IRBI 2022	IRBI 2023	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149.10	146.90	▼	TURUN
2	SUMATERA UTARA	142.51	140.65	▼	TURUN
3	SUMATERA BARAT	144.39	144.38	▼	TURUN
4	RIAU	141.26	137.75	▼	TURUN
5	JAMBI	133.49	135.69	▲	NAIK
6	SUMATERA SELATAN	132.99	131.24	▼	TURUN
7	BENGKULU	155.35	148.75	▼	TURUN
8	LAMPUNG	142.55	135.66	▼	TURUN
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	158.52	155.61	▼	TURUN
10	KEPULAUAN RIAU	110.93	107.79	▼	TURUN
11	DKI JAKARTA	62.58	61.31	▼	TURUN
12	JAWA BARAT	131.62	123.16	▼	TURUN
13	JAWA TENGAH	115.38	109.01	▼	TURUN
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	119.56	108.15	▼	TURUN
15	JAWA TIMUR	121.70	118.61	▼	TURUN
16	BANTEN	144.51	132.21	▼	TURUN
17	BALI	123.98	120.21	▼	TURUN
18	NUSA TENGGARA BARAT	119.83	115.37	▼	TURUN
19	NUSA TENGGARA TIMUR	139.23	132.81	▼	TURUN
20	KALIMANTAN BARAT	136.72	138.92	▲	NAIK
21	KALIMANTAN TENGAH	123.56	121.72	▼	TURUN
22	KALIMANTAN SELATAN	128.81	129.44	▲	NAIK
23	KALIMANTAN TIMUR	146.67	144.43	▼	TURUN
24	KALIMANTAN UTARA	157.47	148.16	▼	TURUN
25	SULAWESI UTARA	129.62	128.01	▼	TURUN
26	SULAWESI TENGAH	143.44	140.56	▼	TURUN
27	SULAWESI SELATAN	150.07	144.47	▼	TURUN
28	SULAWESI TENGGARA	155.79	153.08	▼	TURUN
29	GORONTALO	120.61	116.71	▼	TURUN
30	SULAWESI BARAT	165.23	160.08	▼	TURUN
31	MALUKU	162.47	160.03	▼	TURUN
32	MALUKU UTARA	149.22	148.71	▼	TURUN
33	P A P U A	138.27	138.59	▲	NAIK
34	PAPUA BARAT	143.92	145.76	▲	NAIK
35	PAPUA SELATAN	138.20	138.20	▬	TETAP
36	PAPUA TENGAH	116.10	116.49	▲	NAIK
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.05	102.05	▬	TETAP
38	PAPUA BARAT DAYA	150.11	148.44	▼	TURUN

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat untuk Skor nilai Indeks Risiko Bencana tertinggi secara nasional adalah di Provinsi Sulawesi Barat dan terendah di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Papua Barat dan Papua Tengah mengalami kenaikan skor indeks Risiko Bencana.

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu upaya Pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Standar yang ditetapkan melalui tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penerapan standar pelayanan minimal di provinsi Sumatera utara adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pendidikan

- Jenis Pelayanan Dasar
  a. Pendidikan Menengah
  b. Pendidikan Khusus
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
  a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun.
  b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas
- Realisasi
  a. Persentase jumlah anak 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah dibagi dengan jumlah anak usia 16-18 tahun adalah 78,65 persen.
  b. Persentase jumlah anak 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus dibagi dengan jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas 16,55 persen.

b. Urusan Kesehatan

- Jenis Pelayanan Dasar
  a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (100%).

b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (100%).

- Realisasi

a. Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 15.179.342 orang (100%).

b. Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 85.381 orang (100%).

c. Urusan Pekerjaan Umum

- Jenis Pelayanan Dasar

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (100%).
b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (100%).

- Realisasi

a. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas (63,77%).

b. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (39,99%).

d. Urusan Perumahan Rakyat

- Jenis Pelayanan Dasar

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan :

  ❖ Pada saat masa pasca bencana;
  ❖ Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
  ❖ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 wilayah administrasi kabupaten/ kota.

- Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- ❖ Pada saat masa pasca bencana;
- ❖ Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- ❖ Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

- Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :

  - ❖ Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
  - ❖ Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
  - ❖ Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

c. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun target dan capaian SPM Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.

   Untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi di Tahun Anggaran 2021 belum dilakukan, namun untuk sub indikator mendukung dengan dilakukan pembangunan Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Kabupaten Mandailing Natal berupa Pekerjaan Jalan Paving Blok, Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah yang berada pada Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

   Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdata masyarakat yang harus difasilitasi.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan masyarakat

- Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

  Berdasarkan Indikator SPM yang ditetapkan, yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.350 jiwa.

- Realisasi

  Berdasarkan target yang ditetapkan, maka realisasi capaian dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebanyak 5.351 jiwa atau 100 %.

f. Urusan Sosial

- Jenis Pelayanan Dasar

  Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM (Pasal 3 Ayat 1 sub j, k, l, m, dan n) Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), bahwa Jenis SPM Sosial Provinsi:

  a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
     1) Penyediaan Per makanan
     2) Penyediaan Sandang
     3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
     4) Penyediaan Alat Bantu
     5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
     6) Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
     7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari
     8) Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
     9) Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
     10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
     11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

  b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
     1) Pengasuhan
     2) Penyediaan Makanan
     3) Penyediaan Sandang
     4) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
     5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
     6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
9) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
10) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11) Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengantin

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
1) Penyediaan Per makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Alat Bantu
5) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
6) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
7) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
9) Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
12) Pemula Saraan

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
1) Penyediaan Per makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
4) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
7) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
8) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
9) Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
10) Pemulangan ke Daerah Asal

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
1) Penyediaan Per makanan
2) Penyediaan Sandang
3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

5) Pelayanan Dukungan Psikososial

Sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018, maka Sarana dan Prasarana yang wajib ada di dalam panti adalah sebagai berikut :

a. Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur.

b. Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik ketrampilan, dan ruang kesenian.

c. Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus.

d. Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan

e. Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang peralatan teknis.

f. Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan

g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

  Berdasarkan Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut 5 jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial secara bertahap tahun 2019 - 2023 yang meliputi :

Tabel. 2.90
Target SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.047
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	510
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	173

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2023
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1.880

Sumber : Dinas Sosial Provsu, 2023

- Realisasi

  Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), artinya tahun 2019 adalah tahun awal pencapaian realisasi target SPM bidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupaya secara maksimal untuk mengejar pencapaian target SPM. Saat ini realisasi pencapaian SPM sudah memasuki tahun kedua, namun demikian tetap diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.

Adapun capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.91
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				Realisasi				Status
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
SPM PENDIDIKAN										
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100	100	100	100	96,10	97,35	98,10	100	Mencapai Target
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	100	100	100	100	34,9	34,9	16,55	N/A	Belum Mencapai Target
SPM KESEHATAN										
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				Realisasi				Status
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
SPM PEKERJAAN UMUM										
Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
Penyediaan pelayanan Pengelolaan air limbah domestik regional lintas Kab/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
SPM TRANTIBUNLINMAS										
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target
SPM SOSIAL										
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target				Realisasi				Status
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Mencapai Target

Sumber : Laporan Evaluasi SPM TW 4, 2023

2.1.4.6 Kerja Sama Daerah Untuk Menggambarkan Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah, Maupun Kerja Sama Dengan Swasta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 telah mengatur tata cara kerja sama antar daerah serta kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama.

A. Kerja Sama Antar Daerah

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat KSDD terbagi menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama Sukarela, Kerja Sama wajib meliputi:

a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

sedangkan Kerja Sama Sukarela merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Dalam melaksanakan kerja sama antar daerah Pemerintah Provinsi Sumatera utara telah terlibat dalam berbagai forum untuk menjaring potensi kerja sama antar daerah yaitu:

a. Forum Rapat Koordinasi Gubernur Se-Indonesia
b. Forum Rapat Koordinasi Gubernur Se- Sumatera
c. Forum Rapat Koordinasi Bappeda se-Indonesia
d. Forum Rapat Koordinasi Bappeda Se- Sumatera Utara

B. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan *(Funding gap)* yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan

untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema KPBU yang berjalan di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu *User Charge* dan *Avaibility Payment*, Pengembangan KPBU untuk Infrastruktur pelayanan dasar sangat terbatas dengan skema *User Charge* karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, untuk itu diperlukan inovasi maupun kreativitas pemerintah dalam mengombinasikan pembangunan infrastruktur dasar dengan berbagai kegiatan komersial yang dapat menutup beban CAPEX dan OPEX Proyek KPBU pembangunan infrastruktur pelayanan dasar sedangkan skema *Avaibility Payment* tetap dibebankan pada APBN/APBD Provinsi maupun Kab/Kota, dimana Beban CAPEX dan OPEX Proyek dibayar per tahun selama masa konsesi. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan dukungan pendanaan atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan BRT Mebidang

Pengembangan kawasan Aglomerasi Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) diperlukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas diperlukan dukungan sarana transportasi yang memadai, BRT dapat menjadi salah satu Moda transportasi massal andalan dalam mengatasi berbagai persoalan kemacetan dan pengembangan kawasan perkotaan.

Rencana pembangunan BRT Mebidang yang merupakan bagian program *"Indonesia Mass Transit Project"* (MASTRANS) dilaksanakan dalam rangka implementasi *Major Project* RPJMN 2020 – 2024 Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar).

Major Project tersebut melingkupi 3 strategi utama, yaitu:

1. Penyusunan *Sustainable Urban Mobility Plan* (SUMP)

   Metropolitan Medan: SUMP selesai 2022 (dibantu AFD)

2. Pengembangan kelembagaan transportasi perkotaan metropolitan

   Metropolitan Medan: proses pengembangan kelembagaan pengelola

3. Integrasi sumber pendanaan (antara lain APBD, KPBU, Pinjaman Luar Negeri, pengembangan dukungan fiskal Pemerintah Pusat)

   Metropolitan Bandung dan Mebidang menjadi pilot dalam Program *Implementation Project of National Mass Transit* (tercantum dalam DRPPLN/*Green Book* 2022 untuk pembangunan BRT)

Rencana pembangunan BRT Mebidang bertujuan untuk membangun program angkutan masal, memperbaiki mobilitas dan aksesibilitas perkotaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas institusi dalam pembangunan transportasi perkotaan dan angkutan umum masal.

Rencana pembangunan BRT Mebidang dan BRT Bandung dilaksanakan melalui Loan dengan rincian Loan World Bank USD 224 Juta dan Loan AFD USD 40 Juta, yang efektif sejak tanggal 21 September 2022, dengan ruang lingkup Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas sebesar

USD 33,2 juta, serta Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan sebesar USD 230,8 juta. Jalur BRT Mebidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.92
Trase Rencana BRT Mebidang

No.	BRT	Panjang (Km)	Wilayah Administratif
1	Flamboyan – Hj. Ani Idrus	13.80	Medan
2	Terminal Amplas – SM Raja - Plaza Medan Fair (SM Raja)	19.20	Medan
3	Simpang Pemda – Plaza Medan Fair	14.60	Medan
4	Terminal Amplas – Gatot Subroto – SM Raja - Terminal Pinang Baris	18.50	Medan
5	Terminal Amplas – Simpang Denai - Plaza Medan Fair (SP Denai)	14.50	Medan
6	Terminal Pinang Baris - Teladan Stadium	16.90	Medan
7	Cemara - Teladan Stadium	8.70	Deli Serdang - Medan
8	Simpang Hj. Ani Idrus – Terminal Penumpang Bandar Deli	25.00	Medan
9	Karya Wisata – Plaza Medan Fair	14.50	Deli Serdang - Medan
10	Simpang Hj. Ani Idrus – RS Imelda	16.70	Medan
11	Medan Labuhan – Simpang Hj. Ani Idrus	19.40	Medan - Deli Serdang - Medan
12	Deli Tua – Stasiun Kereta Api Bandar Khalifa	24.00	Deli Serdang - Medan - Deli Serdang
13	Citra Land Gama City – RS Adam Malik	22.00	Deli Serdang - Medan
14	RS Adam Malik – Plaza Medan Fair	15.80	Medan
15	Stasiun Lubuk Pakam – Terminal Amplas	22.00	Deli Serdang - Medan
16	Terminal Ikan Paus Binjai – Pusat Pasar Kota Medan	22.50	Binjai - Deli Serdang - Medan
17	Terminal Pinang Baris – Ring Road - Terminal Amplas (Ring Road)	19.40	Medan

RUTE BRT MEBIDANG IMPLEMENTASI TAHAP AWAL

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (Data diolah)

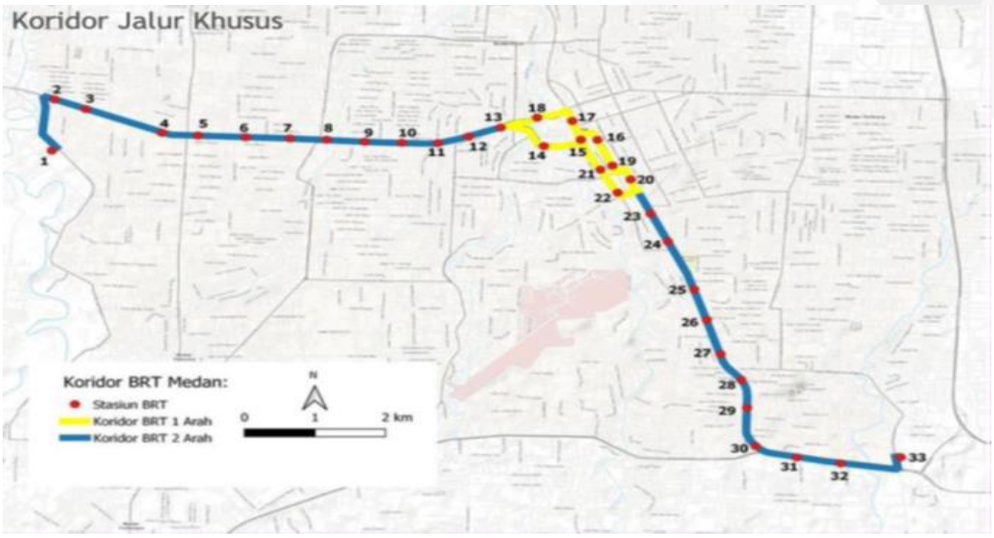

Gambar 2.3
Trase Rencana BRT Mebidang Tahap Awal
Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (Data diolah)

Sistem BRT Tahap Awal ini nantinya akan dilayani dengan 1 (satu) koridor jalur khusus (*delicated*) sepanjang 17 km dan 17 koridor pengumpan (*feeder*), dengan total jumlah kendaraan sebanyak 515 unit bus besar bus ukuran besar dan medium. Untuk mendukung pelayanan BRT ini, akan dibangun halte, depot, fasilitas *Charge* bus listrik, serta fasilitas pejalan kaki (pedestrian), untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna.

Ketersediaan lahan untuk fasilitas *Charge* bus listrik antara lain:

Lokasi	Kapasitas Lahan	Luas	Catatan
Pinang Baris	67 bus	0.74 Ha	1 Level;
Amplas	178 bus	1.96 Ha	1 Level
Flamboyan		26.00 Ha	Milik Pemko Medan
Plaza Medan Fair		2.8 Ha	Milik Pemko Medan

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Adapun hal-hal yang tantangan untuk ditindaklanjuti antara lain:

a. Antisipasi /Kontribusi Pemda jika dibutuhkan lahan untuk relokasi yang digusur, lahan untuk pelebaran, lahan untuk halte, jika terjadi kekurangan OPEX, dll;
b. Terdapat Lahan di sisi Utara Milik Pemprov. Sumut (Dinas KKP) seluas 1.7 Ha untuk Depo;
c. Prinsip Pembiayaan adalah bersama-sama antara Provinsi dengan Pemkot/Pemkab, namun sesuai hasil kajian kapasitas fiskal Pemda yang dilakukan oleh EGIS dan WB, hanya Pemprov. Sumut dan Pemko Medan yang kapasitas fiskalnya memadai, sehingga perlu dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi;
d. Skema Pengoperasian oleh BUMD yang membebani langsung APBD misalkan untuk pengadaan bus, perawatan halte;

e. Dukungan Pendampingan secara intensif dari Tenaga Ahli (Konsultan) untuk berkoordinasi dengan Tim PIU BRT Mebidang;

f. *Deadline* target yang harus disiapkan sesuai harapan *World Bank.*

2. Proyek Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara

Urgensi Pembangunan Sport Center, terkait dengan Rencana PON 2024 Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah, Sumatera Utara menjadi Mega Hub Ekonomi Sumatera Utara yang berkelanjutan dengan Pelaksanaan PON 2024 sebagai *Entry Point*, diharapkan menghasilkan nilai manfaat ekonomi pada daerah sekitar dan lokasi berjarak 3 Km dari bandara internasional Kualanamu dengan akses sangat strategis untuk tujuan perjalanan regional maupun internasional.

Lokasi berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang Luas Lahan : 300 Ha yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan konsep pembangunan yang direncanakan adalah didaerah Sport Center ada pusat Kesehatan, pusat komersial dan *expo center* dan tempat hiburan, konsep pembangunan sebagai berikut:

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (Data diolah)

Gambar 2.4
Ruang Lingkup Sport Center

Dari hasil Pra studi kelayakan yang dilakukan, menjelaskan secara umum hasil kelayakan ekonomi Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara, sebagai berikut:

Indikator Kelayakan Ekonomi	Rupiah
CAPEX	Rp 1.79 triliun
OPEX	Rp 332 Milyar
NPV	Rp . 110 Milyar
IRR Per tahun	13 %
Total AP VALUE (12 Tahun)	Rp 4,43 Triliun /369 Milyar per tahun
CONSESION PERIOD	12 *Years*

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (Data diolah)

Dalam perkembangannya Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara masih terdapat hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan bangunan tinggi disebabkan dekat dengan bandara sehingga mempengaruhi sisi bisnis dalam pengembalian
2. Kebutuhan investasi pembangunan Proyek yang besar, akan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.
3. Belum Disusunnya Dokumen FS Akhir
4. Belum dilaksanakannya *Pre Market Sounding*
5. Perlu Penetapan PJPK (Pusat/Daerah/Bersama)

3. Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei

Urgensi Pembangunan Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei dimana Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Sei Mangkei diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal maupun dari luar kawasan, seiring dengan pertumbuhan KEK Sei Mangkei, kebutuhan perumahan bagi pekerja juga akan meningkat serta peningkatan atraktivitas KEK Sei Mangkei. Dalam periode tahun 2017 hingga tahun 2021, terjadi beberapa bencana di Kabupaten Simalungun seperti banjir dan longsor yang menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal relokasi untuk warga terdampak bencana perlu diakomodir melalui penyediaan lokasi relokasi, lokasi Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei merupakan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seluas 3,3 Ha dan telah dibangun 1 Tower Rusunawa Keramat Kuba yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 60 Unit tipe 36 dan kondisinya sekarang sudah terisi penuh, sehingga dibutuhkan bangunan Tower Rusunawa yang dapat menampung + 3005 Karyawan saat ini dan diprediksi jika KEK Sei Mangkei optimal operasionalnya akan dibutuhkan 38.000 Karyawan yang membutuhkan tempat tinggal. Ruang lingkup konsep pembangunan Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei sebagai berikut:

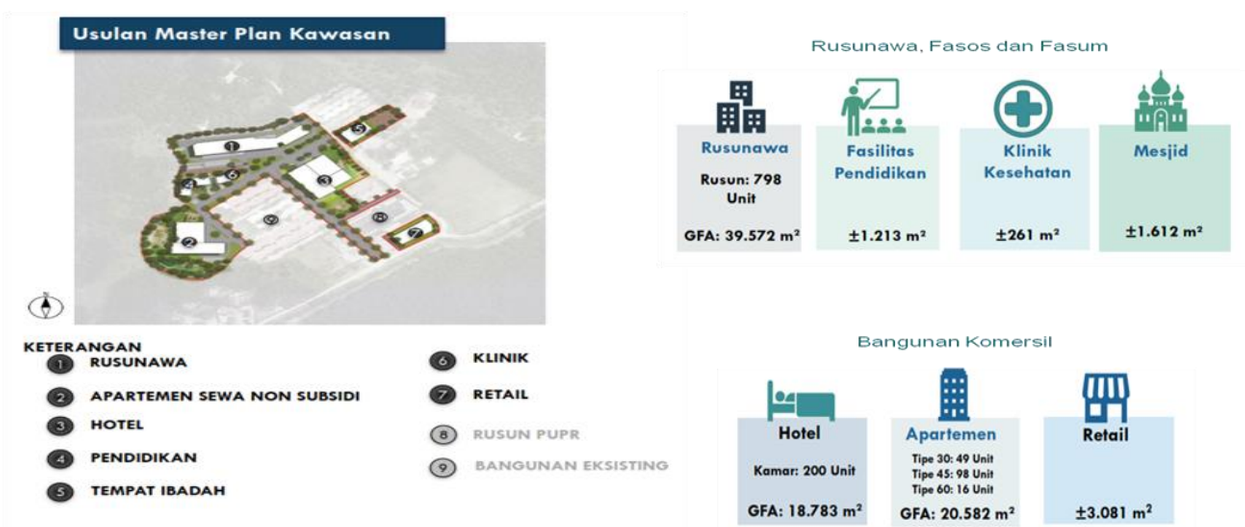

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.5
Ruang Lingkup KPBU Rusunawa KEK Sei Mangkei

Dari hasil FBC/Kajian Akhir *Feasibility* Studi/Kajian Akhir Studi Kelayakan, menjelaskan secara rinci hasil kelayakan ekonomi Proyek KPBU Sport Center Sumatera Utara, sebagai berikut:

Indikator Kelayakan Ekonomi	Rupiah
CAPEX	Rp 1.45 triliun
OPEX	Rp 873 Milyar
NPV	Rp . 110 Milyar
IRR Per tahun	13 %
Total AP VALUE (20 Tahun)	Rp 2,5 Triliun / 90 Milyar per tahun
CONSESION PERIOD	20 *Years*

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023 (Data diolah)

Dalam perkembangannya Proyek KPBU Rusunawa terintegrasi di KEK Sei Mangkei masih terdapat hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Kebutuhan investasi pembangunan Proyek dengan Skema KPBU yang besar, akan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat.
2. Skema Tarif (*User Charge) yang tidak dapat memberikan* pengembalian investasi yang memadai.
3. Hasil Pre Market Sounding berupa skema pengembalian investasi menggunakan pengembalian yang berasal dari pembayaran Pemerintah (*Avaibility Payment*).
4. Fasos berupa Sekolah dan klinik belum dihitung sebagai sumber pendapatan.

2.1.4.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah Proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Proyek Strategis Nasional (PSN) diatur melalui Peraturan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Landasan Hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang sebelumnya telah mengalami perubahan beberapa kali. Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasarnya yakni kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Sektor Infrastruktur, serta memiliki

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Dalam rangka mendukung pembangunan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan dengan mengambil kebijakan-kebijakan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Adapun proyek-proyek Strategis Nasional yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

Tabel. 2.93
Proyek Strategis Nasional yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO	RENCANA PEMBANGUNAN		KABUPATEN/KOTA
I	**Proyek Strategis Nasional (PSN)**	**Kebijakan Provinsi Sumatera Utara**	
A.	**SEKTOR JALAN**		
1	Jalan Tol Medan – Binjai – Bagian dari Trans Sumatera	➔ Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan akses Exit tol; ➔ Pengendalian Pemanfaatan Lahan di sepanjang akses Exit Tol; ➔ Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan Pusat Kegiatan khususnya Perekonomian	Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang,
2	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Batubara Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi
3	Jalan Tol Binjai – Langsa – Bagian dari Trans Sumatera		Kota Binjai, Kabupaten Langkat
4	Jalan Tol Rantau Prapat – Kisaran - Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Asahan
5	Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung - Sibolga – Bagian dari Trans Sumatera		Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Sibolga
6	Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat – Bagian dari Trans Sumatera		Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu selatan
B.	**SEKTOR PELABUHAN**		
7	Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	• Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan sesuai dengan Kewenangan Provinsi; • Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di sekitar Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung; • Pemantapan Jalan Provinsi yang Terhubung dengan Akses Simpul Transportasi ;	Kabupaten Batubara
C.	**SEKTOR KERETA API**		
8	Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	• Pembangunan perlintasan sebidang di ruas jalan Provinsi; • Fasilitasi Perizinan dan koordinasi dalam Pengembangan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Provinsi;	Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara;

NO	RENCANA PEMBANGUNAN		KABUPATEN/KOTA
9	Kereta Api Rantau Prapat – Kota Pinang	• Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rantau • Prapat – Kota Pinang; • Pembangunan perlintasan sebidang di ruas jalan Provinsi; • Fasilitasi Perizinan dan koordinasi dalam Pengembangan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan Provinsi;	Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
D.	**SEKTOR KAWASAN**		
10	Kawasan Industri Kuala Tanjung	• Pengembangan kawasan permukiman terpadu di sekitar kawasan industri; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan industri; • Pengembangan industri pendukung kawasan industri strategis nasional; • Fasilitasi pendukung pengembangan kawasan industri kuala tanjung	Kabupaten Batubara
E.	**SEKTOR BENDUNGAN DAN IRIGASI**		
11	Bendungan Lausimeme	Pengendalian pemanfaatan DAS Ular, DAS Padang, DAS Percut, dan DAS Deli;	Kabupaten Deli Serdang
F.	**SEKTOR ENERGI**		
12	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas KEK Sei Mangkei)	• Fasilitasi Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi; • Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pembangunan Pipa Gas;	Kabupaten Simalungun
II	**PROGRAM STRATEGIS NASIONAL**		
13	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (DPSP Danau Toba)	• Pemantapan jaringan jalan Provinsi; • Penataan Perumahan/Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi; • Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba; • Pengendalian Pencemaran ke Badan Air Danau Toba; • Pengendalian Pemanfaatan DAS Asahan-Toba;	Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbahas, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Utara
14	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional / Food Estate	• Pemantapan Jaringan Jalan Provinsi; • Peningkatan Jaringan Irigasi Provinsi; • Konservasi Hutan di sekitar Food Estate; • Pembinaan Petani di daerah Food Estate; • Penyediaan Pupuk, Benih/Bibit Unggulan untuk Tanaman;	Kabupaten Humbahas, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Tengah
15	Program Pengembangan Jalan Akses *Exit Tol*	• ·Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan akses Exit tol • Pengendalian Pemanfaatan Lahan di sepanjang akses Exit Tol; • Pemantapan Jalan Provinsi yang menghubungkan Pusat Kegiatan khususnya Perekonomian	Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batubara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang

NO	RENCANA PEMBANGUNAN		KABUPATEN/KOTA
16	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	• Pengembangan kawasan permukiman terpadu di sekitar KEK Sei Mangkei; • Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KEK Sei Mangkei; • Pengembangan industri pendukung di sekitar KEK Sei Mangkei; • Fasilitasi pendukung pengembangan kawasan industri di sekitar KEK Sei Mangkei;	Kabupaten Simalungun

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2022 (Data diolah)

2.1.4.8 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda untuk menggambarkan BUMD yang berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 8 (delapan) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu :

1) PT. BANK SUMUT
   Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU yang pada tahun 1962 diubah menjadi Badan BUMD dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemprovsu dan Pemkab/Pemko.
2) PDAM TIRTANADI PROVSU
   Berdasarkan Perda Sumatera Utara No. 11 tahun 1979, status perusahaan diubah menjadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 1991 PDAM Tirtanadi ditunjuk sebagai operator sistem pengelolaan air limbah Kota Medan.
3) PD. PERKEBUNAN / PT. PSU
   PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu badan usaha milik daerah Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979.
4) PD. PERHOTELAN / PT. DIRGA SURYA
   PT. Dhirga Surya dibentuk berdasarkan Perda Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan bentuk PD. Perhotelan Provinsi Sumatera utara menjadi PT. Dhirga Surya.
5) PT. KIM PERSERO
   PT. KIM (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan Kawasan Industri. yang didirikan pada 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60%, Pemprovsu 30%, dan Pemerintah Kota Medan 10%
6) PT. PEMBANGUNAN PRASARANA (PT. PPSU)
   PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 30 Agustus 2007.
7) PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
   Merupakan perusahaan asuransi swasta nasional, yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1989. Moto ASKRIDA adalah “Mitra dalam Usaha Pelindung dalam Duka” dengan menawarkan solusi dalam bentuk perlindungan asuransi yang lengkap dan cerdas.
8) PD. ANEKA INDUSTRI BARANG DAN JASA / PT.AIJ
   Perusahaan Daerah Aneka industri jasa Medan didirikan pada tahun 1985 berdasarkan Peraturan Daerah PERDA No. 26 tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PD Aneka Industri

dan Jasa Provinsi Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 539.22-1435 tanggal 16 Oktober 1985.

Terhitung tahun 2015 s/d Juni 2022 total penyertaan modal Pemprovsu kepada BUMD mencapai Rp. 2,9 Triliun, namun deviden yang diterima masih lebih kecil atau sejumlah Rp. 1,7 Triliun. Hanya PT. Bank Sumut yang nilai devidennya melebihi penyertaan modal. Secara sederhana dapat dilihat jumlah penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemprovsu masih lebih besar dibanding deviden yang diperoleh, Pendapatan deviden yang diterima s/d saat ini ± 74,62% dari total nilai investasi. Investasi pada BUMD diharapkan tidak hanya mengembalikan penyertaan modal tetapi dapat mengembangkan sumber daya sehingga mewujudkan kemandirian BUMD dan mendongkrak kemandirian fiskal daerah. Peningkatan Kinerja BUMD untuk dapat memaksimalkan kontribusinya dalam pembangunan darah khususnya untuk peningkatan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan ke depannya BUMD harus banyak melakukan *improvement* dan memiliki strategi serta inovasi perbaikan agar dapat tumbuh dan berkelanjutan.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023 DAN REALISASI PRPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Sesuai Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021), terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Makro (IKM) dengan capaian pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.94
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Realisasi Tw IV Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00-6,00	4,94
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,25-72,75	75,13
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,80-7,80	8,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,30-5,30	5,89
5	Indeks Gini	Poin	0,309	0,309
6	Laju Inflasi	Persen	2,00	2,25
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*	Juta Ton CO2eq	35,55	29,05

Keterangan :
*) *Hasil Evaluasi RKPD TW IV Tahun 2023*

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang dirilis BPS per November 2023 secara (YoY) tumbuh sebesar 4,94 persen (YoY). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,41 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,72 persen.

Kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2023, Ekonomi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,39 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,96 persen.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara Tahun 2023 mencapai 75,13 meningkat 0,62 (0,83 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (74,51). Peningkatan IPM Sumatera Utara 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,67 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,31 menjadi 13,48 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun, dari 9,71 tahun menjadi 9,82 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 201 ribu rupiah (1,85 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

3. Persentase Kemiskinan

Maret 2023 Garis kemiskinan Sumatera Utara sebesar Rp.602.999, per kapita per bulan. Garis Kemiskinan untuk daerah perkotaan Rp.626.782,- dan pedesaan Rp.573.500,- per kapita per bulan. Penduduk miskin Sumatera Utara mencapai 8,15 persen, jika dibandingkan Maret tahun 2022 sebesar 8,42 persen atau menurun 0,27 poin persen. Capai ini juga lebih baik daripada Nasional yang tercatat sebesar 9,36% pada bulan Maret Tahun 2023. Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 1,240 juta orang, turun 22 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 28 ribu orang terhadap Maret 2022.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,89 persen, turun sebesar 0,27 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pendidikan tertinggi SMA

merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 8,21 persen. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 8,02 juta orang, naik 352 ribu orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,53 persen poin.

Penduduk yang bekerja sebanyak 7,55 juta orang, naik sebanyak 353 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (137 ribu orang). Sebanyak 3,13 juta orang (41,48 persen) bekerja pada kegiatan Formal, naik 0,55 persen poin dibanding Agustus 2022. Persentase Setengah pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin sedangkan persentase Pekerja paruh waktu mengalami kenaikan sebesar 1,93 persen poin dibandingkan Agustus 2022.

5. Indeks Gini

Maret 2023, Rasio Gini Sumatera Utara sebesar 0,309 menurun 0,003 poin dibandingkan Maret 2022. Tingkat ketimpangan pendapatan Sumatera Utara selalu di bawah nasional dalam kurun 5 tahun terakhir. Kondisi Maret 2023, Rasio Gini 2023 sebesar 0,309 paling rendah di Sumatera Utara dalam kurun 7 tahun terakhir.

6. Laju Inflasi

Pada Desember 2023 terjadi inflasi *year on year* (YoY) gabungan lima kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 2,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,30. Dari lima kota IHK di Sumatera Utara, inflasi YoY tertinggi terjadi di Padangsidimpuan sebesar 2,95 persen dengan IHK sebesar 119,05 dan terendah terjadi di Medan sebesar 2,19 persen dengan IHK sebesar 114,84.

Inflasi YoY terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,02 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,92 persen; kelompok transportasi sebesar 1,32 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,64 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,75 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,73 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi YoY pada Desember 2023, antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, akademi/perguruan tinggi, gula pasir, emas perhiasan, dan angkutan udara.

Tingkat inflasi *month to month* (mtm) Desember 2023 sebesar 0,57 persen dan tingkat inflasi *year to date* (ytd) Desember 2023 sebesar 2,25 persen.

7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Utara tentang pembangunan rendah karbon antara lain Program Kampung Iklim, Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Daerah, dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam penerapan 3R. Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 25,16 (ribu ton CO2e).

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan

Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.95
Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara
Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi Tw IV
Misi 1:	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;							
Misi 3:	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri							
1	Indeks Pendidikan	Poin	68,65-69,15	68,79	68,75-69,25	69,34	68,85-69,35	69,34*
2	Indeks Kesehatan	Poin	75,65-76,15	75,74	75,70-76,20	76,32	75,75-76,25	76,32*
3	PDRB Per kapita (ADHB)	Juta (Rp)	57	57,57	59	63,19	61	63,19*
4	Indeks Infrastruktur	Poin	0,7	0,74	0,74	0,76	0,79	0,76*
Misi 2:	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;							
5	Indeks Demokrasi	Poin	65,25	77,6	65,5	N/A	65,75	66,33
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	70 / BB	62,07/B	70.00 / BB	66,87/B	(75.00) BB	70/BB
Misi 4:	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia							
7	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	Persen	91	96,51	92	92	93	83,51
Misi 5:	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab							
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,02	71,15	69,2	74,11	69,38	74,11*

2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan target tersebut bersumber dari PRPJMD Perubahan Tahun 2019-2023.

Capaian realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III meskipun sebahagian masih menggunakan data terakhir yang diterbitkan tahun sebelumnya mengingat tidak semua data indikator kinerja Perangkat Daerah dirilis setiap triwulanan. Berikut capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel. 2.96
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara s/d Triwulan IV Tahun 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,00-6,00	5.01	100.20	5,00-6,00	BPS
2	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	61	63,19*	103.28	61	BPS
3	PDRB Per Kapita (ADHK 2010)	Juta Rupiah	40	37*	92.5	40	BPS
4	PDRB menurut Pengeluaran	Rupiah	1,484,869	602,236	12,044,719	1,484,869	BPS
5	Laju Inflasi	Persen	2	2.25	112.50	2.00	BPS
6	Indeks Gini	Poin	0.309	0.309	100.00	0.309	BPS
	Indeks Ketimpangan Regional	Poin	0.556	0,558	100,36	0.556	
7	Persentase Kemiskinan	Persen	8.80 - 7.80	8.15	104.49	8.80 - 7.80	BPS
8	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1,275,000.00	1,239,071	97.18	1,275,000	BPS
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,25 – 72,75	75.13	103.27	72,25 – 72,75	BPS
10	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35	70,18	101,93	68,85-69,35	
11	Indeks Kesehatan	Poin	75,65-76,15	82,57	109	75,75-76,25	Dinas Kesehatan
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.81	91,06*	100,28	90.81	Dinas P3AKB
13	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	95.75	69,33*	72,41	95.75	Dinas P3AKB
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.96	9.82	98.59	9.96	Dinas Pendidikan
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.48	100.15	13.46	Dinas Pendidikan
16	APK SM Sederajat	Persen	100	105	105.07	100	Dinas Pendidikan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
17	APM SM Sederajat	Persen	83.61	71.72	85.78	83.61	Dinas Pendidikan
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.50	73.67	106.00	69.50	Dinas Kesehatan
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75.12	71.06	94.60	75.12	Dinas Ketenagakerjaan
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,30-5,30	5.89	111.13	6,30-5,30	Dinas Ketenagakerjaan
21	Jumlah Penganggur	Jiwa	350.000-400.000	472000	118.00	350.000-400.000	Dinas Ketenagakerjaan
22	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Persen	8	8	100.00	8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Persen	100	92.31	92.31	100	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
24	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlet Pelajar)	Persen	75.07	51.67	68.83	75.07	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	99.01	100	101.00	99.01	Dinas Pendidikan
2	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	61.30	54.3	88.58	61.3	Dinas Pendidikan
3	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	95.62	100	104.58	95.62	Dinas Pendidikan
4	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	45.50	49.77	109.38	45.5	Dinas Pendidikan
5	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	2.20	3.60	163.64	2.2	Dinas Kesehatan
6	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	12.20	10.10	82.79	12.20	Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	67.39	72.82	108.06	67.39	Dinas Kesehatan
8	Prevalensi Stunting	Persen	26.50	21,10	79,62	26.5	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9	Capaian Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	42.00	70	166.67	42.0	UPTDK. RS. Jiwa Prof.Dr. Muhammad Illdrem Provsu
10	Capaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Jiwa	Persen	85.00	95.51	112.36	85.0	UPTDK RS. Jiwa Prof.Dr. Muhammad Illdrem Provsu
11	Persentase Bed Occupancy Rate BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	65.00	79.00	121.54	65	UPTDK RSU Haji Medan
12	Length Of Stay (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	5.00	5.00	100.00	5	UPTDK RSU Haji Medan
13	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit	Persen	70.00	1.60	2.29	70	Dinas Kesehatan
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	90.00	85.20	94.67	90	UPTDK RSU Haji Medan
15	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	85.08	76.5	89.92	85.08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	91.26	83.45	91.44	91.26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	23.23	16.52	71.11	23.23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	64.75	58.62	90.53	64.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Rasio Layanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	62.92	59.77	94.99	62.92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Persentase Kapasitas Layanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	65.15	63.77	97.88	65.15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	50.24	N/A	N/A	50.24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
22	Akses Rumah Layak Huni	Persen	68.98	70.95	102.86	68.98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Presentasi Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	18.52	18.52	100.00	18.52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	100.00	N/A	N/A	100.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97.00	97.00	100.00	97.00	Satuan Polisi Pamong Praja
26	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75.00	75.00	100.00	75.00	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Jumlah Pelopor Pemilih Cerdas	Orang	550.00	800	145.45	2025	Bakesbangpol
28	Jumlah Pembinaan Ormas Aktif	Jumlah Ormas	50.00	112	224.00	160	Bakesbangpol
29	Menahan Laju Angka Prevalensi pengguna narkoba di Sumut	Persentase	5.70	proses	N/A	5.7	Bakesbangpol
30	Perbaikan Peringkat Laporan Rencana Aksi	Peringkat Provinsi	7.00	proses	N/A	7	Bakesbangpol
31	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Orang	1,300.00	2160	166.15	5235	Bakesbangpol
32	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	33.00	33	100.00	33	BPBD
33	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab/Kota	3.00	4	133.33	3	BPBD
34	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	Kab/Kota	7	5	71.43	0	BPBD
35	Indeks Resiko Bencana	Poin	143.50	140.73	140.73	143.5	BPBD
36	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0.34	0.03	9.97	0.34	Dinas Ketenagakerjaan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
37	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanis melayanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	17.11	60.25	352.13	17.11	Dinas Ketenagakerjaan
38	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	7.80	11.55	148.05	7.8	Dinas Ketenagakerjaan
39	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	50.73	67.54	133.14	50.73	Dinas Ketenagakerjaan
40	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	Persen	100.00	N/A	N/A	100	Dinas P3AKB
41	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	4/10.0000	N/A	N/A	4/100.000	Dinas P3AKB
42	Rasio kekerasan terhadap Anak	/10.000	1/10.000	N/A	N/A	1/10.000	Dinas P3AKB
43	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	Persen	100%	N/A	N/A	100	Dinas P3AKB
44	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92.5	N/A	N/A	92.5	Dinas Pekebunan dan Peternakan / DLHK
45	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	116.81	94.66	81.04	116.81	BRS Februari 2023
46	Produksi Daging (ton)	Ton	228,045.21	277,221.71	121.56	228,045.21	Dinas Pekebunan dan Peternakan
47	Produksi Telur (ton)	Ton	491,656	564,676.86	114.85	491,656	Disbunnak
48	Produksi susu (ton)	Ton	5,386.00	9,913.29	184.06	5,386.00	Disbunnak

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.38	72.80	104.93	69.38	Dinas LH dan Kehutanan
50	Indeks Kualitas Udara	poin	87.29	90.90	104.14	87.29	Dinas LH dan Kehutanan
51	Indeks Kualitas Air	poin	53.91	60.27	111.80	53.91	Dinas LH dan Kehutanan
52	Indeks Kualitas Lahan	poin	48.03	49.77	103.62	48.03	Dinas LH dan Kehutanan
53	Indeks Kualitas air laut	poin	73.74	68.56	92.98	73.74	Dinas LH dan Kehutanan
54	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	35.55	29,05	81,72	35.55	Dinas LH dan Kehutanan
55	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	97	86.18	88.85	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil
56	Persentase Cakupan Perekaman dan Kepemilikan KTP-El	Persen	99.2	93.0	93.71	99.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
57	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	98	91	92.40	98	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
58	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100.00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
59	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya di laporkan	Persen	100	100	100.00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
60	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semu individu yang perceraiannya di laporkan	Persen	100	100	100.00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
61	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Admin duk	Persen	50	39	77.00	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
62	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	90	100.00	111.11	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
63	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	3	3	100.00	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
64	Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase	90	90	100.00	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
65	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	58	58.00	100.00	58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
66	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	32	35.57	111.16	32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
67	Jumlah BUMDes Maju / Program administrasi pemerintahan desa	Jumlah	60	28	46.67	60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
68	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	15	72	480.00	15	Dinas PemberdayaanMasyarakat dan DesaKependudukan dan Catatan Sipil
69	*Total Fertility Rate (TFR)*	-	2.85	2,39*	83,86	2.85	Dinas P3AKB
70	Persentase PemakaianKontrasepsi Modern/Modern *Contraceptive Prevalence* (MCPR)	Persen	60	56,68*	94,47	60	Dinas P3AKB
71	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	Persen	12.4	18,48*	149,03	12.4	Dinas P3AKB
72	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	91.86	70.24	76.46	91.86	Dinas Perhubungan
73	Persentase Konektivitas SimpulAngkutan Jalan	Persen	100	31	30.77	100	Dinas Perhubungan
74	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	Persen	91.71	92	100.00	91.71	Dinas Perhubungan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
75	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	Persen	92.5	93	100.00	92.5	Dinas Perhubungan
76	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persen	92	100.00	108.70	92	Dinas Komunikasi danInformatika
77	Rasio sistem pelayanan berbasisOnline	Persen	75	92.80	123.73	75	Dinas Komunikasi danInformatika
78	Pertambahan wirausaha baru(Mikro, Kecil dan Menengah)	JumlahUMKM	300	315	105.00	300	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
79	Persentase PeningkatanPenjualan Produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	Persen	3.0	59.77	1,992.33	3.0	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
80	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasisarana usahanya	Persen	3.0	49.36	1,645.33	3.0	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
81	Persentase koperasi aktif yangmengakses permodalan	Persen	3.0	0.00	-	3.0	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
82	Persentase jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yangmendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal danBadan Pemeriksa Obat dan Makanan	JumlahUMKM	30	0	-	30	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
83	Persentase Perolehan SertifikatNomor Induk Koperasi	Persen	40	28.87	72.18	40	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
84	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Persen	40	25.75	64.38	40	Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah
85	Investor PMDN	Investor	236.00	17.278	17.278	236	Dinas Penanaman Modal & PelayananTerpadu Satu Pintu

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
86	Investor PMA	Investor	377.00	3.036	3.036	359	Dinas Penanaman Modal & PelayananTerpadu Satu Pintu
87	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	20.58	21,57	21,57	20.58	Dinas Penanaman Modal & PelayananTerpadu Satu Pintu
88	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	17.85	17,48	17,48	17.85	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
89	Jumlah Tenaga Kerja IndonesiaPMDN	Orang	14.97	67.373	67.373	14.970	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
90	Jumlah Tenaga Kerja IndonesiaPMA	Orang	7.74	8.857	8.857	7.743	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
91	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	22.00	-5,31	-5,31	22.00	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
92	Persentase Organisasi Pemudayang Aktif	Persen	49.50	23.15	46.77	49.50	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
93	Persentase Pembinaan CabangOlahraga Berprestasi	Persen	100.00	92.31	92.31	100.00	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
94	Persentase Pembinaan AtletMuda (Atlet Pelajar)	Persen	75.07	51.67	68.83	75.07	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
95	Data Statistik Sektoral	Persen	77	100.00	129.87	77	Dinas Komunikasi danInformatika
96	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah/ Persentase Perangkat Daerah yang memahami persandian dan keamanan Informasi	Persen	50	100.00	200.00	50	Dinas Komunikasi danInformatika
97	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	8	8	100.00	8	Dinas Kebudayaan,pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
98	Jumlah Cagar Budaya yangdilestarikan	Objek	9	10	111.11	9	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
99	JumlahCagar Budaya yangditetapkan	Objek	20	14	70.00	20	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
100	Indeks Pembangunan LiterasiMasyarakat	Poin	16.5	16.5	100.00	16.5	Dinas Perpustakaandan Arsip
101	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	50	50	100.00	50	Dinas Perpustakaandan Arsip
102	Peningkatan SDM PengelolaKearsipan	Orang	103	103	100.00	103	Dinas Perpustakaandan Arsip
103	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum danTransportasi Pergudangan)	Persen	7.18	3.83	53.34	7.18	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
104	Jumlah Kunjungan wisatawanmancanegara	Orang	200,000	178,556	89.28	1,500	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
105	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1.5	1.51	100.67	1.5	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
106	JumlahDestinasi Pariwisatayang dikembangkan	DPP	12	10	83.33	12	Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
107	Produksi Tanaman Pangan : Padi(ton GKG)	Ton GKG	4,064,705.00	4049438.00	99.62	4,064,705	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
108	Produksi Tanaman Pangan : Jagung(ton pipilan kering)	Ton pipilankering	1,706,549	1,898,955.00	111.27	1,706,549	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
109	Produksi Tanaman Pangan : Kedelai(ton)	Ton	4,244	15,693.00	369.77	4,244	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
110	Produktivitas Tanaman Pangan :Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5.25	5.32	101.33	5.25	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
111	Produktivitas Tanaman Pangan:Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6.38	6.23	97.65	6.38	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan danHortikultura
112	Produktivitas Tanaman Pangan :Kedelai (ton/ha)	Ton/Ha	1.58	1.59	100.63	1.58	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
113	Produksi Tanaman Hortikultura :Bawang Merah (ton)	Ton	18,675	65.53	0.35	18,675	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
114	Produksi Tanaman Hortikultura :Cabai (ton)	Ton	190,011	205.96	0.11	190,011	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
115	Produksi Tanaman Hortikultura :Sayur-sayuran (ton)	Ton	1,039,041	1,232,583.00	118.63	1,039,041	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
116	Produksi Tanaman Hortikultura :Buah - buahan (ton)	Ton	1,233,024	1,547,654.00	125.52	1,233,024	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
117	Produktivitas Tanaman Hortikultura :Bawang Merah (ton)	Ton	8.28	15.21	183.70	8.28	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
118	Produktivitas Tanaman Hortikultura :Cabai (ton)	Ton	10.36	11.54	111.39	10.36	Dinas KetahananPangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
119	Persentase peningkatan produksitanaman perkebunan rakyat (PR)(%/tahun)	%	3.00%	1.06%	35.33	3.00%	Dinas Pekebunan danPeternakan
120	Total Produksi Hasil Perkebunan	Ton	8,422,484.98	8,459,681.19	100.44	8,422,484.98	Dinas Pekebunan danPeternakan
121	Produksi Hasil Perkebunan KelapaSawit (ton)	Ton	7,788,108.75	7,873,627.27	101.10	7,788,108.75	Dinas Pekebunan danPeternakan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
122	Produksi Hasil Perkebunan Karet(ton)	Ton	326,928.00	310,100.00	94.85	326,928.00	Dinas Pekebunan danPeternakan
123	Produksi Hasil Perkebunan KopiArabika (ton)	Ton	83,654.39	77,480.00	92.62	83,654.39	Dinas Pekebunan danPeternakan
124	Produksi Hasil Perkebunan KopiRobusta (ton)	Ton	14,845.52	10,400.00	70.05	14,845.52	Dinas Pekebunan danPeternakan
125	Produksi Hasil Perkebunan Kelapa(ton)	Ton	109,300.38	102,387.45	93.68	109,300.38	Dinas Pekebunan danPeternakan
126	Produksi Hasil Perkebunan Kakao(ton)	Ton	40,321.00	36,592.00	90.75	40,321.00	Dinas Pekebunan danPeternakan
127	Produksi Hasil Perkebunan Komoditi perkebunan lainnya (ton)	Ton	59,326.94	40,094.47	67.58	59,326.94	Dinas Pekebunan danPeternakan
128	Laju pertumbuhan Produktivitas sektor perkebunan (%)	Persen	2.22%	1.06%	47.75	2.22%	Dinas Pekebunan danPeternakan
129	NTP Perkebunan	Indeks	101.01	166.53	164.86	101.01	Dinas Pekebunan danPeternakan
130	Kontribusi Sub Sektor PerkebunanTerhadap PDRB	Persen	10.78%	10.78%	100.00	10.78%	Dinas Pekebunan danPeternakan
131	Penurunan Kerusakan KawasanHutan (Ha)	Ha	56,500	54,349.96	96.19	56,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
132	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	275,000	271,056.14	98.57	275,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
133	Kontribusi Sektor KehutananTerhadap PDRB (%)	Persen	0.88	0.72	81.82	0.88	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
134	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	100	99.99	100	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
135	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	100	99	98.89	100	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
136	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	86.96	64.12	73.74	86.96	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
137	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	3.81	5.43	142.52	3.81	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
138	Ekspor Non Migas	(Juta U$)	*8,190.344*	*9,678.849*	118.17	*8,190.344*	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
139	Laju Pertumbuhan Sektor IndustriTerhadap PDRB ADHK	Persen	1.39	3.54	254.68	1.39	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
140	Pertumbuhan Industri Besar danSedang	Persen	3.17	N/A	N/A	3.17	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
141	Pertumbuhan Industri Mikro danKecil	Persen	8.82	N/A	N/A	8.82	Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energidan Sumber Daya Mineral
142	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/kap/tahun	49.79	51.3	103.07	49.79	Dinas Kelautan danPerikanan
143	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasarharga konstan sub sektor perikanan	Persen	7.2	7.2	100.00	7.2	Dinas Kelautan danPerikanan
144	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	676,399.89	701,341.21	103.69	676,399.89	Dinas Kelautan danPerikanan
145	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	459,403.89	482,343.21	104.99	459,403.89	Dinas Kelautan danPerikanan
146	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	216,996	218,998	100.92	216,996	Dinas Kelautan danPerikanan
147	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	49.79	51.32	103.07	49.79	Dinas Kelautan danPerikanan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
148	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	104	108.36	104.19	104	Dinas Kelautan danPerikanan
149	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	105	97.30	92.67	105	Dinas Kelautan danPerikanan
150	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	Ha	165,000	166,168	100.71	25,000	Dinas Kelautan danPerikanan
151	Rehabilitasi Ekosistem TerumbuKarang (m^2)	m^2	102,031	102,031	100.00	102,031	Dinas Kelautan danPerikanan
152	Rehabilitasi Ekosistem Mangrove(Ha)	Ha	50	51	102.00	45	Dinas Kelautan danPerikanan
153	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	84	95	113.10	84	Bappelitbang
154	Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan kedalam APBD	Persen	100	100	100.00	100	Bappelitbang
155	Opini BPK Terhadap LaporanKeuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	WTP	Badan Keuangan danAset Daerah
156	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan danAset Daerah
157	Penyusunan LaporanPertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Keuangan danAset Daerah
158	Persentase tanah milik pemprovsuyang disertifikasi	23.68	84.42	22.84	27.06	84.42	Badan Keuangan danAset Daerah
159	Persentase laporan Aset daerahyang disusun	Persen	100	100	100.00	100	Badan Keuangan danAset Daerah
160	Persentase SK Gubsu atas evaluasiAPBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Persen	100	100	100.00	100	Badan Keuangan danAset Daerah
161	Persentase PAD TerhadapPendapatan	Persen	57	56.82	99.68		Badan PendapatanDaerah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
162	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	11.66%	-1.47%	(12.61)	11.66%	Badan PendapatanDaerah
163	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	1.20%	12.64%	1,053.33	1.20%	Badan PendapatanDaerah
164	Persentase Kenaikan PenerimaanPajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	2%	-27.80%	(1,390.00)	2%	Badan PendapatanDaerah
165	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	10.80%	-2.14%	(19.81)	10.80%	Badan PendapatanDaerah
166	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jam	20	23.2	116.00	20 JP	Badan PengembanganSumber Daya Manusia
167	Persentase Pejabat ASN yang telahmengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	44.44%	83	18,751.13	44.44%	Badan PengembanganSumber Daya Manusia
168	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan FORMAL	Persen	45	106	236.36	41%	Badan PengembanganSumber Daya Manusia
169	Nilai Sistem Marit	Point	325	333.5	102.62	325	Badan Kepegawaian
170	Persentase Implementasi RencanaKelitbangan	Persen	20		300.00	20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
171	Persentase Pemanfaatan HasilKelitbangan	Persen	60	60	100.00	60	Badan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan
172	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan InovasiDaerah	Persen	57	57	100.00	35	Badan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan
173	Persentase Kebijakan Inovasi yangDiterapkan di Daerah	Persen	57	57	100.00	57	Badan PerencanaanPembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
174	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	N/A	N/A	WTP	Inspektorat
175	Persentase Perangkat Daerah yangnilai rata-rata evaluasi sakip ≥ B	%	100	97.62	97.62	100	Inspektorat
176	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	80	N/A	N/A	80	Inspektorat
177	Persentase Penyelesaian TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	%	100	100	100	100	Inspektorat
178	Level Maturitas SPIP PemerintahDaerah Provinsi Sumatera Utara	Level	Level 3,5	Level 3	85.71	Level 3,5	Inspektorat
179	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Level 3 plus	Level 3	100.00	Level 3 plus	Inspektorat
180	Pengaduan Masyarakat	%	75	83	110.67	75	Inspektorat
181	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	%	60	36	60.00	60	Inspektorat
182	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	90	90.97	101.08	90	Badan Penghubung
183	Persentase capaian tingkat kepuasanatas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100.00	100.00	100	Sekretariat DPRD
184	Persentase penyelesaian batasdaerah	Persen	100	100	100.00	100	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintah danOtonomi Daerah)
185	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	3.8	2.9	71.46	4.1	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintah danOtonomi Daerah)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
186	Persentase Kerjasama yangdifasilitasi	Persen	100	100	100.00	100	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintah danOtonomi Daerah)
187	Persentase Proposal Hibah yang ditindaklanjuti	Persen	80	87	108.75	80	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
188	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	80	96	120.0	80	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
189	Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi dan diinformasikan.	Persen	100	216	216.0	100	Sekretariat Daerah(Biro Hukum)
190	Persentase rancangan ProdukHukum Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	Persen	100	114	114.0	100	Sekretariat Daerah(Biro Hukum)
191	Persentase Penanganan perkarahukum dan perlindungan HAM	Persen	100	176	176.0	100	Sekretariat Daerah(Biro Hukum)
192	Persentase BUM DAN BLUD yangmemiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat		100	N/A	N/A		Biro Perekonomian
193	Persentase kebijakan peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	100	N/A	N/A	100	Biro Perekonomian
194	Persentase kebijakan yang diimplementasikan dalam rangkameningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Persen	100	100	100.0	100	Biro Perekonomian
195	Persentase Pelayanan PengadaanBarang dan Jasa	Persen	100	100	100.0	100	Sekretariat Daerah (Biro Pengadaan Barang dan Jasa)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
196	Terbitnya Peraturan/Kebijakanterkait Perjalanan Dinas dan Petunjuk Pelaksanaan KegiatanAPBD	Dokumen	100	N/A	N/A	100	Biro AdministrasiPembangunan
197	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan anggaran APBD PerangkatDaerah di Lingkungan Provsu	Persen	100	N/A	N/A	100	Biro AdministrasiPembangunan
198	Nilai Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	72,00 (BB)	68.85	95,62	72,00 (BB)	Sekretariat Daerah(Biro Organisasi)
199	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	4,2 (A-)	3.51	83,57	5 (A-')	Sekretariat Daerah(Biro Organisasi)
200	Persentase Penataan KelembagaanPerangkat Daerah	Persen	100.00	100	100.0	100%	Sekretariat Daerah(Biro Organisasi)
201	Nilai capaian pelaporan kinerja	Bobot	15	11	73.3	15	Sekretariat Daerah(Biro Organisasi)
202	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	100	100	100.00	100%	Sekretariat Daerah(Biro Umum)
203	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mes Pemprovsu	Persen	100	92.39	92.4	100%	Sekretariat Daerah(Biro Umum)
204	Persentase Bahan Materi Pimpinanyang disiapkan	Persen	100	100	100.0	100%	Sekretariat Daerah(Biro Administrasi Pimpinan)
205	Persentase pelayanan kedinasanpimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100.0	100%	Sekretariat Daerah(Biro Administrasi Pimpinan)
206	Meningkatkan peran serta perangkat daerah dalam pembangunan Provinsi SumateraUtara di dalam dan luar negeri.	Persen	100	0%	N/A	100%	Biro AdministrasiPembangunan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
207	Mewujudkan pengendalian pembangunan agar tepat tujuan dantepat sasaran.	Persen	100	0%	N/A	100%	Biro AdministrasiPembangunan
208	Meningkatkan pengadaan barang/jasa pemerintah di Provsu.	Jumlah	100	0%	N/A	100%	Biro AdministrasiPembangunan
209	Jumlah kebijakan yang dirumuskandan digunakan dalam PelaksanaanAdministrasi Pembangunan.	dokumen	20	20	100.0	100%	Sekretariat Daerah(Biro Administrasi Pembangunan)
210	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Melalui Aplikasi.	Persen	98	95	96.9	100%	Sekretariat Daerah(Biro Administrasi Pembangunan)
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Persentase Pengeluaran KonsumsiNon Pangan Per kapita	Persen	49.44			50.64	BRS September 2023
2	NTP	Poin	111.41	110.35	99.05	111.41	BRS Februari 2023
3	NTP Tanaman Pangan	Persen	100.82	100.68	99.86	100.82	BRS Februari 2023
4	NTP Tanaman Perkebunan	Persen	101.01	167	164.86	101.01	Dinas Perkebunan danPeternakan
5	NTP Hortikultura	Persen	101.2	101.06	99.86	101.20	BRS Februari 2023
6	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	104.00	106	101.90	101.20	Dinas Kelautan danPerikanan
7	NTP Peternakan	Persen	116.81	95	81.04	116.81	Dinas Perkebunan danPeternakan
8	Indeks Infrastruktur	Poin	0.78	0,75	96,15	0.78	BAPELITBANG
9	Persentase Jembatan DalamKondisi Baik	Persen	91.26	88.77	97.27	83.71	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
10	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	97.98	97.98	100.00	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
11	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayanioleh Jaringan Irigasi	Persen	60.34	60	99.06	60.34	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
12	Akses Rumah Layak Huni	Persen	68.98	70.95	102.86	68.98	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman
13	Luas Kawasan Kumuh Ditangani	Persen	18.52	18.52	100.00	54.12	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman
14	Persentase satuan perumahanyang sudah dilengkapi PSU	Persen	100.00	0.00	0.00	100.00	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman
15	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1,900	2,086	2.068	2.068	Dinas Penanaman Modal & PelayananTerpadu Satu Pintu
16	Penduduk Usia Kerja	Ribu Jiwa	10,703		0.00	10,703	BPS
17	Persentase Guru SMA/LBberkualifikasi Akademik S1/D4	Persen	97.86	97.57	99.70	97.86	Dinas Pendidikan
18	Persentase Guru SMA/LBbersertifikasi	Persen	59.2	57.7	97.47	59.2	Dinas Pendidikan
19	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	Persen	50.2	47.8	95.22	50.2	Dinas Pendidikan
20	Persentase Guru SMKbersertifikasi	Persen	96.28	95.76	99.46	96.28	Dinas Pendidikan
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	(70.00) BB	N/A	N/A	(70.00) BB	Inspektorat/BiroOrganisasi
22	Indeks Demokrasi IndonesiaSumatra Utara	Persen	66.33	masih dalamproses	N/A	66.33	Badan Kesatuan Bangsadan Politik

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
23	Skor Kebebasan Sipil	Skor	73.89	masih dalamproses	N/A	73.89	Badan Kesatuan Bangsadan Politik
24	Indeks Kerukunan UmatBeragama	Persen	86.5	masih dalamproses	N/A	86.5	Badan Kesatuan Bangsadan Politik
25	Indeks Resiko Bencana Daerah	Poin	143.5	140.7	98.07	143.5	BNPB
D	SPM						
1	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasidalam pendidikan menengah	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Pendidikan
2	Jumlah Warga Negara Usia 4 –18tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Pendidikan
3	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Kesehatan
4	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Kesehatan
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minumcurah lintas kabupaten/kota	Persen	100	63.77	64	100	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Persen	100	N/A	N/A	100	Indikator SPM

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ JURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU PD/IKK)	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Realisasi s/d TW IV	CAPAIAN REALISASI KINERJA	TARGET KONDISI AKHIR TAHUN RPJMD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumahlayak huni	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman (SPM)
8	Jumlah Warga Negara yang terkenarelokasi akibat program PemerintahDaerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	N/A	N/A	100	Dinas Perumahan danKawasan Permukiman(SPM)
9	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat daripenegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Jiwa	7074	7200	102	100	Satuan Polisi PamongPraja
10	Persentase Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persen	100% (2034)	100%/2034	100	100% (2.025)	Dinas Sosial(SPM)
11	Persentase Keluarga Miskin yangmenerima Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Persen	1,18 % (15600)	0,37%/31680	100	100% (11010)	Dinas Sosial (SPM)

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di atas, dari total 269 indikator terdapat 108 indikator dalam kategori Tercapai/Melampaui (53 masih menggunakan data 2022), 138 indikator yang Belum Tercapai, dan 23 indikator yang NA atau belum dirilis oleh Perangkat Daerah pengampu indikator.

2.2.4 Capaian Kinerja Program dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berdasarkan pada capaian dari hasil masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara persentase target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.97
Capaian Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV TA. 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	**Sekretariat Daerah**		
1)	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93.30	97.41
2	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	100.00	96.71
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**96.71**	**96.90**
2)	Biro Kesejahteraan Rakyat		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	84.00	85.48
2	Program Kesejahteraan Rakyat	96.00	95.56
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***90.00***	***95.52***
3)	Biro Hukum		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.53	98.53
2	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	97.68	97.68
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***98.01***	***98.01***
4)	Biro Perekonomian		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	99.46
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	108.33	97.57
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**104.17**	**98.23**
5)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	91.38

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
2	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan BarangDan Jasa	100.00	94.45
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**100.00**	**94.15**
6)	Biro Administrasi Pembangunan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96.68	96.93
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	98.60	99.09
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***97.64***	***98.01***
7)	Biro Organisasi		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.69	99.69
2	Program Penataan Organisasi	95.76	95.76
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***63.25***	***97.72***
8)	Biro Umum		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.78	97.17
2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100.31	99.77
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***103.55***	***103.28***
9)	Biro Administrasi Pimpinan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99.21	98.67
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**99.21**	**98.67**
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	***94.73***	***97.83***
2	**Sekretariat DPRD**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	96.75
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95.40	98.02
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***97.70***	***97.59***
3	**Inspektorat**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	96.24
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100.00	97.22
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100.00	89.65
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	***96.16***
4	**Badan Kepegawaian**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	96.86
2	Program Kepegawaian Daerah	114.94	95.34
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***107.47***	***96.46***
5	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**		

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi	100.00	95.97
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	166.00	92.12
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	145.00	99.98
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	224.00	88.94
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	data di peroleh dari BNN namun tidak dilakukan penilaian oleh BNN	97.47
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	sedang dilakukan penilaian	98.03
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***105.00***	***99.50***
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.00	95.69
2	Program Penanggulangan Bencana	99.00	100.36
	Rata Rata Capaian Kinerja	***97.00***	***96.87***
7	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	90.84
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100.00	99.24
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	96.00	91.23
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***98.67***	***99.07***
8	**Badan Pendapatan Daerah**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	96.67
2	Program Pengelolaan keuangan Daerah	100.00	83.48
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.00	90.98
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**100.00**	**96.50**
9	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.52	96.98
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.00	96.81
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***99.26***	***97.93***
10	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	97.02

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100.00	96.79
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00	98.92
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100.00	99.70
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	**97.23**
11	**Badan Penghubung Daerah Provinsi**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.17	97.65
2	Program Pelayanan Penghubung	98.95	98.95
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***98.56***	***98.11***
12	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi	100.00	96.74
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	98.25	96.88
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100.00	97.37
4	Program Pembangunan Pengelolaan Persampahan Regional		-
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	100.00	99.00
6	Program Pengembangan Permukiman	100.00	99.46
7	Program Penataan Bangunan Gedung	100.00	99.81
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	97.50	97.71
9	Program Penyelenggaraan Jalan	66.00	43.33
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	97.50	90.34
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	98.90	92.65
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***95.82***	***54.70***
13	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	96.98
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	100.00	96.81
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	100.00	99.34
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	100.00	99.85
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	100.00	99.99
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100.12	84.90
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.00	89.85
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting	18.92	97.58
9	Program Pengembangan Ekspor	19.78	97.96
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	108.62	98.27
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75.00	98.09

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100.00	98.68
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100.00	96.47
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***77.48***	***97.93***
14	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	93.98
2	Program Pengembangan Kebudayaan	96.67	99.57
3	Program Pembinaan Sejarah	90.00	99.07
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.00	98.65
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00	89.51
6	Program Pemasaran Pariwisata	100.00	98.82
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	95.83	94.70
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisatadan Ekonomi Kreatif	100.00	97.54
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.00	98.87
10	Program Pengelolaan Permuseuman	100.00	98.26
	Rata-rata Capaian Kinerja	***98.25***	***96.23***
15	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	97.33
2	Program Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100.00	95.45
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	100.00	99.41
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100.00	98.78
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100.00	99.51
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.00	96.78
	Rata-rata Capaian Kinerja	**100.00**	**97.88**
16	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99.00	96.03
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100.00	95.81
3	Program Perlindungan Perempuan	100.00	82.81
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.00	99.51
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100.00	99.46
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100.00	98.21
7	Program Perlindungan Khusus Anak	100.00	90.90
8	Program Pengendalian Penduduk	100.00	97.62
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100.00	86.89
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100.00	89.08
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**99.90**	**95.34**

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
17	**Dinas Kesehatan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	97.93
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangandan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.18	98.66
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	95.08	85.90
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	99.05	91.43
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	94.43	89.21
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***95.35***	***98.12***
18	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**		
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan KetahananPangan Masyarakat	98.16	99.78
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100.00	98.84
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.00	100.00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	95.32
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	171.07	98.61
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	144.21	95.86
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100.29	99.80
8	Program Penyuluhan Pertanian	94.81	99.53
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***113.57***	***96.20***
19	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.87	97.87
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	99.43	99.43
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	97.89	97.89
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	97.36	97.36
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	96.37	96.37
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***97.78***	***98.42***
20	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	94.80
2	Program Pengembangan UMKM	2,137.00	98.15
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, UsahaKecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	108.47	98.00
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1,270.00	95.28
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	64.37	95.20
6	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	40.00	97.49
7	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	64.65	97.17

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***540.64***	***96.58***
21	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	95.36
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100.00	89.58
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.00	97.09
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.00	0.00
5	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	100.00	96.05
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	182.14	87.37
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukumadat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA	-	-
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	-	-
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100.00	81.23
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.00	91.12
11	Program Pengelolaan Persampahan	100.00	93.91
12	Program Pengelolaan Hutan	100.00	95.53
13	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	100.00	93.15
14	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100.00	97.72
15	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	100.00	79.61
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***85.48***	***95.41***
22	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProvinsi	91.56	93.32
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	93.50	93.11
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	98.93	98.93
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	99.27	99.27
5	Program Pendaftaran Penduduk	99.85	99.85
6	Program Pencatatan Sipil	99.49	99.49
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.12	95.12
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	93.50	93.50
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***96.63***	***96.60***
23	**Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.00	97.07
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100.00	91.92
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100.00	95.77

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.00	99.78
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***91.34***	**95.86**
24	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.70	96.95
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100.00	98.73
3	Program Promosi Penanaman Modal	125.00	97.25
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	258.00	99.90
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	115.61	98.78
6	Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	100.00	100.00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**132.49**	**97.17**
25	**Dinas Pendidikan**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.88	89.54
	Program Pengelolaan Pendidikan	96.13	21.78
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	98.75	98.28
	Rata-Rata Capaian Kinerja	**96.44**	**84.41**
26	**Dinas Perhubungan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.20	97.20
2	Program Pengelolaan Pelayaran	76.19	90.33
3	Program Pengelolaan Perkertaapian	98.61	97.21
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan	60.22	99.66
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***83.06***	***99.07***
27	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	97.73
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	149.58	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100.00	
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	110.34	99.11
5	Program Penyuluhan Pertanian	100.00	93.06
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	187.33	97.42
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	194.00	95.35
8	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	115.85	90.02
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***132.14***	***97.05***
28	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	98.88
2	Program Pembinaan Perpustakaan	100.00	96.67

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan NaskahKuno	76.00	69.59
4	Program Pengelolaan Arsip	100.00	98.31
5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100.00	99.50
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***95.20***	***95.94***
29	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	94.12
2	Program Pengembangan Perumahan	100.00	97.75
3	Program Kawasan Permukiman	100.00	98.29
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100.00	100.00
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0.00	0.00
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	***97.29***
30	**Dinas Sosial**		
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	97.00	96.68
2	Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan	70.00	69.50
3	Program Pemberdayaan sosial	85.00	84.29
4	Program Rehabilitasi Sosial	100.00	64.56
5	Program Perlindungan dan jaminan sosial	94.85	95.00
6	Program Penanganan Bencana	100.00	98.96
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	84.00	83.24
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***97.00***	***96.16***
31	**Dinas Ketenagakerjaan**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.44	96.53
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.97	93.90
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.97	93.33
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	352.13	83.41
5	Program Hubungan Industrial	148.05	99.57
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	133.14	82.64
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100.00	90.74
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***133.81***	**96.52**
32	**Satuan Polisi Pamong Praja**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	95.00
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	94.00
3	Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00	99.00

NO.	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	REALISASI KEUANGAN
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	***95.76***
33	**UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan**		
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pemerintah daerah	100.00	97.65
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00	98.28
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00	83.92
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	***97.97***
34	**UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00	97.65
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan PeroranganDan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00	98.28
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00	83.92
	Rata-Rata Capaian Kinerja	***100.00***	***97.74***
	Total Rata-rata Kinerja Program & Realisasi. Keuangan	**114.62**	**95.45**

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja program sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 secara rerataan kinerja program RKPD mencapai adalah 114.62 persen dan masuk dalam skala nilai peringkat kerja "Sangat Tinggi", sedangkan untuk capaian realisasi anggarannya sebesar 95.45 persen, masuk dalam kriteria realisasi "Sangat Tinggi". Kondisi ini memang menjadi tantangan di Triwulan IV tahun ini, maka perlu dilakukan pencemaran terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan pada tabel di bawah untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap triwulannya.

Tabel. 2.98
Peringkat Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	REALISASI KEUANGAN	PREDIKAT KINERJA KEUANGAN
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.50	ST
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.07	ST
3	Dinas Perhubungan	99.07	ST
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.42	ST
5	Dinas Kesehatan	98.12	ST
6	Badan Penghubung Daerah Provinsi	98.11	ST
7	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	97.97	ST
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.93	ST
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	97.93	ST
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	97.88	ST
11	Sekretariat Daerah	97.83	ST
12	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	97.74	ST
13	Sekretariat DPRD	97.59	ST
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	97.29	ST
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	97.23	ST
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.17	ST
17	Dinas Perkebunan dan Peternakan	97.05	ST
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.87	ST
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	96.60	ST
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	96.58	ST
21	Dinas Ketenagakerjaan	96.52	ST
22	Badan Pendapatan Daerah	96.50	ST
23	Badan Kepegawaian	96.46	ST
24	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96.23	ST
25	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	96.20	ST
26	Inspektorat	96.16	ST
27	Dinas Sosial	96.16	ST
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	95.94	ST
29	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	95.86	ST
30	Satuan Polisi Pamong Praja	95.76	ST
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95.41	ST
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	95.34	ST
33	Dinas Pendidikan	84.41	T
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54.70	R
	RATA-RATA KINERJA KEUANGAN	**95.52**	**ST**

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari 34 perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara 2 (dua) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja realisasi keuangan paling rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 54.70 persen dan Dinas Pendidikan capaian kinerja 84.41 persen.

Adapun 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja realisasi keuangan paling tinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 99.50 persen, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perhubungan mendapatkan dengan capaian kinerja keuangan yang sama yaitu 99.07 persen.

Tabel. 2.99

Peringkat Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA PROGRAM
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	540.64	ST
2	Dinas Ketenagakerjaan	133.81	ST
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132.49	ST
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	132.14	ST
5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113.57	ST
6	Badan Kepegawaian	107.47	ST
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.00	ST
8	Inspektorat	100.00	ST
9	Badan Pendapatan Daerah	100.00	ST
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	100.00	ST
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.00	ST
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00	ST
13	Satuan Polisi Pamong Praja	100.00	ST
14	UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	100.00	ST
15	UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	100.00	ST
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	99.90	ST
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.26	ST
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	98.67	ST
19	Badan Penghubung Daerah Provinsi	98.56	ST
20	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	98.25	ST
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	97.78	ST
22	Sekretariat DPRD	97.70	ST
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.00	ST
24	Dinas Sosial	97.00	ST
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	96.63	ST
26	Dinas Pendidikan	96.44	ST
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.82	ST
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95.42	ST
29	Dinas Kesehatan	95.35	ST
30	Dinas Perpustakaan dan Arsip	95.20	ST
31	Sekretariat Daerah	94.73	ST
32	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	91.34	ST
33	Dinas Perhubungan	83.06	T
34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	77.48	T
	RATA-RATA KINERJA PROGRAM	114.32	**ST**

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

Dari 34 perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja program paling bawah adalah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 77.48 Persen, Dinas Perhubungan sebesar 83.06 persen dan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar 91.34 persen.

Adapun 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja program paling Tinggi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 540.64 persen, Dinas Ketenagakerjaan sebesar 133.81 persen dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 132.49 persen.

2.2.5 Capaian Kegiatan Strategis Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam pembangunan lima tahunan (PRPJMD 2019-2023), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan dalam 8 (Delapan) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Delapan prioritas pembangunan dan Lima Puluh Empat Kegiatan Strategis Daerah tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah. Berikut capaian kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang dirangkum berdasarkan penyampaian laporan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, yaitu:

1. **Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan dilaksanakan,** Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan didukung oleh 11 (sebelas) Kegiatan Strategis Daerah (KSD), keseluruhan sudah dilaksanakan dengan rata-rata persentase kinerja 94,83 %. Rincian sebagai berikut :
   a. Dalam rangka pemenuhan akses pemerataan layanan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, dilaksanakan dengan Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus dengan rincian sebanyak 13 Unit Sekolah Baru (USB) dengan rincian 12 unit dilaksanakan dan 1 USB lanjutan (pembangunan dari tahun 2021 dan 2022) yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yaitu USB SMAN Plus Besitang Kabupaten Langkat (lanjutan), USB SMKN Bandar Kabupaten Simalungun, USB SMAN 1 Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, USB SMKN 1 Tinggi Raja Kabupaten Asahan, USB SMAN 1 Gunung Sitember Kabupaten Dairi, USB SMAN 3 Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, USB SMAN 2 Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, USB SMKN 1 Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, USB SMKN Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, USB SMKN Banjar Aur Kabupaten Mandailing Natal, USB SMAN 1 Penyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, USB SMKN 1 Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, USB SMAN Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, dan USB SMAN Lahomi Kabupaten Nias Barat. Laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV 2023 capaian kinerja program sebesar 92.31% sedangkan realisasi keuangan sebesar 93.20%.
   1 USB SMK NEGERI Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan gagal dikarenakan tidak ada yang memenuhi persyaratan tender. Tahun 2022 dibangun sebanyak 12 unit beroperasi sisa 1 unit.

b. Memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada Siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) jiwa, Data yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV sudah 100% selesai dilaksanakan.
c. Pembangunan (Operasional) kampung beasiswa *scholarships booth* beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan, Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Data yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV sudah 100% selesai dilaksanakan.
d. Telah dilakukan kerja sama *Link and Match* sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri melalui MoU dan MoA yang ditandatangani antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) MoU/MoA kerja sama. Data yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV sudah 100% selesai dilaksanakan.
e. Telah dilakukan Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi oleh 156 sekolah SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
f. Telah dilakukan *teaching factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi yang dilaksanakan oleh 156 sekolah SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
g. Telah melakukan MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama *Link and Match* antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 216 (Dua Ratus Enam Belas) MoU/MoA kerjasama, sudah selesai dilaksanakan pada Desember 2023 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
h. Telah membangun 5 (Lima) unit pojok baca di Kab/Kota (antara lain: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Nias Utara, Kota Sibolga dan Kota Padangsidimpuan) serta penyediaan Gerobak Baca sebanyak 2 (dua) unit yang akan dioperasionalkan di Kab. Langkat dan Kota Medan. Pemprovsu juga menerima bantuan penyediaan Gerobak Baca dari CSR Bank Sumut berupa 10 (sepuluh) unit Gerobak baca yang akan diberikan ke Kab. Tapanuli Selatan Kab. Batubara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kota Pematang Siantar Kab. Asahan, Kab. Nias, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
i. Telah dilaksanakan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan se-Sumatera Utara pada kegiatan expo vokasi di Gedung Serba Guna pada tanggal 22-23 Mei 2023, yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.
j. Telah dilakukan Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

k. Penguatan pembelajaran jarak jauh (*distance learning)* melalui metode *Training Of Trainer* (TOT), Laporan dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara, kegiatan dilakukan pada 4 angkatan yang langsung 2 angkatan dengan jumlah peserta 60 orang dan sudah dilakukan *E Learning* 883 Guru SMA/SMK dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.
l. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 50% dari target yang sudah ditetapkan.

2. **Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui Kegiatan Strategis Daerah yaitu :** Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan Strategis Daerah (KSD), keseluruhan sudah dilaksanakan dengan rata-rata persentase kinerja 100%, rincian sebagai berikut :
   a. Melakukan penanganan covid-19, dan kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan keluarnya KEPRES Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid 19 Tahun 2023, ditetapkan bulan 22 Juni 2023.
   b. Telah diselesai dilaksanakan Pembangunan Tower I RS. Haji Medan dengan *Grand Opening* di Februari 2024, Perangkat Daerah Pelaksana: Dinas PUPR Provsu dan UPT. RS Haji Medan.
   c. Pemberian makanan tambahan sebesar 105.944 jiwa diganti dengan kegiatan pemberian suplementasi gizi (susu energi tinggi) bagi ibu hamil dan Balita sebanyak 105.944 jiwa dalam rangka penurunan prevalensi Stunting. Perubahan ini disebabkan oleh terlambatnya terbit Petunjuk Teknis Tentang Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal oleh Kemenkes yang terbit pada tanggal 17 Mei 2023. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
   d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Ildrem sebanyak 100 bed. Laporan dari UPTDK. RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem dan sudah dilaksanakan *launching* Desember 2023.
   e. Melakukan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara realisasi sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada September 2023.
   f. Memberikan jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 220.035 jiwa (dua ratus dua puluh ribu tiga puluh lima) dan PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa pada 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
   g. Memberikan layanan kesehatan bergerak melalui penyediaan 3 (tiga) unit mobil medis Laporan Dinas Kesehatan Provsu sudah selesai tender dan sudah dilaksanakan serah terima barang oleh pejabat penerima pekerjaan.

3. **Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui**

kegiatan strategis daerah, yaitu : Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan didukung oleh 4 (empat) Kegiatan Strategis Daerah, secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan rata-rata persentase kinerja 96.07%, rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi kerjasama 10 sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan dengan Pelatihan berbasis kompetensi Target 160 orang sampai dengan TW IV target sudah tercapai 100%. fasilitasi pemagangan luar negeri target 700 orang sampai Triwulan IV realisasi 480 orang dengan capaian 68,57%, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan ESDM. Rata-rata kinerja sebesar 84,28%.
b. Melakukan fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran, laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yaitu: Bimbingan bagi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran melalui Sosialisasi/Fasilitasi Standarisasi UMKM dan IKM.
    - Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM Pangan dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 IKM;
    - Sosialisasi Pengurusan Izin Edar BPOM bagi IKM Pangan dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 50 IKM.
    - Tahun 2023 *Fast Track Digitalisasi* (FTD) 1000 KUMKM Bermartabat merupakan kegiatan yang berlangsung selama 5 bulan mulai bulan Maret – Juli yang dilaksanakan secara gratis atau tidak dipungut biaya apa pun. Acara ini di awali dengan *Soft launching Fast Track Digitalisasi* (FTD) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya secara resmi Acara ini dibuka *(Kick Off)* langsung Oleh Bapak Gubernur Edy Rahmayadi yang dilaksanakan pada Senin, 13 Maret 2023 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Program ini melatih, memfasilitasi *tools* digital bagi 1000 UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing KUMKM pada pemasaran produk melalui platform digital. Seluruh rangkaian acara fast track digitalisasi ini, di *Design* untuk memenuhi kebutuhan pelaku KUMKM untuk dapat memahami digitalisasi *mindset*, masuk dalam ekosistem digital (*on boarding* di *e- commerce*), mendapatkan fasilitasi tools digital sampai pada strategi-strategi untuk memenangkan pasar digital. Sehingga kegiatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa baik bagi Kami sebagai penyelenggara maupun KUMKM.
c. Pengembangan Sistem Operasional sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi dengan bursa kerja *Online* melalui pembangunan aplikasi SiLAPER; berapa *user* yang menggunakan aplikasi, sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
d. Melakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi, Laporan Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara sampai Triwulan IV tahun 2023 perkembangan sebagai berikut:
    - Terbitnya Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

pada tanggal 20 Juni 2023;

- Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4. **Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris:** Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris, melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan didukung oleh 5 (lima) Kegiatan Strategis Daerah. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan persentase kinerja 100%. Rincian sebagai berikut :
   a. Peningkatan Produksi daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi Masyarakat Sumut ditargetkan sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton, realisasi kinerja sebesar 15.902,82 (lima belas ribu sembilan ratus dua koma delapan puluh dua) ton. Data dukung yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sampai bulan Desember 2023 capaian kinerja 92,72%.
   b. Produksi daging kambing/domba dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor ditargetkan sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton, dengan realisasi kinerja sebesar 1.619,13 (seribu enam ratus sembilan belas koma tiga belas) ton atau 105,31% . Data realisasi berdasarkan data dukung yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sampai bulan Desember 2023.
   c. Mempertahankan Swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri di Provinsi Sumatera Utara. Data realisasi berdasarkan data dukung yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sampai bulan Desember tahun 2023,
      - Kebutuhan Beras di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.740.170 Ton dengan jumlah produksi sebesar 2.190.200 Ton, terdapat Surplus sebesar 450.030 Ton. Capaian kinerja 125.86 %
      - Target produksi Jagung tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara 1.740.170 Ton, dari target tersebut yang berhasil diproduksi sebesar 1.810.418 Ton sedangkan jumlah kebutuhan Masyarakat sebesar 1.304.210 Ton sehingga terdapat Surplus sebesar 506.208 Ton
   d. Peningkatan produksi cabai sampai dengan Triwulan IV sebesar 202.353 (dua ratus dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) ton.
      - dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri Target produksi bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton sampai Triwulan IV jumlah produksi sebesar 34.999 ton
      - Target produksi bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton dengan realisasi 15,4 ton.
   e. Meningkatkan produksi perikanan tangkap sebesar 482.343,21 Ton (empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga koma dua puluh satu) ton realisasi 358.335,03 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 218.998 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) ton realisasi 169.256,88 ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. **Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata.** Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata didukung oleh 6 (enam) Kegiatan Strategis Daerah. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan persentase kinerja 100%. Rincian sebagai berikut :
   a. Melakukan penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ; Mengembangkan kawasan pariwisata, laporan dari Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Sumatera Utara sampai Triwulan IV tahun 2023, sbb :
      - Ekowisata tangkahan, Bahorok/ bukit lawang – langkat, dengan penanganan kawasan pariwisata ada 21 Langkat 11 Madina 2 Paluta 1 Tapteng 1 Kepulauan Nias, sampai Desember Tahun 2023 telah membangun beberapa hal sbb :
        - Rambu Petunjuk Wisata di Kabupaten Langkat;
        - Gapura (Bukit Lawang-Bahorok)
        - Jalan Setapak (Bukit Lawang-Bahorok)
        - Kios Cinderamata (Bukit Lawang-Bahorok)
        - TIC (Bukit Lawang-Bahorok)
        - Toilet (Bukit Lawang-Bahorok)
        - Gapura (Tangkahan-Batang Serangan)
        - Jalan Setapak (Tangkahan-Batang Serangan)
        - Tempat Parkir(Tangkahan-Batang Serangan)
        - TIC (Tangkahan-Batang Serangan)
        - Toilet (Tangkahan-Batang Serangan)
      - Agrowisata ulu pungkut – Madina, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa : Proses Pembangunan Toilet dan Proses Pembangunan kios kuliner.
      - Wisata alam dan budaya - Kepulauan Nias, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa :
        - Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias Barat;
        - Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias Utara;
        - Pembangunan Gapura, Toilet dan Jalan Setapak di Kabupaten Nias;
        - Pembangunan Toilet di Kabupaten Nias Selatan.
      - Wisata religi dan sejarah barus – Tapanuli tengah, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa : penataan kawasan situs Komplek Makam Papan Tinggi melalui Pematangan Lahan, Penataan Parkir dan Pembuatan Gapura dan Pembangunan jalan setapak.
      - Wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara; Tahun 2023 Pembangunan Gapura.
   b. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, Eko dan budaya melalui:
      - Peningkatan SDM pelaku Pariwisata dalam mengelola Desa Wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan (17 s.d 18 Juli 2023) di Kabupaten Karo (20 s.d 21 Juli 2023) dan di Kabupaten Dairi (24 s.d 25 Juli 2023)
      - Melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif di Desa Wisata di kota Medan (31 Oktober s.d 2 November 2023).
   c. Memberikan dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan, laporan dari Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Sumatera Utara sampai Desember tahun 2023, berupa: Cagar Budaya kesultanan Langkat, melalui :

- Pengecatan Pagar Mesjid Azizi (tahun 2023);
- Revitalisasi Parkir Mesjid Azizi (tahun 2023);
- Revitalisasi Drainase Mesjid Azizi (tahun 2023);
- Penyediaan sarana prasarana pendukung cagar budaya berupa tempat sampah, lampu penerangan, rambu-rambu petunjuk arah, pedestrian, panel sejarah (tahun 2023).

d. Memberikan dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark kaldera Toba, melalui : Pengembangan Konservasi, Pengembangan Edukasi dan Litbang, Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Promosi Kaldera, Peningkatan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim di kawasan UGG Kaldera Toba.
Kegiatan yang dilakukan :
1) Sosialisasi Edukasi Interaktif Terhadap Siswa Sekolah di Kawasan Toba Caldera UGGp, yang dilaksanakan di Kab. Karo (20 Maret 2023), Kab. Toba (23 Maret 2023) dan Kab. Samosir (27 Maret 2023), dengan jumlah peserta masing-masing 60 orang;
2) Pelatihan Pemandu Wisata di Geosite Toba Caldera UGGp, yang dilaksanakan di Kab. Karo (3 s.d 5 April 2023), di Kab. Humbang Hasundutan (10 s.d 12 April 2023) dan Kab. Tapanuli Utara (13 s.d 15 April 2023), dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang;
3) Revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark, yang dilaksanakan pada 10 s.d 14 Maret 2023 (Pra Revalidasi) dan tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 (Revalidasi oleh Asesor Unesco);
4) Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di KSPN Danau Toba, yang dilaksanakan di Kab. Simalungun (9 s.d 10 Mei 2023) dengan jumlah peserta 70 orang;
5) Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite Toba Caldera UGG sebanyak 30 unit, terdiri dari 20 unit di Kab. Samosir dan 10 unit di Kab. Toba;
6) Pembuatan Jalan Setapak di Kabupaten Tapanuli Utara;
7) Pembuatan Jalan Setapak di Kabupaten Toba;
8) Pembuatan Toilet di Kabupaten Samosir.
9) Digitalisasi promosi pariwisata, dilakukan melalui :
   - Pengembangan Aplikasi DISUMUT AJA
     Pengembangan Aplikasi DISUMUT AJA dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi pariwisata dan para pelaku usaha juga UMKM yang terlibat di dalam dunia pariwisata Sumatera Utara, selain dari pada itu Mobile Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur data tracker yang siap diakses oleh Stakeholder, wisatawan juga pelaku usaha pariwisata agar dapat berkontribusi dalam memberikan informasi terkait pariwisata Sumatera Utara, mengambil andil di dalam penyajian informasi pariwisata Sumatera Utara dan dapat dinikmati masyarakat umum.
   - Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata.
     Pada tahun 2023 kegiatan Sosialisasi Promosi Pariwisata telah dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu Kabupaten Toba pada tanggal 08 s.d 10 Februari 2023 dengan jumlah peserta 100 orang, Kabupaten Simalungun pada tanggal

15 s.d 17 Februari 2023 dengan jumlah peserta 100 orang, Tapanuli Selatan tanggal 13 s.d 15 Maret 2023, Kabupaten Batubara 26 s.d 28 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kabupaten Nias Utara tanggal 19 s.d 21 Juli 2023 dengan jumlah peserta 100 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan SDM di kabupaten kota dalam mempromosikan objek wisata melalui media sosial.

e. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu, Tahun 2023 dilaksanakan melalui : Forum Komunitas Tokoh Budaya dan Kesultanan Sumut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri masyarakat khususnya tokoh budaya, tokoh adat dan kesultanan untuk melestarikan adat dan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara.

6. **Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi.** Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan Strategis Daerah. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan persentase kinerja 80%. Rincian sebagai berikut :
   a. Sampai tahun 2023, Pemprovsu berhasil mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-10 kali berturut-turut atas kinerja Laporan Keuangan tahun 2022 dan mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebanyak 82 persen dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
   b. Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat B, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,85 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.
   c. Dalam meningkatkan capaian indeks pelayanan publik telah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2023 oleh OMBUDSMAN RI pada tanggal 04 Desember 2023 di Jakarta, dengan Nilai Kepatuhan 87,96 Zonasi Hijau Kategori B (SK KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 418 TAHUN 2023).

7. **Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga.** Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga didukung oleh 10 (sepuluh) Kegiatan Strategis Daerah. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan persentase kinerja 98.2%. Rincian sebagai berikut :
   a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan, data Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara dengan sebanyak 1.550 orang dan sehingga mendorong pencapaian peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia menjadi 84,29 di tahun 2022 dari 81,33 tahun 2021 dan untuk tahun 2023 sudah dilakukan untuk 2.160 orang;
   b. Pembangunan 300 (Tiga Ratus) Kampung Bersinar (Bersih

Narkoba), sampai dengan Desember Tahun 2023, target 262 desa/kelurahan sudah terealisasi 100% dengan pengukuhan jumlah relawan 4.500 orang (1 desa 15 orang) dan selebihnya 38 desa telah terlaksana di Tahun 2023, maka capaian dari 300 desa yang di targetkan telah terlaksana 100%.

c. Telah selesai Pembangunan Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara melalui aplikasi *contact center* yang dapat diakses pada URL https://contactcenter.sumutprov.go.id, yang terintegrasi dengan media social (Facebook: https://www.facebook.com/PemprovSumut/; Twitter: @pemprovsu; dan Instagram: www.instagram.com/pemprovsumut/). Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Kominfo dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual. Tahun 2023 kegiatan Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu Dialog Gubernur Bersama para Pengajar Muda yang bergabung dalam Gerakan Sumut Mengajar dan Komunitas Penggiat Literasi lainnya pada tanggal 11 Maret 2023 di Aula Raja Inal Kantor Gubsu Medan.

e. Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui (Dinas Sosial) :
   - Pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.734 orang di tahun 2023 dengan 100 persen.
   - Terlaksananya rehabilitasi gedung pada 2 panti di UPT Anak Sidikalang dan UPT Tuna Laras Berastagi.

f. Telah meningkatkan pembinaan atlet berprestasi (KONI) dan melaksanakan pelatihan daerah sepanjang Tahun 2023 kepada 1500 atlet dai 68 cabor dan sebanyak 107 atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) untuk 11 Cabor . pelatihan wasit juri sebanyak 60 orang dari 2 Cabor (*Kick boxing* dan sambo), yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi pada 107 atlet PPLP dan 1181 atlet PELATDA Yang akan diserah melalui hibah KONI yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

h. Pembangunan *sports centre* di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024 terdiri 3 *venue* yaitu stadium madya atletik (realisasi fisik 98 %), martial arts (realisasi fisik sudah 97 %), GOR *indoor volley* (realisasi fisik 100 %) dan pembangunan stadion utama melalui APBN 2023-2024 (*Multi Years*) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

i. Persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024 melalui kegiatan Sosialisasi Publikasi Pelaksanaan PON XXI Tahun 2024.

j. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 sudah membangun/rehab 6.611 Rumah Ibadah di Sumatera Utara, dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara.

8. **Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan,** Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan Strategis Daerah. Secara keseluruhan sudah dilaksanakan persentase kinerja 83.20%. Rincian sebagai berikut :
   a. Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan strategis Provinsi di Sumatera Utara sebagai bentuk pencapaian target 85% tingkat kemantapan jalan di akhir tahun 2023 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan telah direalisasikan 66% dari 92,58% bobot pekerjaan pada Triwulan IV di tahun 2023 melalui metode Design and Build dengan kontrak tahun jamak/MYC 2022-2024. Penanggungjawab kegiatan Dinas PUPR.
   b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan. Capaian Target kinerja Sampai dengan Triwulan IV 2023 adalah sebesar 99%. Penanggungjawab kegiatan Dinas PUPR.
   c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar. Capaian Target Optimalisasi Jaringan Irigasi Sampai dengan Triwulan IV 2023 adalah sebesar 100,67%. Penanggungjawab kegiatan Dinas PUPR.
   d. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional Mebidang; Pada Tahun Anggaran 2023, Pendanaan Rencana Pengadaan Lahan untuk Pembangunan TPA Regional Mebidang mengalami efisiensi anggaran, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, Penganggaran untuk pengadaan lahan untuk kebutuhan dimaksud di atas, akan kembali dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024. Penanggungjawab kegiatan Dinas PUPR.
   e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang; Pembangunan Jaringan Distribusi Umum Sistem Pengelolaan Air Minum Regional Mebidang dilaksanakan secara MYC (2021-2022) dan telah selesai pada Desember 2022 dengan panjang Pipa Jaringan Distribusi Umum sepanjang 5000 M (telah selesai 100%) Penanggungjawab kegiatan Dinas PUPR.
   f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit; Tahun 2023 telah dilaksanakan 98 persen Pembangunan pemugaran role model KSD Sei Bilah Langkat dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat sebanyak 21,03 hektar dengan capaian fisik sebesar 100 %. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai Tahun 2023 sebanyak 524 unit dengan realisasi fisik 100 %. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terehabilitasi (2019-2023) oleh Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2481 unit, capaian telah melebihi target 1.000 unit terehabilitasi (Dinas Perkim).
   g. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Utara tentang pembangunan rendah karbon antara lain Program Kampung Iklim, Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penerapan 3R. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin, Tahun 2023 akan menyediakan sambungan listrik sebanyak 4.925 sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu dan akan membangun PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produksi pertanian sebanyak 3 unit dengan realisasi fisik 100 %. (Dinas Perindag & ESDM).

Adapun 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan capaian kinerja realisasi keuangan paling tinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 99.50 persen, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Perhubungan mendapatkan dengan capaian kinerja keuangan yang sama yaitu 99.07 persen. Anggarannya sebesar 95.45 persen, masuk dalam kriteria realisasi "Sangat Tinggi". Kondisi ini memang menjadi tantangan di Triwulan IV tahun ini, maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan tabel V untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap triwulannya.

Dari tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Capaian kinerja program sampai dengan triwulan III Tahun 2023 secara rata-rata kinerja program RKPD mencapai adalah 65,95 persen dan masuk dalam skala nilai peringkat kerja "Rendah", sedangkan untuk capaian realisasi anggarannya sebesar 62,33 persen, masuk dalam kriteria realisasi "Rendah". Kondisi ini memang menjadi tantangan di Triwulan III tahun ini, maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap triwulannya.
2) Dari 34 perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara 5 (Lima) Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja terendah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan capaian kinerja 22 Persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan capaian kinerja sebesar 32,12 persen dan Dinas Perkebunan Peternakan dengan capaian kinerja sebesar 41,13 persen dan Dinas Perhubungan dengan capaian 50,00 persen dan Dinas Pendidikan 50,14 persen.

   Untuk 2 (Dua) capaian kinerja secara peringkat Sangat Tinggi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian kinerja sebesar 128,23 persen dan Dinas Kesehatan sebesar 92,17 persen.

3) Dari tabel di atas, ada 4 (Lima) Perangkat Daerah dengan capaian Realisasi Keuangan terendah dari total 34 perangkat daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan realisasi keuangan sebesar 35,25 Persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan realisasi keuangan sebesar 45,71 Persen, Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 46,09 dan Dinas Perhubungan dengan realisasi keuangan sebesar 46,19 Persen.
4) Dari total 34 perangkat di Provinsi Sumatera Utara, 4 (Empat) Perangkat Daerah dengan capaian Realisasi Keuangan tertinggi yaitu Inspektorat dengan realisasi keuangan sebesar 83,97 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan realisasi keuangan sebesar 81,51 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,18 persen dan UPTD. Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem sebesar 75,50 persen.

2.2.6 Capaian Kegiatan Strategis Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam pembangunan lima tahunan (PRPJMD 2019-2023), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan dalam 8 (Delapan) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Delapan prioritas pembangunan dan Lima Puluh Empat Kegiatan Strategis Daerah tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah. Berikut capaian kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang dirangkum berdasarkan penyampaian laporan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, yaitu:

1. **Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan dilaksanakan, melalui Kegiatan Strategis Daerah yaitu :**

    1. Dalam rangka pemenuhan akses pemerataan layanan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, dilaksanakan dengan Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus 13 Unit Sekolah Baru (USB) dan 1 USB lanjutan (pembangunan dari tahun 2021 dan 2022) yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yaitu USB SMAN Plus Besitang Kabupaten Langkat (lanjutan), USB SMKN Bandar Kabupaten Simalungun, USB SMAN 1 Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, USB SMKN 1 Tinggi Raja Kabupaten Asahan, USB SMAN 1 Gunung Sitember Kabupaten Dairi, USB SMAN 3 Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, USB SMAN 2 Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara, USB SMKN 1 Padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, USB SMKN Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, USB SMKN Banjar Aur Kabupaten Mandailing Natal, USB SMAN 1 Penyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, USB SMKN 1 Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, USB SMAN Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, dan USB SMAN Lahomi Kabupaten Nias Barat. Laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan III 2023, masih dalam proses pekerjaan dan akan selesai di akhir tahun 2023.

    1. USB SMK NEGERI Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan gagal dikarenakan tidak ada yang memenuhi persyaratan tender. Tahun 2022 dibangun sebanyak 12 unit beroperasi sisa 1 unit.
    2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada Siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu) jiwa, Data yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan III sudah selesai, verifikasi akhir dilakukan oleh di Bank Sumut.
    3. Pembangunan (Operasional) kampung beasiswa scholarships booth beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan, Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

4. MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama *Link and Match* antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) MoU / MoA kerjasama.
5. Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi yang dilaksanakan oleh 120 sekolah SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
6. *Teaching factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi yang dilaksanakan oleh 120 sekolah SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
7. MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama *Link and Match* antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) MoU / MoA kerjasama;
8. Pembangunan 5 (Lima) unit pojok baca di Kab/Kota (antara lain: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Nias Utara, Kota Sibolga dan Kota Padang Sidempuan) serta penyediaan Gerobak Baca sebanyak 2 (dua) unit yang akan dioperasionalkan di Kab. Langkat dan Kota Medan. Pemprovsu juga menerima bantuan penyediaan Gerobak Baca dari CSR Bank Sumut berupa 10 (sepuluh) unit Gerobak baca yang akan diberikan ke Kab. Tapanuli Selatan Kab. Batubara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai Kab. Simalungun Kota Pematang Siantar Kab. Asahan, Kab. Nias, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu. Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kejuruan se-Sumatera Utara. Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pendidikan.
10. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu. Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Pendidikan.
11. Penguatan pembelajaran jarak jauh *(distance learning)* melalui metode Training Of Trainer (TOT), Laporan dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara, kegiatan dilakukan pada 4 angkatan yang langsung 2 angkatan dengan jumlah peserta 60 orang dan sudah dilakukan E Learning 883 Guru SMA/SMK dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pelaksana : BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui Kegiatan Strategis Daerah yaitu :

1. Pada Triwulan III tahun 2023, Penanganan covid-19 melalui tidak dilaksanakan dengan keluarnya KEPRES Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid 19 Tahun 2023, ditetapkan bulan 22 Juni 2023.
2. Pembangunan Tower I RS. Haji Medan realisasi fisik 100% dengan anggaran 90%. alokasi 169.253.164.800 realisasi 151.169.379.023 dilaksanakan Grand Opening di Februari 2024, Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas PUPR Provsu.
3. Pemberian makanan tambahan sebesar 105.944 jiwa diganti dengan kegiatan pemberian suplementasi gizi (susu energi tinggi) bagi ibu hamil dan Balita sebanyak 105.944 jiwa. Perubahan ini disebabkan oleh terlambatnya terbit Petunjuk Teknis Tentang

Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal oleh Kemenkes yang terbit pada tanggal 17 Mei 2023. Dengan realisasi triwulan III sebanyak 87.817 Jiwa atau 82,89 %. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.895.766.540 dengan realisasi 3.391.207.500 (87,05%).

4. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Ildrem sebanyak 100 Bed. Laporan dari UPTDK. RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem sampai Triwulan III, bangunan belum serah terima dari kontraktor termin telah dibayar 80% sisa pembayaran 20% Soft launching direncanakan tahun ini bulan Desember 2023.
5. Melakukan Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara realisasi sudah 100 % dan pagu anggaran sebesar Rp. 2.429.167.400 dapat terealisasi Rp. 2.000.545.630 (82,36 %) .
6. Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sampai dengan TW III Tahun 2023 sebanyak 196.394 jiwa dengan anggaran 89.066.628.000 dengan realisasi 70,997.485.100 (79,71%) dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.658.355 jiwa dengan anggaran Rp. 117.390.546.000 realisasi Rp. 88.439.404.200 (75,34 %).
7. Memberikan layanan kesehatan bergerak melalui proses penyediaan 3 (tiga) unit mobil medis dengan anggaran 7.048.000.000 Laporan Dinas Kesehatan Provsu, sudah selesai tender dan akan selesai di akhir tahun 2023.

3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan strategis daerah, yaitu :

1. Fasilitasi kerja dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan dengan Pelatihan berbasis kompetensi Target 160 orang sampai dengan TW III realisasi 128 orang; fasilitasi pemagangan luar negeri target 700 orang realisasi 480 orang. Fasilitasi kerjasama 10 sektor ekonomi (Dinas Perindustrian, perdagangan dan ESDM)
2. Melakukan fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran, laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yaitu:
   - Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM Pangan sebanyak 30 IKM sudah selesai dilaksanakan
   - Fasilitasi pendaftaran merk sebanyak 50 IKM direncanakan dilaksanakan bulan November 2023
   - Sosialisasi BPOM sebanyak 50 IKM sudah selesai dilaksanakan
   - Bimtek Pembuatan Foto, video dan kemasan produk dari IKM sebanyak 30 IKM sudah selesai dilaksanakan total ada 160 IKM yang diberikan fasilitasi dengan target anggaran 2023 sebesar Rp.734.734.150 dengan realisasi Rp. 472.873.233 atau 64,34%.
   - Fasilitasi Kelengkapan Legalitas, Pelatihan Branding, Pelatihan Media Sosial menjual produk, aktivasi iklan, on boarding di *E-Catalog*. sampai dengan tahap akhir tahun 2023 sebanyak 530 UMKM.
   - Bimbingan bagi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran melalui Sosialisasi/Fasilitasi Standarisasi UMKM dan IKM,

sampai dengan TW III Dinas Perindustrian telah melakukan realisasi kinerja sebesar 68,75 Persen. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM yang membawahi 1000 UMKM melaksanakan realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.254.349.990 atau 67,50 Persen.

3. Pengembangan Sistem Operasional sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi dengan bursa kerja Online melalui pembangunan aplikasi SiLAPER; berapa user yang menggunakan aplikasi, Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
4. Melakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi, Laporan Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara sampai Triwulan III tahun 2023 perkembangan sebagai berikut:
   1) Terbitnya Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi pada tanggal 20 Juni 2023
   2) Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui kegiatan strategis daerah, yaitu :

1. Peningkatan Produksi daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi Masyarakat Sumut ditargetkan sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton. Dengan realisasi kinerja 11.927,11 (69,55 persen), dengan jumlah anggaran sebesar Rp.17.662.603.166,- realisasi anggaran sebesar Rp.3.262.101.493,43 (18,47%). Data realisasi berdasarkan data dukung yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sampai bulan September tahun 2023,
2. Produksi daging kambing/domba dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor ditargetkan sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton, dengan realisasi kinerja sebesar 1.214,34 ton atau 78,97% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.769.400.468,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.098.674.622,70 (19,04%). Data realisasi berdasarkan data dukung yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sampai bulan September tahun 2023,
3. Mempertahankan Swasembada padi dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri di Provinsi Sumatera Utara. Data realisasi berdasarkan data dukung yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sampai bulan September tahun 2023
   - Target Produksi Padi : 4.064.705 ton dan Realisasi : 3.438.305 ton, sampai dengan triwulan III Realisasi anggaran sebesar 92,8 %
   - Kebutuhan Beras di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.740.170 Ton dengan jumlah produksi sebesar 2.190.200 Ton, terdapat Surplus sebesar 450.030 Ton
   - Target produksi Jagung tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara 1.740.170 Ton, dari target tersebut yang berhasil diproduksi sebesar 1.426.075 Ton sedangkan jumlah kebutuhan Masyarakat sebesar 1.304.210 Ton sehingga terdapat Surplus sebesar 121.865 Ton

- dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri Target produksi bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton sampai Triwulan III jumlah produksi sebesar 34.999 ton
- Target produksi bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton dengan realisasi 15,4 ton.

4. Peningkatan produksi cabai sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) produksi 164.333 ton sampai dengan Triwulan III dan bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton realisasi 34.999 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri, produksi bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton realisasi 15,4 ton;
5. Meningkatkan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton realisasi 358.335,03 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton realisasi 169.256,88 ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui kegiatan strategis daerah, yaitu :

1. Melakukan penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui; Mengembangkan kawasan pariwisata, laporan dari Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Sumatera Utara sampai Triwulan III tahun 2023, sbb :
   - Ekowisata tangkahan, Bahorok/ bukit lawang – langkat, dengan penanganan kawasan pariwisata ada 21 Langkat 11 Madina 2 Paluta 1 Tapteng 1 Kepulauan Nias, Sampai Triwulan III tahun 2023 pelaksanaan pekerjaan sbb :
     - Proses Pembuatan Rambu Petunjuk Wisata di Kabupaten Langkat;
     - Proses Pembangunan Gapura (Bukit Lawang-Bahorok)
     - Proses Pembangunan Jalan Setapak (Bukit Lawang-Bahorok)
     - Proses Pembangunan Kios Cinderamata (Bukit Lawang-Bahorok)
     - Proses Pembangunan TIC (Bukit Lawang-Bahorok)
     - Proses Pembangunan Toilet (Bukit Lawang-Bahorok)
     - Proses Pembangunan Gapura (Tangkahan-Batang Serangan)
     - Proses Pembangunan Jalan Setapak (Tangkahan-Batang Serangan)
     - Proses Pembangunan Tempat Parkir(Tangkahan-Batang Serangan)
     - Proses Pembangunan TIC (Tangkahan-Batang Serangan)
     - Proses Pembangunan Toilet (Tangkahan-Batang Serangan)
   - Agrowisata ulu pungkut – Madina, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa : Proses Pembangunan Toilet dan Proses Pembangunan kios kuliner.
   - Wisata alam dan budaya - Kepulauan Nias, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa :
     - Proses Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias Barat;
     - Proses Pembangunan Gapura di Kabupaten Nias Utara;
     - Proses Pembangunan Gapura, Toilet dan Jalan Setapak di Kabupaten Nias;
     - Proses Pembangunan Toilet di Kabupaten Nias Selatan.

- Wisata religi dan sejarah barus – Tapanuli tengah, dengan penanganan kawasan pariwisata berupa : Proses penataan kawasan situs Komplek Makam Papan Tinggi melalui Pematangan Lahan, Penataan Parkir dan Pembuatan Gapura dan Pembangunan jalan setapak.
- Wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara; Tahun 2023 Proses Pembangunan Gapura.

2. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, Eko dan budaya sudah melakukan Peningkatan SDM;
   - ✓ Melaksanakan kegiatan Peningkatan SDM Pelaku Pariwisata Dalam mengelola Desa Wisata TA 2023 di Kabupaten Humbang Hasundutan (17 s.d 18 Juli 2023) di Kabupaten Karo (20 s.d 21 Juli 2023) dan di Kabupaten Dairi (24 s.d 25 Juli 2023)
   - ✓ Melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif di Desa Wisata di kota Medan (31 Oktober s.d 2 November 2023).
3. Memberikan dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan, laporan dari Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi Sumatera Utara sampai Triwulan III tahun 2023, berupa: Proses Pengecatan Pagar; Proses Revitalisasi Parkir; Proses Revitalisasi Drainase dan Proses Penyediaan sarana prasarana pendukung cagar budaya berupa tempat sampah, lampu penerangan, rambu-rambu petunjuk arah, pedestrian, panel sejarah.
4. Memberikan dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark kaldera Toba, melalui : Pengembangan Konservasi; Pengembangan Edukasi dan Litbang; Pemberdayaan masyarakat; Peningkatan Promosi Kaldera; Peningkatan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim di kawasan UGG Kaldera Toba.

   Kegiatan yang dilakukan tahun 2023 :

   1) Sosialisasi Edukasi Interaktif Terhadap Siswa Sekolah di Kawasan Toba Caldera UGGp, yang dilaksanakan di Kab. Karo (20 Maret 2023), Kab. Toba (23 Maret 2023) dan Kab. Samosir (27 Maret 2023), dengan jumlah peserta masing-masing 60 orang;
   2) Pelatihan Pemandu Wisata di Geosite Toba Caldera UGGp, yang dilaksanakan di Kab. Karo (3 s.d 5 April 2023), di Kab. Humbang Hasundutan (10 s.d 12 April 2023) dan Kab. Tapanuli Utara (13 s.d 15 April 2023), dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang;
   3) Revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark, yang dilaksanakan pada 10 s.d 14 Maret 2023 (Pra Revalidasi) dan tanggal 31 Juli s.d 4 Agustus 2023 (Revalidasi oleh Asesor Unesco);
   4) Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di KSPN Danau Toba, yang dilaksanakan di Kab. Simalungun (9 s.d 10 Mei 2023) dengan jumlah peserta 70 orang;
   5) Pembuatan Papan Penunjuk Arah Geosite Toba Caldera UGG sebanyak 30 unit, terdiri dari 20 unit di Kab. Samosir dan 10 unit di Kab. Toba;
   6) Pembuatan Jalan Setapak di Kabupaten Tapanuli Utara;
   7) Pembuatan Jalan Setapak di Kabupaten Toba;
   8) Pembuatan Toilet di Kabupaten Samosir.

5. Digitalisasi promosi pariwisata, dilakukan melalui :
   - Pengembangan Aplikasi DISUMUT AJA, dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023. Tujuan aplikasi ini yakni untuk memasarkan objek-objek wisata yang ada di Sumatera Utara dan memudahkan calon wisatawan untuk berwisata di Sumatera Utara. Pagu anggaran Pengembangan Aplikasi DI SUMUT aja sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.149.992.150,-
   - Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata. Pada tahun 2023 kegiatan Sosialisasi Promosi Pariwisata telah dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu Kabupaten Toba pada tanggal 08 s.d 10 Februari 2023 dengan jumlah peserta 100 orang, Kabupaten Simalungun pada tanggal 15 s.d 17 Februari 2023 dengan jumlah peserta 100 orang, Tapanuli Selatan tanggal 13 s.d 15 Maret 2023, Kabupaten Batubara 26 s.d 28 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 100 orang, Kabupaten Nias Utara tanggal 19 s.d 21 Juli 2023 dengan jumlah peserta 100 orang.

     Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan SDM di kabupaten kota dalam mempromosikan objek wisata melalui media sosial. Anggaran kegiatan sosialisasi Promosi Pariwisata sebesar Rp. 752.332.250,- dengan realisasi Rp. 739.928.736,-

6. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu, Tahun 2023 dilaksanakan melalui : Forum Komunitas Tokoh Budaya dan Kesultanan Sumut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri masyarakat khususnya tokoh budaya, tokoh adat dan kesultanan untuk melestarikan adat dan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara.

6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu :

1. Tahun 2023, mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 atas kinerja Laporan Keuangan tahun 2022 dari BPK RI dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan pencapaian 82%.
2. Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB,
   - ✓ Inspektorat, melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil penilaian BPK untuk tahun 2023
   - ✓ Biro Organisasi, melakukan Fasilitasi pelaksanaan evaluasi sakip KEMENPAN RB, optimalisasi e-Sakip, verifikasi laporan kinerja Perangkat Daerah.
   - ✓ Bappelitbang, memfasilitasi penyusunan Pohon Kinerja 41 OPD tahun 2023.
3. Dalam meningkatkan capaian indeks pelayanan publik telah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik 2022 oleh OMBUDSMAN RI pada tanggal 22 Desember 2022 di Jakarta, dengan Nilai Kepatuhan 90,54 Zonasi Hijau Kategori A (SK KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 337 TAHUN 2022) dan mengalami peningkatan untuk kualitas pelayanan publik dari

3,80 menjadi 3,92 oleh KementerianPANRB yang disampaikan melalui surat Kementerian PANRB Nomor B/747/RB.06/2022 tanggal 6 Desember2022. Selanjutnya di tahun 2023 akan meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh KementerianPANRB menjadi 4,02 dengan predikat A-.

7. **Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan strategis daerah, yaitu :**

1. Penguatan pusat wawasan kebangsaan, data Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara dengan target tahun 2023 sebanyak 1300 orang dengan realisasi 500 orang dan anggaran Rp.1.059.169.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 563.865.776,- atau (53 %) ;
2. Pembangunan 300 (Tiga Ratus) Kampung Bersinar (Bersih Narkoba), sampai dengan TW III tahun 2023, target 262 desa/kelurahan sudah terealisasi 100% dengan pengukuhan jumlah relawan 4.500 orang (1 desa 15 orang). 300 desa/Kelurahan yang menjadi target 2022 dan 2023 sudah6 tercapai 100%.
3. Telah membangun Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara melalui aplikasi contact center yang dapat diakses pada URL https://contactcenter.sumutprov.go.id, yang terintegrasi dengan media social (Facebook : https://www.facebook.com/PemprovSumut/; Twitter : @pemprovsu; dan Instagram : www.instagram.com/pemprovsumut/). Perangkat Daerah Pelaksana : Dinas Kominfo dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
4. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual. (Dinas Kominfo)
5. Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui :
   - pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.745 orang di tahun 2023 dengan realisasi TW III sebesar 71,44 persen. Selanjutnya diharapkan sampai akhir tahun 2023 memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga binaan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara.
   - Terdapat rehab 2 panti di UPT anak Sidikalang dengan realisasi fisik sebesar 65 % dan UPT Tuna Laras Berastagi dengan realisasi fisik 50 %. Dari total anggaran sebesar Rp.2.803.700.000,
6. Telah meningkatkan pembinaan atlet berprestasi (KONI) dan melaksanakan pelatihan daerah kepada 1500 atlet dai 68 cabor dan sebanyak 107 atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) untuk 11 Cabor . pelatihan wasit juri sebanyak 60 orang dari 2 Cabor (*Kick Boxing* dan sambo), dengan anggaran sebesar Rp. 343.333.600 sudah terealisasi sebanyak Rp. 225.424.392 yang akan diserah melalui hibah KONI.
7. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi pada 107 atlet PPLP dengan anggaran sebesar Rp. 135.945.910 dan 1181 atlet PELATDA dengan anggaran sebesar Rp. 1.258.500.000 Yang akan diserah melalui hibah KONI.
8. Pembangunan sports centre di daerah Kualanamu dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024 terdiri 3 venue yaitu stadion madya atletik (realisasi fisik sudah 50 %),

martial arts (realisasi fisik sudah 70%), GOR indoor volley (realisasi fisik 55%) dan pembangunan stadion utama melalui APBN 2023-2024 (*Multi Years*).

9. Persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024 melalui kegiatan Sosialisasi Publikasi Pelaksanaan PON XXI Tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000.000 sudah terealisasi sebesar Rp.2.762.325.942.
10. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Strategis daerah, yaitu :

1. Terlaksananya penanganan ruas jalan dan jembatan strategis Provinsi di Sumatera Utara sebagai bentuk pencapaian target 85% tingkat kemantapan jalan di akhir tahun 2023 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan telah direalisasikan 58,79% dari 92,58% bobot pekerjaan pada Triwulan III di tahun 2023 melalui metode Design and Build dengan kontrak tahun jamak / MYC 2022-2024 dari nilai Kontrak Rp.2.648.281.761.981,99. Realisasi keuangan Rp. 554.125.714.201,31 atau 20,92%.
2. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan
3. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;, Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp.66.846.476.426,- , Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 21.558.912.140 (32,25%). Capaian Target Optimalisasi Jaringan Irigasi Sampai dengan Triwulan III 2023 adalah sebesar 49.980 ha, dengan target peningkatan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 51.232 Ha.
4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional Mebidang; Pada Tahun Anggaran 2023, Pendanaan Rencana Pengadaan Lahan untuk Pembangunan TPA Regional Mebidang mengalami efisiensi anggaran, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, Penganggaran untuk Pengadaan lahan untuk kebutuhan dimaksud di atas, akan kembali dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.
5. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang; Pembangunan Jaringan Distribusi Umum Sistem Pengelolaan Air Minum Regional Mebidang dilaksanakan secara MYC (2021-2022) dan telah selesai pada Desember 2022 dengan panjang Pipa Jaringan Distribusi Umum sepanjang 5000 M (telah selesai 100%)
6. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit; Tahun 2023 telah dilaksanakan 98 persen Pembangunan pemugaran role model KSD Sei Bilah Langkat dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha di Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat sebanyak 21,03 hektar dengan anggaran sebesar Rp. 7.496.126.248 dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.495.137.283 atau sebesar 70 % dengan capaian fisik sebesar 100 %. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sampai Tahun 2023 sebanyak 524 unit dengan anggaran

Rp.15.720.000.000 dengan realisasi fisik 100 % . Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terehabilitasi (2019-2023) oleh Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2481 unit, capaian telah melebihi target 1.000 unit terehabilitasi;

7. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Utara tentang pembangunan rendah karbon antara lain Program Kampung Iklim, Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penerapan 3R. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
8. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin, Tahun 2023 akan menyediakan sambungan listrik sebanyak 4.925 sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu dan akan membangun PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produksi pertanian sebanyak 3 unit dengan anggaran Rp.18.502.246.171 dengan realisasi 18.358.585.437 atau 99,22 % dan realisasi fisik 100%.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Evaluasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, hal ini guna menjaga konsistensi capaian pembangunan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 yang memedomani RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Capaian tahun 2022 menjadi basis data untuk menetapkan target sasaran pembangunan 2024 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan RKPD 2025 salah satunya berpedoman terhadap pencapaian target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Evaluasi pencapaian target 2022 dilaksanakan yang salah satunya dengan penekanan pada pencapaian Misi yang juga menjadi Prioritas Pembangunan pada Perubahan RPJMD 2019-2023. Evaluasi Tahun 2022 mencakup evaluasi terhadap kinerja efektivitas pembangunan yang berdasarkan kinerja pencapaian sasaran dan target pembangunan dan selanjutnya evaluasi kinerja efektivitas pembangunan digunakan sebagai salah satu dasar perumusan permasalahan pembangunan yang juga menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran serta program pembangunan RKPD Tahun 2025 yang meliputi antara lain:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan
   b. Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan
   c. Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak
2. Belum Optimalnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain :
   a. Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan
   b. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan Kompetensi
   c. Rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha

d. Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru
e. Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktivitas
f. Rendahnya daya saing pariwisata

3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Belum Terpenuhinya Layanan sistem Transportasi
   b. Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman
   c. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup
   d. Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah
   e. Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat
4. Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif, permasalahan ini didukung oleh beberapa permasalahan pokok antara lain:
   a. Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
   b. Belum Optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah
   c. Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima
   d. Belum Optimalnya Peningkatan Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
   e. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.100
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		
	Pendidikan		
1.1.	**Belum optimalnya Peningkatan Kualitas pendidikan**	Belum optimalnya ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus	1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan terkait ketersediaan akses belajar, sarana & prasarana, kualitas dan mutu pendidika sekolah menengah, kejuruan dan khusus, serta peningkatan literasi masyarakat dan Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan 2. Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan Mayarakat, perbaikan gizi masyarakat dan penanganan Stunting serta angka kesakitan. 3. Belum Optimalnya penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		Belum optimalnya peningkatan Kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan Literasi masyarakat	1. Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/Tenaga Pendidik Produktif 2. Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum pendidikan 3. Masih kurangnya minat baca masyarakat 4. Belum optimalnya Pengembangan Perpustakaan Berbasis digital (E-

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			library)
		Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	1. Belum optimalnya peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 2. Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Belum optimalnya Peningkatan daya saing kepemudaan
	Kesehatan		
1.2	**Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan**	Pelayanan Kesehatan Masyarakat belum Optimal	1. Belum Optimalnya Peningkatan Usia Harapan Hidup 2. Rendahnya ketersediaan mutu dan sumber daya manusia kesehatan 3. Belum Optimalnya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit 4. Belum Optimalnya Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
		Belum maksimalnya perbaikan gizi masyarakat dan penanganan prevalensi Stunting	1. Belum Optimalnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Stunting 2. Belum Optimalnya Peningkatan Pemenuhan Gizi 3. Belum Optimalnya Peningkatan Akses Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi
		Masih tingginya angka kesakitan	1. Belum Optimalnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular 2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) masih belum maksimal
	Kesetaraan Gender		
1.3	**Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak**	Belum Optimalnya Peranan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak	1. Belum Optimalnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan 2. Belum Optimalnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah 3. Belum Optimalnya Perlindungan Anak
2	**Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		
	Penurunan Angka Kemiskinan		
2.1	**Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan**	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatihan	1. Belum optimal Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainer), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
		Belum Optimalnya Perluasan Jenis Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1. Belum Optimalnya Pengembangan Kurikulum Pelatihan (Kemenaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian) 2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Internship/Pemagangan (Kemenaker,

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian)
	Ketenagakerjaan		
2.2	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan**	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatihan	1. Belum optimal Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainer), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
		Belum Optimalnya Perluasan Jenis Pelatihan Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1. Belum Optimalnya Pengembangan Kurikulum Pelatihan (Kemanaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian) 2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Internship/Pemagangan (Kemenaker, Kemendikbud, Balai Diklat Kementerian)
2.3	**Rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha**	Belum optimalnya Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja	
	Koperasi dan UKM		
2.4	**Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru**	Terbatasnya Akses Permodalan Usaha dan informasi pasar yang akan ditekuni	1. Minimnya informasi layanan permodalan usaha dan pasar (Sulitnya memenuhi persyaratan memperoleh modal usaha
		Rendahnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	1. Belum tersedianya database informasi ketenagakerjaan 2. Minimnya kerjasama dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD untuk penempatan tenaga kerja 3. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kemudahan proses perizinan & non perizinan yang masih rendah
		Rendahnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	1. Belum optimalnya Pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku Ekonomi Kreatif 2. Masih rendahnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan Ekonomi kreatif 3. Masih rendahnya kerjasama dalam pemasaran produk Ekonomi Kreatif 4. Kurangnya infrastruktur sarana pendukung promosi produk
		Rendahkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	1. Belum tersedianya database informasi ketenagakerjaan 2. Minimnya kerjasama dengan perusahaan swasta/BUMN/BUMD untuk penempatan tenaga kerja 3. Tenaga Kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan 4. kemudahan proses perizinan & non perizinan yang masih rendah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Pertanian		
2.5	Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktivitas	Tingginya alih fungsi lahan	1. Rendahnya kepemilikan lahan petani 2. Sulitnya mendapatkan akses pembiayaan 3. Tingginya biaya operasional pertanian
		Rendahnya nilai tambah sektor pertanian	1. Rendahnya skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 2. Rendahnya kerjasama antar daerah sektor pertanian 3. Belum optimalnya Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan 4. Minimnya fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian
		Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian yang belum memadai	1. Akses Jalan Produksi Pertanian belum memadai 2. Belum optimalnya Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Ha) 3. Belum optimalnya Pemberian Bantuan Benih/Bibit dan Pupuk Pertanian 4. Belum optimalnya Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian 5. Minimnya penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
		Produktivitas pertanian yang masih rendah	1. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul yang bersertifikat 2. Penerapan teknologi yang masih konvensional 3. Belum optimalnya Peningkatan Diversifikasi Pertanian 4. Tingginya serangan organisme pengganggu (tanaman, ternak, ikan) 5. Belum optimalnya Pengawasan Peredaran & Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian
		Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan petani	1. Rendahnya penguasaan teknologi pertanian 2. Rendahnya kualitas penyuluhan petani 3. Belum optimalnya Kelembagaan Petani Pengelolaan dan Penggunaan Air 4. Rendahnya minat menjadi petani 5. Rendahnya Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan dan P3A/GP3A/IP3) 6. Belum optimalnya Pelatihan Sekolah Lapang
	Kebudayaan Dan Pariwisata		
2.6	**Rendahnya daya saing pariwisata terhadap PDRB**	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan secara kolaboratif dengan memanfaatkan potensi pariwisata	1. Rendahnya Destinasi wisata yang terintegrasi 2. Belum optimalnya Diversifikasi Atraksi wisata 3. Masih rendahnya Kualitas, Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas dan Ancillary 4. Kualitas Pelestarian Lingkungan yang masih rendah 5. Belum optimalnya Promosi Pariwisata 6. Masih rendahnya keselamatan dan keamanan di destinasi wisata

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			7. Kurangnya Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Wisata
		Belum optimalnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata yang tersertifikasi	1. Terbatasnya kuantitas SDM Pariwisata yang berkualitas 2. Rendahnya Kompetensi SDM dan Kelembagaan Pariwisata 3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4. Terbatasnya Fasilitas Pendidikan Pariwisata 5. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga pariwisata
		Rendahnya nilai tambah ekonomi kreatif dan berdaya saing	1. Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Rendahnya fasilitasi perluasan pasar produk ekonomi kreatif 3. Rendahnya fasilitasi kekayaan intelektual 4. Belum adanya Rencana Aksi pengembangan ekonomi kreatif
		Belum optimalnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Belum adanya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan. 3. Meningkatkan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan kesenian tradisional. 4. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional. 5. Membangun sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
3	**Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan**		
3.1	**Belum optimalnya Kualitas Infrastruktur Jalan**	Belum meratanya kualitas jaringan jalan	1. Kualitas konstruksi yang belum sesuai standar 2. Kondisi geologi yang membutuhkan penanganan khusus 3. Belum terpenuhinya standar kelengkapan dan fasilitas keselamatan jalan serta rendahnya pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna transportasi dan kelayakan Moda transportasi 4. Kelebihan muatan yang membebani jalan dan lemahnya pengawasan 5. Pemeliharaan jalan yang tidak responsif
3.2	**Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman**	Belum Terpenuhinya Layanan Air Minum	1. Kurangnya Sumber dan Suplai Air Baku 2. Belum Optimalnya Perencanaan Penyediaan Akses Air Minum 3. Rendahnya Kapasitas Penyelenggara Air Minum 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapasitas SPAM 5. Masih Rendahnya Kualitas Air Minum
		Rendahnya Layanan Sanitasi	1. Pengolahan Akhir Sampah belum sesuai Standar

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Rendahnya Ketersediaan dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Akses Air Limbah
		Terbatasnya Akses Rumah Layak Huni dan Belum Maksimalnya Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1. Rendahnya Suplai Pembangunan Perumahan dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap rumah 2. Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman dan Belum Terintegrasi/terpadu pengelolaan layanan infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman 3. Tata Kelola pertanahan permukiman belum optimal 4. Kawasan permukiman rentan kebencanaan
		Belum Maksimalnya Akses Ketersediaan Listrik/Energi Baru Terbarukan	1. Minimnya Akses Listrik untuk masyarakat kurang mampu 2. Rendahnya Proporsi Bauran Energi baru terbarukan
		Minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi	1. Tingginya sedimentasi pada intake jaringan irigasi 2. Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi 3. Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier 4. Alih fungsi lahan pada daerah irigasi Banjir/luapan sungai yang merusak daerah irigasi
		Rendahnya Perlindungan Sumber Air Baku	1. Tingginya sedimentasi pada sungai 2. Meningkatnya aktivitas gangguan masyarakat di kawasan sekitar sumber air baku 3. Perubahan tutupan lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air
	Lingkungan Hidup		
3.3	**Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup**	Pencemaran udara, air, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut	1. Rendahnya kesadaran lingkungan 2. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup 3. Lemahnya pemahaman terhadap kegiatan pembangunan pro lingkungan 4. Rendahnya keterpaduan rencana pembangunan pro lingkungan yang memenuhi daya dukung dan daya tamping 5. Rendahnya kualitas instrumen pengendalian lingkungan
		Belum maksimalnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Aktivitas kawasan permukiman dan industri yang menghasilkan CO2 2. Aktivitas sektor pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida 3. Tutupan lahan hutan yang semakin kurang sebagai cadangan karbon 4. Pembukaan lahan gambut yang tidak sesuai kaidah lingkungan
	Ketimpangan Wilayah		
3.4	**Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah**	Belum meratanya perekonomian wilayah	1. Belum seimbangnya produktivitas kota-desa, pantai timur-pantai barat, dan pusat-pusat kegiatan wilayah 2. Belum meratanya pembangunan infrastruktur 3. Persebaran penduduk tidak merata

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Ketangguhan Bencana		
3.5	**Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat**	Belum Optimalnya Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Bencana di Masyarakat	1. Belum Optimalnya Budaya Kesadaran Tangguh Bencana di Masyarakat 2. Belum Optimalnya Peringatan Dini dan Respons Cepat Penanganan Darurat Bencana Alam dan Non Alam 3. Rendahnya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan 4. Kualitas Desain Konstruksi Infrastruktur Masih Belum Sesuai Standar 5. Belum Optimalnya Kesiapan Dukungan Peralatan Infrastruktur untuk Penanganan Bencana
4	**Belum Optimalnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif**		
4.1	**Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.2	**Belum optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah**	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum maksimal	1. Belum Optimalnya Kualitas Pengukuran Kinerja di Perangkat Daerah 2. Belum Optimalnya Kualitas Pelaporan Kinerja di Perangkat Daerah 3. Belum Optimalnya Evaluasi Internal AKIP di Perangkat Daerah
4.3	**Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima**	Belum Optimalnya Peningkatan Manajemen dan Implementasi Pelayanan Publik	1. Belum Optimalnya Penerapan dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah 2. Belum Optimalnya Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah
4.4	**Belum optimalnya peningkatan inovasi daerah penyelenggaraan pemerintahan**	Belum maksimalnya pemanfaatan hasil kajian dan riset pada Perangkat Daerah serta belum maksimalnya inovasi daerah yang memenuhi standar tingkat kematangan	1. Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi Jenjang Pendidikan Aparatur Sipil Negara 3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi
4.5	**Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Daerah**	Kualitas sinkronisasi perencanaan & penganggaran belum optimal	1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah 2. Belum Maksimalnya keselarasan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pemerintah 3. Belum Optimalnya Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah 4. Belum Optimalnya Kualitas Inovasi di Instansi Pemerintah

Sumber : Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2023

2.3.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah meliputi antara lain:

A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
   1) Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pembangunan Sekolah di Kabupaten/Kota pada jenjang SMA,SMK,SLB
   2) Belum optimalnya Peningkatan ketersediaan Akses pembiayaan pendidikan
   3) Belum Optimalnya Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/Tenaga Pendidik Produktif
   4) Belum optimalnya peningkatan mutu kurikulum pendidikan

2. Kesehatan
   1) Belum optimalnya ketersediaan mutu dan sumber daya manusia kesehatan
   2) Belum Optimalnya Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit
   3) Belum Optimalnya Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
   4) Belum Optimalnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Stunting
   5) Belum Optimalnya Peningkatan Pemenuhan Gizi
   6) Belum Optimalnya Peningkatan Akses Rumah Layak Huni, Air Bersih dan Sanitasi
   7) Belum Optimalnya Penurunan Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   1) Belum optimalnya kondisi jaringan jalan dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan sentra-sentra produksi di Sumatera Utara
   2) Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan
   3) Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan antara lain pembebanan berlebihan dan bencana alam
   4) Masih rendahnya kualitas kompetensi pelaku jasa konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi
   5) Masih terbatasnya konektivitas sehingga menjadi hambatan dalam pengembangan Kawasan strategis provinsi
   6) Belum optimalnya penanganan konservasi dan pelestarian Sumber Daya Air, layanan jaringan irigasi permukaan dan rawa. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal
   7) Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian.
   8) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Sumber Daya Air, yang terdiri dari OPD Pengelola Sumber Daya Air, TKPSDA Wilayah Sungai, Komisi Irigasi, dan P3A/GP3A/IP3A. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *good goverment* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;
   9) Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan.
   10) Cakupan pelayanan persampahan masih belum optimal
   11) Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi yang banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sebagai dampak dari umur jaringan

irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Sumatera Utara.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   1) Belum Optimalnya Perencanaan Penyediaan Akses Air Minum
   2) Belum Optimalnya Pemanfaatan Kapasitas SPAM
   3) Pengolahan Akhir Sampah belum sesuai Standar
   4) Rendahnya Ketersediaan dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Akses Air Limbah
   5) Masih adanya kebutuhan rumah layak huni
   6) Masih terdapat kawasan kumuh;
   7) Rendahnya Ketersediaan Infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman dan Belum Terintegrasi/terpadu pengelolaan layanan infrastruktur/PSU Kawasan Permukiman
   8) Rendahnya pemeliharaan jaringan irigasi
   9) Rendahnya ketersediaan jaringan irigasi ditingkat sekunder dan tersier

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   1) Tingkat pelanggaran hukum masih cukup tinggi.
   2) Belum optimalnya penegakan Perda.
   3) Upaya penegakan Perda masih bersifat represif, yang menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat;
   4) Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan dan belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
   5) Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.
   6) Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini dan masih tingginya intensitas daerah rawan bencana di Sumatera Utara.

6) Sosial
   1) Belum maksimalnya penanganan PMKS dan fakir miskin
   2) Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum
   3) mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
   4) Kondisi panti masih banyak dalam kondisi rusak
   5) Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
   6) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat

B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   1) Masih kurangnya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
   2) Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
   3) Rendahnya persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan;
   4) Belum optimalnya fungsi Balai Latihan Kerja serta prasarana dan sarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
   5) Rendahnya persentase perusahaan yang menyahkan Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

6) Terbatasnya kuantitas dan kualitas pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tidak sebanding dengan jumlah kasus/ perkara perselisihan kepentingan yang harus dimediasi.
7) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sangat tidak sebanding dengan jumlah Pegawai Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan.
8) Jumlah pegawai pengawas spesialis yang sangat kurang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1) Belum optimalnya integrasi Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan;
   2) Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   3) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
   4) Belum optimalnya kontribusi dalam perwujudan provinsi layak anak melalui kabupaten/kota layak anak;
   5) Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data terpilah.

3. Pangan
   1) Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan ;
   2) Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan);
   3) Rendahnya pengawasan pangan yang beredar;
   4) Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu;
   5) Rendahnya kualitas SDM petani;
   6) Sistem pemasaran belum efisien dan berkeadilan (harga masih ditentukan pedagang);
   7) Minimnya jumlah penyuluh pertanian.
   8) Persediaan pangan yang belum bisa memenuhi kebutuhan.

4. Pertanahan
   1) Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan
   2) Belum optimalnya reforma agraria.
   3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembebasan lahan
   4) Terbatasnya bantuan dari aparat hukum dalam mengoordinasikan dan menjaga ketenteraman/ketertiban dalam penyelesaian masalah pertanahan

5. Lingkungan Hidup
   1) Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas air, udara maupun lahan.
   2) Masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah
   3) Masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, serta masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
   4) Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK yang masih

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   1) Belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota
   2) Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.

3) Kurangnya sosialisasi pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Belum Optimalnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat desa;
   2) Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat desa;
   3) Belum optimalnya pembinaan terhadap BUMDES maju
   4) Kurangnya akses pelayanan dasar pada desa mandiri

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB mandiri;
   2) Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (Stakeholder dan masyarakat) dalam pengembangan program dan kegiatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Sumatera Utara.
   3) Belum optimalnya pengendalian penduduk;

9. Perhubungan
   1) Fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum maksimal dan merata;
   2) Belum maksimalnya penyerahan aset terminal tipe B yang merupakan kewenangan Provinsi;
   3) Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pergerakan orang dan barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (konektivitas simpul)
   4) Belum maksimalnya integrasi pelayanan antar Moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah.(konektivitas jaringan)
   5) Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas
   6) Belum optimalnya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan;

10. Komunikasi dan Informatika
   1) Belum optimalnya penyebaran informasi publik akibat belum optimalnya kapasitas SDM dalam pemahaman digital dan teknologi
   2) Belum optimalnya fasilitas teknologi IT dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik;
   3) Beragamnya Media Komunikasi yang digunakan oleh masyarakat dalam mengakses informasi baik konvensional maupun digital
   4) Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengelola SPBE, Infrastruktur Jaringan dan Masyarakat
   5) Belum optimalnya pengintegrasian TIK dalam mendukung Sistem Pemerintah yang berbasis Elektronik
   6) Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   1) Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk go digital.
   2) Belum optimalnya strategi pemasaran produk Koperasi dan UMKM khususnya di daerah-daerah destinasi wisata
   3) Masih rendahnya kualitas produk UMKM untuk memasuki pasar ekspor
   4) Masih kurangnya akses permodalan UMKM

12. Penanaman Modal

1) Belum optimalnya dukungan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi
2) Belum optimalnya integrasi sistem layanan perizinan terpadu
3) Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT
4) Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;

13. Kepemudaan dan Olahraga

1) Belum maksimalnya pembinaan dan apresiasi kepada tenaga keolahragaan dan atlet berprestasi
2) Belum optimalnya upaya peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan;
3) Belum optimalnya sinkronisasi antara organisasi olahraga dengan sekolah dalam hal pembibitan, dan pembinaan prestasi olahraga pelajar/ atlet pelajar yang menjadi cikal bakal atlet nasional di masa depan;
4) Belum maksimalnya atlet yang mengikuti Event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertanding yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.
5) Belum optimalnya peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan
6) Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7) Belum optimalnya Peningkatan daya saing kepemudaan

14. Statistik

1) Belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun Geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.
2) Masih minimnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral;
3) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan statistik sektoral

15. Persandian

1) Belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.
2) Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung persandian dan keamanan informasi;
3) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi;

16. Kebudayaan

1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan
2) Belum maksimalnya penyelenggaraan Event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata;
3) Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya
4) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan
5) Masih rendahnya partisipasi seni dan budaya masyarakat
6) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

17. Perpustakaan

1) Rendahnya tingkat Literasi masyarakat yang ditandai dengan masih rendahnya minat baca masyarakat.

2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi/ digital/ E-Library;
3) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan (Pustakawan) yang bersertifikasi;
4) Belum optimalnya gerakan minat baca melalui sosialisasi dan promosi perpustakaan, lomba-lomba minat baca, bimbingan teknis pengelola semua jenis perpustakaan, Pameran perpustakaan, sosialisasi minat baca dan promosi Gerakan Literasi di Provinsi Sumut
5) Masih minimnya pengembangan dan pembinaan semua Jenis perpustakaan guna peningkatan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat minimnya sarana prasarana untuk pengembangan titik baca, pojok baca, gerobak baca dan pengembangan semua jenis perpustakaan di Sumatera utara.
6) Kurangnya ketersediaan semua jenis bahan perpustakaan yang berkualitas di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

18. Kearsipan

1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan yang ditandai dengan penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat belum optimal.
2) Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sumatera Utara
3) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM Kearsipan (Arsiparis) yang bersertifikasi
4) Belum optimalnya penataan Kearsipan berbasis digital di PD Pemprovsu
5) Belum dimilikinya pedoman tata cara kearsipan yang diberlakukan secara baku

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2) Belum optimalnya industri pengolahan perikanan;
3) Belum optimalnya pengawasan UU Fishing;
4) Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah;
5) Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial yang masih rendah
6) belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan

2. Pariwisata

1) Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata masih terdampak akibat Pandemi Covid-19.
2) Kurang optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata
3) Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat
4) Kurang optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif
5) Kurang optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya

3. Pertanian

1) Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Belum Mencukupi Kebutuhan
2) Belum optimalnya produksi sektor pertanian, produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
3) Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi
5) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
6) Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
7) Tingkat kesejahteraan petani, nelayan dan peternak yang masih rendah

4. Kehutanan

1) Masih kurangnya penanganan pelestarian hutan dan lahan kritis
2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutan terutama perambahan, perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain;
4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan kawasan hutan;
5) Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan
6) Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Utara.
7) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan untuk meningkatkan perekonomian

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Tidak meratanya Rasio Elektrifikasi di Sumatera Utara
2) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi
3) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
4) Potensi Energi Alternatif yang belum termanfaatkan sepenuhnya
5) Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

6. Perdagangan

1) Masih belum efisiennya perdagangan dalam negeri daerah
   a. Belum optimalnya jaringan produksi, distribusi dan promosi daerah
   b. Belum optimalnya koordinasi jaringan gugus tugas fungsi pengendalian inflasi daerah dan ketahanan pangan daerah
   c. Belum terintegrasinya simpul jaringan data dan informasi pemantauan bahan pokok dan bahan penting, kabupaten/kota, provinsi dan pusat
2) Kurang optimalnya kualitas produk yang memenuhi standar ekspor
3) Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha ekspor
4) Masih rendahnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
5) Belum optimalnya standarisasi dan perlindungan konsumen;
6) Keterbatasan peran unit pengelola standarisasi mutu barang

a. Kapasitas laboratorium pengujian mutu dan kalibrasi yang masih terbatas
b. Kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja

7. Perindustrian

1) Keterbatasan Infrastruktur Industri;
2) Rendahnya Investasi Industri;
3) Kualitas Tenaga Kerja;
4) Persaingan dengan Produk Impor

8. Transmigrasi

1) Kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam penetapan Kawasan Transmigrasi.
2) Masih adanya Pemerintah Kabupaten yang menolak program transmigrasi didaerahnya, padahal potensi masih terbuka di daerah tersebut.

D. Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

1) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
2) Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah;
3) Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT;
4) Masih kurangnya tindak lanjut implementasi terhadap kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
5) Masih belum maksimalnya layanan administrasi umum dan produk hukum berbasis IT.

2. Sekretariat DPRD

1) Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala karena perbedaan kepentingan dan pandangan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat

E. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

1) Belum optimalnya kelengkapan dan pemanfaatan data informasi dalam rumusan analisis perencanaan pembangunan daerah
2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah
3) Belum optimalnya keselarasan perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan dari tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya.

2. Keuangan

1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;

2) Perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam peningkatan Pendapatan Daerah melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Perlu melakukan optimalisasi retribusi daerah, meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD;
3) Belum optimalnya kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis IT
5) Masih lemahnya inventarisir dan pengawasan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Kepegawaian

1) Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan
2) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian
3) Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan Stakeholder bidang kepegawaian
4) Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital;
2) Masih belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan /diklat
3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendidik kediklatan
4) Masih belum optimalnya kerjasama dengan Stakeholder terkait untuk peningkatan distribusi pemerataan diklat dan pelatihan terutama terkait pemenuhan demand diklat sesuai dengan perkembangan zaman 4.0
5) Penguatan koordinasi yang optimal antar lintas OPD dan kabupaten/kota terkait identifikasi kebutuhan diklat prioritas yang dibutuhkan serta mekanisme alokasi penganggaran yang dibutuhkan (mekanisme kontribusi)

5. Penelitian dan Pengembangan

1) Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang disampaikan kepada perangkat daerah
2) Belum efektifnya sosialisasi terhadap hasil penelitian Balitbang kepada Perangkat daerah/pemangku kepentingan
3) Belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi
4) Masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.
5) Belum tersedianya informasi dan data sejauh mana hasil kelitbangan yang telah dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

1) Masih belum sinkronnya pola pemeriksaan yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Teknis, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Inspektorat Provinsi;

2) Masih belum adanya Kendali Mutu dan Standar Operasional Pemeriksaan yang dapat dijadikan acuan di dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan secara teknis;
3) Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan stabilitas politik dan ketahanan bangsa dari ancaman ekstremisme terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi

2.3.3 Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok di atas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPD Provinsi Sumatera Utara, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPD dan arah kebijakan RKP. Maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan suatu elemen penting dalam perwujudan Golden Generation menuju 100 Tahun Indonesia pada tahun 2045. Indonesia akan berada pada fase bonus demografi dimana terjadi peningkatan penduduk sebesar 70 persen pada usia produktif (16-65 tahun) sementara 30% persen merupakan penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa (BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022). Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk keempat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menjadikan Sumatera Utara sebagai penyumbang Sumber Daya Manusia yang produktif dan melimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 170,9 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 187,6 juta jiwa pada tahun 2025. Hal tersebut mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif.

Dengan kuantitas penduduk yang lebih dari cukup, pembangunan yang membentuk *human capital* (modal manusia) seharusnya berjalan dengan optimal. Faktanya, kuantitas penduduk dengan peringkat keempat terbesar di Indonesia tidak menjadikan Sumatera Utara berada di jajaran provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Meskipun kuantitas penduduk Sumatera Utara berada di posisi keempat tertinggi, Indeks Pembangunan Manusia selama 2 tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata capaian IPM Nasional. Pada tahun 2021, IPM Sumatera Utara hanya menempati urutan ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara itu, tahun 2022, Sumatera Utara berada pada urutan ke-15.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Untuk komponen pengetahuan yang direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Provinsi Sumatera

Utara memiliki capaian indikator RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional, yaitu sebesar 9,71 tahun pada tahun 2022, dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,54 tahun. Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Utara juga lebih baik dibandingkan capaian Nasional yaitu sebesar 13,27 tahun pada tahun 2022 dengan capaian Nasional sebesar 13.08 tahun. Pencapaian dua komponen IPM ini memang lebih baik pada skala nasional, namun apabila dikomparasi secara relatif regional, maka Provinsi Sumatera Utara masih merupakan peringkat ke -2 (dua) untuk Wilayah Sumatera, di bawah capaian Kepulauan Riau.

Optimalisasi Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya pada indikator RLS dan HLS, yang direpresentasikan secara akumulatif pada indikator Indeks Pendidikan, melalui isu strategis antara lain pada pemerataan akses Pendidikan melalui peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Sekolah Menengah, Kejuruan dan Khusus (Unit Sekolah Baru, Rehabilitasi sekolah dan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan identifikasi kebutuhan daerah); peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM Guru Produktif di bidang keahliannya serta sejalan dengan kebijakan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan dan peningkatan mutu dilaksanakan melalui upaya revitalisasi SMK, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum vokasi *(Link and Match)* dengan DUDI, serta peningkatan jumlah lulusan vokasi yang diserap oleh Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Kondisi kesehatan di Provinsi Sumatera Utara juga masih belum optimal, Derajat Kesehatan belum menjangkau seluruh penduduk. Kapasitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak serta pelayanan reproduksi belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian Nasional, UHH Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 69.61 th kondisi ini meningkat dibanding tahun 2021 (69.23 th), walaupun terjadi peningkatan UHH di Provinsi Sumatera Utara namun capaiannya masih lebih rendah di banding capaian nasional yaitu sebesar 71.57 pada tahun 2021 dan 71.85 pada tahun 2022.

Kesetaraan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender dimana kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, dimana IPM Perempuan pada tahun 2021 sebesar 69.08 dan Laki-laki sebesar 76.14. Selama periode 2011-2021, capaian IPM perempuan berhasil meningkat sebesar 5,21 poin, sedangkan IPM laki-laki meningkat sebesar 4,73 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Namun demikian, hingga 2021, posisi capaian IPM perempuan masih berada di bawah IPM laki-laki.

2. Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penurunan kemiskinan adalah komponen penting dari ekonomi inklusif. Ini melibatkan pengurangan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan peluang ekonomi lainnya. Penurunan kemiskinan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan sosial.

Arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 (satu) pada pencapaian target global Sustainable Development Goals (SDGs).

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten agar dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP) di bawah US$1,9 per hari.

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 1,41 persen atau sekitar 212. 810 jiwa, meningkat 0.02 poin dibandingkan pada tahun 2021, sebesar 1,39 persen atau sekitar 208.060 jiwa. Peningkatan ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum mutakhirnya basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berimplikasi pada program penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran; masih dibutuhkan penguatan konvergensi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem dari seluruh Perangkat Daerah, sektor non Pemerintah serta Stakeholder terkait; serta penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menjadi fokus wilayah prioritas Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 baik dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Perekonomian Indonesia yang sudah mulai menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian (*scaring effect*) yang mengena pada sisi produksi yang mempengaruhi penurunan produktivitas tenaga kerja. untuk itu, perlu upaya yang lebih serius khususnya pada penduduk usia kerja yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 7,67 juta orang (69,75 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 159 ribu orang. Penduduk bekerja juga mengalami peningkatan

sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak dua ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2021. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang.

Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan solusi dalam bentuk Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja Online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani melalui produksi dan produktivitas pertanian.

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pariwisata memiliki *multiflyer* efek ke berbagai sektor serta berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor pariwisata Sumatera Utara terhadap PDRB Sumatera Utara tercatat sebesar 6,57% pada Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi baru badi Sumatera Utara. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah merilis Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), dimana Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi ke-14 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan poin sebesar 3,548. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Utara mengupayakan untuk pemanfaatan adopsi teknologi digital dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian khususnya di sektor strategis Provinsi Sumut seperti sektor pariwisata maupun sektor lainnya (ekonomi kreatif, pertanian, perikanan dll).

3. Optimalisasi Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dalam Penguatan Konektivitas Dan Daya Saing Produktivitas Wilayah

Penanganan permasalahan infrastruktur di Sumatera Utara pada masa pandemi tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih fokus pada kebutuhan masyarakat mengingat pada 2 (dua) tahun anggaran, pembangunan Sumatera Utara difokuskan pada penanganan Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya diperlukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur.

Penyelesaian pertanahan dan tata ruang juga menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk diselesaikan. Selain itu, optimalisasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor Agraris, pembangunan dan pengelolaan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh, penurunan emisi gas rumah kaca serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi menjadi upaya pemenuhan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya penanganan risiko bencana juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif baik dari kesadaran masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Selain itu dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah Sumatera Utara memberikan fasilitasi dan kemudahan sesuai dengan kewenangannya kepada penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akun tabel, dan efisien. Infrastruktur dimaksud tidak terbatas pada gorong-gorong (*ducting*), tiang telekomunikasi (Tower), tiang (pole) dan lubang kabel (manhole) untuk adap digunakan secara bersama dengan biaya terjangkau.

Keterbatasan APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Berikut beberapa kegiatan prioritas yang memerlukan

dukungan pendanaan atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- Rencana Rusunawa Terintegrasi di KEK Sei Mangkei
  Menyikapi perkembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 83.304 jiwa sampai tahun 2025, maka perlu adanya konsep pembangunan rumah susun. Pengembangan rumah susun diarahkan berada di luar Kawasan Ekonomi Terpadu Sei Mangkei. Oleh karena itu perlu adanya alokasi ruang untuk mengakomodasi kebutuhan rumah tersebut. Perhitungan kebutuhan ruang rumah susun diasumsikan hanya 60% tenaga kerja yang tinggal di rumah susun dan 40% tinggal di perumahan. 40% berasal dari tenaga kerja lokal dan diasumsikan hanya 10% tenaga kerja lokal yang tinggal di rumah susun. Di samping penyediaan rumah bagi pekerja, Rusunawa ini juga menjadi alternatif bagi relokasi masyarakat korban bencana, masyarakat terdampak program pembangunan pemerintah, maupun masyarakat yang berada di wilayah negatif list, hal ini untuk mewujudkan kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana.
- Rencana Pembangunan BRT Mebidang
  Pengembangan simpul dan jaringan pelayanan transportasi, pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) sebagai sarana mobilitas penduduk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Khusus pada sektor transportasi darat, saat ini provinsi Sumatera Utara sedang memfokuskan pada upaya mewujudkan pengembangan sistem Angkutan Umum Massal berbasis jalan (Bus Rapid Transit/BRT) di wilayah perkotaan Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang).
  Sistem BRT nantinya kan dilayani dengan 1 (satu) koridor jalur khusus (delicated) sepanjang 17 km dan 17 koridor pengumpan (feeder), dengan total jumlah kendaraan sebanyak 515 unit bus besar bus ukuran besar dan medium. Untuk mendukung pelayanan BRT ini, akan dibangun halte, depot, fasilitas Charge bus listrik, serta fasilitas pejalan kaki (pedestrian), untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna. Tantangan utama dalam pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya transportasi adalah aspek investasi, pembiayaan dan kelembagaan.
- Pengembangan Pembangunan Sport Centre Sumatera Utara
  Sports Center Sumatera Utara merupakan kawasan olahraga yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Terletak sangat strategis di daerah yang dilalui jalan utama dari kota Medan dan Bandara Internasional Kualanamu. Berjarak 5,6 KM dari Bandara Internasional Kualanamu dan 4,4 KM dari Stasiun Batang Kuis, dengan kemudahan aksesibilitas yang akan terintegrasi dengan jalan Tol dan rencana pembangunan Moda transportasi LRT/BRT.

  Lahan yang digunakan dalam Kawasan Sport Center seluas 300 Ha terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jalan raya Bandar Udara Internasional Kualanamu. Secara umum, lahan ini diperuntukkan sebagai kompleks sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional. Selain itu akan disediakan sarana dan prasarana penunjang serta komersial yang mendukung terciptanya Kawasan Sports Center yang terintegrasi dan berkelanjutan (*Sustainable integratif Development*).

Setelah pelaksanaan PON XXXI pada bulan November Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara juga merencanakan Pembangunan Commercial dan Business Center di Kawasan Sports Center sebagai alternatif dalam Maintenance dan Operasional Pendukung. Adapun Pembangunan Commercial dan Business Center adalah sebagai berikut:

a. Business Center (Convention Hall, Expo, Perkantoran, Pusat Bisnis)
b. Shopping Center (Pusat Perbelanjaan)
c. Hotel
d. Entertainment Facilities (Fasilitas Hiburan)
e. Rumah Sakit

- Perencanaan Proyek *Waste to Energy*
  Proyek ini direncanakan untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) daerah Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Dimana kondisi saat ini sampah yang dihasilkan perhari adalah 3827,61 Ton/Hari dimana sampah yang paling banyak ada di Kota Medan 2500 Ton/hari, kemudian Deli Serdang 638 Ton/Hari, Kota Binjai 132,61 Ton/hari dan Karo 557 Ton/hari, rencana Lokasi TPA ini di Desa Limau Mungkur STM Hilir, Deli Serdang, konsep pembangunan TPA ini dengan sistem *Waste to Energy.*

- Ketahanan Bencana
  Karakter masyarakat yang tangguh juga ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, saat ini Provinsi Sumatera Utara belum dapat meraih capaian resiko bencana yang rendah. Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sumatera Utara, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 142,51 (sedang) dari sebelumnya pada tahun 2021 yaitu sebesar 143,83 (Sedang). Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Kompleksitas permasalahan bencana dan kemungkinan dampak bencananya serta dapat berpeluang terjadi di waktu mendatang di Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good goverment* adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan melalui program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada

Tahun 2020 memperoleh nilai 61,05 dengan kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 62,07 dengan Kategori B. Indeks reformasi birokrasi Provinsi mengalami kenaikan1,02 poin, namun belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh Perangkat Daerah, khususnya dalam pembangunan budaya kerja.

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dengan mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 8 (delapan) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut serta memberi dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan pencapaian kualitas pelayanan publik serta penataan kelembagaan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendorong terlaksananya pemerintahan yang baik dan dipercaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Perencanaan dan Pertanggungjawaban melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 memperoleh Nilai 62,79 dengan Predikat B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 63,89 dengan Predikat B. Hasil ini masih belum optimal yang disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yang mampu menyusun laporan kinerja perangkat daerah sehingga laporan yang disusun belum dapat menyajikan laporan kinerja yang memuat informasi atas evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pelayanan Publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik harus terus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sampai saat ini telah banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respons yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 memperoleh nilai 3,68

dengan Kategori B dan pada Tahun 2021 memperoleh nilai 3,80 dengan Kategori B.

Tata kelola pemerintahan yang inovatif merupakan upaya untuk menuju keadaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik serta bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah 39,41 dengan kategori inovatif, dan pada tahun 2022 memperoleh skor 54,36 dengan kategori inovatif. Sedangkan persentase pemanfaatan hasil riset terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sebesar 75%. Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan menyebabkan tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Inovasi merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi dilakukan sebagai upaya pembaruan terhadap prosedur dan birokrasi, serta kebijakan strategis dengan pendekatan yang lebih efisien, selektif, dan implementasi. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif ditinjau dari sudut pandang riset dan inovasi adalah dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi melalui pelaksanaan penelitian tematik sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah (RPJMD) serta pelaksanaan penelitian yang berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel. 2.101
Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2025

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2025	ISU STRATEGIS RKPD 2025
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan	
	Belum Optimalnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Belum Optimalnya Penurunan Angka Miskin	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan	
	Rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	
	Rendahnya pertumbuhan UKM dan IKM Baru	
	Rendahnya kesejahteraan petani dan rendahnya produktivitas	
	Rendahnya daya saing pariwisata terhadap PDRB	
Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Belum optimalnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan
	Belum Terpenuhinya Layanan Infrastruktur Permukiman	
	Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	
	Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah	

PRIORITAS PROVSU	PERMASALAHAN RKPD 2025	ISU STRATEGIS RKPD 2025
	Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat	
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif
	Belum optimalnya kualitas kinerja pemerintah daerah	
	Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima	
	Belum optimalnya peningkatan inovasi daerah penyelenggaraan pemerintahan	
	Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Daerah	

Selain isu strategis daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan isu strategis tematik yaitu terkait dengan:

1. Penurunan Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Permasalahan Stunting pada usia dini (periode 1000 HPK), akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Penurunan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak Stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, Stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Untuk mencegah dan menurunkan Stunting, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan Stunting berupa 5 (lima) pilar yang meliputi (1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan (2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat (3) peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif (4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi (5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi; yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk dapat (1) Menurunkan prevalensi Stunting; (2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (3) Menjamin pemenuhan asupan gizi; (4) Memperbaiki pola aksi; (5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan (6)

Meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dengan kelompok sasaran yang meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen. Target tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Peta jalan (*roadmap*) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi pada tahun 2021. Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen. Dan di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen.

Tingkat kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan 0,18 poin yaitu dari 8,33 persen pada September 2022 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023. Setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023 atau berkurang 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara berada di bawah kemiskinan Nasional, pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen.

Tabel. 2.102
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1	Nias	21,99	15,10
2	Mandailing Natal	41,04	8,86
3	Tapanuli Selatan	20,09	7,01
4	Tapanuli Tengah	47,09	11,50
5	Tapanuli Utara	26,39	8,54
6	Toba	14,94	8,04
7	Labuhan Batu	42,58	7,99
8	Asahan	61,69	821
9	Simalungun	69,21	7,87
10	Dairi	21,42	7,47
11	Karo	35,65	7,98
12	Deli Serdang	82,75	3,44
13	Langkat	98,16	9,23
14	Nias Selatan	54,29	16,39
15	Humbang Hasundutan	17,14	8,69
16	Pakpak Bharat	4,01	7,54
17	Samosir	14,86	11,66
18	Serdang Bedagai	45,88	7,44
19	Batu Bara	49,18	11,38
20	Padang Lawas Utara	26,17	8,79
21	Padang Lawas	24,51	7,89
22	Labuhan Batu Selatan	29,83	8,06

No.	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
23	Labuhan Batu Utara	34,13	9,08
24	Nias Utara	30,78	21,79
25	Nias Barat	18,66	22,81
26	Kota Sibolga	10,02	11,42
27	Kota Tanjung Balai	22,45	12,21
28	Kota Pematang Siantar	18,96	7,24
29	Kota Tebing Tinggi	16,36	9,49
30	Kota Medan	187,28	8,00
31	Kota Binjai	13,85	4,79
32	Kota Padangsidimpuan	16,15	6,85
33	Kota Gunungsitoli	22,03	14,78
	Sumatera Utara	**1239,71**	**8,15**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara Maret 2023

Serta terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota di Sumatera utara dengan Jumlah Penduduk Miskin di atas 100.000 Jiwa, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

3. Peningkatan Investasi

Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia sepanjang 2023 bisa dikatakan cukup membaik. Pencapaiannya menjadi akselerasi perekonomian nasional. Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi 2023 mencapai Rp1.418 triliun, berhasil mencapai 101,3% dari target yang ditetapkan Bapak Presiden Jokowi sebesar Rp1.400 triliun. Pencapaian itu tentu sangat menggembirakan, di tengah awan gelap yang menyelimuti perekonomian global. Peran investasi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, nilai realisasi investasi untuk hilirisasi pada tahun 2023 sebesar Rp375,4 triliun atau 26,5% dari total realisasi investasi sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah se-Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), seperti dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (17/1 2023).

Sejumlah strategi pun sudah dirancang pemerintah pusat dan daerah agar aliran investasi tak surut terhalang sentimen geopolitik dan geoekonomi. Langkah strategis dalam tataran kebijakan perlu dilakukan. Pertama, membenahi persoalan di dalam negeri terutama dari aspek perizinan. Kedua, terus melakukan promosi di negara lain baik secara bilateral maupun dengan memanfaatkan berbagai forum internasional sehingga mampu mengakselerasi investasi. Hal itu termasuk, pelibatan Indonesia dalam aneka forum kerja sama multilateral yang membawa dampak besar terhadap kepercayaan investor asing.

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan respons positif dengan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selanjutnya, Pemerintah

Sumatera Utara juga telah menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Regulasi yang telah diterbitkan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan iklim investasi sehingga menjadi daya tarik bagi calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara.

Pencapaian indikator investasi Provinsi Sumatera Utara di peroleh data sebagaimana berikut ini:

Tabel. 2.103
Capaian Indikator Investasi 2019-2022

No.	Indikator	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Investor PMDN (dalam RKPD)	Investor	200	550	205	1.377	225	9.146	215	4.186	236	17.278
2	Investor PMA (dalam RKPD)	Investor	337	428	342	401	359	1.613	342	690	359	3.036
3	Nilai Investasi PMDN	Rp Triliun	,89	19,7	18	18,1	19,6	22,78	18,75	18,4	20,58	21,5
4	Nilai Investasi PMA	Rp Triliun	1,11	5,7	16	14	17,00	18,88	16,25	8,4	17,85	17,48
5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN berdasarkan lap.LKPM	Orang	0.233	10.255	11.250	11.265	13.612	25.682	12.375	22.568	14.970	67.373
6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA berdasarkan lap.LKPM	Orang	4.637	4.739	5.330	5.632	7.039	6.702	6.121	6.118	7.743	8.857
7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Persen	19,5	19,5	20,00	37	21,50	23,29	21,00	1,62	22,0	-5,31
8	Jumlah izin yang terbit	Dokumen	3.257	2.747	1.100	1.428	1.170	1.511	1.484	1.565	1.484	2.068

Sumber: DPM&P2TSP Provsu, 2024

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang disebutkan dalam Inpres untuk:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan

produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada K/L dan pemda.
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju satu juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi K/L dan pemda yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. inflasi Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi K/L dan pemda untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Pengendalian Inflasi

Presiden memberikan lima arahan kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi. Tim pengendali inflasi diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah agar pasokan dan barang kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada jajarannya Tim Pengendalian Inflasi di pusat maupun daerah (TPIP dan TPID) untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menekan inflasi. Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022, Presiden Jokowi menyebut dalam kondisi yang berat saat ini, para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak hanya bekerja rutin dan standar, namun harus bekerja secara detail.

Dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait lainnya. Telah menginisiasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan sejak awal Agustus 2022 lalu.

Pada Desember 2022 terjadi inflasi Year On Year (YoY) gabungan lima Kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 6,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,77. Sementara di tingkat nasional inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 5,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,59. Perbandingan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

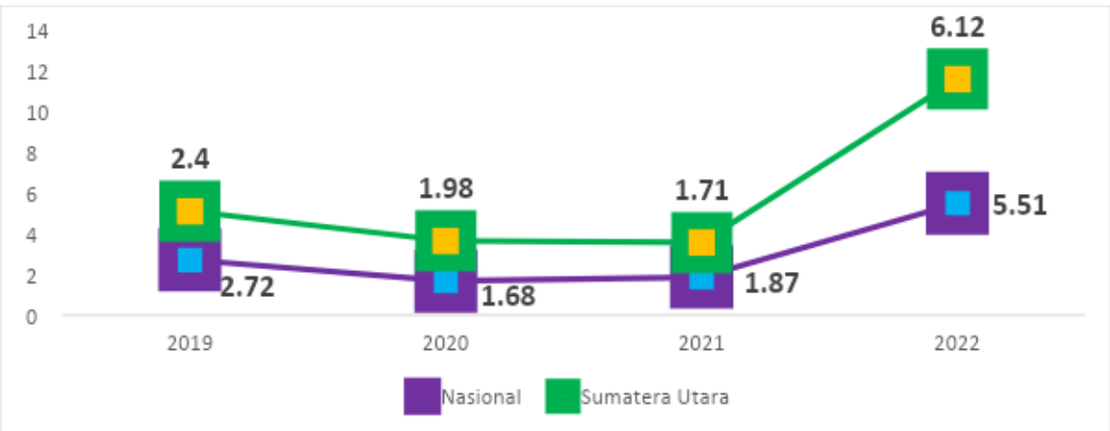

Sumber: BPRS BPS 2022

Grafik 2.19
Laju Inflasi Sumatera Utara dan Nasional 2016-2020 (y-on-y)

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,66 persen; kelompok perumahan, air,

listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,49; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,91 persen; kelompok transportasi sebesar 18,73 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,12 persen

Pada Desember 2022, seluruh kota IHK di Sumatera Utara yang berjumlah lima kota mengalami inflasi YoY. Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 6,43 persen dengan IHK sebesar 115,10 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,74 persen dengan IHK sebesar 114,65 persen.

Sedangkan pada tahun 2023, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,79 persen; kelompok transportasi sebesar 1,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,36 persen.

Dari delapan Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara, inflasi YoY tertinggi terjadi di Padangsidempuan sebesar 4,13 persen dengan IHK sebesar 107,78 poin dan terendah terjadi di Pematang Siantar sebesar 2,89 persen dengan IHK sebesar 106,95 poin.

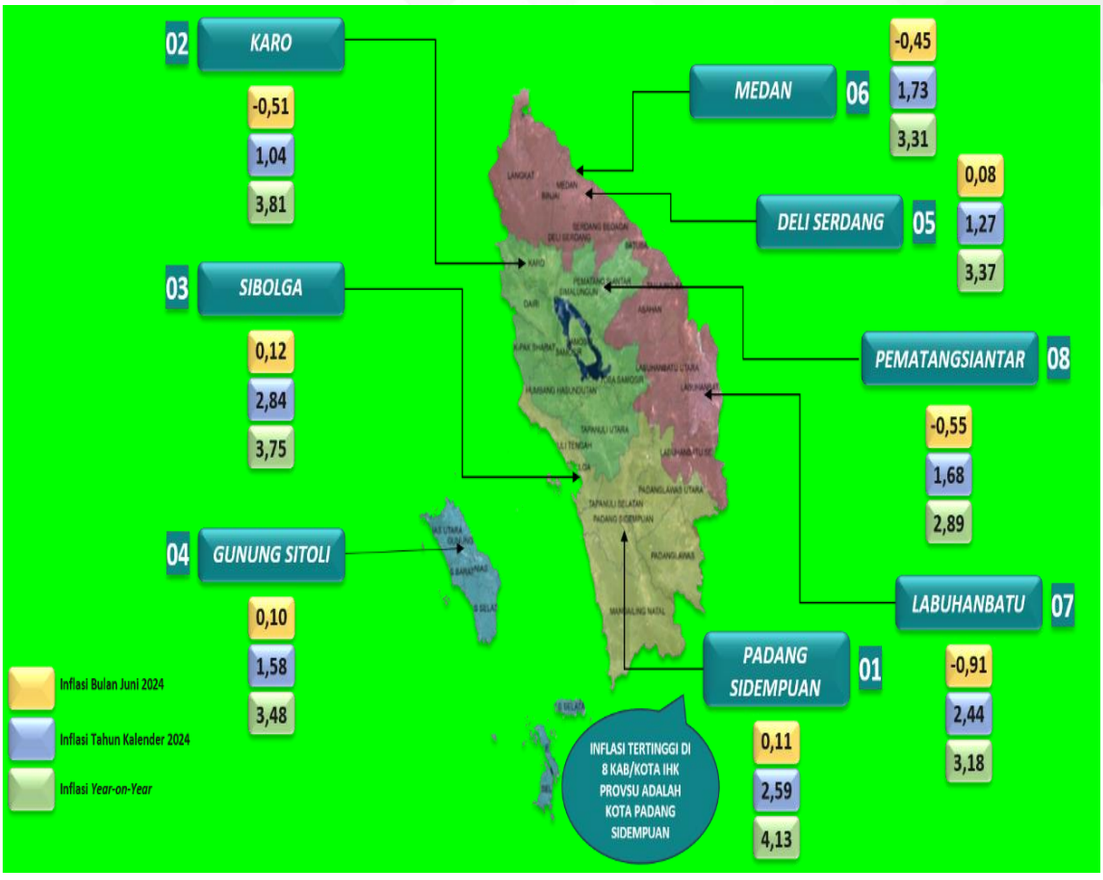

Gambar 2.1
Tingkat Inflasi 8 Kabupaten/Kota IHK di Sumatera Utara Mei 2024
Sumber : BPS, data diolah

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Untuk tahun 2022, Provinsi Sumatera Utara telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25,16 Juta Ton Co2Eq dari target 31,06 Ton Co2Eq pada tahun 2023 sehingga masih perlu yang maksimal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga mencapai target yang diharapkan.

7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

Berdasarkan Hasil analisa pencapaian target TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban;
3. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Pengentasan Kemiskinan, Penguatan Ketahanan Pangan dan Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
6. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan; serta
7. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sumatera Utara masih belum mencapai target yang diharapkan, baik ditinjau dari aspek tenaga kerja, kepariwisataan, maupun industri manufaktur. Demikian juga rasio penerimaan pajak terhadap PDB, total pendapatan pemerintah terhadap PDB, proporsi anggaran riset terhadap PDB. Hal lainnya adalah rendahnya akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jasa keuangan, rendahnya penerapan kota hijau, masih terdapatnya rumah tangga kumuh perkotaan, kawasan perkotaan metropolitan yang belum memenuhi standar pelayanan perkotaan, jumlah kota pengendali urbanisasi, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Perkotaan, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum di perkotaan, dan juga rendahnya penegakan hukum bagi penggunaan air tanah serta kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang pelayanan publik, demikian juga dengan indeks perilaku anti korupsi. Timbulnya masalah-masalah ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola pemerintahan. Pemerintah kurang hadir baik dari aspek kebijakan maupun kegiatan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Selain hal itu berbagai indikator yang terdapat pada isu ini, dapat dipenuhi dengan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penentuan Isu strategis Peningkatan Infrastruktur Dasar, Telekomunikasi dan Pengelolaan Wilayah Urban, didasarkan pada fakta indikator-indikator TPB yang berkaitan dengan hal tersebut belum mencapai target nasional. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak belum terpenuhi, demikian juga dengan kapasitas air baku, layanan sanitasi, pengelolaan air limbah baik terpusat, kawasan maupun komunal, pengelolaan lumpur tinja maupun jaringan gas rumah tangga, serta konsumsi listrik per kapita yang masih rendah. Infrastruktur lain yang belum terpenuhi antara lain. adalah panjang jalan tol, jumlah pelabuhan strategis, serta jumlah sistem angkutan rel.

Jika ditinjau dari aspek ketersediaan air, Sumatera Utara secara umum masih surplus, namun daerah-daerah perkotaan umumnya sudah defisit. Oleh sebab itu peranan infrastruktur untuk mendistribusikan air menjadi sangat penting. Ketersediaan jaringan air yang cukup dan andal akan berperan dalam pembangunan dan pelayanan sanitasi.

Dalam aspek telekomunikasi proporsi penduduk yang terlayani *Mobile broadband* juga belum mencapai target, baik karena tingkat penetrasi yang rendah maupun proporsi populasi yang memiliki telepon genggam yang masih rendah.

Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan diangkat menjadi salah satu isu prioritas berhubung target-target untuk indikator yang berhubungan dengan hal ini masih banyak yang belum tercapai, diantaranya masih terjadinya kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan belum terlayaninya korban kekerasan ini secara komprehensif. Total Fertility Rate yang masih tinggi, baik karena angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

masih tinggi, median usia kawin pertama yang rendah, atau perempuan yang belum bisa membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi.

Pada bidang pemberdayaan, jumlah perempuan yang berada pada posisi manajerial masih rendah, demikian juga yang terlibat dalam parlemen.

Pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan tenaga kerja masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara meskipun ketersediaan pangan melebihi kebutuhan, namun ketersediaannya tidak merata pada seluruh wilayah. Angka kemiskinan di Sumatera Utara yang belum mencapai target nasional menjadi salah satu faktor pendukung isu ini. Hak-hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi, demikian juga jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat masih tinggi.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara juga masih belum mencapai target nasional, asupan kalori minimum belum tercapai, ketidakcukupan konsumsi pangan masih terjadi, sehingga kasus Stunting masih terjadi pada beberapa wilayah.

Persentase tenaga kerja formal juga masih rendah, tingkat setengah pengangguran masih tinggi bahkan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih rendah.

Peningkatan Tata Kelola Kesehatan dan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan isu pembangunan berkelanjutan berikutnya di Sumatera Utara. Isu ini diangkat karena masih banyak indikator kesehatan dan pola hidup sehat yang belum tercapai di Sumatera Utara, diantaranya persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun masih tinggi, prevalensi darah tinggi, obesitas, dan penyalahgunaan narkoba. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan juga masih perlu ditata, persentase perempuan yang proses melahirkannya pada fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih juga belum mencapai target, *Unmet Need* pelayanan kesehatan serta *Unmet Need* kebutuhan Keluarga Berencana juga masih terjadi termasuk prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada pasangan usia subur.

Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Kebencanaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara karena target indikator-indikator lingkungan dan kebencanaan banyak yang belum tercapai seperti luas lahan kritis, kualitas air sungai sebagai air baku, kualitas air danau, emisi gas rumah kaca, timbunan sampah yang didaur ulang, dan sampah perkotaan yang tertangani. Peningkatan hasil hutan bukan kayu guna pemulihan DAS juga belum tercapai, luas tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan, dll.

Dari aspek tata kelola, jumlah jaringan sumber daya air yang dibentuk juga belum memadai, demikian juga dengan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat, jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dokumen pelaporan penurunan rumah kaca belum memenuhi target, dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati serta ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Aspek kebencanaan yang belum mencapai target antara lain. dokumen strategi pengurangan risiko bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, serta jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

Angka partisipasi murni, persentase SMA/MA berakreditasi minimal B, proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi sekolah dengan akses listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin dam fasilitas cuci tangan yang belum terpenuhi menjadi dasar perumusan isu strategis Peningkatan Kualitas Air dan Layanan Pendidikan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional. Tren pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara menunjukkan peningkatan seiring dengan pemulihan pasca pandemi covid-19. Meskipun tendensi ekonomi global yang cenderung mengalami perlambatan akibat dampak perang Ukraina dan Rusia dan tensi geopolitik antara Israel dengan Palestina serta kondisi yang terjadi di Laut Merah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan tumbuh meskipun berada pada ketidakpastian ekonomi global.

Kecenderungan tren penurunan suku bunga perbankan di level global seiring semakin terkendalinya laju inflasi global, yang berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai seperti konflik geopolitik yang berkepanjangan sehingga menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang Utama Sumatera Utara seperti Tiongkok menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun arah kebijakan perekonomian Tahun 2025.

Perekonomian Sumatera Utara untuk keseluruhan tahun 2025 diprakirakan meningkat. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat melalui implementasi program *biofuel* B35 dan B40 yang mendukung industri kelapa sawit serta pelaksanaan Pemilu 2024, meski masih dibayangi masih lemahnya harga komoditas utama di pasar internasional. Kebijakan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Penguatan Iptek, SDM, dan Inovasi mendukung hilirisasi SDA serta penguatan industri regional berinvestasi besar dan penguatan industri lokal yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi, peningkatan kerja sama internasional serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting* melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan tahun Perkuatan Fondasi Transformasi Ekonomi pada Tahapan I dalam periode RPJPD 2025-2045. Untuk itu, pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengusung tema "Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan"

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Ketidakpastian ekonomi global menunjukkan kejadian yang semakin kompleks dan membentuk "*The Global Poly Crisis*", serta disebabkan oleh banyaknya *negative spillover* baik dari sisi ekonomi, keuangan, lingkungan yang telah terjadi secara global. Pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat yang mencapai angka 5,2 persen (yoy) pada tahun 2023 berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pra pandemi. Tren *decoupling* dalam rantai nilai Cina dan Amerika yang diiringi fenomena *reshoring* ke negara sekutu Amerika, serta *onshoring* kembali ke Amerika memberikan tekanan lebih besar kepada pertumbuhan Cina. Sektor properti Cina yang lemah mengurangi permintaan impor Cina. Selain itu, Ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah kembali menimbulkan ketidakpastian global. Serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel menimbulkan

kekhawatiran akan peningkatan harga berbagai komoditas, seperti emas, minyak, hingga akhirnya berdampak terhadap rantai pasok dan perekonomian global. Apabila Israel melakukan pembalasan terhadap serangan Iran, maka hal tersebut berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi dunia. Berbagai spekulasi yang dapat timbul dari perang wilayah Timur Tengah ini adalah potensi peningkatan pengeluaran pertahanan di berbagai negara sebagai respons peningkatan ketegangan geopolitik pasca serangan Iran ke Israel. Peningkatan pengeluaran pertahanan tersebut dapat berisiko memicu peningkatan rasio utang berbagai negara ke depan.

Secara umum, ekonomi global diperkirakan membaik pada tahun 2025 yang didorong oleh *emerging markets*. Hal ini didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi. Berikut Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025;

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2025

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023-2025											
	IMF (JAN 24)			WB (JAN 24)			ADB (DES 23)		OECD (NOV 23)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2023	2024	2025
World	**3,1**	3,1	3,2	**2,6**	2,4	2,7	-	-	2,9	2,7	3,0
Major Economies	**1,6**	1,5	1,8	**1,5**	1,2	1,6	1,6	1,3	-	-	-
Amerika Serikat	2,5	2,1	1,7	2,5	1,6	1,7	2,4	1,8	2,4	1,5	1,7
Euro Area	0,5	0,9	1,7	0,4	0,7	1,6	0,5	0,8	0,6	0,9	1,5
Jepang	1,9	0,9	0,8	1,8	0,9	0,8	1,6	0,6	1,7	1,0	1,2
Emerging Markets	**4,1**	4,1	4,2	**4,0**	3,9	4,0	-	-	-	-	-
China	5,2	4,6	4,1	5,2	4,5	4,3	5,2	4,5	5,2	4,7	4,2
Indonesia	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**4,9**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**4,9**	**5,2**	**5,2**
Vietnam	-	-	-	4,7	5,5	6,5	5,2	6,0	-	-	-
Thailand	2,5	4,4	2,0	2,5	3,2	3,1	2,5	3,3	-	-	-
Malaysia	4,0	4,3	4,4	3,9	4,3	4,2	4,2	4,6	-	-	-
Filipina	5,3	6,0	6,1	5,6	5,8	5,8	5,7	6,2	-	-	-
Brazil	3,1	1,7	1,9	3,1	1,5	2,2	-	-	3,0	1,8	2,0
India	6,7	6,5	6,5	6,3	6,4	6,5	6,7	6,7	6,3	6,1	6,5

Sumber: *WEO IMF Update Jan 2024, GEP WB Jan 2024, ADO-ADB Des 2023, OECD Report Nov 2023*

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia pada Tahun 2023 tumbuh 5,05 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Tahun 2023 (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,96 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Akomodasi Makan Minum. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat; penyelenggaraan *event* internasional, seperti Piala Dunia U-17, pertemuan KTT ASEAN, MotoGP Mandalika, dan pelaksanaan pemilihan umum. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit Rumah Tangga) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,83 persen yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan pemilihan umum eksekutif dan legislatif tahun 2024.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada Tahun 2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,05 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,01 persen,

Pulau Kalimantan sebesar 8,49 persen, Pulau Sulawesi sebesar 7,01 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,77 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,58 persen. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada Tahun 2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 6,94 persen, disusul oleh Pulau Sulawesi sebesar 6,37 persen, Pulau Kalimantan sebesar 5,43 persen, Pulau Jawa sebesar 4,96 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,69 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,00 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia pada Tahun 2023, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2025 sebesar 5,3-5,6 persen. Adapun sektor yang didorong antara lain Investasi dan Ekspor menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan dan Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi. Berikut Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan	2022		2023		Target 2024 (RKP)	Target 2025 (RKP)
		Target (RKP)	Capaian	Target (RKP)	Capaian		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5	5,3 – 5,5	5,05	5,3 – 5,7	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	8,5 – 9,0	7,5 – 8,5	9,36 *Maret 2023	6,5 – 7,5	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,5 – 6,3	5,5 – 6,3	5,3 – 6,0	5,32 *Agustus 2023	5,0 – 5,7	4,5 – 5,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,376 – 0,378	0,376 – 0,378	0,375 – 0,378	0,388 *Maret 2023	0,374 – 0,377	0,379 – 0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	73,41 – 73,46	73,41 – 73,46	73,31 – 73,49	74,39	73,99 – 74,02	0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	26,87	26,87	27,02	27,82 (Capaian Tahun 2022 (pelaporan t+1))	27,27	38,6
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103 – 105	103 – 105	105 – 107	112,46	105 – 108	113 – 115
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104 -106	104 -106	107 – 108	105,40	107 - 110	104 - 105

Sumber: Bappenas April 2024

Keterangan:

a) Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022
b) Perpres Nomor 134/2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023
c) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024
d) Exercise Bappenas, April 2024

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

3.1.3.1 Kondisi Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, tren pemulihan Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	5,05	3,02
2	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69	3,46
3	Lndustri Pengolahan	1,43	1,98	3,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81	2,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,89
6	Konstruksi	2,18	3,02	6,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,56	5,81
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,92	13,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	7,26	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	6,51	7,6	7,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,5
12	Real Estate	2,5	4,52	3,2
13	Jasa Perusahaan	-0,14	8,77	6,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,08	-0,74	1,93
15	Jasa Pendidikan	3,05	5,13	7,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	4,82	6,43
17	Jasa Lainnya	1,43	8,65	9,55
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**

Sumber: BPS Februari 2024, data diolah

Dari sisi produksi, Tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 13,12 persen; sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 10,22 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 9,55 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,02 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,81 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,44 persen; dan Konstruksi sebesar 6,41 persen.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengeluaran

No	Kategori Pengeluaran	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,16	4,55	5,59
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	9,27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	3,98

No	Kategori Pengeluaran	2021	2022	2023
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	3,83	4,48
5	Perubahan lnventori	-7,09	10,11	7,79
6	Ekspor Luar Negeri	14,44	11,48	-0,40
7	Impor Luar Negeri	18,32	11,22	-1,70
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**

Sumber: BPS, data diolah

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 9,27 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,59 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 4,48; Komponen PKP tumbuh sebesar 3,98 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 0,40 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB mengalami kontraksi sebesar sebesar 1,70 persen. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh kenaikan seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan sejalan dengan belanja modal pemerintah yang meningkat utamanya untuk jenis mesin dan peralatan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi, relatif termoderasi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi.

3.1.3.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Secara umum, perekonomian Sumatera Utara akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada perekonomian regional antara lain:

a) Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat yang mengakibatkan Melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi
b) Melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya risiko resesi negara-negara maju dan melambatnya perekonomian China
c) Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global
d) Deglobalisasi akibat geopolitik
e) Risiko scarring effect akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,20-5,40 persen. Berikut Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha dan Berdasarkan Pengeluaran:

Tabel 3.5
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Kategori Lapangan Usaha	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	5,05	3,02	3,40-3,60	3,60-3,80
2	Pertambangan dan Penggalian	1,92	2,69	3,46	3,50-3,70	3,70-3,90
3	Industri Pengolahan	1,43	1,98	3,44	3,50-3,90	3,90-4,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	4,81	2,16	2,30-2,50	2,50-2,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,62	2,17	2,89	2,90-3,10	3,10-3,30
6	Konstruksi	2,18	3,02	6,41	6,40-6,60	6,60-6,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	6,56	5,81	5,80-6,00	6,00-6,20
8	Transportasi dan Pergudangan	-3,63	12,92	13,12	13,10-13,20	13,20-13,30
9	Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	-0,81	7,26	10,22	10,20-10,30	10,30-10,40
10	Informasi dan Komunikasi	6,51	7,6	7,8	7,80-8,00	8,00-8,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	3,81	5,5	5,60-5,80	5,80-6,00
12	Real Estate	2,5	4,52	3,2	3,20-3,40	3,40-3,60
13	Jasa Perusahaan	-0,14	8,77	6,68	6,70-6,90	6,90-7,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,08	-0,74	1,93	2,00-2,10	2,10-2,20
15	Jasa Pendidikan	3,05	5,13	7,39	7,40-7,60	7,60-7,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	4,82	6,43	6,50-6,70	6,70-6,90
17	Jasa Lainnya	1,43	8,65	9,55	9,60-9,80	9,80-10,00
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**5,00 – 5,20**	**5,20 – 5,40**

Sumber: Exercise Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tabel 3.6
Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara
Berdasarkan Pengeluaran

No	Kategori Pengeluaran	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,16	4,55	5,59	5,60-5,80	5,80-6,00
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,59	5,47	9,27	9,30-9,40	9,40-9,50
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,46	-3,34	3,98	4,10-4,30	4,30-4,50
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	3,83	4,48	4,50-4,70	4,70-4,90
5	Perubahan Inventori	-7,09	10,11	7,79	-	-

No	Kategori Pengeluaran	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2024	2025
6	Ekspor Luar Negeri	14,44	11,48	-0,4	15,30-15,50	15,50-15,70
7	Impor Luar Negeri	18,32	11,22	-1,7	4,00-4,20	4,20-4,40
	PDRB	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**5,00-5,20**	**5,20-5,40**

Sumber: *Exercise* Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2024

Highlight Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 antara lain:

1. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:
   a. Sektor pertanian dan peternakan melalui Gerakan Sumut Menanam "GEMA" pemberian bantuan benih; Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan sarana dan prasarana; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; pembinaan Petani Muda Milenial "PMM" melalui modernisasi sistem pertanian, pemberdayaan dan pemberian kredit usaha mikro; berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor *(Gratieks)* Pertanian.
   b. Sektor peternakan dengan peningkatan produksi hasil ternak "TANDUK TERNAK" dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan peternak melalui pemberian bantuan bibit dan alsintan pendukung usaha peternakan.
   c. Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan *skill* dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
   d. Sektor Perdagangan melalui pelaksanaan kegiatan *ENTERPRENEURS PRODUKTIF, ADAPTIF, KOLABORATIF "PROAKTIF"* yaitu inkubasi wirausahawan baru; Fasilitasi "KLINIK BISNIS" bagi Koperasi, UMKM/IKM melalui pelatihan dan pendampingan UMKM/IKM digital *(Go-digital/Go-export*), fasilitasi sertifikasi HAKI/Industri rumah tangga/HALAL dan BPOM serta akses permodalan melalui fasilitasi jaminan kredit berbunga rendah oleh PT. Jamkrida Sumut; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM; mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah; serta Pemulihan pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit.
   e. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan pariwisata dengan gagasan "HEBAT" (HERITAGE, BERKELANJUTAN DAN ATRAKTIF) yaitu pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan *event-event* wisata dan budaya melalui penetapan *Calender of Event Pariwisata dan Travel Pattern* "Raon-Raon di Sumut Aja"; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata.

f. Sektor lingkungan hidup melalui gerakan pembangunan hijau Sumatera Utara (*Green Growth Movement*) "GGM" yaitu rehabilitasi lahan dan pengembangan lokasi kampung iklim;
g. Sektor perikanan melalui peningkatan kawasan konservasi kelautan serta budidaya perikanan dengan penanaman Mangrove, Rehabilitasi Terumbu Karang Buatan dan Pembangunan Cold Storage;
h. Sektor investasi melalui pengembangan Investasi Sumut Hebat "ISBAT" yaitu pelaksanaan *North Sumatra Investment Business* forum yang menghasilkan *Letter of Intern* (LOI) dalam peningkatan investasi Sumatera Utara; kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
i. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan.

2. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

3.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Adapun Tujuan dan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas melalui Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah, Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir RKP Tahun 2025 dimana target sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. LPE sebesar 5,2-5,4%;
2. Kemiskinan sebesar 6,96-7,46%
3. TPT sebesar 5,27-5,56%
4. IMM sebesar 0,53
5. Gini rasio sebesar 0,303-0,305
6. Intensitas emisi GRK sebesar 1%

Berikut Capaian dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 :

Tabel 3.7

Tren Capaian Dan Sasaran Pembangunan RKPD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target	Capaian	Target RKPD	Target RKP *)
			2023		2025	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00-6,00	5,01	5,20-5,40	5,10-5,38
2	Persentase Kemiskinan	Persen	8,80-7,80	8,15	6,96-7,46	6,96-7,46
3	Rasio Gini	Poin	0,309	0,309	0,305-0,303	0,307-0,303
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,30-5,30	5,89	5,27-5,56	5,27-5,56
5	Indeks Modal Manusia	Poin	-	-	0,53	0,53
6	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	1	1
7	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	-	68,31	72,75-74,01	74,01-74,02
8	Kontribusi PDRB Perikanan	Persen	-	1,83	2,30-2,50	-
9	Cakupan Kepesertaan JAMSOSTEK Provinsi	Persen	-	-	41	36,78
10	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	-	18,44	19,00-19,50	18,77-18,86
11	Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	-	-	27	27
12	Kontribusi PDRB terhadap Nasional	Persen	-	5,12	5,12	5,12
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	-	-	58,80-62,80	59,39
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	-	2,11	2,30-2,50	2,42
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	-	197.015	300.000-350.000	346.940
16	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	-	-	0,35-0,43	0,43
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	-	-	6	-
18	Ekspor Barang dan Jasa	Persen		37,62	22,80-23,00	22,80
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Persen	-	-	11,26	11,26
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen		29,52	29,00-27,00	29,70
21	Indeks Reformasi Hukum	Poin	-	-	70	70
22	Indeks Pelayanan Publik	Poin	-	-	3,57	3,57
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPB	Poin	-	-	3,45	3,45
24	Indeks Integritas Nasional	Poin	-	-	66,78	66,78
25	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	-	-	82,58-85,83	60-80

No	Indikator Makro	Satuan	Target	Capaian	Target RKPD	Target RKP *)
			2023		2025	
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	-	-	1,20-1,50	1,40
27	Laju Inflasi	Persen	2,00	2,25	1,75-3,75	-
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	-	-	55,83-65,83	65,82-65,83
29	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	-	-	0,41-0,39	0,41
30	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	-	850-1050	1005
31	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)*	Persen	-	-	7,35	7,35

Keterangan *) Target sasaran RKP untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Sumber : RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026, Draf RKP Tahun 2025 (Bappenas Maret 2023), data diolah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025. Arah Kebijakan Keuangan Provinsi Sumatera Utara selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi Pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Fungsi Alokasi Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penetapan kebijakan keuangan atau kebijakan fiskal daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentu didasarkan pada kondisi perekonomian dan diintegrasikan dengan kebijakan pusat yang telah direncanakan dalam dokumen RKP Tahun 2025 dan kebijakan daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah direncanakan dalam RPD Tahun 2024 – 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin akan terjadi melalui beberapa arah kebijakan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 selai mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2023 dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2021 AUDITED	REALISASI TA. 2022 AUDITED	REALISASI TA. 2023 AUDITED	APBD TA. 2024 PERGUB No.51 2023	PROYEKSI TARGET TA 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**	**14.034.036.626.479**	**12.594.412.688.862**	**12.757.833.199.493**	**14.634.905.519.358**	**15.285.432.726.570**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	6.402.714.086.507	7.258.018.251.933	7.225.688.105.703	8.972.327.385.958	9.507.662.949.275
1.1.1	Pajak Daerah	5.730.574.818.536	6.646.504.121.057	6.667.891.089.708	8.057.906.541.491	8.654.662.949.275
1.1.2	Retribusi Daerah	27.129.155.454	28.954.300.036	33.234.330.583	36.959.862.067	43.000.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	384.479.882.887	302.399.281.274	299.801.727.761	331.891.359.887	450.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	260.530.229.630	280.160.549.565	224.760.957.651	545.569.622.513	360.000.000.000
1.2	**Pendapatan Transfer**	**7.518.180.471.987**	**5.250.014.270.033**	**5.443.196.241.831**	**5.637.010.133.400**	**5.754.201.777.295**
1.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	797.628.780.665	739.563.418.216	581.910.953.859	489.469.391.400	547.825.912.520
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.463.686.589.000	2.432.954.103.819	2.682.814.024.612	2.904.966.554.000	2.963.801.676.775
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik dan Non Fisik	4.256.865.102.322	2.041.308.500.998	2.148.915.361.360	2.242.574.188.000	2.242.574.188.000
1.2.4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	36.188.247.000	29.555.902.000	-	-
1.3	**Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**113.142.067.985**	**86.380.166.896**	**88.948.851.959**	**25.568.000.000**	**23.568.000.000**
1.3.1	Hibah	70.624.665.645	73.032.471.483	80.249.646.343	7.568.000.000	20.000.000.000
1.3.2	Lainnya	42.517.402.340	13.347.695.413	8.699.205.616	18.000.000.000	3.568.000.000

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2024

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 sebesar Rp. 12,59 triliun yang mana Pendapatan Asli Daerah masih mendominasi Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp. 7,23 triliun atau sebesar 56,63 persen dari total Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah diproyeksikan terus mengalami kenaikan pada TA. 2024 sebesar 14,71 dan pada TA. 2025 sebesar 4,45 persen.

3.2.2. Analisa dan Perkiraan Sumber – Sumber Pendanaan Daerah

1. Sumber Pendanaan APBD

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga turut mempengaruhi proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi *Covid-19*.

Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus naik untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah dalam perencanaan target dan kewenangan pemungutannya mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi melalui kebijakan – kebijakan terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di antaranya Peningkatan Pajak Daerah, Peningkatan Retribusi Daerah dan Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian pengaturan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai pemberian kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB merupakan peralihan dari sistem bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dirumuskan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan peningkatan kemandirian Daerah, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan

baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif daerah. Proyeksi penerimaan dari Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi/pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

Tabel 3.9

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2021 AUDITED	REALISASI TA. 2022 AUDITED	REALISASI TA. 2023 AUDITED	APBD TA. 2024 PERGUB No.51 2023	PROYEKSI TARGET TA 2025
1	2	3	4	5	6	7
2	**BELANJA**	**13.225.393.166.670**	**12.509.062.821.349**	**13.748.313.016.645**	**14.834.905.519.358**	**15.435.432.726.570**
2.1	**Belanja Operasi**	**9.509.003.885.719**	**7.582.911.612.511**	**8.029.171.006.323**	**9.246.625.331.740**	**7.802.655.175.869**
2.1.1	Belanja Pegawai	3.372.531.926.884	3.392.784.207.610	3.291.794.526.060	3.621.079.486.865	3.674.668.365.169
2.1.2	Belanja barang dan jasa	2.828.790.517.551	2.964.824.567.293	2.919.824.583.503	3.252.854.579.353	3.317.620.807.747
2.1.3	Belanja Hibah	3.285.226.861.028	1.185.343.267.347	1.801.731.896.760	2.357.079.265.522	790.366.002.953
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	22.454.580.257	39.959.570.262	15.820.000.000	15.612.000.000	20.000.000.000
2.2	**Belanja Modal**	**1.141.203.699.702**	**1.775.917.392.367**	**2.629.552.763.164**	**2.268.450.585.358**	**3.868.277.550.701**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**805.581.714**	**384.450.625**	**57.501.409.671**	**142.280.922.260**	**199.500.000.000**
2.4	**Belanja Transfer**	**2.574.379.999.535**	**3.149.849.365.846**	**3.032.087.837.487**	**3.177.548.680.000**	**3.565.000.000.000**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.574.379.999.535	2.697.082.376.553	2.704.480.636.573	2.800.000.000.000	3.400.000.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	452.766.989.293	327.607.200.914	377.548.680.000	165.000.000.000

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2024

Besaran realisasi belanja daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun TA. 2021 sampai dengan TA. 2025 menunjukkan realisasi fluktuatif. Realisasi belanja pada TA. 2023 sebesar Rp.13,75 triliun, lebih rendah sebesar 10,68 persen dari alokasi dalam P. APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Realisasi belanja daerah TA. 2023 utamanya dimanfaatkan untuk peningkatan untuk Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha, peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat, belanja hibah dalam rangka persiapan Pemilu Tahun 2024 serta PON XXI Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2024.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai dengan tabel di atas belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pada Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 – 2025 digambarkan bahwa Target belanja operasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,62 persen dibandingkan TA. 2024, hal ini terjadi karena adanya penurunan belanja pada komponen belanja hibah sebesar Rp.676.342.429.532,- yang pada TA. 2024 dianggarkan sebagai belanja hibah untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Hibah untuk KPU, Bawaslu dan Pengamanan Pemilu) serta hibah dalam rangka pelaksanaan PON XXI Sumatera Utara dan Aceh sebesar Rp. 1.079.606.273.827,- yang tidak lagi dianggarkan pada TA. 2025, di sisi lain belanja barang dan jasa diproyeksikan mengalami peningkatan berdasarkan potensi yang diprioritaskan untuk pemenuhan atau pelayanan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat, sektor belanja pegawai juga diproyeksikan mengalami peningkatan 1,47 persen dari TA. 2024 yang dialokasikan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen). Demikian juga dengan belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 28,10 persen dibanding TA 2024, bantuan sosial dialokasikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya.

Realisasi belanja modal pada TA. 2023 sebesar Rp. 2,63 triliun, Pada TA. 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 70,53 dari TA. 2024 persen yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik sekaligus diupayakan untuk menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) secara bertahap sampai dengan Tahun 2027.

Belanja tidak terduga pada TA. 2023 terealisasi sebesar Rp. 57,50 milyar diproyeksikan turut mengalami peningkatan pada TA. 2024 sebesar 147,44 persen dan pada TA. 2025 sebesar 40,22 persen dialokasikan sebagai dana tanggap darurat bencana alam/non alam, konflik sosial dan kejadian luar biasa.

Realisasi belanja transfer pada TA. 2023 sebesar Rp. 3,02 triliun. Adapun belanja transfer dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Provinsi Sumatera Utara menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 2,70 triliun serta belanja bantuan keuangan sebesar 327,60 milyar pada TA. 2023. Belanja transfer diproyeksikan terus mengalami kenaikan masing-masing di TA. 2024 sebesar 4,80 persen dan TA. 2025 sebesar 12,19 persen. Belanja bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota untuk

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan Kawasan permukiman, bantuan pendidikan, kesehatan, pertanian dan irigasi, pariwisata, pemulihan ekonomi dan bidang pemerintahan umum.

3.2.5. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan Pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. terdiri atas, Penyertaan Modal/Investasi.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan untuk pengalokasian SILPA dan Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman dari pemerintah pusat untuk pembangunan proyek MRT Jakarta. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Alokasi penyertaan modal diarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan fokus pada BUMD yang dapat membuka lapangan kerja baru;
2. Alokasi penyertaan modal diarahkan pada BUMD yang mampu berkontribusi dalam pengendalian harga - harga kebutuhan pokok melalui pengelolaan ketersediaan bahan baku dan penyederhanaan rantai distribusi;
3. Alokasi penyertaan modal diarahkan pada BUMD yang melaksanakan

penugasan proyek strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna kesejahteraan masyarakat;

4. Alokasi penyertaan modal diarahkan untuk mendorong investasi daerah, yang diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
5. Alokasi penyertaan modal kepada BUMD dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil telaahan, penelitian atau penilaian kelayakan yang disusun oleh Tim Penasihat Investasi yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/133/KPTS/2023 tentang Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari Masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Utara perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Sumatera Utara dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman dan hibah luar negeri, penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong Kerja sama secara *business to business* (*B to B*) serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang - undangan.

Realisasi penerimaan pembiayaan TA. 2023 sebesar 1,07 triliun merupakan akumulasi SiLPA sampai dengan TA. 2022, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4,70 milyar dan diproyeksikan sebesar Rp. 100 milyar pada TA. 2024 dan 50 milyar pada TA. 2025. Realisasi dan Proyeksi /Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2021 AUDITED	REALISASI TA. 2022 AUDITED	REALISASI TA. 2023 AUDITED	APBD TA. 2024 PERGUB No.51 2023	PROYEKSI TARGET TA 2025
1	2	3	4	5	6	7
3	**PEMBIAYAAN**	**288.850.054.431**	**990.810.739.008**	**1.071.462.606.521**	**200.000.000.000**	**150.000.000.000**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**499.350.054.431**	**1.097.493.514.239**	**1.076.160.606.521**	**300.000.000.000**	**200.000.000.000**
3.1.1	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)	499.350.054.431	1.097.493.514.239	1.076.160.606.521	300.000.000.000	200.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**210.500.000.000**	**106.682.775.231**	**4.698.000.000**	**100.000.000.000**	**50.000.000.000**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	210.500.000.000	106.682.775.231	4.698.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000

Sumber : BKAD Provinsi Sumatera Utara, 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas E menuju Indonesia Emas misi Gas Rumah Kaca.

Melalui Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 akan mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,3 -5,6 (%)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,5 – 5,0 (%)
3. Tingkat Kemiskinan: 7,0 – 8,0 (%)
4. Nilai Tukar Petani (kumulatif): 113-115
5. Rasio Gini (nilai): 0,379 – 0,382
6. Indeks Modal Manusia (nilai): 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 38,6
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif): 104 - 105

Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 difokuskan dalam tiga arah kebijakan, yang meliputi: (1) sumber daya manusia berkualitas antara lain, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; (2) infrastruktur berkualitas yang diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas yang menunjang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata, serta infrastruktur layanan dasar (antara lain infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, dan irigasi), pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, penguatan infrastruktur digital hingga reformasi pengelolaan sampah; serta (3) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, antara lain melalui penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengembangan skema graduasi bantuan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya, percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan, serta peningkatan produksi industri pengolahan. Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Dalam RKP Tahun 2025 untuk pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Sumatera Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Nasional Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025

Sasaran Pembangunan	Target 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,4
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56
Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46
Rasio Gini (nilai)	0,303-0305
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53
Intensitas Emisi GRK (%)	1,00

Sumber: RKP 2025

4.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah, serta mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah RKPD tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2026 yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dan mengacu pada RKP Tahun 2025 dimana RKP Tahun 2025 merupakan fondasi awal untuk menghubungkan transisi pembangunan periode jangka Panjang RPJPD 2005-2025 ke 2025-2045 dengan Visi Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan dan pembangunan jangka menengah.

Merujuk pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:
- Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan,
- Meningkatnya Derajat Kesehatan
- Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran:
- Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat
- Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata.

Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Sasaran:
- Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
- Meningkatnya akses hunian yang layak
- Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
- Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Ketangguhan Bencana.

Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

Sasaran:

- Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Meningkatnya pelayanan publik yang prima
- Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
- Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan.

Lebih jelas terkait sinkronisasi tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran serta target Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dalam RPD dan RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Capaian	Target	
					2023	RPD	RKPD
1			*2*	*3*	*5*	*6*	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		IPM	Poin	75,13	73,10-73,40	76,00
	1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	70,18	71,03	71,37
	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	Tahun	82,57	76.69	83,10
	1.3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,31	91,06	91,50
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		LPE	Persen	5,01	5,20-5,40	5,2-5,4
			Inflasi	Persen	2,25	2,75±1%	2,75±1%
			Gini Rasio	Poin	0,309	0,320	0,305-0,303
	2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat	Persentase Kemiskinan	Persen	8,15	8,20-8,00	7,46-6,96
	2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,89	5,50-5,20	5,56-5,27
	2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Poin	129,04	125,23	134,50
	2.4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,11	7,25	2,30-2,50
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur	Poin	0,75	0,806	0,759
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	29,05	30,16	30,16
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan Mantap	Persen	76,5	88,06	78,61
	3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	70,95	73,00	74,36
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	60	57,10	57,10

Tujuan Dan Sasaran			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	Capaian	Target	
					2023	RPD	RKPD
1			*2*	*3*	*5*	*6*	
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,560	0,3840	0,520
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,80	74,24	72.20
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	140,73	141,50	140,00
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	75,18 (B)	72,25 (BB)	81,10 (A)
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Poin Predikat	68,85 (B)	72,00(BB)	72,00(BB)
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	3,51	4,45 (A-)	4.1(A-)
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	53,76 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)	57,50-60,00 (Inovatif)
	4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan	Peringkat PPD	Peringkat	12	12	12

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 024-2026

Cascading pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset dan tujuan penting dalam pembangunan daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan peningkatan Indikator Indeks Pembangunan Manusia, selain itu untuk menciptakan perubahan yang positif diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing.

Pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan Cascading sebagaimana berikut ini:

Gambar 4.1
Cascading Pencapaian Tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Tahun 2022, perekonomian Sumatera Utara mulai bangkit digambarkan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73%. Hal ini disebabkan peningkatan sektor perekonomian Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata.

Pencapaian tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan Cascading sebagaimana berikut:

Gambar 4.2
Cascading Pencapaian Tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

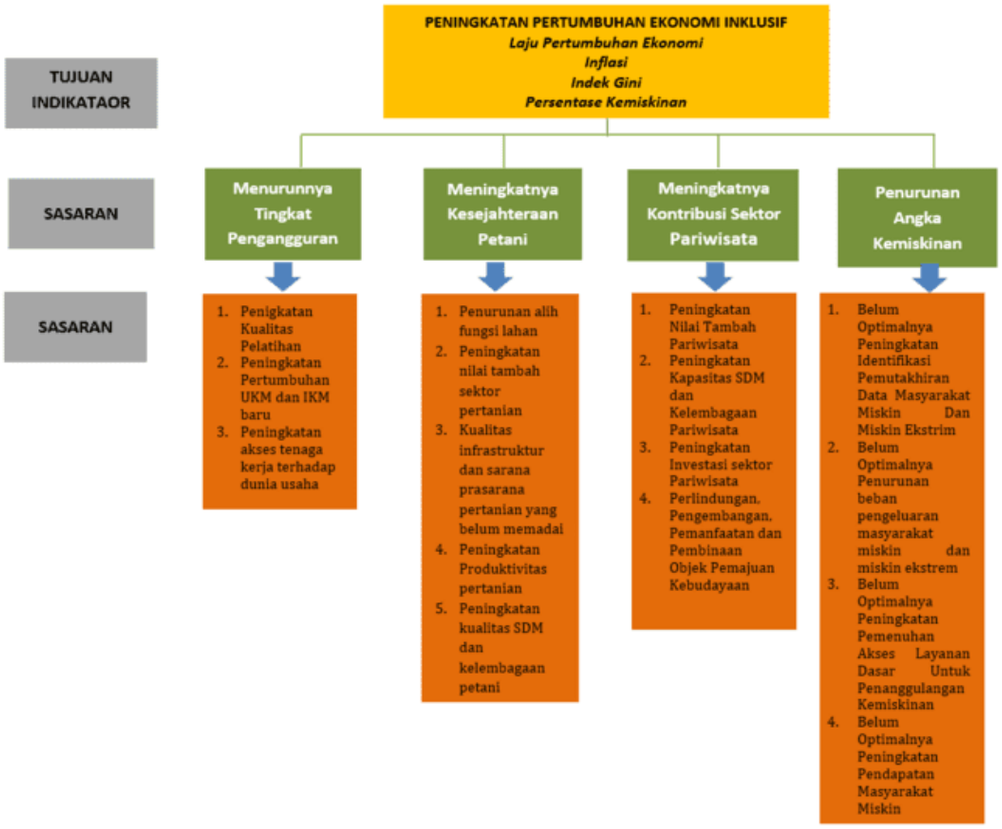

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Percepatan pembangunan infrastruktur masih menjadi Program Prioritas Pembangunan di Sumatera Utara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada satu aspek saja, tetapi memperhatikan semua aspek baik dari Hulu sampai dengan ke Hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dapat dilihat pada Cascading berikut ini:

Gambar 4.3
Cascading Pencapaian Tujuan Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

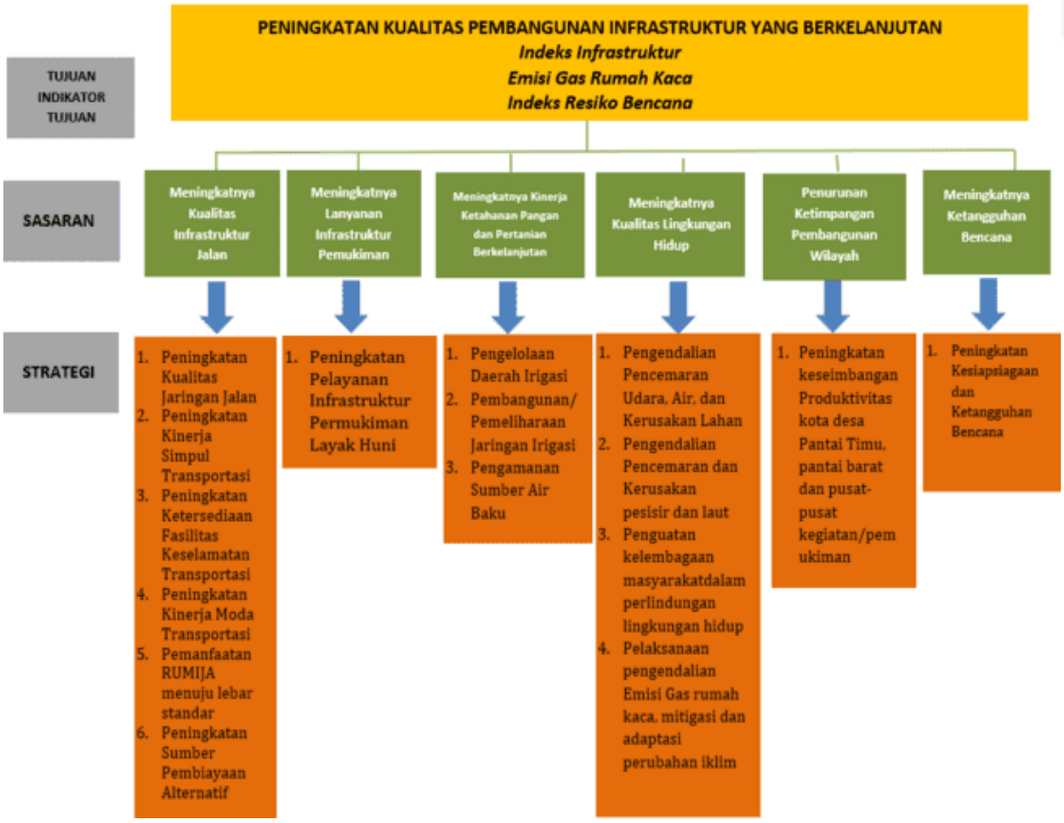

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. *Perwujudan Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsensus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dengan sasaran dan strategi yang digambarkan dengan Cascading sebagaimana berikut ini:

Gambar 4.4
Cascading Pencapaian tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provsu Tahun 2024-2026

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah**.** "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"

Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

Visi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" akan dicapai melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. **Memperkokoh Pancasila ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).**

   Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.

   - Dalam memperkokoh ideologi Pancasila dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
     (1) Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;

(2) Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
(3) Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan; dan
(4) Internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

- Penguatan demokrasi dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
  (2) Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas;
  (3) Menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum;
  (4) Penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan;
  (5) Peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui
  (6) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik;
  (7) Pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta
  (8) Peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

- Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku;
  (2) Memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya;
  (3) Memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  (4) Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta
  (5) Transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:

(1) Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI;
(2) Memperkuat komponen cadangan;
(3) Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara;
(4) Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber;
(5) Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI;
(6) Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar;
(7) Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
(8) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; serta
(9) Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

- Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  (2) Meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri;
  (3) Pembentukan ekosistem industri pertahanan;
  (4) Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest;*
  (5) Kolaborasi penelitian dan pengembangan *alpalhankam*.
- Penguatan keamanan negara dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme,
  (2) Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara,
  (3) Memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia,
  (4) Memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme,
  (5) Penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar,
  (6) Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.
- Profesionalisme dan pelayanan kepolisian dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
  (2) Peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita;
  (3) Pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat;

(4) Penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas;
(5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

- Penguatan keamanan laut dan *hidro-oseanografi* dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  (2) Penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut;
  (3) Kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*;
  (4) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut;
  (5) Pemetaan batimetri dan alur laut.

- Keamanan siber, sandi, dan sinyal dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi;
  (2) Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal;
  (3) Penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
  (4) Penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

- Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy;*
  (2) Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi;
  (3) Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik;
  (4) Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia;
  (5) Penyelesaian perundingan perbatasan darat negara;
  (6) Mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas;
  (7) Perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing;
  (8) Optimalisasi promosi aset Soft power Indonesia.

- Penguatan infrastruktur dan jejaring *Smart diplomacy* dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *Smart diplomacy;*

(2) Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri;
(3) Memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

- Kerja Sama Pembangunan Internasional dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular.
  (2) Integrated National Financing Framework.
  (3) Pembangunan data *economic intelligence* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  (4) Promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi.
  (5) Penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.
  (6) Penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional.
  (7) Kerja sama ekonomi internasional yang adaptif.
  (8) Optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan.
  (9) Partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global.
  (10) Perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan
  (11) pengawalan proses aksesi Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.

- Swasembada pangan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
  (2) Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio;
  (3) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian;
  (4) Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya;
  (5) Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional;
  (6) Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *Holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya;

(7) Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan;
(8) Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *Food Estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu;
(9) Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur);
(10) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal;
(11) Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan;
(12) Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional;
(13) Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

- Swasembada energi dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*);
  (2) Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  (3) Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta
  (4) Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

- Swasembada air dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan

air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau;

(2) Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi;

(3) Pengelolaan risiko bencana daya rusak air;

(4) Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir;

(5) Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.

Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi *Trade Off* melalui pendekatan yang berkesinambungan (*Food, Energy, Water Nexus*). Pendekatan konsep *Food, Energy, Water Nexus* berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan *Food, Energy, Water Nexus* memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

- Pengembangan ekonomi Syariah dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim;
  (2) Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional;
  (3) Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;
  (4) Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan *non bank* syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal Syariah;
  (5) Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

- Ekonomi Digital dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat,

(2) Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro,
(3) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing,
(4) Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan Literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

- Ekonomi Hijau dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*);
  (2) Menerapkan ekonomi sirkular industri;
  (3) Menerapkan efisiensi sumber daya;
  (4) Mengembangkan produk ramah lingkungan;
  (5) Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material;
  (6) Menguatkan ekosistem daur ulang;
  (7) Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan;
  (8) Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa;
  (9) Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber;
  (10) Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse*, dan *recycle*,
  (11) Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  (12) Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*; (13) perbaikan tata kelola persampahan;
  (14) Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta
  (15) Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi
  (16) Mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies;
  (17) Memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan;
  (18) Mengelola sumber daya genetik;
  (19) Menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
  (20) Memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi;
  (21) Pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif;
  (22) Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem;
  (23) Peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati;
  (24) Penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati;
  (25) Peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati;

(26) Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
(27) Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan;
(28) Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru;
(29) Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional;
(30) Peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan
(31) Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*);
(32) Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya;
(33) Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah;
(34) Merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *Public Private people Partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat;
(35) Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi
(36) Meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau;
(37) Meningkatkan pengelolaan air limbah;
(38) Meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia;
(39) Meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa;
(40) Meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut;
(41) Meningkatkan kualitas lahan;
(42) Menurunkan laju deforestasi;
(43) Meningkatkan kualitas ekosistem gambut;
(44) Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
(45) Menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
(46) Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
(47) Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang;
(48) Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta
(49) Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(50) Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif;
(51) Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi;

(52) Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi;
(53) Menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan;
(54) Melakukan pembangunan rendah karbon;
(55) Peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer;
(56) Efisiensi energi;
(57) Peningkatan transportasi berkelanjutan;
(58) Peningkatan cadangan karbon;
(59) Pencegahan pengurangan cadangan karbon;
(60) Implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru;
(62) Pengembangan industri hijau; dan
(63) Pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular;
(64) Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau;
(65) Mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade;
(66) Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap *(coal-fired power plant retirement)* dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan;
(67) Menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah;
(68) Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
(69) Mendorong adopsi kendaraan listrik (*Electric vehicle*) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi;
(70) Mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing;
(71) Meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta
(72) Memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

- Ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance dan good neighbour policy*;

(2) Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem Mangrove, terumbu karang, dan lamun;

(3) Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi;

(4) Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan;

(5) Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar;

(6) Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata;

(7) Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science, Technology, Engineering, Art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. **Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**.

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

(1) melanjutkan pembangunan infrastruktur,
(2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,
(3) penguatan koperasi,
(4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

- Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah, dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah;
  (2) Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu;
  (3) Menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi;
  .(4) Mengembangkan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik;
  (5) Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta
  (6) Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.

- Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran;
  (2) Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi
  (3) Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat;
  (4) Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan;
  (5) Melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha;
  (6) Mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global;

(7) Mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- Mengembangkan industri kreatif dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas;
  (2) Integrasi data ekonomi kreatif;
  (3) Percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka;
  (4) Perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia;
  (5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif;
  (6) Pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan *hub*/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global;
  (7) Penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum);
  (8) Mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia;
  (9) Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global;
  (10) Perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata;
  (11) Menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata;
  (12) Menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata;
  (13) Penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan;
  (14) Reaktivasi pelaksanaan *Event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi;
  (15) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana;
  (16) Pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata;
  (17) Pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated Tourism Master Plan*, 3 destinasi Regeneratif Bali, Greater Kepri, Greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara;

(18) Diversifikasi jenis pariwisata *Geopark* (terutama di 10 *UNESCO Global Geopark)*, gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta
(19) Pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*).

- Penguatan koperasi dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak;
  (2) Memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbankable* menjadi koperasi *bankable*;
  (3) Menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar 58 dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
  (4) Memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota;
  (5) Mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa;
  (6) Mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam;
  (7) Memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

- Pendalaman sektor keuangan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penguatan peran perbankan;
  (2) Penguatan peran sektor keuangan *non bank*, serta
  (3) Peningkatan inklusi dan Literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antar sektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan *non bank* dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses *fintech*, penguatan pengawasan sektor keuangan *non bank*, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan Literasi keuangan dilakukan melalui Literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

4. **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.**
   - Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
     (1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan *low-skilled* berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi *school to work* dan integrasi *Soft skills* bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya Literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
     (2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk

pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.

(3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan Stunting; (c) mencegah terjadinya Stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan

ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih pro rakyat, pro tenaga kesehatan, pro fasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman Stunting (gizi buruk); (n) 63 meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*Family medicine*); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, *schistosomiasis*, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan *surveilans*, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi anti mikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi *pre-market*, penguatan pengawasan siber, dan *farmakovigilans*; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

(4) Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan

dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotip, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

(5) Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete* program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

Melanjutkan Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi

1) Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.

2) Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang.
3) Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
4) Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transhipment hub*) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:

(1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
(2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan industri dasar, dan Industri strategis nasional
(3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui

Dalam mewujudkan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.

- Membangun desa dan membangun dari desa dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa;
  (2) Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan *Inklusivitas* sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa;
  (3) Pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota;
  (4) Pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan;
  (5) Peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
  (6) Penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akun tabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa;
  (7) Optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan);

(8) Pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan;
(9) Penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa;
(10) Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa);
(11) Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan;
(12) Pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran
(13) Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung

- Pemerataan ekonomi dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan;
  (2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda);
  (3) Peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi;
  (4) Pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro;
  (5) Pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*.

- Memberantas Kemiskinan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;

(2) Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan;
(3) Penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk;
(4) Peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan Literasi secara masif pada program jaminan sosial;
(5) Penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya;
(6) Reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial;
(7) Penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain;
(8) Peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial;
(9) Pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain;
(10) Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan;
(11) Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Diwujudkan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

- Reformasi politik dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi;
  (2) Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;
  (3) Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
  (4) Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki:
  (5) Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.

- Reformasi Hukum dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai *think-tank* dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi;
  (2) Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan;
  (3) Menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of *excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
  (4) Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik;
  (5) Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman;
  (6) Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
  (7) Mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa;
  (8) Penguatan budaya hukum;
  (9) Penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum.

- Reformasi tata kelola pemerintahan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberi perhatian pada peningkatan integritas dan *soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum;
  (2) Memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung;
  (3) Mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *Future jobs* di era digital;
  (4) Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara;
  (5) Memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara;
  (6) Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya

strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta;

(7) Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional;

(8) Penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah;

(9) Penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional;

(10) Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah);

(11) Penguatan manajemen kinerja pembangunan

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

- Pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah;
  (2) Memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
  (3) Meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa;
  (4) Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba;
  (5) Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba;
  (6) Meningkatkan kemampuan *surveillance* dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

- Penanggulangan judi dan penyelundupan dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Menutup semua akses ke situs perjudian *online;*

(2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi;
(3) Meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak
(4) Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia; serta
(5) Memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

- Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
  (2) penanganan konflik sosial.

- Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara;
  (2) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

- Masyarakat adil, makmur, dan harmonis dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa;
  (2) Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  (3) Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini;
  (4) Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal;
  (5) Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya;
  (6) Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
  (7) Memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan;
  (8) Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan;
  (9) Memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal;
  (10) Meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akun tabel, aman, dan nyaman;
  (11) Merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif

- Melestarikan budaya dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:
  (1) Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan;
  (2) Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital;
  (3) Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia;
  (4) Merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda;
  (5) Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia;
  (6) Memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya;
  (7) Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia;
  (8) Melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia;
  (9) Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara;
  (10) Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya;
  (11) Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia;
  (12) Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia;
  (13) Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas;
  (14) Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum;
  (15) Memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila;
  (16) Mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan;
  (17) Memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
  (18) Mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia;
  (19) Mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta
  (20) Melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

- Penanganan bencana dengan arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan melalui:

(1) Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana;
(2) Memperkuat sistem deteksi bencana *(Early warning System)* dengan penerapan teknologi terkini;
(3) Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut;
(4) Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana;
(5) Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana;
(6) Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana;
(7) Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
(8) Pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana;
(9) Mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana;
(10) Mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta
(11) Meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh Moda transportasi.

Pencapaian Visi dan Misi Program Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program prioritas yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air swasembada pangan, energi, dan air Mencapai swasembada pangan, energi dan air swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi, Politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam lima tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
   Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
   Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
   Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.
4. Membangun sekolah-sekolah terintegrasi unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
   Negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
   Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
   Ditargetkan untuk dapat membangun/ merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk Pembangunan kewilayahan Sumatera Utara, Pemerintah Pusat telah memberikan bentuk intervensi, sebagai berikut: bentuk dukungan dan perhatian yang ter

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Nasional Terhadap Pembangunan Kewilayahan Sumatera Utara

Prioritas Nasional	*Highlight* Indikasi Intervensi*
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Peningkatan produktivitas sawit dan karet secara berkelanjutan di Sumatra Utara • Lanjutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III • Fasilitasi Business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatra Utara terutama di Wilayah Metropolitan Medan • Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Medan dan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai guna penguatan keamanan laut di Selat Malaka • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, penataan dan rehabilitasi tempat pemrosesan akhir serta pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle • Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatra Utara • Pengembangan kawasan padi di Kabupaten Serdang Bedagai • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Seriti (Serdang Bedagai – Tebing Tinggi) • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Girsang Simpangan Bolon/Parapat di Kabupaten Simalungun • Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Padangsidimpuan
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Pengembangan Bandara Hub dan Aerocity Kualanamu dan Bandara Sibisa di Kabupaten Toba • Penguatan produktivitas industri makanan • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun di Sungai Moro'o Kabuaten Nias Barat • Prasarana irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi Daerah Irigasi Batang Gadis • Pembangunan Jalan Strategis Simpang Kota Pinang - Simpang PAL XI • Preservasi pemeliharaan rutin Jalan bts. Kabupaten Toba - Siborong Borong • Penyediaan pintu perlintasan sebidang di Jalan Nasional ruas akses Tol Medan – Belawan • Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Kota Sibolga • Pembangunan Jembatan Batahan akses Pelabuhan Palimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital

PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam neger	• Penguatan industri logam dasar • Hilirisasi industri bauksit • Penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan prioritas perbatasan di Provinsi Sumatra Utara • Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di Perkotaan Medan • Penataan permukiman pesisir di Kota Sibolga
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan anti narkoba di Sumatra Utara • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital guna memudahkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Sumatra Utara • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Peningkatan tata kelola cagar budaya Istana Maimun dan Istana Niat Lima Laras • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Penyediaan Early Warning System pada sungai kewenangan pusat di Kota Medan

4.2.2 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RKP tahun 2025. Penetapan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan memperhatikan hal -hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu**: "Peningkatan Kualitas Pembangunan Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan",** dimana Tema pembangunan tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah Sumatera Utara.

Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3) Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program-program prioritas pada Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah Sumatera Utara yang juga merupakan 4 (empat) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun

2025 selanjutnya akan diturunkan ke dalam. kinerja Perangkat Daerah dan akan dijabarkan ke dalam program prioritas pada Perangkat Daerah.

Konsistensi permasalahan/isu strategis pembangunan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Permasalahan/Isu Strategis Pada RKPD 2025

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan
1	Peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas SDM	- Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan terkait ketersediaan akses belajar, sarana & prasarana, kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus, serta peningkatan Literasi masyarakat dan Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan - Belum Optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan terkait Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perbaikan gizi masyarakat dan penanganan Stunting serta angka kesakitan. - Belum Optimalnya penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	-	- Belum Optimalnya Penurunan Angka Kemiskinan terkait Identifikasi Pemutakhiran Data Masyarakat, Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat, Ketersediaan akses Rumah Layak Huni, dan Pemenuhan Layanan Dasar untuk penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem - Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pelatihan Ketenagakerjaan terkait Kualitas dan Kompetensi Pelatihan - Belum Optimalnya Pertumbuhan UKM dan IKM Baru yang disebabkan terbatasnya akses permodalan usaha, informasi pasar serta rendahnya kapasitas SDM Ekonomi Kreatif. - Belum Optimalnya Akses Tenaga Kerja terhadap Dunia Usaha terkait Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja. - Belum Optimalnya Kesejahteraan Petani dan Belum Optimalnya Produktivitas akibat tingginya alih fungsi lahan serta nilai tambah sektor pertanian, kualitas infrastruktur yang masih belum baik serta rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Petani. - Belum Optimalnya Daya Saing Pariwisata yang berkelanjutan yang disebabkan rendahnya nilai tambah pariwisata, kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata yang kurang memadai, rendahnya Investasi, serta masih rendahnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	- Kesenjangan Wilayah terkait belum meratanya Perekonomian Wilayah - Belum terpenuhinya layanan Infrastruktur Permukiman terkait layanan air minum,

	yang berkelanjutan	yang berkelanjutan	layanan sanitasi, terbatasnya akses rumah layak huni dan belum maksimalnya akses ketersediaan listrik/energi baru terbarukan. Rentannya Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan yang diakibatkan pengelolaan Daerah Irigasi yang kurang Optimal, minimnya penyediaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan rendahnya perlindungan sumber air baku - Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup terkait pencemaran udara, air, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut serta belum maksimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Belum terpenuhinya layanan Sistem Transportasi yang disebabkan belum meratanya kualitas jaringan jalan dan belum terpenuhinya standar fasilitas keselamatan transportasi - Belum Optimalnya Penurunan Resiko Bencana di Masyarakat terkait Kesiapsiagaan, Ketangguhan dan Penanganan Bencana di Masyarakat.
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	- Belum Optimalnya Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Keberlanjutan Akuntabilitas dan Aset Daerah terkait Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah - Belum Optimalnya Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima - Belum Optimalnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Kapasitas dan Manajemen Aparatur Sipil Negara. - Belum Maksimalnya Pengembangan Inovasi dan Riset Daerah - Belum Optimalnya Kualitas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, 2024

Selanjutnya dalam upaya pencapaian dan mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan permasalahan dan isu strategis, dituangkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dilihat pada tabel selanjutnya.

Tabel 4.5
Strategi dan Arah Kebijakan pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas pendidikan	Peningkatan ketersediaan akses belajar dan peningkatan sarana & prasarana sekolah menengah, kejuruan dan khusus	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembangunan Sekolah di Kabupaten /Kota pada jenjang SMA, SMK, SLB 2. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang 3. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya;
			Peningkatan Kualitas dan mutu pendidikan sekolah menengah, kejuruan dan khusus serta peningkatan Literasi masyarakat	1. Peningkatan Kualifikasi dan kapasitas SDM Guru/ Tenaga Pendidik Produktif 2. penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas 3. Mengembangkan budaya Literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial 4. Peningkatan Pengembangan Perpustakaan Berbasis digital (E-library)
			Peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	1. Peningkatan kualitas atlet dan tenaga keolahragaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Peningkatan daya saing kepemudaan
		Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) 2. Memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; 3. Peningkatan Sarana Prasarana, dan mutu pelayanan Kesehatan 4. meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, 5. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak 6. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Rumah Sakit 7. Pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				8. peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.
			Peningkatan Perbaikan gizi masyarakat dan penanganan prevalensi Stunting	1. Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman Stunting (gizi buruk); 2. Peningkatan pelayanan kesehatan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, dll 3. Peningkatan Pemenuhan Gizi
			Penurunan Angka Kesakitan	1. Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan mental yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan 3. Peningkatan Kesehatan Lanjut usia
		Peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak	Penguatan Pembangunan Keluarga, pengarusutamaan gender dan Perlindungan anak	1. Penguatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga 2. Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan (termasuk penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia) 3. Peningkatan Upaya Perlindungan Anak dan pemenuhan anak secara universal 4. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Penurunan Angka Kemiskinan	Peningkatan Identifikasi Pemutakhiran Data Masyarakat Miskin Dan Miskin Ekstrem	1. Peningkatan Verifikasi Dan Validasi Data Masyarakat Miskin Dan Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota By Name By Addres By NIK
			Peningkatan Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem	1. Peningkatan penyandang PMKS miskin kewenangan Provinsi yang memperoleh jaminan dan bantuan perlindungan sosial tepat sasaran 2. Peningkatan Kualitas Panti Kewenangan Provinsi Sumatera Utara.

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Pemenuhan Akses Layanan Dasar Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan Pemenuhan Sanitasi dan Air Bersih bagi Masyarakat Miskin 2. Peningkatan Percepatan Pembangunan Pada Daerah Tertinggal/3T.
			Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin	1. Peningkatan Pelatihan dan Peningkatan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin; 2. Peningkatan Penyaluran Akses Permodalan dan Pengembangan Akses Pasar Produk Usaha Masyarakat Miskin.
		Penurunan Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kualitas Pelatihan	1. Optimalisasi Pelaksanaan TOT dan Belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Training Of Trainner), Pengembangan kurikulum pelatihan dan pelaksanaan internship/pemagangan 2. Peningkatan sarana prasarana balai latihan kerja dan belum tersusunnya dengan baik rencana penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar melalui mekanisme bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota
			Peningkatan pertumbuhan UKM dan IKM Baru	1. Peningkatan Akses Permodalan Usaha dan informasi pasar yang akan ditekuni 2. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif
			Peningkatan akses tenaga kerja terhadap dunia usaha	3. Peningkatan Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penurunan alih fungsi lahan	1. Peningkatan kepemilikan lahan petani 2. Peningkatan akses pembiayaan 3. Penurunan biaya operasional pertanian
			Peningkatan nilai tambah sektor pertanian	1. Peningkatan skill petani dalam pengolahan hasil pertanian 2. Peningkatan kerjasama antar daerah sektor pertanian 3. Optimalnya Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan 4. Peningkatan fasilitas teknologi pengolahan hilirisasi produk pertanian

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian yang belum memadai	1. Peningkatan Akses Jalan Produksi Pertanian 2. Optimalisasi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi (Ha) 3. Optimalnya Pemberian Bantuan Benih/Bibit dan Pupuk Pertanian 4. Optimalnya Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian 5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
			Peningkatan Produktivitas pertanian	1. Peningkatan ketersediaan benih/bibit unggul yang bersertifikat 2. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 3. Belum optimalnya Peningkatan Diversifikasi Pertanian 4. Tingginya serangan organisme pengganggu (tanaman, ternak, ikan) 5. Belum optimalnya Pengawasan Peredaran & Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani	1. Rendahnya penguasaan teknologi pertanian 2. Rendahnya kualitas penyuluhan petani 3. Belum optimalnya Kelembagaan Petani Pengelolaan dan Penggunaan Air 4. Rendahnya minat menjadi petani 5. Rendahnya Pemberdayaan Kelembagaan Petani (Poktan/Gapoktan dan P3A/GP3A/IP3) 6. Belum optimalnya Pelatihan Sekolah Lapang
		Peningkatan Daya Saing Pariwisata Berkelanjutan	Peningkatan pembangunan kepariwisataan secara kolaboratif dengan memanfaatkan potensi pariwisata	1. Peningkatan Destinasi wisata yang terintegrasi 2. Peningkatan Diversifikasi Atraksi wisata 3. Peningkatan Kualitas, Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas dan Ancillary 4. Peningkatan Kualitas Pelestarian Lingkungan 5. Optimalnya Promosi Pariwisata 6. Peningkatan keselamatan dan keamanan di destinasi wisata 7. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Wisata

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata yang tersertifikasi	1. Peningkatan kuantitas SDM Pariwisata 2. Peningkatan Kompetensi SDM dan Kelembagaan Pariwisata 3. Peningkatan Fasilitas Pendidikan Pariwisata 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pariwisata
			Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif dan pengembangan produk ekonomi kreatif	1. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif 2. Fasilitasi perluasan pasar produk ekonomi kreatif 3. Fasilitas kekayaan intelektual 4. Penyusunan Rencana Aksi pengembangan ekonomi kreatif
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	1. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan. 3. Peningkatan pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan kesenian tradisional. 4. Memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional 5. Membangun sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel
3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah	1. Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan 2. Peningkatan Kinerja Simpul Transportasi 3. Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi 4. Peningkatan Kinerja Moda Transportasi 5. Pemanfaatan RUMIJA (Ruang Milik Jalan) menuju lebar standar 6. Peningkatan Sumber Pembiayaan Alternatif
		Terpenuhinya layanan infrastruktur permukiman	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman Layak Huni	1. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum 2. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum 3. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan 4. Peningkatan Sumber Pembiayaan Alternatif 5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Regulator dan Operator Persampahan 6. Penyediaan Pengelolaan Akhir Sampah 7. Peningkatan Kinerja Sarana Prasarana Persampahan Permukiman 8. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air limbah 9. Peningkatan kapasitas penyelenggara air limbah

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				10.Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAL yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan 11.Mengurangi backlog perumahan 12.Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Berkelanjutan 13.Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh 14.Penyediaan Tanah/Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur 15.Peningkatan Kualitas SDM pada Jasa Konstruksi 16.Peningkatan Akses Listrik Untuk Masyarakat kurang mampu 17.Peningkatan Proporsi Bauran Energi baru terbarukan 18.Peningkatan Cakupan Layanan TIK 19.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 20.Peningkatan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu 21.Peningkatan Kualitas SDM pada Infrastruktur Persandian
		Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian yang Berkelanjutan	1. Pengelolaan daerah irigasi 2. Pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi 3. Pengamanan Sumber Air Baku
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Daya Dukung Lingkungan yang Optimal bagi Masyarakat	1. Pengendalian pencemaran udara, air, dan kerusakan lahan 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup 4. Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat	1. Peningkatan keseimbangan produktivitas kota-desa, pantai timur-pantai barat, dan pusat-pusat kegiatan wilayah 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur Persebaran pusat-pusat kegiatan/permukiman

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Ketangguhan Bencana	1. Peningkatan Budaya Kesadaran Tangguh Bencana di Masyarakat 2. Peningkatan Peringatan Dini dan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Alam dan Non Alam 3. Penguatan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebencanaan 4. Peningkatan Desain Konstruksi Infrastruktur yang Tangguh Bencana Penyediaan Kesiapan dukungan Peralatan Infrastruktur untuk Penanganan Bencana
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja di Perangkat Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja di Perangkat Daerah 3. Peningkatan Evaluasi Internal AKIP di Perangkat Daerah
		Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima	Peningkatan Manajemen dan Implementasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan Penerapan dan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Instansi Pemerintah 2. Peningkatan Penerapan dan Integrasi SPBE di Instansi Pemerintah
		Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas sinkronisasi perencanaan & penganggaran	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja di Instansi Pemerintah 2. Peningkatan keselarasan perencanaan dan penganggaran di Instansi Pemerintah 3. Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja Pembangunan di Instansi Pemerintah 4. Peningkatan Kualitas Inovasi di Instansi Pemerintah 5. Peningkatan pemanfaatan hasil kajian dan riset serta kuantitas dan kualitas kematangan inovasi daerah

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Utara 2024-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Utara yang diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah Sumatera Utara yang diturunkan ke dalam kinerja Perangkat Daerah selanjutnya akan dijabarkan ke dalam program kegiatan. Dukungan Perangkat Daerah tergambar dari tabel berikut ini yang menyajikan program prioritas Perangkat daerah sebagai bentuk Prioritas Pembangunan dalam pencapaian Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025.

Tabel 4.6
Konsistensi Dukungan Program Prioritas Terhadap Prioritas Pembangunan Dalam Pencapaian Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN DAN SASARAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		**Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**		
	1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
				Program Kepegawaian	Badan Kepegawaian
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM
	1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Jiwa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RS. Haji
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RS. Haji
	1.3	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3AKB
				Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3AKB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas P3AKB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas P3AKB
2.	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		**Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**		
	2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pengembangan Ekspor	DisperindagESDM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperindag ESDM
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperindag ESDM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Disperindag ESDM
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperindag ESDM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM
	2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disbunnak
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbunnak
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disbunnak
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Disbunnak
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Disbunnak
				Program Penyuluhan Pertanian	Disbunnak
	2.4			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	**Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**		**Prioritas Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan**		
	3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
	3.3	Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	3.4	Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPR
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
	3.2	Meningkatnya akses hunian yang layak		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dishub
	3.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK
				Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
				Program Pengelolaan Hutan	DLHK
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DLHK

				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Disperindag ESDM
	3.6	Meningkatnya Ketangguhan Bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
4.	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif**		**Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif**		
	4.1	Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
	4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	4.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Umum
				Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otda
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Biro Perekonomian
				Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat

				Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
				Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
				Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Administrasi Pimpinan
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekr.DPRD
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
				Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
				Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	4.4	Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbang
	4.5	Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Pencapaian Prioritas Nasional didukung oleh pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat dilihat dari tabel sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sinkronisasi Pencapaian Sasaran Prioritas Provinsi Terhadap Sasaran Prioritas Nasional

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	80,41 (2022)	81,69–85,23	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Nilai SAKIP	67,83 (B)	72,00(BB)
						Indeks Pelayanan Publik	3,92 (B)	4,1(A-)
						Indeks Inovasi Daerah	54,36 (Inovatif)	58,50-60,50 (Inovatif)
						Peringkat PPD	18	12
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	14,6 (2022)	20	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Persentase Kemiskinan	8,15	6,96-7,46
		2. Asia Power Index (Military Capability)	60,42	61,54		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,27-5,56
		3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	62,8 (2020)	67,5		NTP	121,78	129
		4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,53	7,21		Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	6,57	7,25
		5. Indeks Ketahanan Energi	6,64 (2022)	6,77				
		6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	60,43	65,18				

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	67,26	73
		8. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	57,1	57,1
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	45	43				
		Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,80				
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	13,21	20,00				
		Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15,00 (13,00 terdaur ulang) (2022)	24,00 (16,00 terdaur ulang)				
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44				
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,09	76,68				
		Persentase Penurunan Emisi GRK						
		- Tahunan (%)	35,53	32,65				
		- Kumulatif (%)	27,82	28,12				
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,32 (2019)	1,44	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	6,57	7,25
		2. Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14				

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,26				
		4. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,1	4,6				
		5. Devisa Pariwisata (miliar USD)	14,63	22,1	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan			
		6. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92		Persentase Jalan Mantap	80,57	88,06
		7. Aset Perbankan/PDB (%)	56,23	59,5		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	67,26	73
		8. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,37	8,1		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	54,19	57,1
		9. Aset Asuransi/PDB (%)	8,35	8,78		Indeks Wiliamson	0,416	0,384
		10. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,87	56,7		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,11	74,24
		11. Total Kredit/PDB (%)	34,2	36,1		Indeks Resiko Bencana	140,7	140,00
		12. Inklusi Keuangan (%)	88,5	90,6				
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1. Hasil pembelajaran			Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun	Indeks Pendidikan	70,18	71,37
		a. Rata-rata nilai PISA				Indeks Kesehatan	82,57	83,10

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		i. Membaca	359 (2022)	396		Indeks Pembangunan Gender	91,31	91,50
		ii. Matematika	366 (2022)	404				
		iii. Sains	383 (2022)	416				
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,82	9,46				
		c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,48	13,37				
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94				
		3. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78				
		4. Tingkat Penguasaan Iptek:						
		a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30				
		b. Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60,00				
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50-5,00	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Persentase Kemiskinan	8,15	6,96-7,46
		6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,52	56,30		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,27-5,56
		7. Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	74,43		NTP	121,78	129
		8. Kesehatan Ibu dan Anak						

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122				
		b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,5	18,80				
		9. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272				
		10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95	98				
		11. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,53 (2022)	70,29				
		12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2022)	0,425				
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67	19,9-20,0	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Persentase Kemiskinan	8,15	6,96-7,46
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1-30,2		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,27-5,56
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0-21,6		NTP	129,04	134,50
		Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,50		Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,11	7,25
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%	0	15	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun			

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,27-5,56
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22		NTP	121,78	134,50
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,11	44,34		Persentase Kemiskinan	8,15	6,96-7,46
		Persentase desa mandiri (%)	3,9	4				
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	67,26	73
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,05 (2022)	3,45				
		Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52				
		Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51				
		Indeks Pelayanan Publik	3,93	3,68 b)	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	Indeks Pelayanan Publik	3,92 (B)	4,1 (A-)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3		Opini BPK	WTP	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	34	38	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Persentase Kemiskinan	8,15	6,96-7,46

NO	Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	Baseline 2023	Target 2025	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Baseline 2023	Target 2025
		Indeks Pembangunan Hukum	0,66	0,69		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,89	5,27-5,56
		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,3 a)	10,70–11,20		Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,11	7,25
		Tingkat Inflasi (%)	2,61	1,5–3,5				
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,11	7,25
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	OPINI BPK	WTP	WTP
						Nilai SAKIP	67,83 (B)	72,00(BB)
						Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,1(A-)
		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137				

Tabel Sinkronisasi Pencapaian Sasaran Prioritas Provinsi terhadap Sasaran Prioritas Nasional diatas, menunjukkan keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Sasaran Prioritas Nasional. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

PN 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" memiliki keterkaitan dengan beberapa Sasaran Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang meliputi a) Nilai SAKIP; b) Indeks Pelayanan Publik; c) Indeks Inovasi Daerah; d) Peringkat PPD.

PN 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang mencakup : a) Persentase Kemiskinan; b) Tingkat Pengangguran Terbuka; c) NTP; d) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB;

PN 3 "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang meliputi: a) Persentase Jalan Mantap; b) Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak; c) Indeks Kinerja Sistem Irigasi; d) Indeks Wiliamson; e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; f) Persentase Kemiskinan; g) Tingkat Pengangguran Terbuka; h) NTP; i) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB;

Indeks Resiko Bencana **PN 4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas"** memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang dituangkan kebagian berikut: a) Indeks Pendidikan; b) Indeks Kesehatan; c) Indeks Pembangunan Gender; d) Persentase Kemiskinan; e) Tingkat Pengangguran Terbuka; f) NTP; g) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.

PN 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang meliputi sebagai berikut: a) Persentase Kemiskinan; b) Tingkat Pengangguran Terbuka; c) NTP; d) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.

PN 6 "**Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan"** memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang meliputi sebagai berikut: a) Persentase Kemiskinan; b) Tingkat Pengangguran Terbuka; c) NTP; d) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.

PN 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 yang meliputi sebagai berikut: a) Indeks Pelayanan Publik; a) Indeks Pendidikan; b) Indeks Pembangunan Gender; c) SAKIP; d) Indeks Pelayanan Publik; e) Opini BPK

PN 8 "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025

yang meliputi sebagai berikut: a) OPINI BPK; b) SAKIP; d) Indeks Pelayanan Publik; e) Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB.

Tabel 4.8
Dukungan Program Prioritas Provinsi Terhadap Prioritas Nasional

NO	PIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-6
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	

		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	
		Perbenihan Tanaman Hutan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	

		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pengelolaan Museum Provinsi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	

		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	

		Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi

				dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
			Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
			Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Penataan Prasarana Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	

			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Kesejahteraan Hewan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Penataan Prasarana Pertanian	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	
			Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	

		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Tahun	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	

			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	

		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	

		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penyediaan Profil Kependudukan	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo
		Pengelolaan E-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Kominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pendampingan dan Asistensi	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
		Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

4.3. Pencapaian Prioritas Pembangunan Sumatera Utara melalui Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (empat) prioritas pembangunan dan 40 (empat puluh) Kegiatan Strategis daerah (KSD). Empat Prioritas pembangunan dan empat puluh kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) antara lain:

1. **Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:**
   1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;
      a. Pembangunan merupakan pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru pada Unit Sekolah Baru yang di bangun pada tahun 2019-2023
      Rencana Aksi:
      - Pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru dengan target 35 Ruang Kelas.

      Lokasi: USB (SMA dan SMKN) yang di bangun pada periodisasi Tahun 2019-2023.

      b. Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus merupakan proses pembaruan, peremajaan, penyempurnaan Sarana dan Prasarana sekolah dalam rangka revitalisasi dan pemenuhan Sarana dan Prasarana.
      Rencana Aksi:
      a) Pemeliharaan Ruang Kelas dengan target 25 Ruang Kelas,
      b) Pemeliharaan Perlengkapan Ruang Kelas (Meja/Kursi/Papan Tulis) dengan target 112 Sarana Ruang Kelas

      Lokasi: SMA dan SMKN kewenangan Provinsi Sumatera Utara
   2) Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
      Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama merupakan pelaksanaan model pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) pada SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berdasarkan MoA yang telah ditandatangani antara SMK dengan DUDI.
      Rencana Aksi:

a) Menghadirkan mentor/guru bantu dari DUDI sesuai dengan kebutuhan pasar dengan target 20 sekolah
b) Melatih guru ke DUDI untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang berorientasi bisnis di DUDI dengan target 20 sekolah

Lokasi: Berdasarkan Kabupaten/Kota dengan Peringkat Nilai Angka Partisipasi Murni 10 terbawah

3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Edukasi Perempuan dan Anak);

Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan edukasi terhadap perempuan usia 18 tahun ke atas di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada lembaga pemberdayaan perempuan.

Rencana Aksi:

a) Penguatan kapasitas perempuan marginal melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) melalui Pembentukan lembaga Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) dengan target 3 Lembaga
b) Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT) sebanyak 245 orang

Lokasi: Kabupaten/Kota se Sumatera Utara

4) Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library;

Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library merupakan Pembuatan Titik Baca berbasis digital dengan teknologi Scan QR Code yang dilengkapi dengan 100.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book) pada 100 titik sampai dengan 2026 agar masyarakat Sumatera Utara dapat membaca Buku Digital di Lokasi Penempatan Titik Baca.

Rencana Aksi:

a. Koordinasi bersama Dispusip Kabupaten/Kota Perihal lokasi dan izin penempatan Titik Baca dengan target 32 titik.
b. Penyediaan E-Book untuk Penambahan Konten Titik Baca dengan target 32.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book)
c. Penyediaan Tugu (Totem) QR Code Titik Baca dengan target 32 tugu

Lokasi:

- Kabupaten Deli Serdang, Pakpak Bharat, Toba, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan batu, Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli, Binjai, Sibolga, Siantar.
- Penentuan lokus berdasarkan Lokasi yang sudah di bentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB).

5) Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan.

a. Pengembangan Sarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana gedung Rumah Sakit dengan Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2022-2023 dan Rencana Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tower 2 Tahun 2025 pada Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat

   Rencana Aksi:

   a) Pembangunan Gedung Tower 2 target 1 gedung (*Loan on process*)
   b) Peningkatan dan pengembangan gedung rumah sakit dengan Pemeliharaan/renovasi Poliklinik dan ruangan lainnya dengan target 1 paket.

   Lokasi: UPTD Khusus RS. Haji Medan

b. Pengembangan Prasarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan peralatan/perlengkapan Rumah Sakit dengan telah dibangunnya Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2023 Rumah Sakit Haji Medan.

   Rencana Aksi:

   Pengembangan Prasarana tersebut maka dilakukan Penyediaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Tower yang telah dibangun dengan target 1 paket

Lokasi: UPTD Khusus RS. Haji Medan

c. Pengembangan layanan Rumah Sakit Haji Medan merupakan upaya dalam menyediakan dan meningkatkan layanan-layanan unggulan yang telah didukung oleh Kementerian Kesehatan dengan Kepmenkes ataupun layanan unggulan lokal Rumah Sakit Haji Medan yang merupakan inovasi.
Rencana Aksi
Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Petugas Medis dan Non Medis (untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Diabets Melitus/DM, Tuberkulosis/TB dan *Respiratori, Gastrohepatologi* serta *Orthopedi* dengan target 30 orang
Lokasi: UPTD Khusus RS. Haji Medan

6) Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut)
Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) bagi balita usia 6-9 bulan untuk percepatan penurunan prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Utara.
Rencana Akasi:
- Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita usia 6-9 bulan dengan target 4.4oo balita

Lokasi: 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

7) Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi.
Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat di kabupaten/kota [di luar kab/kota yang telah UHC] dalam rangka mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95% penduduk memiliki jaminan kesehatan nasional melalui skema pembiayaan *cost-sharing* untuk mendorong peningkatan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)'
Rencana Aksi:
Pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi dengan target 6 Kabupaten/Kota
Lokasi: 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

8) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Masyarakat di 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menurunkan Angka Kesakitan
Rencana Aksi:
Penyediaan media KIE baik media cetak dan elektronik dalam rangka peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan target 100 Persen
Lokasi:33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

9) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:
- Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak "Dr. Muhammad Ildrem Menyapa"
- Bus Kesehatan Bergerak

a. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mental Bergerak "Dr. Muhammad Ildrem Menyapa" merupakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mental keliling yang bukan hanya dilakukan di lingkungan Rumah Sakit tetapi juga di lapisan masyarakat khususnya di wilayah Lokus yang sudah ditetapkan dengan melakukan promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat.
Rencana aksi:
a) Melakukan MOU dengan Kabupaten/Kota berdasarkan kajian rekam medis di RSJ dengan target 3 Kabupaten/Kota
b) Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan mental bergerak

berupa promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat serta memberikan rujukan pelayanan kesehatan lanjutan bila diperlukan dengan target 3 Kabupaten/Kota
Lokasi: Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bergerak dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan Mobil/Bus Medis Kesehatan, meliputi operasi bibir sumbing, sunat masal, penyakit dalam, pemeriksaan mata, pemeriksaan paru dan layanan laboratorium kesehatan dalam rangka menurunkan angka kesakitan.
Rencana Aksi:
Menyelenggarakan layanan kesehatan bergerak yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan mobil/bus medis kesehatan dengan target 33 Kabupaten/Kota
Lokasi: Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

10) Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA
a. Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara harus sukses dari segi Prestasi.
b. Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara harus dapat dimanfaatkan dengan baik Pasca Pelaksanaan PON XXI Tahun 2024
b. SUMUT JUARA adalah peningkatan atlet nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang semula berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi dari yang semula berjumlah 1181orang atlet dan pelatih/wasit/ juri
Rencana Aksi:
Meningkatkan atlet berprestasi provinsi dengan target: 1181 atlet dan 150 pelatih/wasit/juri melalui :
- Penyelenggaraan kejuaraan single *Event* dan multi *Event*. Pembinaan atlet pelajar melalui PPLP/D.
- Kegiatan pelatihan pelatih, wasit dan juri

Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

11) Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan serta Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi
a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai berdasarkan demokrasi Pancasila dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada
b. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada
c. Edukasi pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi merupakan pemberian pengetahuan terkait pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk meminimalisir konflik sosial.
Rencana Aksi:
a) Sosialisasi untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan target 300 Orang
b) Sosialisasi untuk menggerakkan perubahan dalam cara berpikir, dan cara hidup masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila dengan target 300 Orang
Lokasi: Provinsi Sumatera Utara.

12) Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
Optimalisasi dan pengembangan kampung bersinar (bersih narkoba) merupakan penurunan kawasan rawan narkoba kategori bahaya menjadi 200 kelurahan/desa di tahun 2026
Rencana Aksi:
Penurunan kawasan rawan narkoba kategori bahaya, dengan kategori bahaya yang diturunkan. 245 Kelurahan/Desa, melalui aplikasi siap BERSINAR yang mendapatkan penguatan melalui 4.500 Relawan, 2 lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, bantuan dana rehabilitasi narkoba bagi penyalahgunaan dari masyarakat tidak mampu sebanyak 491 Orang
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

2. Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO).
Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO), melalui pelatihan wirausaha dan akses permodalan /pasar melalui Kelompok Usaha Bersama di Seluruh Kabupaten/Kota
Rencana Aksi:
Pembinaan dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin dengan target 350 0rang (30 KUBE dan 200 UEP)
Lokasi:
Kab. Labura, Karo, Taput, Humbahas, Deli Serdang, Asahan, Tapsel, Sibolga, Dairi, Pakpak Bharat, Medan, Tapanuli Tengah dan Kota Gunungsitoli.

2) Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri.
   a. Rehabilitasi Bangunan pada UPTD Balai Latihan Kerja
   Rencana Aksi:
   Rehab bangunan asrama instruktur dan ruangan pelatihan dengan target: Gedung UPTD. BLK
   Lokasi: Gedung UPTD. BLK Kabupaten Simalungun
   b. Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja.
   Rencana Aksi:
   a) Pelaksanaan pelatihan untuk 8 kejuruan antara lain: kejuruan las, menjahit, desain grafis, tata rias pengantin, barista, teknisi HP, teknisi sepeda motor, tata boga dengan target 770 Orang
   b) Seleksi calon peserta magang luar negeri dan dalam negeri dengan target 1.203 Orang
   c) Rekrut, seleksi, dan pembekalan calon wirausaha baru dan pemberian bantuan sarana usaha dengan target: 1.100 Orang
   Lokasi:
   UPTD. BLK di Kabupaten Simalungun (untuk Rencana Aksi a)
   Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi b dan c)
   c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online.
   Rencana Aksi
   a) Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui Sistem Online (Karir Hub) dengan target 20.000 Orang
   b) Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui pelaksanaan *Job Fair* dengan target 3.500 Orang
   Lokasi: Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a dan b)

3) Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
   a. Standarisasi merupakan produk yang memiliki standar melalui sertifikasi.
      Rencana Aksi:
      "KLINIK BISNIS" BAGI KOPERASI DAN UKM/IKM melalui:
      - Fasilitasi standarisasi dilakukan melalui dukungan pengurusan Sertifikat Halal, Haki Merk dan BPOM Bimtek seputar sertifikasi Halal, HaKI Merk dan BPOM sebanyak 125 UMKM
      - Peningkatan Pendapatan UMKM melalui digitalisasi pemasaran dilakukan melalui dukungan pemasaran produk UMKM melalui *Market place* sebanyak 30 UMKM
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

   b. Fasilitasi standarisasi dan peningkatan pendapatan IKM melalui digitalisasi pemasaran dengan melakukan fasilitasi terhadap sertifikasi halal, merk, izin edar, dan pembinaan kepada IKM.
      Rencana Aksi:
      a) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan target 50 IKM (sertifikasi halal dan merk), 5 IKM (izin edar BPOM)
      b) Bimtek Literasi Digital dalam rangka peningkatan Akses Pasar dengan target 50 IKM
      c) Monev terhadap IKM dengan target: 155 IKM
      Lokasi:
      Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

5) Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.
   Sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan antar sub sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya), meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
   Rencana Aksi:
   a) Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan) dengan target:
      - Bantuan Benih Padi seluas 15.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 3.500 Ha.
      - Bantuan saprodi bawang merah seluas 130 Ha, Bantuan Saprodi Cabai Merah seluas 160 Ha
      - 2 Kelompok ternak Kabupaten/Kota yang diintegrasikan dengan tanaman pangan dan hortikultura.
      - 2 Kelompok ternak kabupaten/Kota yang di integrasikan dengan tanaman perkebunan
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

6) Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;
   a. Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi;
      Rencana Aksi:
      Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi dengan target 200 Orang petani sektor tanaman pangan dan hortikultura dan 45 orang petani sektor perkebunan dan peternakan
      Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
   b. Pemanfaatan sumber daya lahan sawah yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usaha tani yang lebih

produktif;
Rencana Aksi:
Termanfaatkannya lahan sawah yang tidak optimal dengan target 250 Ha
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

c. Peningkatan penggunaan peralatan dan mesin pertanian
Rencana Aksi:
Peningkatan mekanisasi pertanian dengan target: 700 unit bantuan alat mesin pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, 372 unit bantuan alat mesin pertanian sektor Perkebunan, 18 unit bantuan alat mesin pertanian sektor Peternakan.
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

7) Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata
   a. *Travel fair* sebagai ajang pameran yang menyediakan beragam kebutuhan para pelancong untuk berwisata.
   Rencana Aksi:
   Pelaksanaan Travel Fair di dalam dan luar negeri dengan target 3 kali melalui:
   - Pembuatan paket wisata, tiket pesawat, tiket objek wisata serta perlengkapan berwisata;
   - *Event travel fair joined* biro/agen perjalanan, *ticketing*, hotel, bank.

   Lokasi:
   Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Kota Bandung
   b. Penyelenggaraan *Event sport Tourism* dalam mendorong momentum promosi wisata di Indonesia.

8) Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan *Calender of Event*;
Event internasional yang melibatkan pengunjung (nusantara dan mancanegara), memiliki dampak besar pada ekonomi dan media dan juga sebagai sarana saling mempelajari budaya yang berbeda.
Rencana Aksi:
Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event dengan target 3 kegiatan melalui:
- Dukungan *Event* Pesta Danau Toba, *Triathlon, Traditional Music Festival*, Arung Jeram, Festival Paralayang serta Nias Pro;
- *Calendar of Event*

Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

9) Dukungan Pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;
   a. Pengembangan *Geopark* kaldera Toba melalui jaringan Global *Geoparks Network* dan *Asia Pacific Geoparks Network* khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal serta mempertahankan status Caldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark
   Rencana Aksi:
   Pengembangan *Geopark* kaldera Toba, dengan target 5 *Geosite*:
   - Restrukturisasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
   - Penataan Kawasan Geosite di Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
   - Pengusulan destinasi pariwisata menjadi standar pariwisata berkelanjutan internasional (UNESCO)

   Lokasi: Kabupaten Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark
   b. Pengembangan desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimiliki serta sebagai sarana untuk belajar mengenai kearifan

lokal.
Rencana Aksi:
Pengembangan desa untuk menjadi tempat wisata dengan target 5 Desa Wisata, melalui:
a) Menginventarisasi potensi desa wisata di Sumut;
b) Melakukan pendampingan tata kelola desa wisata;
c) Mengikutsertakan desa wisata dalam ajang anugerah desa wisata tingkat nasional;
Lokasi: Kabupaten/kota di Sumatera Utara

10) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;
a. Melaksanakan tahapan dalam rangka penyusunan PPKD Provsu
Rencana Aksi:
Penyusunan dokumen PPKD dengan target 1 dokumen, melalui :
- FGD & Konsultasi Publik Dokumen Rancangan awal PPKD provinsi Sumatera Utara;
- Penyusunan Dokumen Rancangan awal PPKD Provinsi Sumatera Utara
Lokasi: Kabupaten/kota di Sumatera Utara
b. Melaksanakan tahapan dalam rangka penyusunan roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu.
Rencana Aksi:
Penyusunan dokumen Roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu dengan target 1 dokumen melalui:
- FGD Rancangan awal Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara;
- Penyusunan Rancangan akhir Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Utara
Lokasi: Kabupaten/kota di Sumatera Utara

11) Penyelenggaraan *North Sumatera Utara Business Forum and Business Matching* dan Pameran Agro Industri Nasional.
Penyelenggaraan *North Sumatera Utara Business Forum and Business Matching* dan Pameran Agroindustri Nasional, terdiri dari:
- Pertemuan antara pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara antara para *project owner* dengan para penanaman modal dari dalam dan luar negeri
- Pertemuan langsung atau tatap muka antara project owner dengan para penanaman modal dari dalam dan luar negeri
- Pameran yang diikuti oleh para project owner, BUMD/BUMN, Asosiasi/Himpunan, Proyek investasi strategis dari 33 Kabupaten/Kota pada sektor agroindustri.
Rencana Aksi:
Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agroindustri Nasional dengan target 5 *Letter of Intent*
Lokasi: Dalam Negeri dan Luar Negeri

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi, pada ruas jalan:
- Meningkatkan Konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan Perkotaan di zona Pantai Timur;
- Mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektivitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan;
- Mendukung Konektivitas Kawasan Perbatasan
Rencana Aksi

Peningkatan Kemantapan jalan kewenangan provinsi dengan target 76,61 persen
Lokasi:
a) Lokasi ruas jalan yang meningkatkan konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan Perkotaan di zona Pantai Timur, yaitu: Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu
b) Lokasi ruas jalan yang mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektivitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan, yaitu: Kabupaten Madina, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Padang Lawas.
c) Lokasi ruas jalan yang mendukung konektivitas Kawasan Perbatasan, yaitu: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas.

2) Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
Kondisi infrastruktur jaringan irigasi belum berfungsi optimal diakibatkan jaringan irigasi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kinerja jaringan irigasi menurun serta terjadinya alih fungsi lahan dan belum optimalnya SDM Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
Rencana Aksi
Melakukan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan target 10.0000 Ha
Lokasi:
Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas.

3) Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;
a. Pengurangan Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha melalui Penataan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
Rencana Aksi:
a) Verifikasi Teknis Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dan Legislasi RP3KP Provinsi Sumatera Utara. dengan target 23 Dokumen
b) Pembinaan Keswadayaan Calon Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan target 700 Rumah Tangga
c) Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha yang telah ditangani dengan target 9 Kelompok masyarakat
d) Koordinasi dan Sinkronisasi Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 23 laporan
e) Pendataan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 18 Sistem Informasi
Lokasi:
- Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a)
- 17 Kabupaten/Kota (untuk Rencana Aksi b)
- Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Nias Utara, (untuk Rencana Aksi c)
- Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Langkat, Kota Binjai, Kab. Padanglawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab.

Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan. (untuk Rencana Aksi d).
- 18 Kabupaten/Kota. (untuk Rencana Aksi e).

b. Pengurangan Banjir Permukiman melalui Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha.

Rencana Aksi:

a) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Dengan target 16 laporan
b) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 5 laporan
c) Penyusunan DED Permukiman Kumuh termasuk penanganan indikator drainase penanganan genangan air di permukiman kumuh. Dengan target 13 dokumen
d) Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 147 Ha
e) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dengan target 700 unit

Lokasi:

- 16 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a)
- Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara (untuk Rencana Aksi b)
- Kab. Dairi, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Asahan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Kota Sibolga, Padangsidimpuan. (untuk Rencana Aksi c)
- Kab. Toba, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah. (untuk Rencana Aksi d).
- 16 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. (untuk Rencana Aksi e).

4) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang;

Pembangunan TPA melalui dokumen Penyediaan Lahan ± 50 Ha

Rencana Aksi:

a) Nota Kesepakatan antara Kabupaten/Kota (Medan dan Deli Serdang) dan Provinsi Sumatera Utara
b) Pembentukan Tim Pembebasan Lahan
c) Pembebasan Lahan
d) Pembangunan PSD TPA Regional Mebidang dengan target 1 unit
e) Pengawasan Pembangunan PSD TPA Regional Mebidang dengan target 1 dokumen

Lokasi: Kec. STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang

5) Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias

Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias adalah Pembangunan Bendungan/ Embung Idano Mola untuk menyuplai Air Baku dan Berfungsi Sebagai Pengendali Banjir di Kabupaten Nias

Rencana Aksi:

a) Penyusunan Detail Desain dan Model Tes Bendungan Idanomola Kab. Nias.
b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Idanomola Kab. Nias dengan target 1 dokumen.
c) Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias dengan target 1 dokumen
d) Sertifikasi Desain Bendungan Idanomola Kab. Nias dengan target 1 dokumen
e) Jasa Appraisal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan

Idanomola Kab. Nias dengan target 1 dokumen

f) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
g) Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.
h) Supervisi/ Konsultan Pengawasan Pembangunan Bendungan Idanomola Kab. Nias.

Lokasi: kabupaten Nias (untuk Rencana Aksi b s.d. e)

6) Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)
Pembangunan prasarana Air minum sebagai pemenuhan kebutuhan dasar untuk pemenuhan SPM.
Rencana Aksi:
a) Melakukan tahap penyelesaian konstruksi fisik SPAM Mebidang dengan target 277 L /detik
b) Melakukan tahap Konstruksi fisik SPAM Seriti dengan target 1 unit
Lokasi:
- Kota Medan (Kec. Medan Helvetia) , Kota Binjai (Kec. Binjai Timur, Kec. Binjai Utara), Kab. Deli Serdang (Kec. Sunggal). (untuk Rencana Aksi a).
- Kota Tebing Tinggi (Kec. Padang Hulu), Kab. Serdang Bedagai (Kec. Tebing Sahbandar, Kec. Tebing Tinggi). (untuk Rencana Aksi b).

7) Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah adalah Sungai yang berada di Perkotaan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya tertata, air yang mengalir bersih, kondisi sungai aman dan terlihat indah secara arsitektur landscapenya
Rencana Aksi
a) Penyusunan Masterplan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
b) Penyusunan Dokumen Arsitektur Landscape dan Desain Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah
c) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah dengan target 2 dokumen
d) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah dengan target 2 dokumen
e) Pengadaan Tanah Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah dengan target 0,5 Ha
f) Pembangunan Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah.
Lokasi: Sungai Deli Kota Medan dan Sungai Bingei Kota Binjai (untuk Rencana Aksi c s.d. e)

8) Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu
Menyambungkan sambungan listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu yang sudah dialiri jaringan listrik PLN.
Rencana Aksi:
Pelaksanaan sambungan listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu yang sudah dialiri jaringan listrik PLN dengan target 2.500 rumah tangga
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

9) Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata
Memanfaatkan EBT Sinar Surya Matahari untuk sumber energi menggerakkan pompanisasi pertanian dan objek wisata baru.
Rencana Aksi:
Melaksanakan Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung program peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata dengan target 2 EBT
Lokasi: Kabupaten di Sumatera Utara.

10) Pembangunan Satu Data Digital Daerah
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang bertujuan untuk

menciptakan Data Berkualitas
Rencana Aksi:
a) Pengumpulan data. Dengan target Jumlah data yang terhimpun 1.050 data
b) Sosialisasi/diklat Penyelenggaraan statistik sektoral dan pembangunan Satu Data Sumatera Utara dengan target 86 Orang/43 OPD
c) Penyusunan metadata dan standar data dengan target 1.050 Metadata
d) Pengembangan portal satu data dengan target 1 Aplikasi
Lokasi: Medan

11) SUMUT TANGGUH BENCANA
Sumut Tangguh Bencana merupakan kesiapsiagaan Sumatera Utara dalam menghadapi Bencana, melalui:
- Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi dengan sasaran masyarakat. Tema dan materi sosialisasi menyesuaikan jenis bencana di wilayah masing-masing;
- Penguatan kapasitas kawasan dengan sasaran desa yang berada pada kawasan resiko bencana tinggi. Bentuk fasilitasi meliputi penyusunan Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi di tingkat desa;
- Penyediaan sarana kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang bersifat *Mobile*, dapat menjangkau wilayah kab/kota;
- Penguatan kapasitas BPBD Kab/Kota terkait penanggulangan bencana, melalui penyediaan peralatan dan logistik kebencanaan sebagai bentuk dukungan provinsi terhadap kesiapsiagaan respon cepat penanganan darurat di daerah. Alokasi peralatan dan logistik menyesuaikan kebutuhan dan jenis bencana di masing-masing Kab/Kota.

Rencana Aksi:
a) Pelaksanaan Sosialisasi Kebencanaan, Sasaran Jumlah peserta sosialisasi dengan target 1.200 Orang peserta
b) Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Melalui Penyediaan Tenaga Fasilitator/ Penyuluh Kebencanaan dengan target 70 Desa
c) Pengadaan Mobil Edukasi Tangguh Bencana
d) Dukungan peralatan dan logistik ke kab/kota dengan target 33 Kab/Kota
Lokasi: Kabupaten di Sumatera Utara.

12) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”.
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU” merupakan dukungan dalam rangka pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,64 juta ton CO2eq di Tahun 2026, dengan pembangunan rendah karbon pada sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor limbah, sektor transportasi dan Blue Carbon.
Rencana Aksi:
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target 30,16 Juta Ton CO2Eq
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif dengan Kegiatan Strategis Daerah antara lain:

1) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
Rencana Aksi:
Meningkatkan kualitas Opini BPK Pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang akun tabel dengan target WTP
Lokasi: Kota Medan

2) Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;
Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara menjadi predikat BB dengan nilai 81,10 ditahun 2025 melalui pelaksanaan klinik RB
Rencana Aksi:
Peningkatan pelaksanaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dengan target BB (72) melalui:
a) Penyusunan kerangka logis RB tematik;
b) Penyusunan rencana aksi general dan tematik;
c) Penyusunan Road Map RB Pemprovsu;
d) Evaluasi perencanaan rencana aksi RB tematik dan RB general Pemprovsu;
e) Evaluasi pelaksaan rencana aksi RB
Lokasi: Provinsi Sumatera Utara

3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASN di dalam dan luar negeri;
Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN se-Sumatera Utara melalui pemberian Beasiswa S3 dan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri serta di luar negeri.
Rencana Aksi:
a) Pelatihan Pengembangan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal dengan target 40 orang
b) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana dengan target 40 orang
c) Pelatihan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan dengan target 40 orang
d) Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah dengan target 40 orang
e) Pelatihan Aset dan Barang Milik Daerah dengan target 40 orang
f) Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 dengan target 40 orang
g) Pelatihan analis kebijakan dengan target 40 orang
h) MoU dengan Negara tujuan untuk pelaksanaan pelatihan di luar Negeri
i) Pelaksanaan pelatihan ASN Pemprovsu di luar Negeri dengan target 10 orang
Lokasi:
- BPSDM Provinsi Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a s.d. f)
- Negara Malaysia dan Singapura (untuk Rencana Aksi g)

4) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui:
- *Planning and Innovation Corner* (PIC)
- *Event "North Sumatra Innovation and Achievement Summit"*
Rencana Aksi:
- Melakukan *coaching clinic* terkait perencanaan pembangunan dengan target 34 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Kab/Kota
- Melakukan coaching clinic IID, Bimtek inovasi daerah, Innovation Day, Forum CSR, lomba inovasi (inotek) dengan target 33 Kab/Kota
Lokasi: Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Kebijakan pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dilaksanakan dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yaitu:

a. ***Tematik*** dimaknai bahwa tema RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 memiliki tema pembangunan berdasarkan prioritas yang telah

ditetapkan untuk tahun 2025 mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;

b. ***Holistik*** artinya penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan telah mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang diarahkan untuk menjawab tuntutan kinerja daerah tahun 2025;

c. ***Integratif*** dimaknai bahwa upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran kementerian/ Lembaga daerah/ pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan sasaran prioritas pembangunan dicapai melalui berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;

d. ***Spasial*** dapat diartikan bahwa Penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah .

4.4 Percepatan dan strategi dalam pencapaian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Gambar 4.5
Pendekatan THIS (Tematik – Holistik, Integratif, dan Spasial)

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian /kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi

keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pada dasarnya Pendekatan THIS adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, pendekatan yang tidak hanya dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi yang mendukung keterpaduan. Dengan penekanan akan keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar dalam lingkup daerah. Tema dapat bersumber dari isu-isu strategis maupun prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selanjutnya perangkat daerah yang terlibat disebut integratif untuk mewujudkannya ke dalam program-program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik

4.3.1. Perencanaan Tematik

Pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan permasalahan-permasalahan dan target-target pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun pendekatan tematik dalam RKPD Provsu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penurunan Angka Stunting

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan *Stunting* hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/801/KPTS/2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu dalam melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil dan balita dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan jamban, peningkatan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peningkatan keikutsertaan ber-KB, Edukasi pemahaman Stunting pada remaja di SMA/SMK dan konsultasi calon pengantin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam mendukung perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan Stunting terintegrasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Utara antara lain Bappelitbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah serta Biro Kesejahteraan Rakyat serta Organisasi Perangkat Daerah Teknis lainnya yang terdapat pada TPPS Provinsi Sumatera Utara.

Adapun peran Provinsi Sumatera Utara dalam Penurunan Stunting yaitu :

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan *Stunting*;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan *Stunting* Kampanye dan promosi penurunan *Stunting* dengan pendekatan *behavior change communication* (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan *Stunting* kabupaten /kota;
5. Penguatan kapasitas sumber daya provinsi dan kabupaten/kota;
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan *Stunting* yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan *Stunting* terintegrasi di kabupaten/kota;
8. Penilaian kinerja Kab/Kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan *Stunting*;
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan *Stunting*;

Berikut kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Penurunan Angka Stunting:

Gambar 4.6
Kerangka Logis Penurunan Stunting

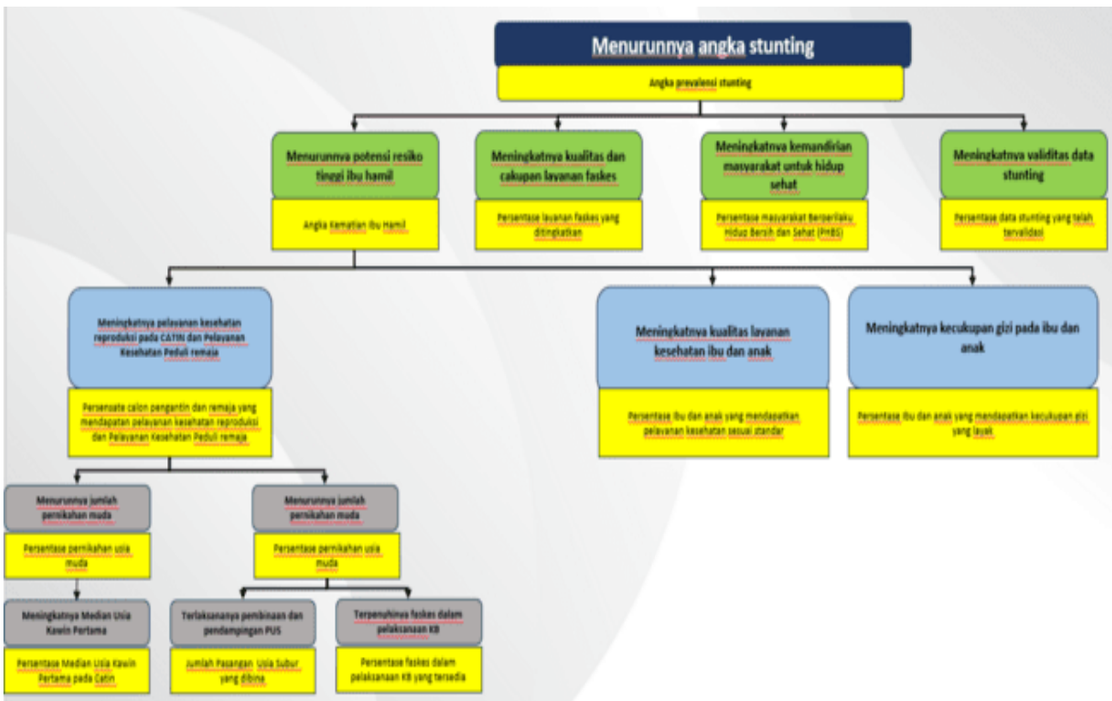

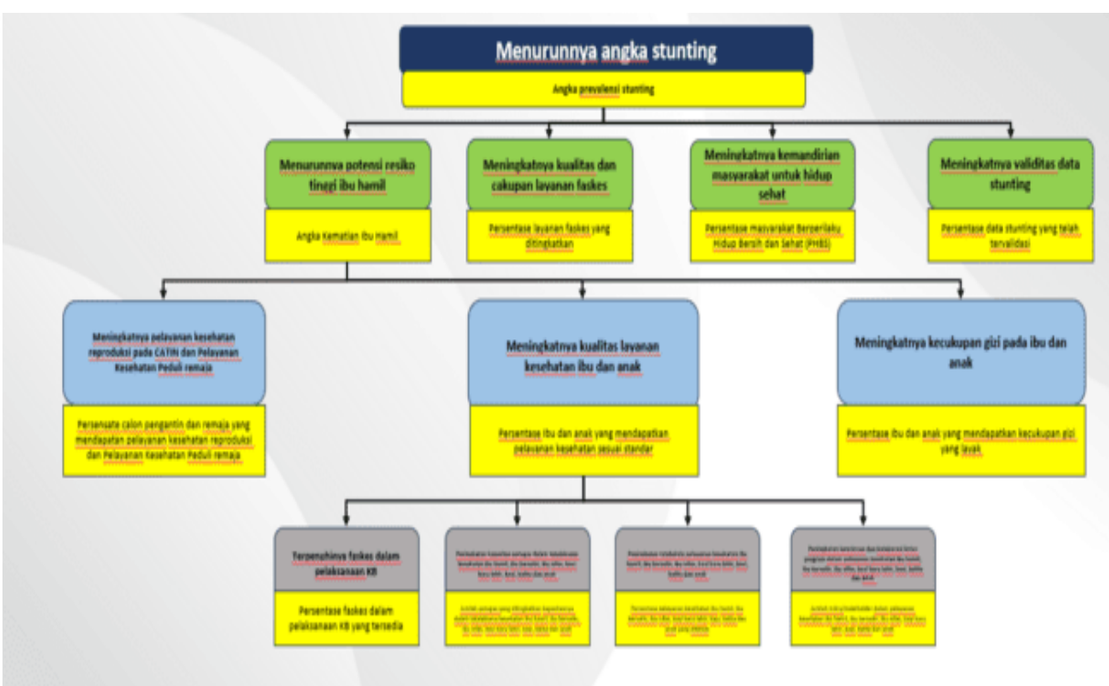

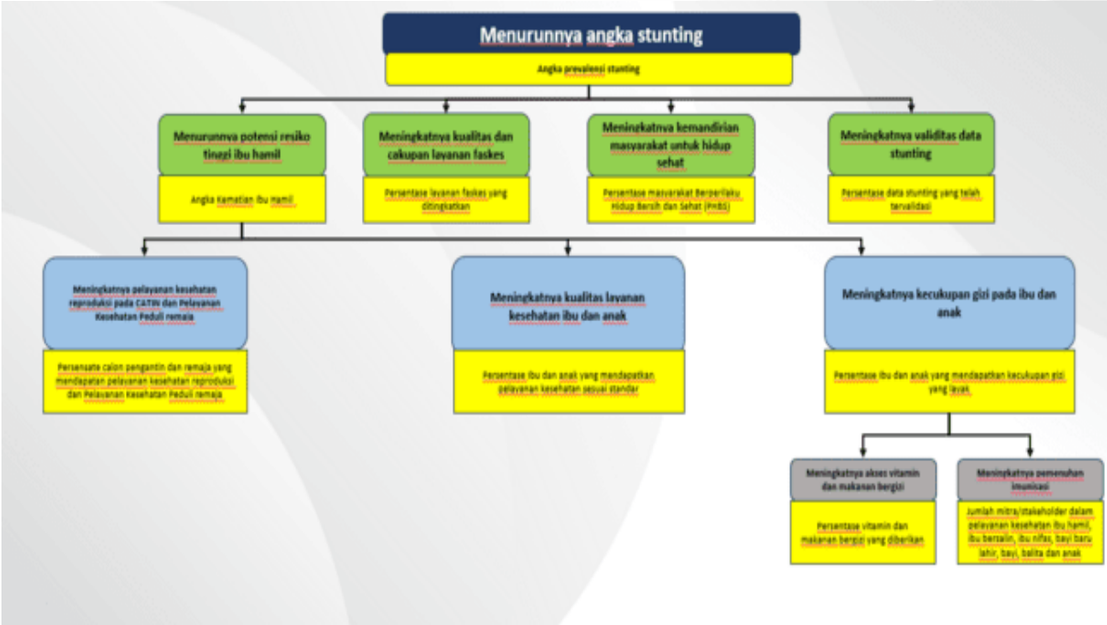
Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka kematian ibu hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meninekatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi pada CATIN dan Pelayanan Kesehatan Peduli remaja
Persentase calon pengantin dan remaja yang mendapatan pelayanan kesehatan reproduksi dan Pelayanan kesehatan Peduli remaja
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
Persentase ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Meningkatnya kecukupan gizi pada ibu dan anak
Persentase ibu dan anak yang mendapatkan kecukupan gizi yang layak
Meningkatnya akses vitamin dan makanan bergizi
Persentase vitamin dan makanan bergizi yang diberikan
Meningkatnya pemenuhan imunisasi
Jumlah mitra/stakeholder dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak

Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka kematian ibu hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya ketersediaan dan mutu, sumberdaya manusia kesehatan
Persentase sumberdaya manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan kefarmasian
Persentase pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang meningkat akses dan mutunya
Peningkatan jangkauan masyarakat yang mendapatka jaminan kesehatan
Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan
Meningkatnya pelatihan/sertifikasi SDM kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang dilatih
Meningkatnya ketersisian SDM kesehatan
Jumlah SDM kesehatan aktif
Meningkatnya fasilitas kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar
Persentase fasilitas kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar
Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan
Peningkatan pelayanan kegawat daruratan dan penguatan Public Safety Center (PSC)
Jumlah layanan kegawat daruratan dan penguatan Public Safety Center (PSC) yang ditingkatkan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasara, rujukan, dan laboratorium kesehatan
Jumlah layanan kesehatan dasar, rujukan, dan laboratorium kesehatan yang ditingkatkan
Peningkatan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan
Persentase pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang terlaksana

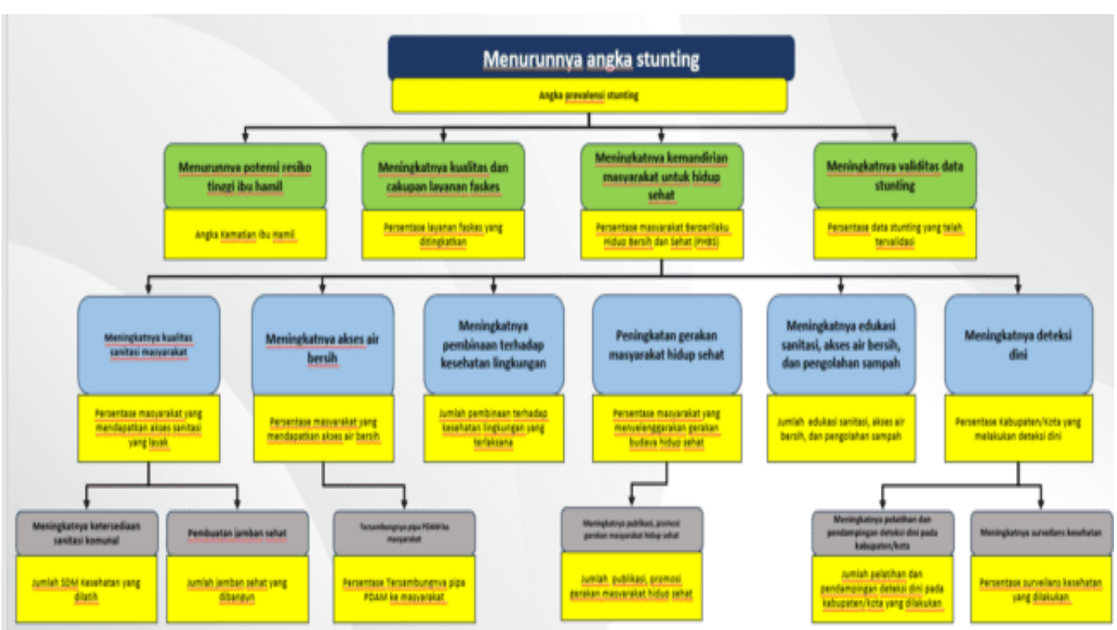
Menurunnya angka stunting
Angka prevalensi stunting
Menurunnya potensi resiko tinggi ibu hamil
Angka kematian ibu hamil
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan faskes
Persentase layanan faskes yang ditingkatkan
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Persentase masyarakat berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatnya validitas data stunting
Persentase data stunting yang telah tervalidasi
Meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat
Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi yang layak
Meningkatnya akses air bersih
Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air bersih
Meningkatnya pembinaan terhadap kesehatan lingkungan
Jumlah pembinaan terhadap kesehatan lingkungan yang terlaksana
Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat
Persentase masyarakat yang menyelenggarakan gerakan budaya hidup sehat
Meningkatnya edukasi sanitasi, akses air bersih, dan pengolahan sampah
Jumlah edukasi sanitasi, akses air bersih, dan pengolahan sampah
Meningkatnya deteksi dini
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini
Meningkatnya ketersediaan sanitasi komunal
Jumlah SDM kesehatan yang dilatih
Pembuatan jamban sehat
Jumlah jamban sehat yang dibangun
Tersambungnya pipa PDAM ke masyarakat
Persentase Tersambungnya pipa PDAM ke masyarakat
Meningkatnya publikasi, promosi gerakan masyarakat hidup sehat
Jumlah publikasi, promosi gerakan masyarakat hidup sehat
Meningkatnya pelatihan dan pendampingan deteksi dini pada kabupaten/kota
Jumlah pelatihan dan pendampingan deteksi dini pada kabupaten/kota yang dilakukan
Meningkatnya surveilans kesehatan
Persentase surveilans kesehatan yang dilakukan

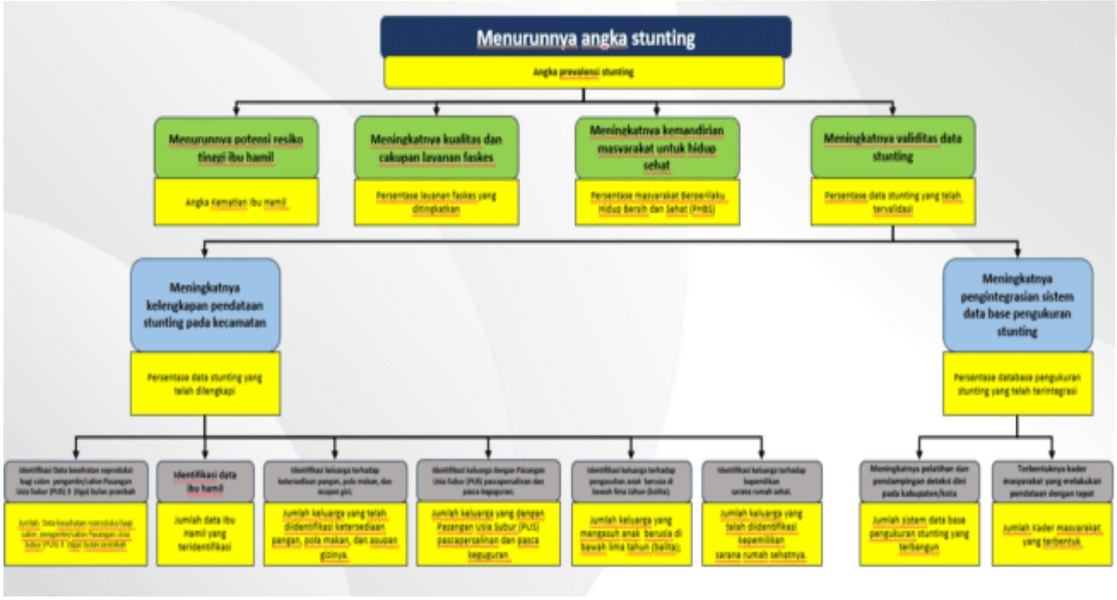

Tabel 4.9
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Stunting

No.	Nama OPD	Program	Kegiatan
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
5.	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
10.	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
		Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

2) Penurunan Angka Kemiskinan

2.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 1.239.710 jiwa. Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,18 poin yaitu dari 8,33 persen pada September 2022 menjadi 8,15 persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,24 juta jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 22,4 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 di daerah perkotaan sebesar 8,23 persen, dan di daerah perdesaan sebesar 8,03 persen. Di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,40 poin, sementara di perdesaan justru naik sebesar 0,07 poin jika dibandingkan September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp.602.999,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.458.706,- (76,07%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.144.293,- atau sekitar 23,93 persen. Pada periode September 2022-Maret 2023, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 turun dari 1,411 pada September 2022 menjadi 1,261 pada Maret 2023, sementara P2 turun dari 0,339 menjadi 0,324. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Selanjutnya P2 – yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin – turunnya indeks ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi di antara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

2.3. Kemiskinan Ekstrem

Secara Internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parities*). Purchasing Power Parities adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang diakukan pembanding dengan US$. Pada tahun 2021, nilai US$ 1,9 PPP = Rp. 11.941 per kapita per hari. Atau dapat didefinisikan bahwa Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan US$ 1,9 *Purchasing Power Perities (PPP)*. Menurut data Bank Dunia, ada 3 hal yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, yaitu 1) kondisi social-budaya, 2) keterbatasan sumber daya, 3) keterisolasian, rendahnya Pendidikan, Kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja. Berdasarkan database Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara tahun 2023 adalah 1.239.710 jiwa, dalam komposisi jumlah tersebut terdapat **118.42** jiwa yang masuk sebagai kategori Penduduk **Miskin Ekstrem.** Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah memiliki Data P3KE sebagai basis data untuk dapat digunakan sebagai pensasaran penanggulangan kemiskinan di Sumatera Utara.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Penurunan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/336/KPTS/2021 Tahun 2021. TKPK Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Rencana Aksi Tahunan (RAT).

Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPKD dan RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem daerah dengan arah kebijakan ditujukan meliputi:

1) Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan miskin merupakan kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Berdasarkan data P3KE terdapat 5.258.079 jiwa yang dapat dikategorikan sebagai penduduk Rentan Miskin.

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin dapat melalui mekanisme pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) yang harus fokus pada kelompok masyarakat rentan/vulnerable group. Namun kendala masalah terkait data penerima manfaat yang kurang valid selalu masalah klasik yang berulang untuk segera diselesaikan. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan masyarakat rentan miskin adalah melalui pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin yang dapat dilaksanakan melalui:

a) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provsu yang

memiliki kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah, dengan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi;

b) Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial Provsu. Dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya di dalam Panti;

c) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, dengan kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah serta kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri;

d) Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi oleh Dinas Tenaga Kerja Provsu.

2) Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO)

Konsep Program/kegiatan integrasi Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO) Adalah konsep penanggulangan kemiskinan daerah yang bersifat inklusif dengan melibatkan lintas OPD Provinsi Sumatera Utara yang berorientasi pada implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah tingginya tingkat kemiskinan yang tidak memiliki pekerjaan di Sumatera Utara. Sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan karena kesulitan berwirausaha dan memperoleh pekerjaan. Untuk itu diciptakanlah suatu kegiatan sebagai solusinya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan peningkatan wirausaha dan pelatihan skill pada kelompok masyarakat miskin. Tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga diperoleh manfaat berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat miskin.

Dalam strategi pelaksanaan penurunan angka kemiskinan/ kemiskinan ekstrem memedomani Tagging Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun **2021**). Penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu intervensi akses pasar adalah melalui pemasaran produk hasil usaha pada PLUT Provinsi Sumatera Utara dan Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, dan dapat juga dilaksanakan pemasaran melalui *e-commerce* dan platform lainnya yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyusun kerangka Identifikasi Resiko penanggulangan kemiskinan dengan pendampingan oleh inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi Resiko yang memuat penyebab resiko dan dampak resiko;
2) Penentuan Status resiko yang memuat pedoman matriks Analisa resiko dan tabel level dampak resiko;
3) Penilaian resiko yang memuat pernyataan resiko yang dinilai berdasarkan level kemungkinan, level dampak dan Analisa status resiko dan skala kemungkinan, skala dampak dan skala status resiko, status resiko serta level resiko;
4) Respon resiko yang memuat deskripsi resiko dan penanganan resiko;

Tabel 4.9
Isu dan Strategi Penanganan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem

NO	ISU	STRATEGI
1.	Penguatan Regulasi	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Penyusunan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2023, Rencana Aksi Tahunan (RAT) tahun 2021-2022, serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun 2021.
2.	Penguatan Regulasi	Pengesahan SK Gubernur Sumatera Utara terkait tim TKPK Provinsi dan Lintas *Stakeholder* tahun 2021-2024 Nomor 188.44/336/KPTS/2021 tahun 2021-2024 sesuai dengan amanat Permendagri nomor 53 tahun 2020.
3.	Penguatan Regulasi	Peningkatan Kapasitas TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota terutama dalam Fungsi pembinaan, sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan dokumen RPKD, RAT, dan LP2KD.
4.	Penguatan Regulasi	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi akan terus berkomitmen ke depannya untuk bersinergi dalam penyusunan basis data identifikasi masyarakat rentan miskin agar tidak menjadi miskin bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Sosial, BPS Provinsi Sumatera Utara, TNP2K RI serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya terutama dalam perbaikan data DTKS diaplikasi SIKS-NG pusat. agar memperbaiki pendataan penduduk dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin (40% orang-orang termiskin), melalui: • peningkatan kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan, verifikasi, Validasi, usulan data masyarakat rentan miskin yang diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial. • Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Sosial Provsu sebagai Wakil Sekretaris TKPK Provinsi ke depannya akan membangun System aplikasi pendukung terintegrasi dalam proses pemutakhiran data DTKS Kabupaten/Kota, sehingga Provinsi dapat bersinergi dengan efektif dan efisien dengan Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan data mutakhir, filterisasi data yang diperlukan sesuai dengan jenis Program Perlindungan Sosial serta updating data secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber referensi data dalam penanganan masyarakat miskin.
5.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui OPD lintas sektor pada TKPK Provinsi Sumatera Utara akan terus berkomitmen ke depannya untuk menyusun basis data yang akurat dan relevan melalui usaha peningkatan kapasitas TKPK Daerah /Kabupaten/Kota dalam melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran usulan data masyarakat miskin DTKS ke Pusat melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial, dan meningkatkan sinergitas TKPK Kabupaten/Kota untuk proses pengumpulan dan updating data kemiskinan secara reguler untuk mendukung DTKS sebagai sumber data dalam penanganan masyarakat miskin serta akan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran coverage data pada aplikasi SIKS-NG tersebut
6.	Penguatan Regulasi dan Pendataan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Pemprov Sumatera Utara melalui TKPK Provinsi akan berkoordinasi dan bersinergi dengan TNP2K RI dan Kementerian/Lembaga terkait dalam usaha percepatan penyusunan instrument spesifik pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan

NO	ISU	STRATEGI
		kemiskinan untuk mengukur/menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut dalam usaha penanggulangan kemiskinan.
7	Menurunkan beban pengeluaran	a. Bantuan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lansia dan Penyandang Disabilitas,) b. Jaminan Sosial c. Perlindungan Sosial d. Subsidi e. Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatkan Pendapatan	a. Peningkatan Kapasitas serta Pemberdayaan Masyarakat miskin melalui pendampingan, BUMDes, Koperasi dan UMKM b. Pelatihan dan Perluasan akses pekerjaan (Kegiatan Pelatihan Padat Karya, Prakerja, Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal) c. Perluasan akses Modal dan Asuransi (Asuransi Tani, Ternak, dan Nelayan) d. Perluasan transfer aset (lahan, Sarana Produksi, dan ternak) e. Perluasan akses dan informasi pasar melalui digitalisasi.
9	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	a. Perluasan dan pemerataan akses layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan air bersih). b. Perluasan konektivitas wilayah (pembangunan jalan dan sarana transportasi, dan akses rumah layak huni serta akses air minum dan jaringan irigasi) c. Peningkatan komitmen dan sinergitas pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa (Pendataan masyarakat miskin serta penguatan peran TKPK Daerah).

Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.7
Kerangka Logis Pengentasan Kemiskinan

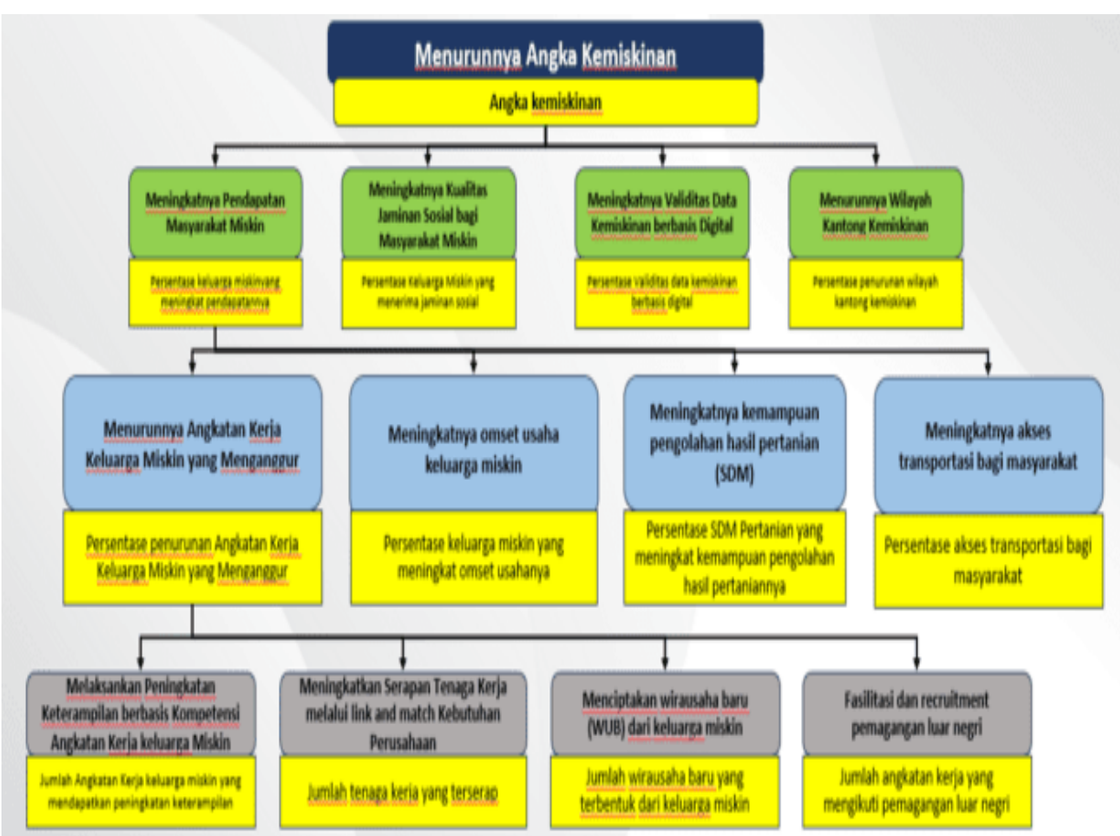

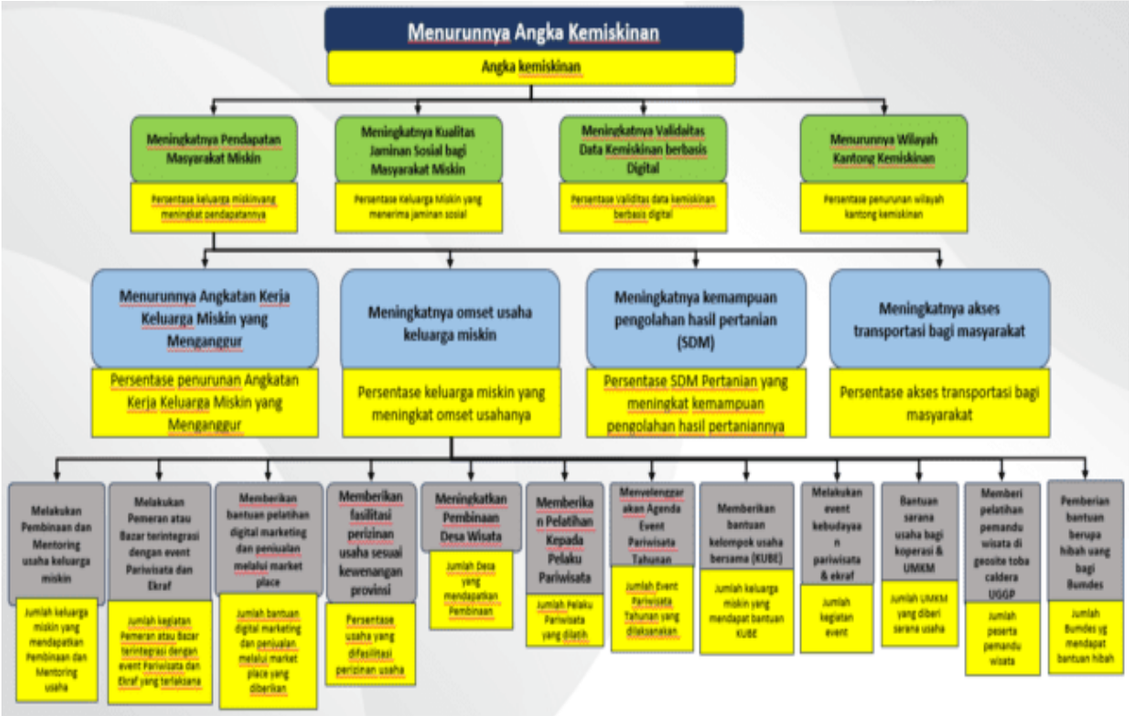
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Melakukan Pembinaan dan Mentoring usaha keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan Pembinaan dan Mentoring usaha
Melakukan Pameran atau Bazar terintegrasi dengan event Pariwisata dan Ekraf
Jumlah kegiatan Pameran atau Bazar terintegrasi dengan event Pariwisata dan Ekraf yang terlaksana
Memberikan bantuan pelatihan digital marketing dan penjualan melalui market place
Jumlah bantuan digital marketing dan penjualan melalui market place yang diberikan
Memberikan fasilitasi perizinan usaha sesuai kewenangan provinsi
Persentase usaha yang difasilitasi perizinan usaha
Meningkatkan Pembinaan Desa Wisata
Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan
Memberikan Pelatihan Kepada Pelaku Pariwisata
Jumlah Pelaku Pariwisata yang dilatih
Menyelenggarakan Agenda Event Pariwisata Tahunan
Jumlah Event Pariwisata Tahunan yang dilaksanakan
Memberikan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan KUBE
Melakukan event kebudayaan pariwisata & ekraf
Jumlah kegiatan event
Bantuan sarana usaha bagi koperasi & UMKM
Jumlah UMKM yang diberi sarana usaha
Memberi pelatihan pemandu wisata di geosite toba caldera UGGP
Jumlah peserta pemandu wisata
Pemberian bantuan berupa hibah uang bagi Bumdes
Jumlah Bumdes yg mendapat bantuan hibah

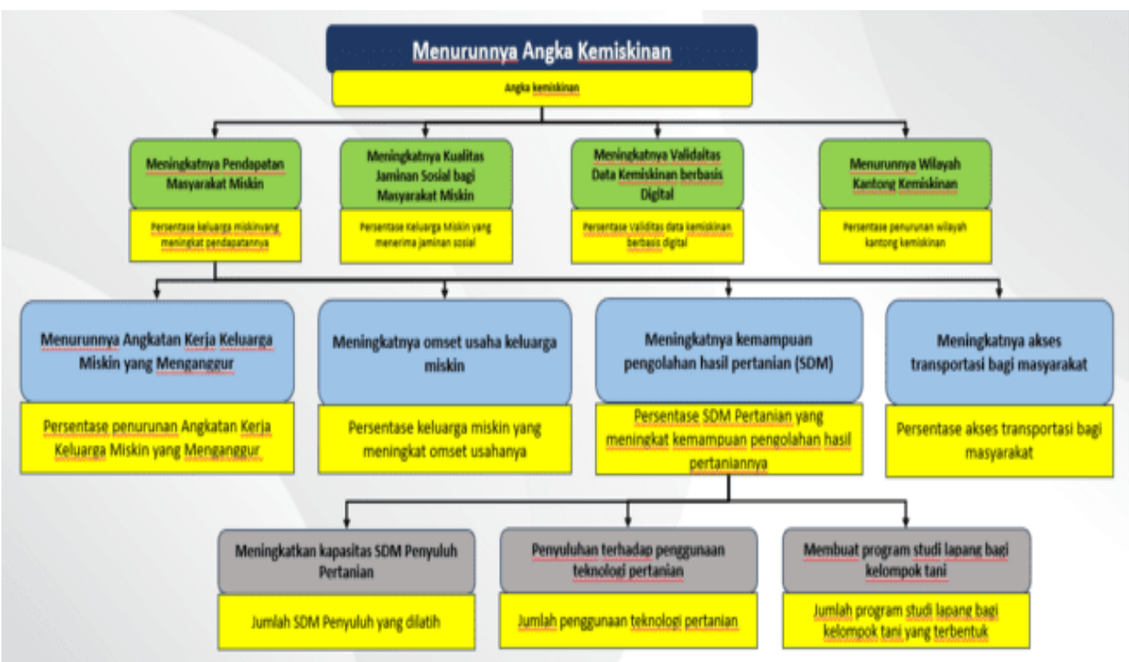
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
Jumlah SDM Penyuluh yang dilatih
Penyuluhan terhadap penggunaan teknologi pertanian
Jumlah penggunaan teknologi pertanian
Membuat program studi lapang bagi kelompok tani
Jumlah program studi lapang bagi kelompok tani yang terbentuk

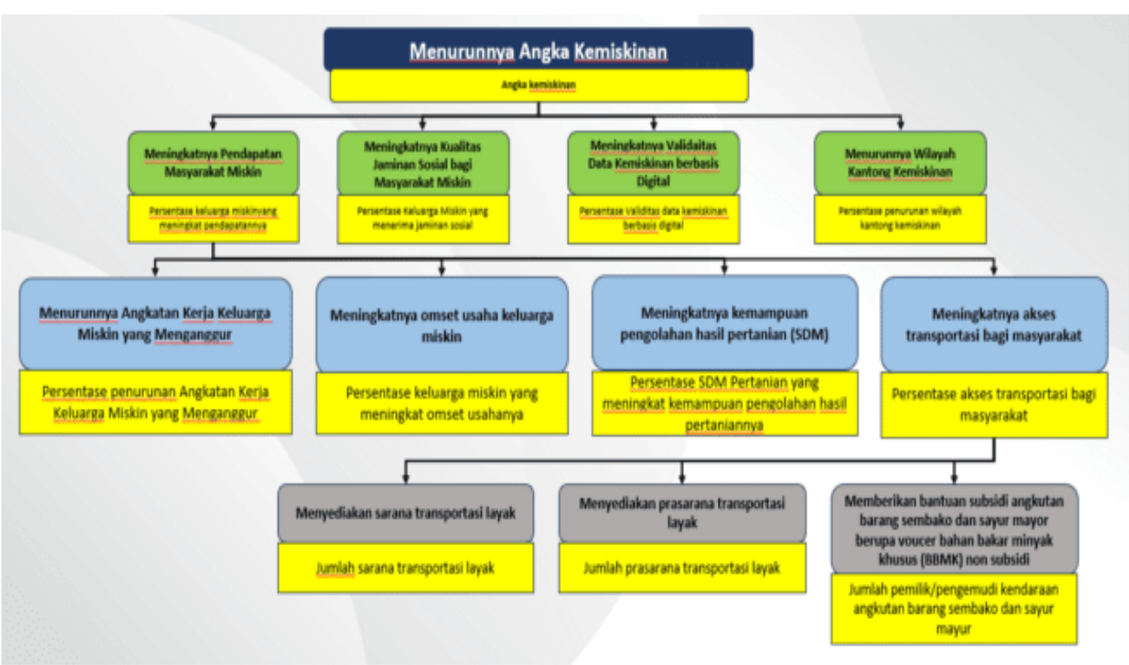
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Menurunnya Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Persentase penurunan Angkatan Kerja Keluarga Miskin yang Menganggur
Meningkatnya omset usaha keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat omset usahanya
Meningkatnya kemampuan pengolahan hasil pertanian (SDM)
Persentase SDM Pertanian yang meningkat kemampuan pengolahan hasil pertaniannya
Meningkatnya akses transportasi bagi masyarakat
Persentase akses transportasi bagi masyarakat
Menyediakan sarana transportasi layak
Jumlah sarana transportasi layak
Menyediakan prasarana transportasi layak
Jumlah prasarana transportasi layak
Memberikan bantuan subsidi angkutan barang sembako dan sayur mayor berupa voucer bahan bakar minyak khusus (BBMK) non subsidi
Jumlah pemilik/pengemudi kendaraan angkutan barang sembako dan sayur mayur

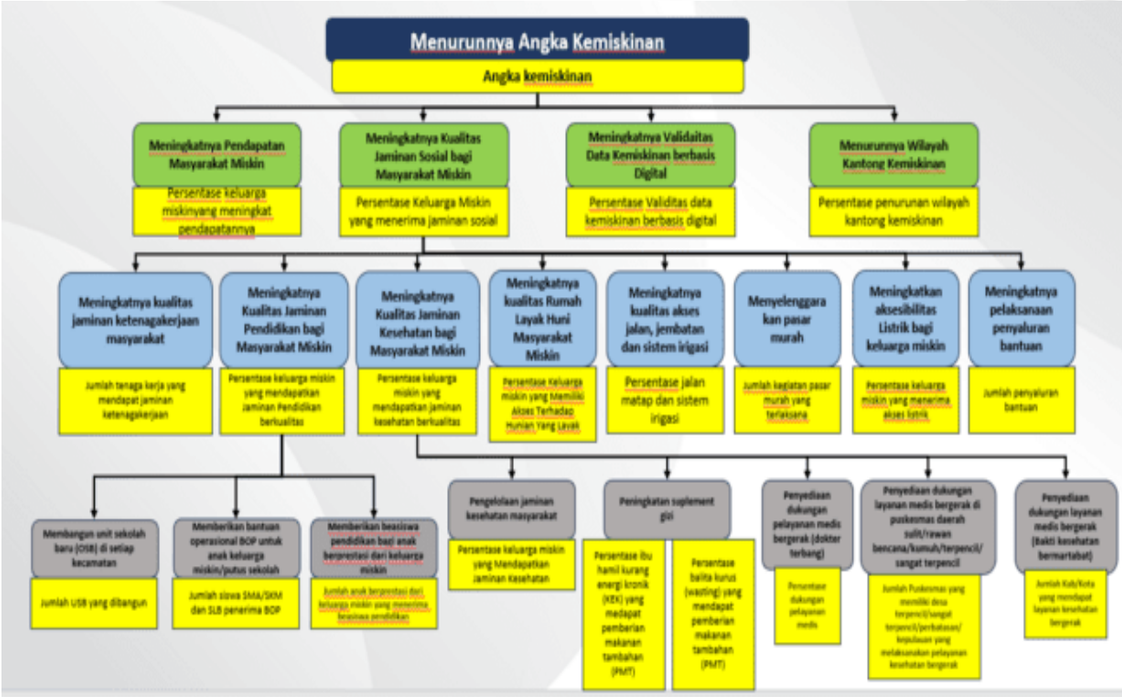
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Menyelenggara kan pasar murah
Jumlah kegiatan pasar murah yang terlaksana
Meningkatkan aksesibilitas Listrik bagi keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang menerima akses listrik
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Membangun unit sekolah baru (USB) di setiap kecamatan
Jumlah USB yang dibangun
Memberikan bantuan operasional BOP untuk anak keluarga miskin/putus sekolah
Jumlah siswa SMA/SKM dan SLB penerima BOP
Memberikan beasiswa pendidikan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin
Jumlah anak berprestasi dari keluarga miskin yang menerima beasiswa pendidikan
Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
Persentase keluarga miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Peningkatan suplement gizi
Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)
Persentase balita kurus (wasting) yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT)
Penyediaan dukungan pelayanan medis bergerak (dokter terbang)
Persentase dukungan pelayanan medis
Penyediaan dukungan layanan medis bergerak di puskesmas daerah sulit/rawan bencana/kumuh/terpencil/ sangat terpencil
Jumlah Puskesmas yang memiliki desa terpencil/sangat terpencil/perbatasan/ kepulauan yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak
Penyediaan dukungan layanan medis bergerak (Bakti kesehatan bermartabat)
Jumlah Kab/Kota yang mendapat layanan kesehatan bergerak

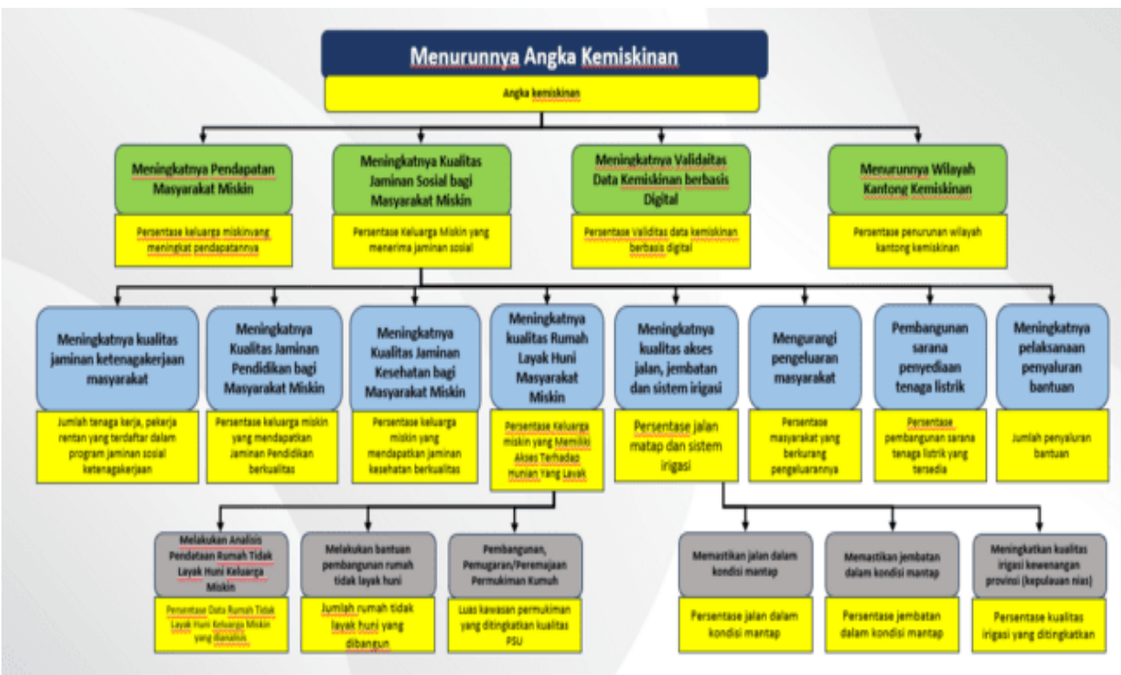
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Melakukan Analisis Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin
Persentase Data Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin yang dianalisis
Melakukan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun
Pembangunan, Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Luas kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitas PSU
Memastikan jalan dalam kondisi mantap
Persentase jalan dalam kondisi mantap
Memastikan jembatan dalam kondisi mantap
Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Meningkatkan kualitas irigasi kewenangan provinsi (kepulauan nias)
Persentase kualitas irigasi yang ditingkatkan

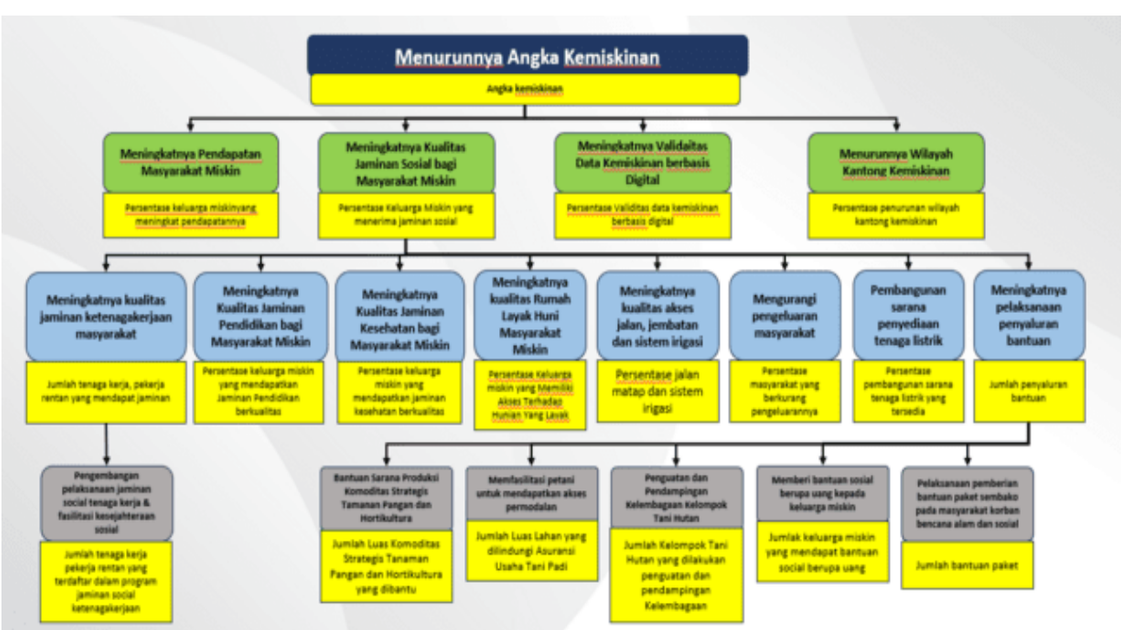
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase Validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang mendapat jaminan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Pengembangan pelaksanaan jaminan social tenaga kerja & fasilitasi kesejahteraan sosial
Jumlah tenaga kerja pekerja rentan yang terdaftar dalam program jaminan social ketenagakerjaan
Bantuan Sarana Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Luas Komoditas Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dibantu
Memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses permodalan
Jumlah Luas Lahan yang dilindungi Asuransi Usaha Tani Padi
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dilakukan penguatan dan pendampingan Kelembagaan
Memberi bantuan sosial berupa uang kepada keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan social berupa uang
Pelaksanaan pemberian bantuan paket sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Jumlah bantuan paket

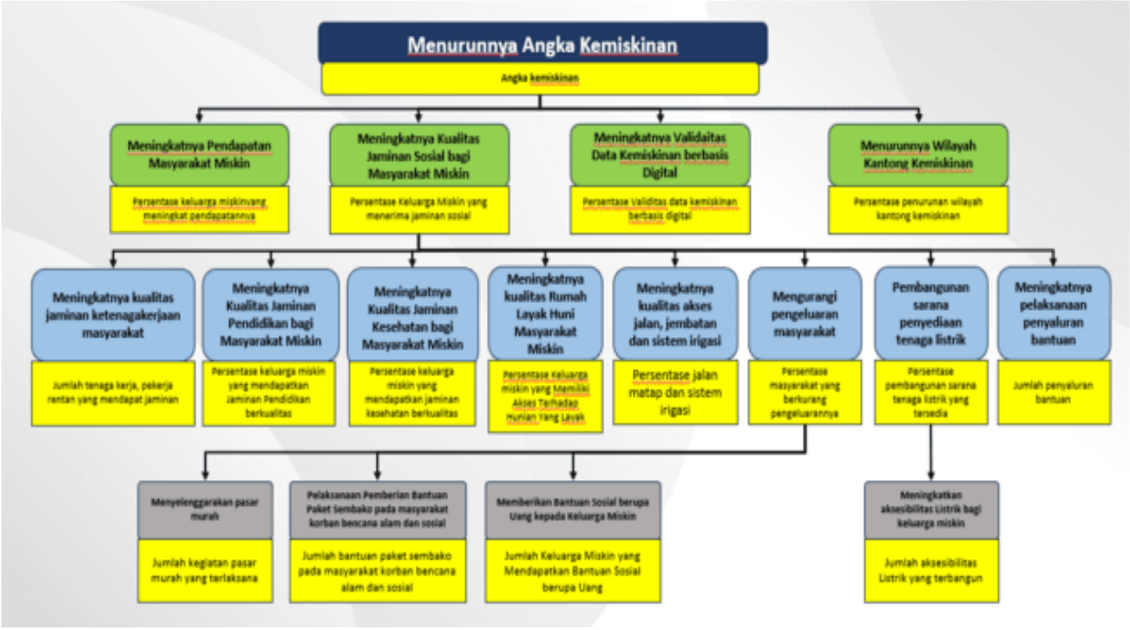
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatnya kualitas jaminan ketenagakerjaan masyarakat
Jumlah tenaga kerja, pekerja rentan yang mendapat jaminan
Meningkatnya Kualitas Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan Jaminan Pendidikan berkualitas
Meningkatnya Kualitas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan berkualitas
Meningkatnya kualitas Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga miskin yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak
Meningkatnya kualitas akses jalan, jembatan dan sistem irigasi
Persentase jalan matap dan sistem irigasi
Mengurangi pengeluaran masyarakat
Persentase masyarakat yang berkurang pengeluarannya
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
Persentase pembangunan sarana tenaga listrik yang tersedia
Meningkatnya pelaksanaan penyaluran bantuan
Jumlah penyaluran bantuan
Menyelenggarakan pasar murah
Jumlah kegiatan pasar murah yang terlaksana
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Paket Sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Jumlah bantuan paket sembako pada masyarakat korban bencana alam dan sosial
Memberikan Bantuan Sosial berupa Uang kepada Keluarga Miskin
Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial berupa Uang
Meningkatkan aksesibilitas Listrik bagi keluarga miskin
Jumlah aksesibilitas Listrik yang terbangun

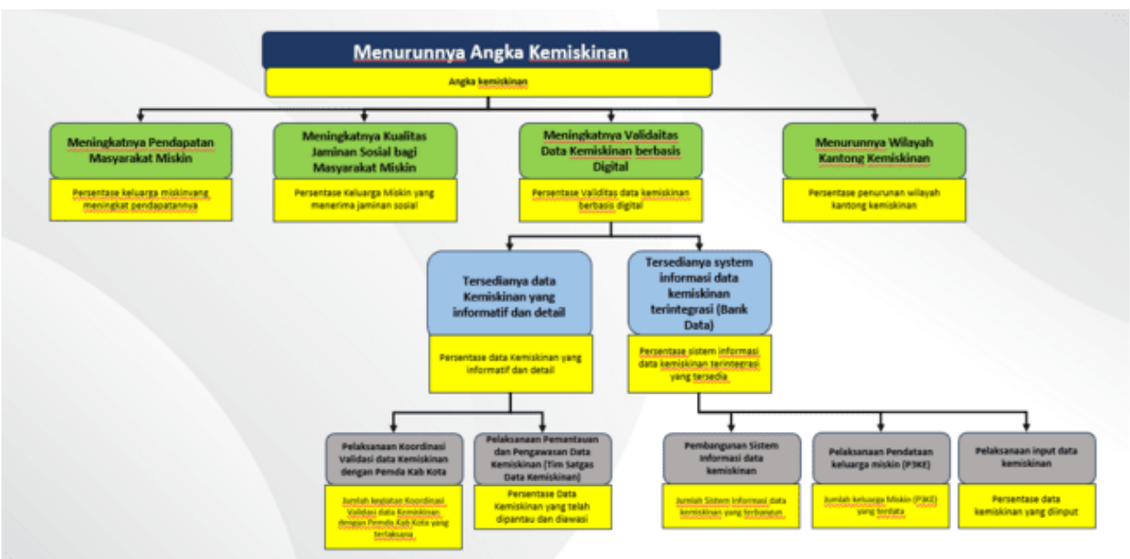
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Tersedianya data Kemiskinan yang informatif dan detail
Persentase data Kemiskinan yang informatif dan detail
Tersedianya system informasi data kemiskinan terintegrasi (Bank Data)
Persentase sistem informasi data kemiskinan terintegrasi yang tersedia
Pelaksanaan Koordinasi Validasi data Kemiskinan dengan Pemda Kab Kota
Jumlah kegiatan Koordinasi Validasi data Kemiskinan dengan Pemda Kab Kota yang terlaksana
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Data Kemiskinan (Tim Satgas Data Kemiskinan)
Persentase Data Kemiskinan yang telah dipantau dan diawasi
Pembangunan Sistem Informasi data kemiskinan
Jumlah Sistem Informasi data kemiskinan yang terbangun
Pelaksanaan Pendataan keluarga miskin (P3KE)
Jumlah keluarga Miskin (P3KE) yang terdata
Pelaksanaan input data kemiskinan
Persentase data kemiskinan yang diinput

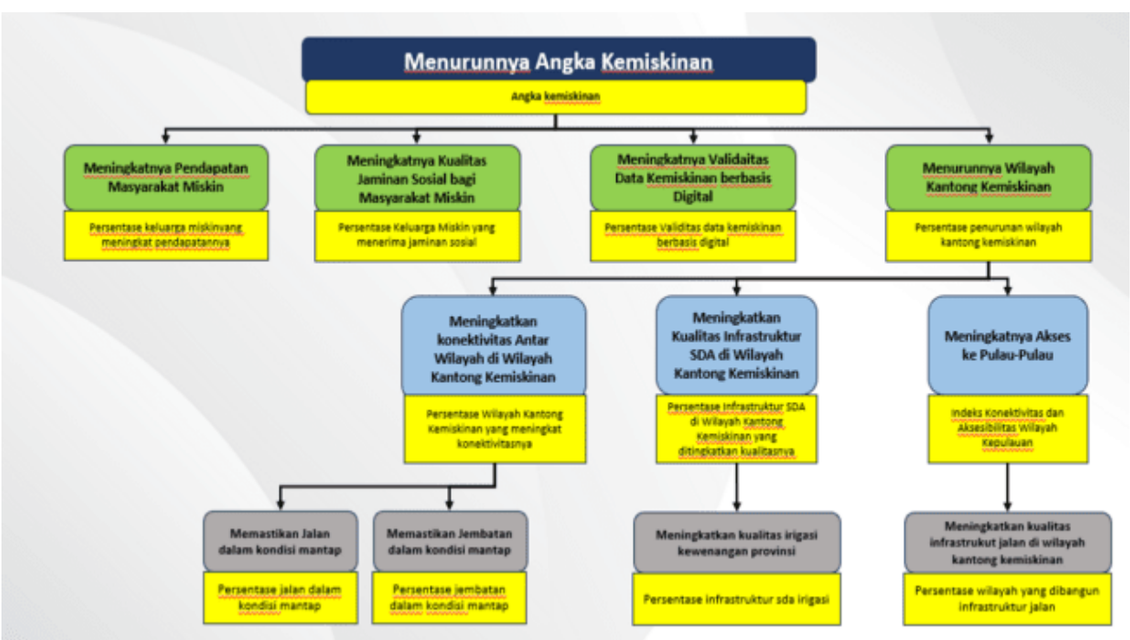
Menurunnya Angka Kemiskinan
Angka kemiskinan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Persentase keluarga miskinyang meningkat pendapatannya
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin
Persentase Keluarga Miskin yang menerima jaminan sosial
Meningkatnya Validaitas Data Kemiskinan berbasis Digital
Persentase validitas data kemiskinan berbasis digital
Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase penurunan wilayah kantong kemiskinan
Meningkatkan konektivitas Antar Wilayah di Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase Wilayah Kantong Kemiskinan yang meningkat konektivitasnya
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur SDA di Wilayah Kantong Kemiskinan
Persentase Infrastruktur SDA di Wilayah Kantong Kemiskinan yang ditingkatkan kualitasnya
Meningkatnya Akses ke Pulau-Pulau
Indeks Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan
Memastikan Jalan dalam kondisi mantap
Persentase jalan dalam kondisi mantap
Memastikan Jembatan dalam kondisi mantap
Persentase jembatan dalam kondisi mantap
Meningkatkan kualitas irigasi kewenangan provinsi
Persentase infrastruktur sda irigasi
Meningkatkan kualitas infrastrukut jalan di wilayah kantong kemiskinan
Persentase wilayah yang dibangun infrastruktur jalan

Tabel 4.10
Strategi Intervensi Terhadap Penurunan Kemiskinan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
1.	Dinas Sosial	Pengadaan alat bantu disabilitas bagi penyandang Disabilitas kurang mampu	Penyandang Disabilitas kurang mampu	Terpenuhinya kebutuhan alat bantu kepada Penyandang Disabilitas Memudahkan Penyandang Disabilitas untuk berusaha
		Pemberian bantuan kepada PPKS hasil Razia	Gelandangan dan Pengemis	Terpenuhinya kebutuhan Modal Usaha kepada warga terminasi Gelandangan dan Pengemis
		Pemberian bantuan seminar kit dan transport ke sekolah	Anak terlantar dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan pendidikan dan transport ke sekolah mengurangi tanggungan di dalam keluarga
		Pemberian bantuan bahan bacaan bagi anak dalam panti	Anak balita kurang mampu	Terpenuhinya Kebutuhan pendidikan sejak dini
		Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Keluarga Kurang Mampu	Penurunan Kemiskinan dengan memberikan bantuan melalui KUBE setiap kelompok masyarakat bisa langsung membuat usaha
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga Kurang Mampu	Penurunan Kemiskinan dengan memberikan bantuan melalui UEP masyarakat kurang mampu bisa langsung membuat usaha
		Pelaksaan pelatihan dukungan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam/sosial	Korban bencana alam/Sosial	Terpenuhinya tenaga profesional dalam penanganan bencana
		Pemberian bantuan Toolkit keterampilan bagi penyandang disabilitas di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Penurunan Kemiskinan dengan Alat bantu Memudahkan Penyandang Disabilitas untuk berusaha setelah Terminasi
		Pemberian bantuan sewa bus pariwisata dan spanduk	Anak balita kurang mampu	Terpenuhinya Kebutuhan bimbingan rekreasi
		Pemberian bantuan melalui instruktur Salon dan Menjahit	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Penurunan Kemiskinan dengan memberikan Memudahkan Penyandang Disabilitas untuk belajar ketrampilan di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Penyandang Disabilitas Terlantar/ PPKS lainnya dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Anak terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	terpenuhinya layanan Bimbingan fisik, mental,

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
				spiritual dan sosial di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Bukan merupakan bagian penurunan kemiskinan
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Bukan merupakan bagian penurunan kemiskinan
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Bukan merupakan bagian penurunan kemiskinan
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Bukan merupakan bagian penurunan kemiskinan
		Dukungan pengerahan petugas penanggulangan bencana dalam penanganan bencana alam/sosial	Korban bencana alam/Sosial	Terpenuhinya bantuan langsung baik secara fisik maupun psikis kepada korban bencana
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Anak dan Lanjut usia Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan layanan pengasuhan di dalam Panti
		Pemberian bantuan melalui jasa tenaga pelayanan	Anak terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan layanan pengasuhan di dalam Panti
		Pelaksanaan Penginputan, VERVAL Data Kemiskinan di Kab./kota Sumatera Utara.	Petugas Penginputan, VERVAL pada Aplikasi SIDAKMASU	Dengan terinput, VERVAL data pada aplikasi SIDAKMASU maka didapatlah Data Kemiskinan yang VALID
		Pemberian bantuan Toolkit keterampilan bagi penyandang disabilitas di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam praktik keterampilan untuk berusaha setelah Terminasi
		Pemberian bantuan pangan bagi anak dan lanjut usia terlantar di dalam panti	Anak dan Lanjut usia Terlantar dalam panti	Terpenuhinya Kebutuhan pangan kepada anak dan lanjut usia terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar dalam panti	
		Pemberian bantuan pangan bagi anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada anak terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada anak terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan Penyandang Disabilitas di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan Penyandang Disabilitas di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Penyandang Disabilitas Terlantar dan PPKS lainnya dalam panti	Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan Penyandang Disabilitas dan PPKS lainnya di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan Penyandang Disabilitas di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan Penyandang Disabilitas terlantar di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan kepada Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Lanjut usia Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan kepada Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Anak terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan kepada Anak Terlantar di dalam Panti
		Pemberian bantuan medis berupa obat-obatan	Anak dan Lanjut usia Terlantar dalam panti	Terpenuhinya fasilitas kesehatan kepada Anak dan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
				lanjut usia Terlantar di dalam Panti
		Pemberian bantuan pangan bagi Disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada anak terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi Disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi Disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi Disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan pangan bagi Disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan pangan kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan sandang	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan sandang kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan sandang	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan sandang kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan sandang	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan sandang kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan sandang	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan sandang kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pemberian bantuan sandang	Penyandang Disabilitas Terlantar dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan sandang kepada Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
		Pengadaan tenda pengungsian	Korban bencana alam/Sosial	Terpenuhinya shelter /tempat pengungsian di lokasi kejadian bencana pada saat tanggap darurat kejadian bencana
		Pemberian bantuan uang saku peserta	PSM	Terpenuhinya kebutuhan dengan mengurangi biaya pengeluaran peserta
		Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui BK3S dan pemberian bantuan hibah bagi lembaga lanjut usia Indonesia	Masyarakat kurang mampu dan lembaga	Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan kepada masyarakat kurang mampu dan bantuan hibah berbentuk uang kepada LLI
		Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang	KUBE PKK terpadu	Penurunan Kemiskinan melalui pemberian modal usaha bagi kelompok
		Pemberian bantuan uang saku peserta	TKSK	Terpenuhinya kebutuhan dengan mengurangi biaya pengeluaran peserta
		Pemberian bantuan ketrampilan pertanian	Gelandangan dan Pengemis	Penurunan Kemiskinan dengan mempunyai skill di bidang Pertanian
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Belanja Operasional dan pemeliharaan rutin 5 bendung elektrik	Bendung irigasi elektrik yang beroperasi dan dipelihara	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Bimbingan Teknis Aplikasi Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi E-PAKSI	Petugas OP memahami dan mampu melakukan E-Paksi secara mandiri dan berkala	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Saluran sekunder, Pintu Air dan Bendung)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 5 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Saluran dan Pintu Air)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 3 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Rehab dan Normalisasi Saluran Primer, sekunder pembuang, dan perkuatan sayap Bendung)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara dari 8 Daerah Irigasi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Saluran dan Pintu Air)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Normalisasi dan rehab Saluran dan Rehab Bendung)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 5 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Saluran dan Pintu Air)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 1 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Saluran dan Pintu Air)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 1 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Normalisasi dan Rehab Saluran)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 1 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 5 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Normalisasi dan Rehab Saluran) pada 5 Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 5 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Normalisasi Saluran) pada 3 Daerah Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 1 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 3 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan 2 Daerah Irigasi Rawa (Normalisasi)	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 3 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan 2 Daerah Irigasi Rawa (Normalisasi)	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 3 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Operasional dan pemeliharaan 2 Daerah Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi Rawa (rehab kantor UPL)	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 3 km	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		`- Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Operasi & Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) - Penyusunan E-Paksi - Komisi Irigasi - Konsultan Supervisi - Peningkatan Saluran (DAK)	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Pembangunan Baru SPAM jaringan perpipaan daerah pelayanan rendah luas jaringan s/d 300 Ha	Pembangunan Pipa Extension Off Taker Binjai	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		- Pembangunan Pipa Extension Off Taker Binjai pendukung SPAM Regional Mebidang (1 Paket) - Pembangunan Pipa Extension Off Taker Deli Serdang (1 Paket) - Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama JDU Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m - Konsultan Manajemen Konstruksi MK, Supervisi dan Pengawasan (1 Paket)	Peningkatan Layanan Air Minum Perpipaan Regional	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kab. Labuhanbatu Utara	Peningkatan Layanan Air Minum Perpipaan Komunal	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Sirahar Kec. Barus	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		- Kebutuhan Alat Ukur Stasiun Hidrologi/Hidrometri - Tinta Ukur - Papan Ukur Duga Air - Konsultan Perencana - Jasa Tenaga pengolah data	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sipirok Kompleks Kec. Sipirok (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		- Perkuatan Tebing Sungai Dalu-Dalu Kec. Air Putih - Perkuatan Tebing Sungai Sei Balai Kec. Nibung Hangus/ Tanjung Tiram - Perkuatan Tebing Sungai Sei Pare-Pare Kec. Medang Deras - Rehabilitasi Tanggul Sungai Silau Tua Kec. Setia Janji	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	- Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman - 1 Orang Tenaga Ahli GIS Setara S1 Teknik Sipil - 1 Orang Tenaga Ahli Kelembagaan Setara S1 Teknik Sipil - 1 Orang Tenaga Ahli Perencanaan Setara S1 Teknik Sipil - Koordinasi pendataan kawasan kumuh di Kab Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Langkat, Kota Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, dan Kota Binjai	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Koordinasi ke Kab. Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi,.	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
		- Makan minum rapat - 2 Orang Tenaga Ahli Perencanaan/ Setara Pengalaman 2 tahun - Koordinasi ke Kab. Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Selatan, Kota Gunungsitoli, Kota DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Mengurangi kantong wilayah kemiskinan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kependudukan Dan Catatan Sipil	Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen rentan admin duk	Kabupaten/Kota	Pengurangan Beban Pengeluaran
		Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan	Kabupaten/Kota	Pengurangan Beban Pengeluaran
		pelaksanaan penyusunan profil data perkembangan kependudukan	Kabupaten/Kota	Pengurangan Beban Pengeluaran
		Pelaksanaan Pembinaan Desa/Kelurahan melalaui lomba desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	Pengurangan Beban Pengeluaran
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan	Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Umum Tenaga Surya (PU-TS)	Terbangunnya Penerangan Umum di lokasi yang gelap, fasilitas sosial dan umum	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
	Sumber Daya Mineral	pengawasan yang ketat terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan memastikan distribusi yang adil dan merata kepada petani yang membutuhkan	Mencapai stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting di Provinsi Sumatera Utara	Mengurangi Beban Pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
		Pemasangan sambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya untuk pompanisasi pertanian	Tersambungnya listrik bagi rumah tangga tidak mampu dan terbangunnya pompanisasi pertanian tenaga surya	Mengurangi Beban Pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
		Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Umum Tenaga Surya (PU-TS)	Terbangunnya Penerangan Umum di lokasi yang gelap, fasilitas sosial dan umum	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Umum Tenaga Surya (PU-TS)	Terbangunnya Penerangan Umum di lokasi yang gelap, fasilitas sosial dan umum	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Umum Tenaga Surya (PU-TS)	Terbangunnya Penerangan Umum di lokasi yang gelap, fasilitas sosial dan umum	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Umum Tenaga Surya (PU-TS)	Terbangunnya Penerangan Umum di lokasi yang gelap, fasilitas sosial dan umum	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
6	Dinas Kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak Melalui Bus Kesehatan Bergerak	Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Terintegrasi (Dinas Kesehatan)	Masyarakat	
		Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Terintegrasi (UPTD RS. Khusus mata)	Masyarakat	
		Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Terintegrasi (UPTD RS Khusus Paru)	Masyarakat	
		Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Terintegrasi (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Masyarakat	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer sesuai Standar	Tenaga Kesehatan	
		Dukungan Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Petugas Kesehatan dan Verifikator Independen	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Non-Register	Masyarakat Miskin/Kurang Mampu	
		Penyediaan kontribusi bagi peserta PBI-JKN	Masyarakat Miskin/Kurang Mampu	

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi	Masyarakat Miskin/Kurang Mampu	
		Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional	Petugas Kesehatan	
		Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan dugaan kejadian luar biasa (KLB)	Tenaga Kesehatan	
		Workshop Analisis data KLB dengan Pemanfaatan Aplikasi Visualisasi Data	Tenaga Kesehatan	
		Logistik Penanggulangan Krisis Kesehatan	Masyarakat terdampak krisis kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan	Tenaga Kesehatan	
		Sosialisasi dan Koordinasi dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Tenaga Kesehatan	
		Dukungan penanganan masalah krisis kesehatan bagi penduduk terdampak bencana alam dan non alam	Petugas Kesehatan	
		Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 6 – 12 bulan (PELITA SUMUT)	Balita Usia 6-9 Bulan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pemberian Susu Tinggi Protein kepada Ibu Hamil Malnutrisi dan diprioritaskan untuk keluarga tidak mampu	Ibu Hamil	
		Penyediaan Informasi dan Analisis Data Indikator Kinerja Gizi (Surveilens Gizi)	Tenaga Kesehatan	
		Supervisi layanan dan program gizi	Tenaga Kesehatan Gizi	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)	Tenaga Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pelatihan Assesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika	Tenaga Kesehatan	
		Pelatihan Skrining Penyalahgunaan Napza Dengan Menggunakan Assist	Tenaga Kesehatan	
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Gerakan Cinta Laut dengan melakukan dengan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Penanaman Mangrove) dan Rehabilitasi Terumbu karang (dengan pembuatan transplantasi terumbu karang)		Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan bagi wanita nelayan		Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pengadaan Rumah Ikan dan Bantuan Sosial GPS kepada kelompok nelayan, Mesin Kapal dan Sampan bermotor		Mengurangi Beban Pengeluaran
		Bantuan Alat Penangkap Ikan di Laut, GPS dan Asuransi Nelayan		Meningkatkan Pendapatan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Bantuan Benih dan Pakan bagi kelompok pembudidaya ikan		Meningkatkan Pendapatan
		Pengadaan Fasilitas Pendukung kegiatan di UPTD BAPL		Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pengadaan Induk Ikan Nila, Lele beserta Pakannya dan Penambahan Fasilitas di UPTD BAPL		Mengurangi Beban Pengeluaran
		Pengadaan Benih ikan, induk udang galah beserta pakannya		Mengurangi Beban Pengeluaran
8	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Bantuan Benih Bawang Merah, Bayam, Cabai Rawit, Cabai Merah, Kangkung, Seledri, Terong, Dan Saprodinya	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Rumah Tangga	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Pemberian bantuan kompor gas, mesin perajang serbaguna, mesin spinner, tabung gas, dll	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Rumah Tangga	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Bantuan Saprodi Budidaya Sayur Pekarangan berupa Bantuan Cabai, Cabai rawit, bibit buncis, bibit kacang panjang pestisida dan pupuk kompos	Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Rumah Tangga	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Pemberian Bantuan Benih dan Sarana Pertanian Seperti Benih Bawang Merah, cabai, kentang, jahe, kunyit, buah-buahan, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar		Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Bawang Merah	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Cabai	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Aneka Sayur dan Biofarmaka (Kentang)	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Jahe	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Kunyit	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Aneka Buah Alpukat	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Aneka Buah Durian	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Aneka Buah Jeruk	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Aneka Buah Mangga	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Penangkar Benih Bawang Merah	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Penangkar Benih Kentang	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Penangkar Buah	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengadaan Sarana Pasca Panen (Bangsal)	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Padi	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Jagung	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Kedelai	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Kacang Tanah	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pengembangan Budidaya Kacang Hijau	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Ubi Jalar	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengembangan Budidaya Ubi Kayu	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pemberian Bantuan Pupuk Hayati Cair dan Pupuk Organik		
		Pupuk Kompos	Kelompok Tani	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Pupuk Hayati Cair	Kelompok Tani	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian Berupa Hand Traktor, Traktor Roda 4, Hand Sprayer, Pompa Air, Cultivator, Dll	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pemberian bantuan cadangan benih daerah untuk lokasi bencana	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Melaksanakan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pada Kelompok tani	Penyuluh dan Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Melaksanakan Penyuluhan dan Pemberdayaan Pada Kelompok tani	Penyuluh dan Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
9	Badan Penanggulangan Bencana	Dukungan bantuan logistik kebencanaan bagi BPBD kab/kota yang akan mendistribusikan kepada masyarakat saat kejadian bencana	BPBD Kab/Kota dan masyarakat terdampak bencana	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
		Pengelolaan hasil hutan dan pelatihan bagi petani serta pemberian bantuan alat ekonomi produktif di UPT KPH untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Kelompok Tani Hutan	Meningkatkan Pendapatan
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) dan Pelatihan fasilitator desa Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	Lembaga masyarakat	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pemberian layanan pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum, penjangkauan, mediasi dan penampungan sementara di rumah perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		(1) Penguatan Forum Data Terpilah Untuk OPD Provsu 2 kali keg, (2) Penguatan Forum Data Terpilah Untuk OPD Kabupaten Kota	Dokumen	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		1) Bimtek Pemanfaatan Aplikasi SIGA, (2) Bimtek Penyusunan Profil Gender, (3) FGD Penyusunan Profil Gender, (4) Pelatihan Info Grafis	Dokumen	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pemberian bantuan spesifik kepada perempuan dan anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Masyarakat	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pemberian layanan pengaduan, kesehatan, pendampingan hukum, penjangkauan, mediasi dan penampungan sementara di rumah perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masyarakat	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
		Pemberian edukasi dan pendampingan layanan peningkatan kualitas hidup anak	Masyarakat	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
		Pembinaan dan edukasi Ketahanan / Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran keluarga dan remaja	Masyarakat	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
			Lembaga masyarakat	Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
12	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	Penyerahan Pestisida, Pembinaan / Pemantauan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pengawasan Fasilitasi Bantuan Sarana Pasca Panen Kopi, Pengawasan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Tembakau Virginia dan Burley, Pengawasan Fasilitasi Bantuan Sarana Pasca Panen Kopi, Pengawasan Fasilitasi Bantuan Sarana Pengolahan Pasca Panen Kakao, Pengawasan Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Pupuk Organik,	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pengawasan mutu, penyediaan benih kelapa genjah, benih kopi mendukung agroforestry, benih kopi mendukung peremajaan tanaman kopi di desa wisata, penyediaan benih pinang, penyediaan benih tanaman aren, penyediaan benih kelapa pandan wangi, penyediaan benih kopi, penyediaan benih mendukung optimasi tanaman kakao	Kelompok Tani	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Bantuan Ternak Ayam, Ternak Babi Betina, ternak domba betina, Ternak Itik, ternak kambing, ternak kerbau, ternak sapi.	Kelompok Ternak	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Alat dan Mesin Peternakan: Hammer Mill, Kendaraan Angkutan Roda 3, Mesin Chopper	Kelompok Ternak	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Fasilitasi Penerapan dan Penerbitan Sertifikasi ISPO, Koordinasi dan Pengawasan Kemitraan Usaha Sektor Peternakan, Pembekalan Teknis Persiapan KUR Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan, Pendataan Pekebun dan Penerbitan STDB, Smart Farm Technology Smart Choice of Young Farmer (IMT-GT)	Kelompok Tani/Ternak	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
		Pembinaan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	Kelompok Tani/Ternak	Peningkatan Pendapatan Masyarakat
13	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Pelayanan Kesehatan jiwa untuk menjaring masyarakat dalam kegiatan bebas pasung	Masyarakat yang dipasung	Peningkatan Layanan Kesehatan
		Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi medis	Pasien NAPZA	Peningkatan Layanan Kesehatan
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pelatihan Vocational Usaha Cukur /Pangkas Rambut Bagi Wirausaha Pemula (P3KE)	Pelaku UMKM	Spesifik
		Pelatihan Vocational Makanan Olahan Bagi Wirausaha Pemula di Sumatera Utara (P3KE)	UMKM	Spesifik
		Pelatihan Vocational ecoprint Bagi Wirausaha Pemula (P3KE)	UMKM	Spesifik
		Pelatihan Vocational Craft dari bahan Limbah Bagi Wirausaha Pemula (P3KE)	UMKM	Spesifik

NO	PERANGKAT DAERAH	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	STRATEGI INTERVENSI
		Pelatihan Vocational Jahit Bordir dan Payet Pelaku UMK (P3KE)	UMKM	Spesifik
15	Dinas Pendidikan	BOS SMA NEGERI	SMA NEGERI	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
		BOS SMA SWASTA	SMA SWASTA	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
		BOS SMK NEGERI	SMK NEGERI	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
		BOS SMK SWASTA	SMK SWASTA	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
		BOS SLB NEGERI	SLB NEGERI	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
		BOS SLB SWASTA	SLB SWASTA	Penurunan Jumlah Siswa Putus Sekolah
16	Dinas Ketenagakerjaan	- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan -Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pekerja Rentan	Sektor Informal / Pekerja Bukan Penerima Upah	Penurunan Tingkat Kemiskinan melalui Bantuan JKK, JKM dan bantuan bagi anak yang orangtuanya mengalami Kecelakaan Kerja dan Kematian sampai pendidikan anak sampai dengan S1
		Fasilitasi Seleksi Magang ke Jepang dengan tahapan seleksi sbb : Tahapan I seleksi berkas, Tes Matematika, Tes SAMAPTA, Tes Fisik, G208Wawancara, Medical Check-Up, Tes Bahasa, Pelatihan Tahap I Daerah, Pelatihan Tahap II di Pusat.	Pencari Kerja	Penurunan Tingkat Pengangguran guna mencegah kemiskinan melalui peluang lapangan pekerjaan magang luar negari Ke Jepang
		Pelaksanaan Pelatihan untuk 8 Kejuruan antara lain: Kejuruan Las, Menjahit, Desain Grafis, Tata rias Pengantin, Barista, Teknisi HP, Teknisi Sepeda Motor, Tata Boga Peserta pelatihan ditargetkan berasal dari Kab/Kota Se-Sumatera Utara	Pencari Kerja/ Calon Wirausaha Baru	Penurunan Tingkat Pengangguran guna mencegah kemiskinan melalui Peningkatan Skill dan Kompetensi serta menciptakan WUB yang berkompeten

3. Peningkatan Investasi

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tentang North Sumatera Invest. North Sumatera Invest (NSI) merupakan tim kerja lintas lembaga di Sumatera Utara yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara melalui kegiatan promosi investasi dan perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Utara. Keanggotaan NSI terdiri dari instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab tim kerja dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui:

1. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
3. Penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata.

Dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencapai kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2023 ini. Perda tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan penanaman modal serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Utara.

Selain itu, dalam mempromosikan potensi investasi, Provinsi Sumatera Utara juga sedang dalam proses penyusunan peta potensi investasi berbasis Webgis yang dapat memudahkan calon investor mendapatkan informasi terkait potensi dan peluang investasi berupa gambaran singkat usaha, titik koordinat lokasi, visualisasi, nilai investasi, legalitas, dan bentuk kerjasama investasi.

Berikut kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Investasi:

Gambar 4.8
Kerangka Logis Peningkatan Investasi

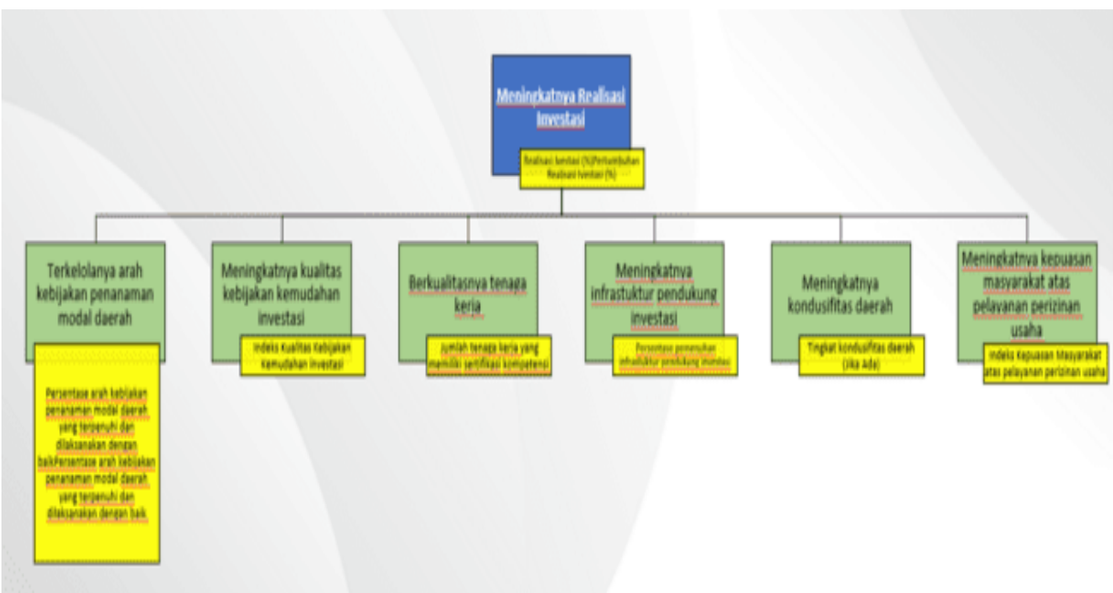

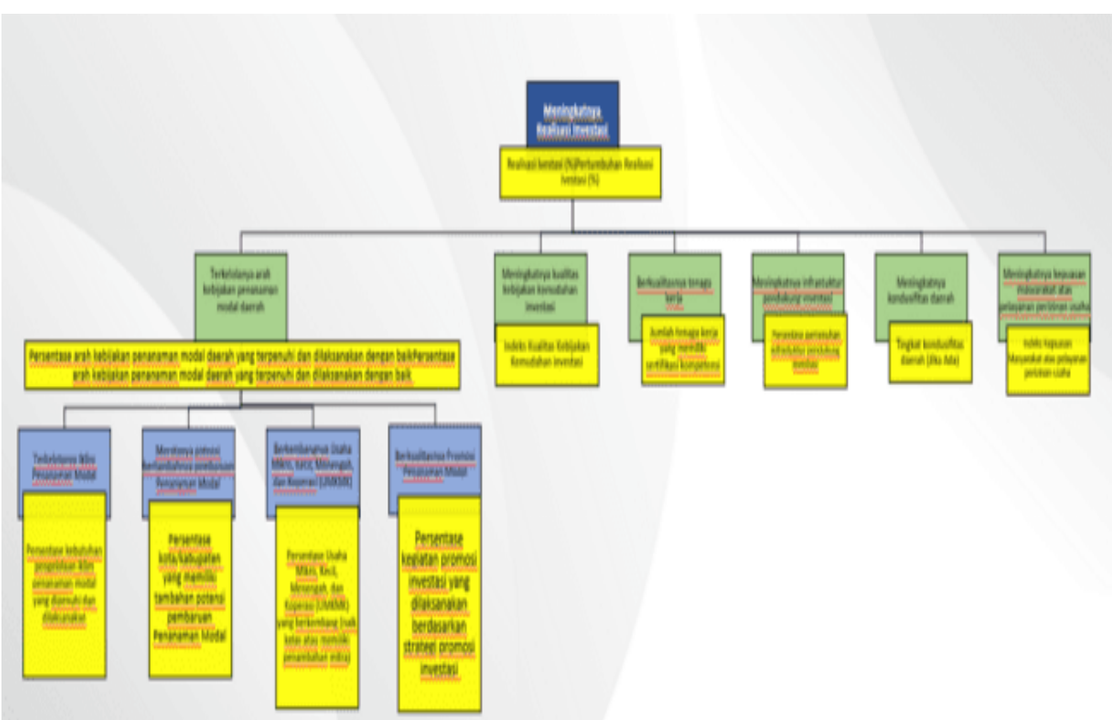

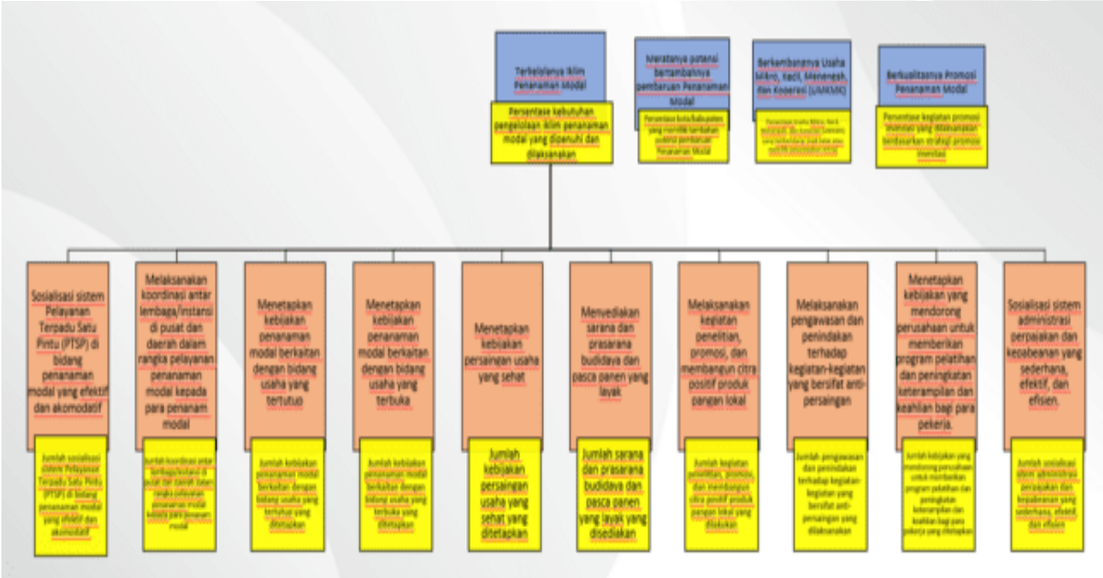
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang efektif dan akomodatif
Jumlah sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang efektif dan akomodatif
Melaksanakan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal
Jumlah koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal
Menetapkan kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang tertutup
Jumlah kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang tertutup yang ditetapkan
Menetapkan kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka
Jumlah kebijakan penanaman modal berkaitan dengan bidang usaha yang terbuka yang ditetapkan
Menetapkan kebijakan persaingan usaha yang sehat
Jumlah kebijakan persaingan usaha yang sehat yang ditetapkan
Menyediakan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak
Jumlah sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak yang disediakan
Melaksanakan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan lokal
Jumlah kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan lokal yang dilakukan
Melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan
Jumlah pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan yang dilaksanakan
Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
Jumlah kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja yang ditetapkan
Sosialisasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien.
Jumlah sosialisasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pembangunan sentra-sentra ekonomi baru
Jumlah sentra-sentra ekonomi baru yang dibangun
Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan strategis (seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Jumlah pusat-pusat pertumbuhan strategis (seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun
Menyediakan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan
Jumlah sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan
Menyusun Strategi agar UMKMK mendaftarkan usaha
Jumlah dokumen strategi agar UMKMK mendaftarkan usaha
Pendampingan pendaftaran UMKMK
Jumlah UMKMK yang mendaftar

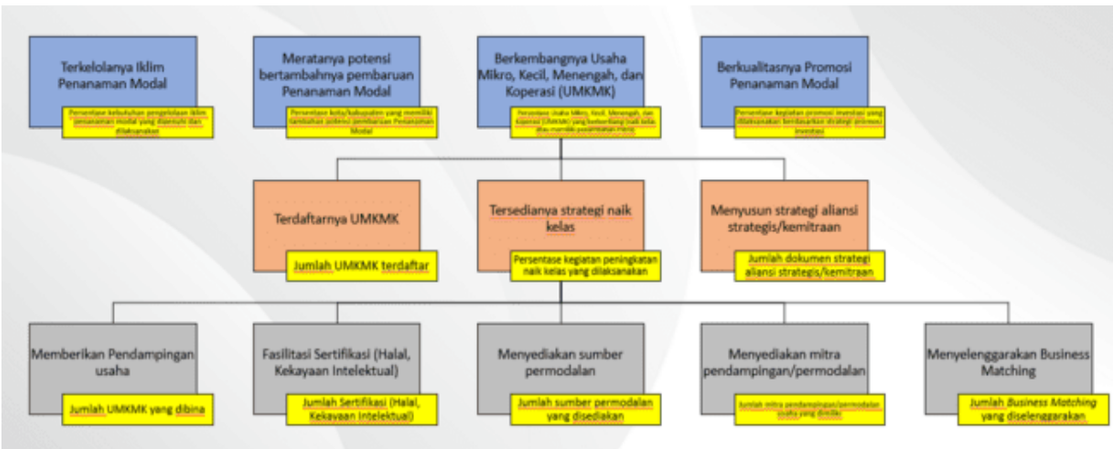
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Terdaftarnya UMKMK
Jumlah UMKMK terdaftar
Tersedianya strategi naik kelas
Persentase kegiatan peningkatan naik kelas yang dilaksanakan
Menyusun strategi aliansi strategis/kemitraan
Jumlah dokumen strategi aliansi strategis/kemitraan
Memberikan Pendampingan usaha
Jumlah UMKMK yang dibina
Fasilitasi Sertifikasi (Halal, Kekayaan Intelektual)
Jumlah Sertifikasi (Halal, Kekayaan Intelektual)
Menyediakan sumber permodalan
Jumlah sumber permodalan yang disediakan
Menyediakan mitra pendampingan/permodalan
Menyelenggarakan Business Matching
Jumlah Business Matching yang diselenggarakan

Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pengelolaan potensi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan potensi investasi
Pengelolaan calon investor
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyusun strategi promosi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi
Jumlah kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan
Menyediakan media/sarana/prasarana promosi investasi
Jumlah media/sarana/prasarana promosi investasi yang disediakan

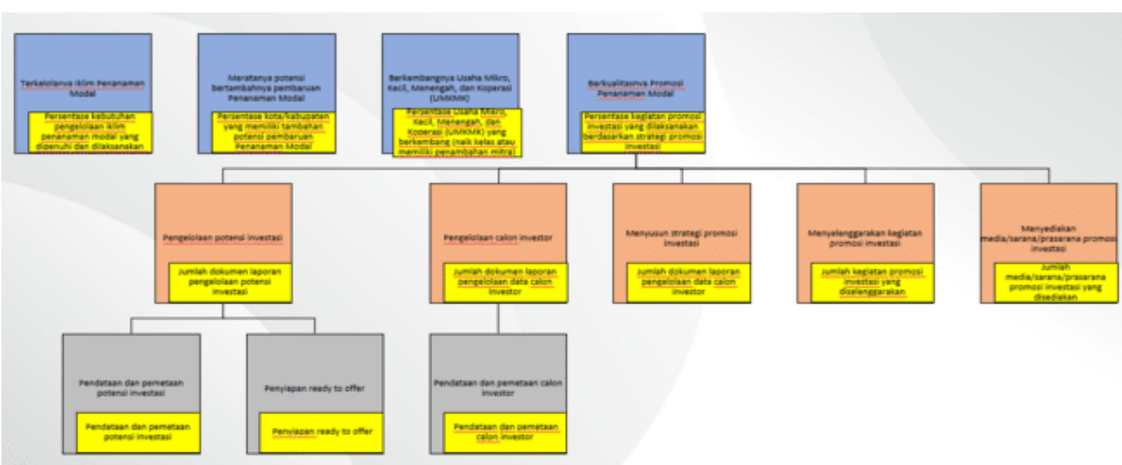
Terkelolanya Iklim Penanaman Modal
Persentase kebutuhan pengelolaan iklim penanaman modal yang dipenuhi dan dilaksanakan
Meratanya potensi bertambahnya pembaruan Penanaman Modal
Persentase kota/kabupaten yang memiliki tambahan potensi pembaruan Penanaman Modal
Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Persentase Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berkembang (naik kelas atau memiliki penambahan mitra)
Berkualitasnya Promosi Penanaman Modal
Persentase kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan berdasarkan strategi promosi investasi
Pengelolaan potensi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan potensi investasi
Pengelolaan calon investor
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyusun strategi promosi investasi
Jumlah dokumen laporan pengelolaan data calon investor
Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi
Jumlah kegiatan promosi investasi yang diselenggarakan
Menyediakan media/sarana/prasarana promosi investasi
Jumlah media/sarana/prasarana promosi investasi yang disediakan
Pendataan dan pemetaan potensi investasi
Pendataan dan pemetaan potensi investasi
Penyiapan ready to offer
Penyiapan ready to offer
Pendataan dan pemetaan calon investor
Pendataan dan pemetaan calon investor

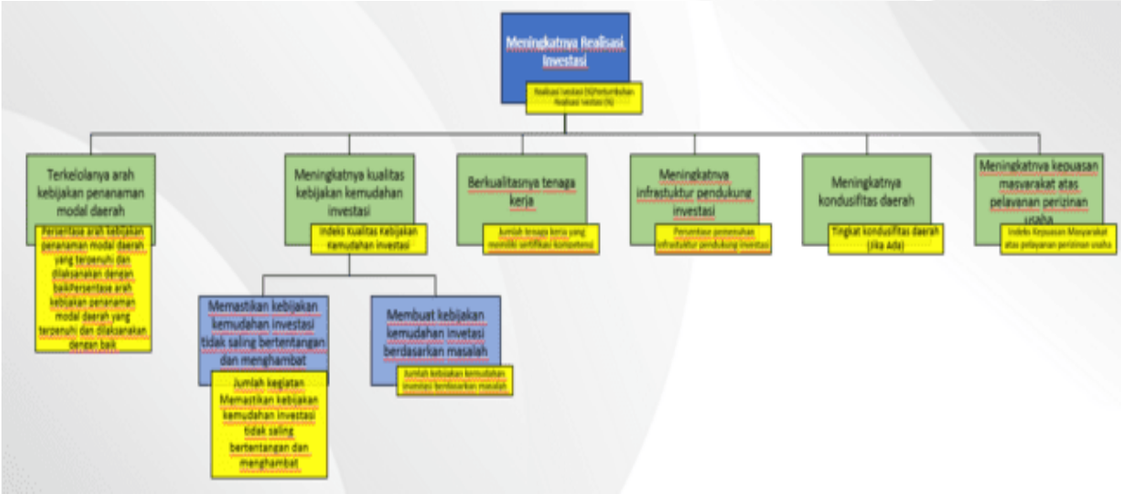
Meningkatnya Realisasi Investasi
Terkelolanya arah kebijakan penanaman modal daerah
Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baikPersentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik
Meningkatnya kualitas kebijakan kemudahan investasi
Indeks Kualitas Kebijakan kemudahan investasi
Memastikan kebijakan kemudahan investasi tidak saling bertentangan dan menghambat
Jumlah kegiatan Memastikan kebijakan kemudahan investasi tidak saling bertentangan dan menghambat
Membuat kebijakan kemudahan invetasi berdasarkan masalah
Jumlah kebijakan kemudahan investasi berdasarkan masalah
Berkualitasnya tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi
Meningkatnya infrastuktur pendukung investasi
Persentase pemenuhan infrastuktur pendukung investasi
Meningkatnya kondusifitas daerah
Tingkat kondusifitas daerah (jika ada)
Meningkatnya keouasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha

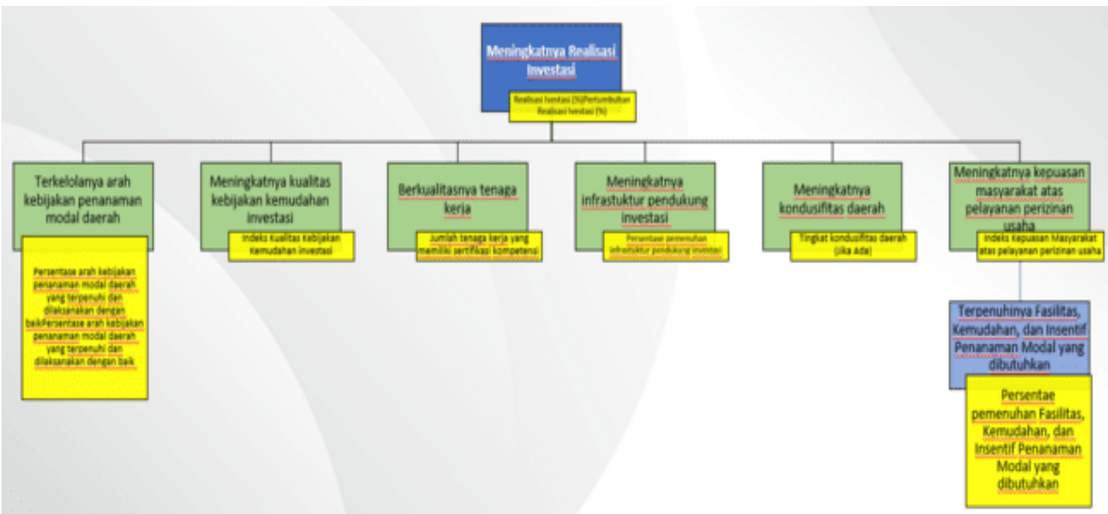
Meningkatnya Realisasi Investasi
Terkelolanya arah kebijakan penanaman modal daerah
Persentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baikPersentase arah kebijakan penanaman modal daerah yang terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik
Meningkatnya kualitas kebijakan kemudahan investasi
Indeks Kualitas Kebijakan kemudahan investasi
Berkualitasnya tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi
Meningkatnya infrastuktur pendukung investasi
Persentase pemenuhan infrastuktur pendukung investasi
Meningkatnya kondusifitas daerah
Tingkat kondusifitas daerah (jika ada)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Terpenuhinya Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Persentae pemenuhan Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan

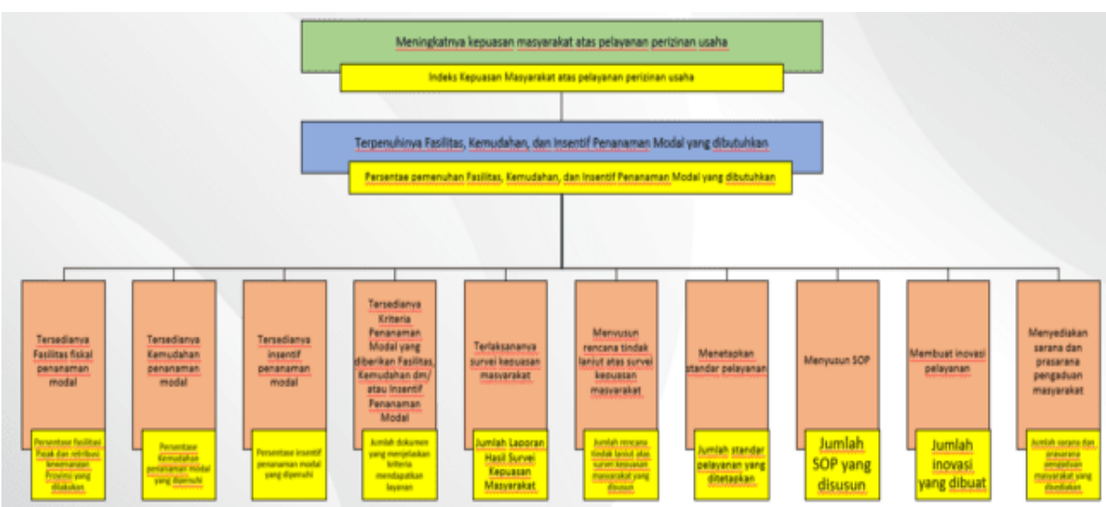
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan usaha
Terpenuhinya Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Persentae pemenuhan Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal yang dibutuhkan
Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Persentase fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal
Jumlah dokumen yang menjelaskan kriteria mendapatkan layanan
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Jumlah rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat yang disusun
Menetapkan standar pelayanan
Jumlah standar pelayanan yang ditetapkan
Menyusun SOP
Jumlah SOP yang disusun
Membuat inovasi pelayanan
Jumlah inovasi yang dibuat
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang disediakan

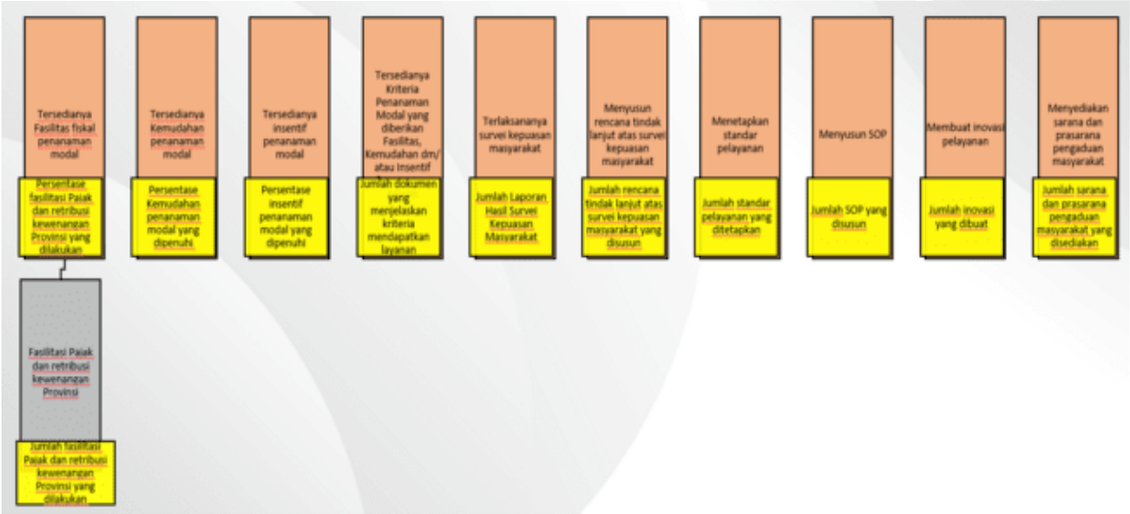
Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Persentase fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dm/ atau Insentif
Jumlah dokumen yang menjelaskan kriteria mendapatkan layanan
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Jumlah rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat yang disusun
Menetapkan standar pelayanan
Jumlah standar pelayanan yang ditetapkan
Menyusun SOP
Jumlah SOP yang disusun
Membuat inovasi pelayanan
Jumlah inovasi yang dibuat
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana pengaduan masyarakat yang disediakan
Fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi
Jumlah fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan

Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dm/ atau Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Menetapkan standar pelayanan
Menyusun SOP
Jumlah SOP yang disusun
Membuat inovasi pelayanan
Jumlah inovasi yang dibuat
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Menyediakan Sarana dan Prasarana kemudahan investasi
Menyusun kebijakan pendampingan bantuan teknis

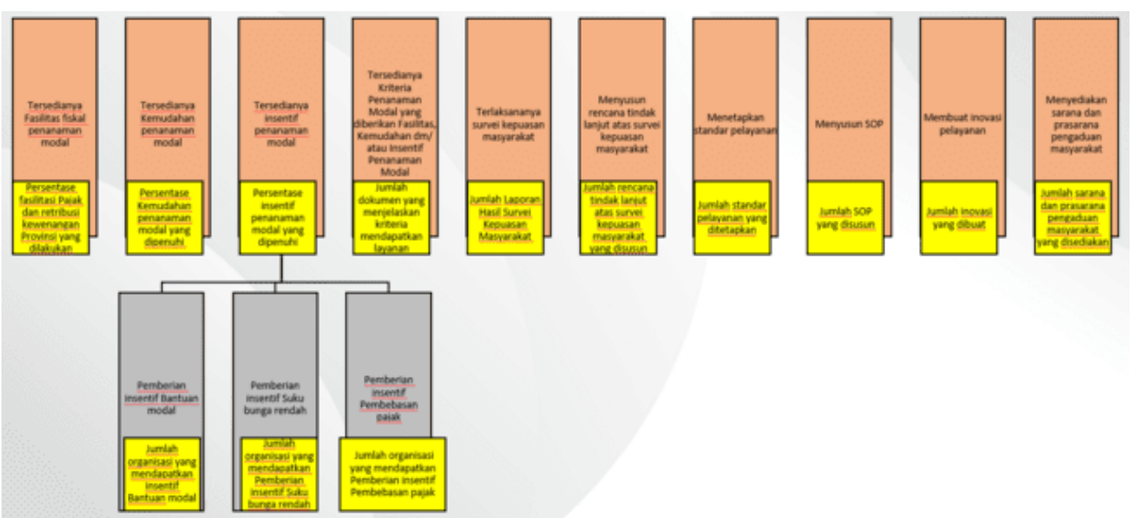
Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Persentase fasilitasi Pajak dan retribusi kewenangan Provinsi yang dilakukan
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Persentase Kemudahan penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya insentif penanaman modal
Persentase insentif penanaman modal yang dipenuhi
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dm/ atau Insentif Penanaman Modal
Jumlah dokumen yang menjelaskan kriteria mendapatkan layanan
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Menetapkan standar pelayanan
Menyusun SOP
Membuat inovasi pelayanan
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Pemberian Insentif Bantuan modal
Pemberian Insentif Suku bunga rendah
Pemberian Insentif Pembebasan pajak

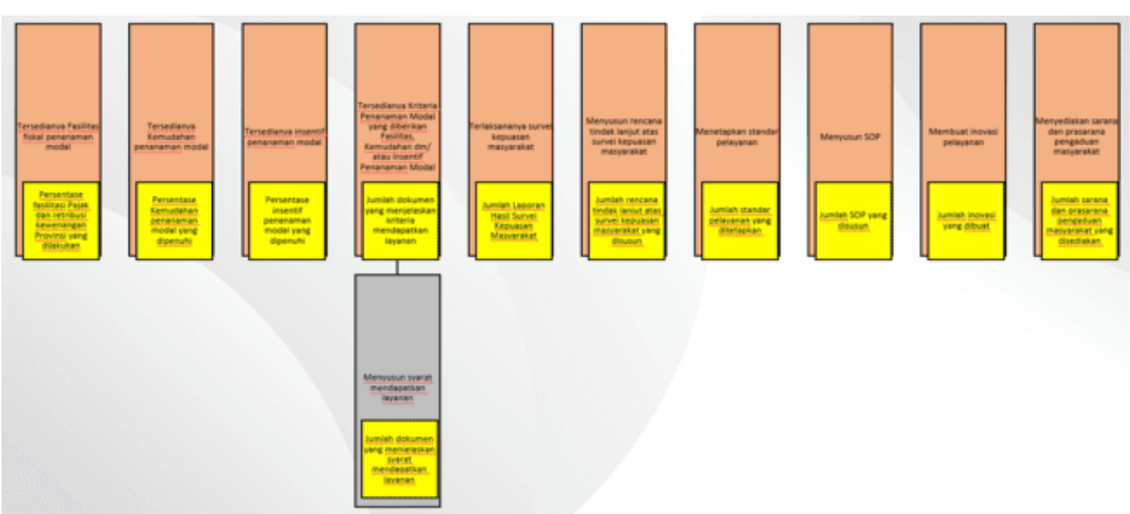
Tersedianya Fasilitas fiskal penanaman modal
Tersedianya Kemudahan penanaman modal
Tersedianya insentif penanaman modal
Tersedianya Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dm/ atau Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
Menyusun rencana tindak lanjut atas survei kepuasan masyarakat
Menetapkan standar pelayanan
Menyusun SOP
Membuat inovasi pelayanan
Menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
Menyusun surat mendapatkan layanan

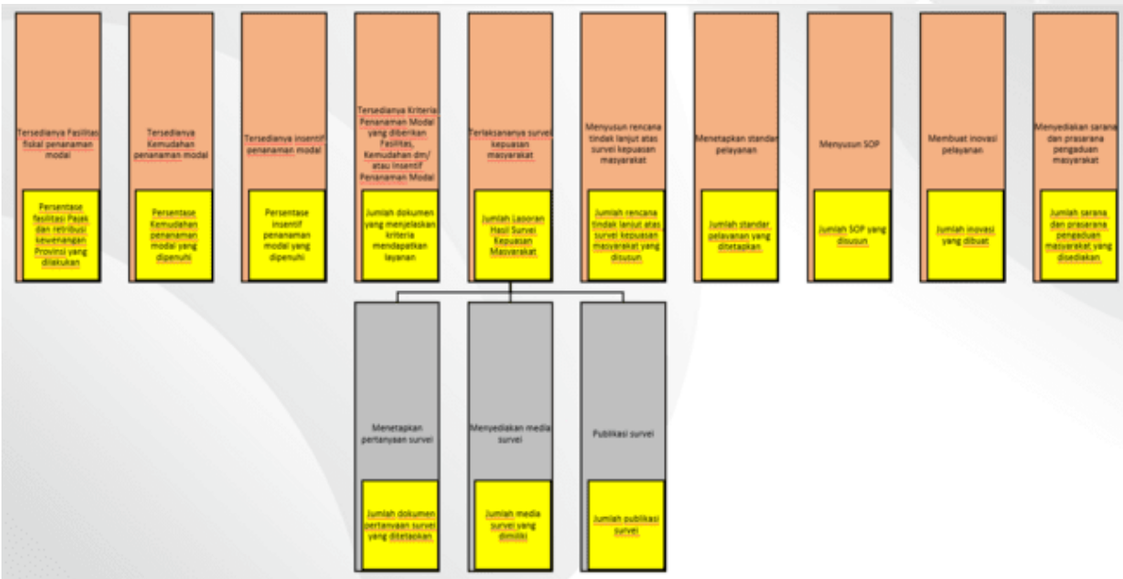

Tabel 4.11
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Investasi

No.	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program	Kegiatan
1.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3.	Biro Perekonomian Setdaprovsu	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
4.	Biro Hukum Setdaprovsu	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Arahan Bapak Presiden untuk penggunaan PDN dan UMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengadaan wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25 % ketika sudah terdapat produk dengan akumulasi nila TKDN dan BMP minimal 40%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 86 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta/ Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No. 29 Tahun 2018 adalah Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja WNI, prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor B/287/SJ-IND.8/IND/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Undangan Klarifikasi Kategori Pemerintah Daerah yang menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masuk dalam 5 (lima) besar nominator penerima penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Adapun Tujuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu:
1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan utilitas nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Penghematan devisa negara
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Adapun Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:
1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 melalui aplikasi e-Katalog Bela Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. Adapun aplikasi ini sudah mengikuti peraturan antara lain:
   a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
   b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
   c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

5. Pengendalian Inflasi

Pada tahun 2022 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.4/233/KPTS/2022 tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2022-2024. Roadmap merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi

Sumatera Utara selama 3 (tiga) tahun.

Adapun program yang dilakukan dalam pengendalian inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 melalui:

1) Program Stabilitas Harga dalam rangka peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain: Operasi pasar; Pasar murah dan bazar; Sidak pasar, monitoring pasokan dan harga serta gudang distributor.
2) Program Mengelola Permintaan dalam rangka menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui: Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar makan ikan); Dukungan kebijakan penyaluran program bansos, optimalisasi belanja Pemda, khususnya pada belanja infrastruktur dan sektor produktif, serta investasi.
3) Program Produksi Domestik dalam rangka: Perluasan Adopsi Teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian dan hortikultura untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan; Pengembangan lumbung pangan (food estate); Pengembangan Kampung Hortikultura; Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian; Penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Manufacturing Practices* (GMP), Poktan Hortikultura: 8014 Poktan; Peningkatan produksi protein hewani; Peningkatan ketersediaan telur ayam ras tahunan; Modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian.
4) Program Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Beras (CBP) minimal 200 ton/tahun.
5) Program Penguatan Kelembagaan dalam rangka Penguatan kelembagaan petani pangan dan hortikultura, peternak perkebunan sawit dan petani tebu; Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; Peningkatan transaksi Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK); Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM; Membentuk BUMD Pangan.
6) Program Penguatan KAD dalam rangka Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD); Fasilitasi Distribusi Pangan oleh Pasar Mitra Tani (PMT)/ Toko Tani Indonesia (TTIC) dan Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI).
7) Program Meningkatkan Instruktur Perdagangan dalam rangka Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP; Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir; Partisipasi pada pelaksanaan event pariwisata dalam negeri (Promosi destinasi pariwisata, desa wisata, produk-produk ekonomi kreatif dan UMKM).
8) Program Memperbaiki Kualitas Data dalam rangka Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah; Peningkatan kualitas dan keakuratan data Siharapanku sebagai salah satu leading indikator pergerakan harga dan pasokan pangan.
9) Program Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka: Penyusunan peta jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan peta jalan pengendalian inflasi daerah; Peningkatan keandalan TPID melalui program pembinaan TPID/*capacity building* TPID/ *capacity building* /sosialisasi; Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial; Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pusat dan daerah.
10) Program Mengendalikan Ekspektasi Inflasi dalam rangka Pelaksanaan bauran kebijakan yang kredibel untuk menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang rutin dan terpercaya.

Kerangka logis pelaksanaan RB Tematik Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.9
Kerangka Logis Pengendalian Inflasi

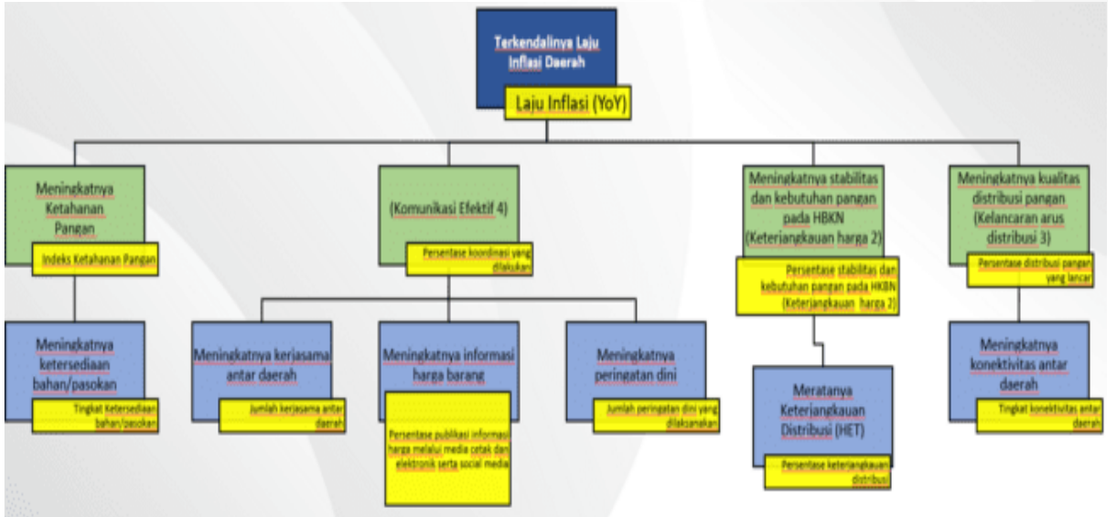

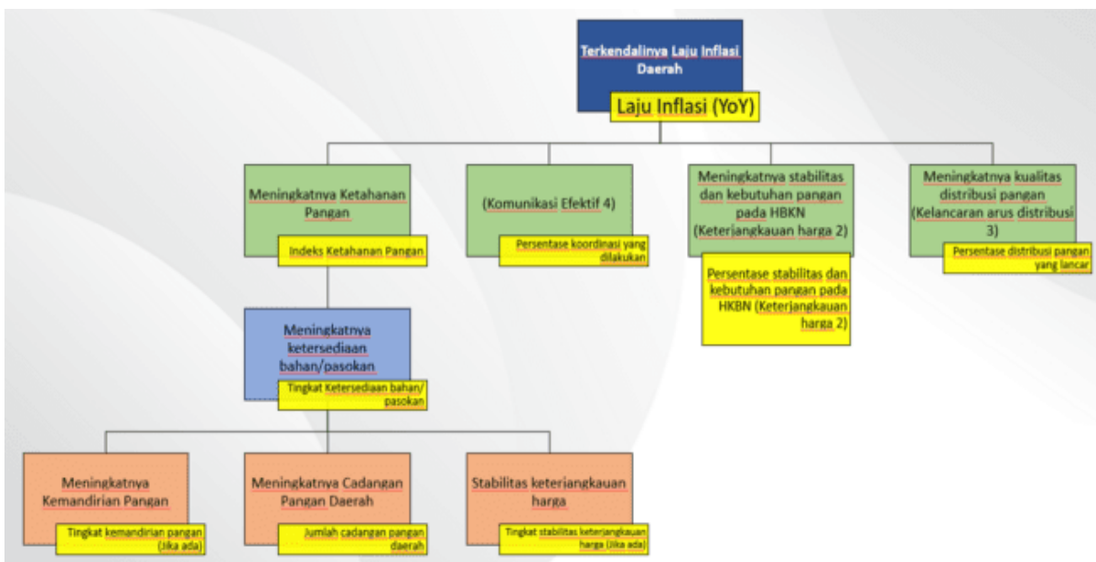

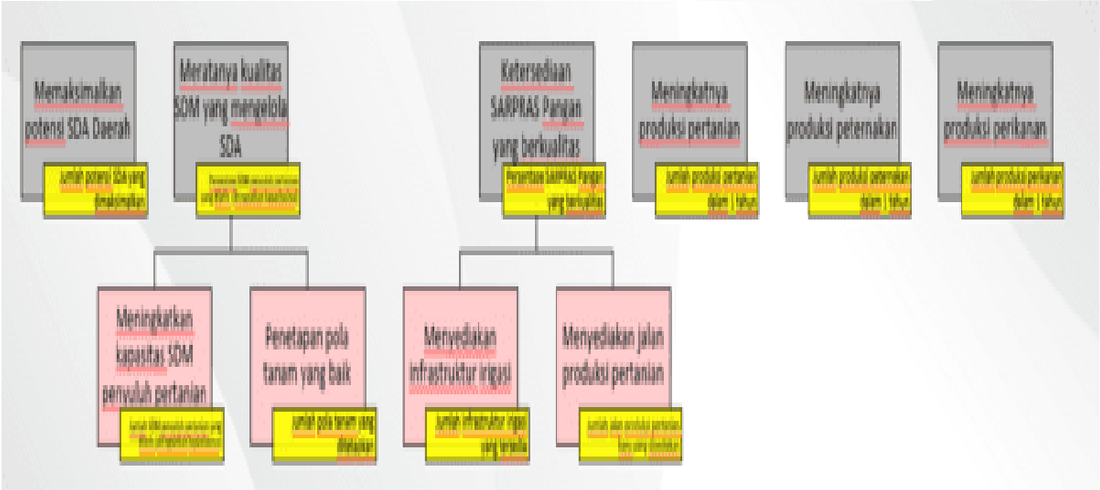
Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Meningkatkan kapasitas SDM penyuluh pertanian
Penetapan pola tanam yang baik
Jumlah pola tanam yang ditetapkan
Menyediakan infrastruktur irigasi
Jumlah infrastruktur irigasi yang tersedia
Menyediakan jalan produksi pertanian

Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Menyediakan benih/bibit
Jumlah usaha tani yang mendapatkan benih/bibit
Meningkatkan ketersediaan pupuk
Persentase kebutuhan pupuk yang dipenuhi
Meningkatnya pengendalian bencana pertanian
Menyediakan asuransi usaha tani
Jumlah usaha tani yang mendapatkan asuransi
Menyediakan bantuan benih pengganti

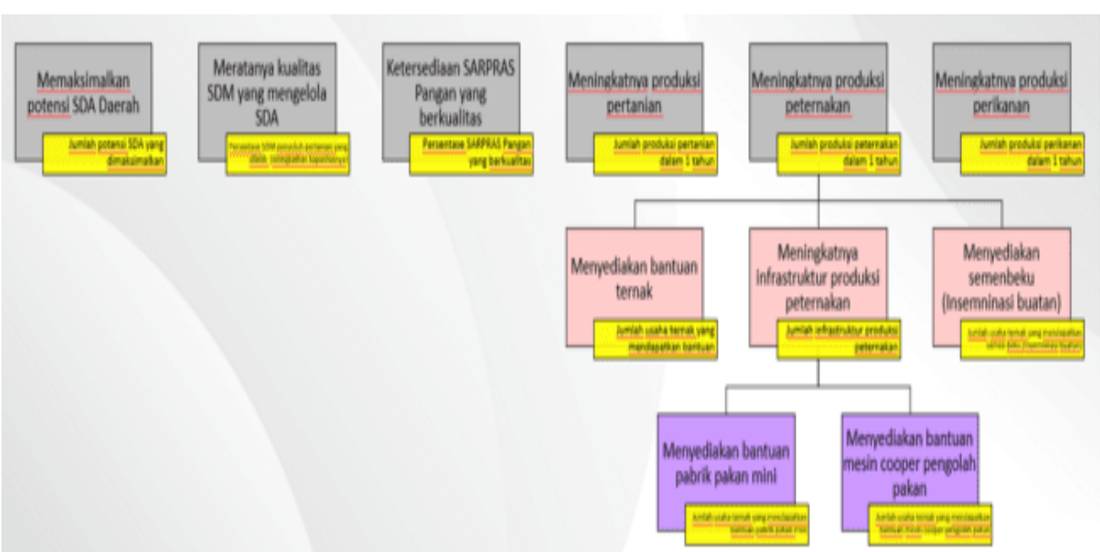
Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Jumlah potensi SDA yang dimaksimalkan
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Persentase SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Jumlah produksi pertanian dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi peternakan
Jumlah produksi peternakan dalam 1 tahun
Meningkatnya produksi perikanan
Jumlah produksi perikanan dalam 1 tahun
Menyediakan bantuan ternak
Jumlah usaha ternak yang mendapatkan bantuan
Meningkatnya Infrastruktur produksi peternakan
Jumlah infrastruktur produksi peternakan
Menyediakan semenbeku (Insemninasi buatan)
Menyediakan bantuan pabrik pakan mini
Menyediakan bantuan mesin cooper pengolah pakan

Memaksimalkan potensi SDA Daerah
Meratanya kualitas SDM yang mengelola SDA
Ketersediaan SARPRAS Pangan yang berkualitas
Meningkatnya produksi pertanian
Meningkatnya produksi peternakan
Meningkatnya produksi perikanan
Menyediakan benih ikan
Menyediakan bantuan kapal dan alat tangkap
Meningkatkan jalan produksi perikanan

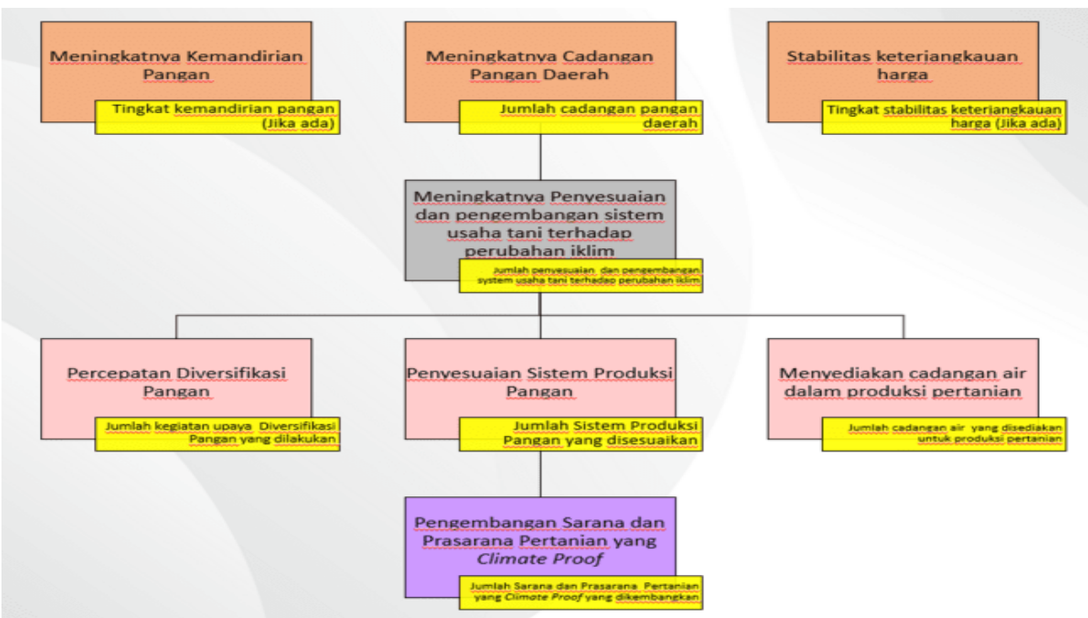
Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)
Meningkatnya Penyesuaian dan pengembangan sistem usaha tani terhadap perubahan iklim
Jumlah penyesuaian, dan pengembangan system usaha tani terhadap perubahan iklim
Percepatan Diversifikasi Pangan
Jumlah kegiatan upaya Diversifikasi Pangan yang dilakukan
Penyesuaian Sistem Produksi Pangan
Jumlah Sistem Produksi Pangan yang disesuaikan
Menyediakan cadangan air dalam produksi pertanian
Jumlah cadangan air yang disediakan untuk produksi pertanian
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof
Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof yang dikembangkan

Meningkatnya Kemandirian Pangan
Tingkat kemandirian pangan (Jika ada)
Meningkatnya Cadangan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan daerah
Stabilitas keterjangkauan harga
Tingkat stabilitas keterjangkauan harga (Jika ada)
Stabilitas supply and demand
Tingkat stabilitas supply and demand (Jika ada)
Menetapkan kebijakan harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Jumlah kebijakan harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Menetapkan kebijkan Harga produk substitusi
Jumlah kebijakan Harga produk substitusi yang ditetapkan

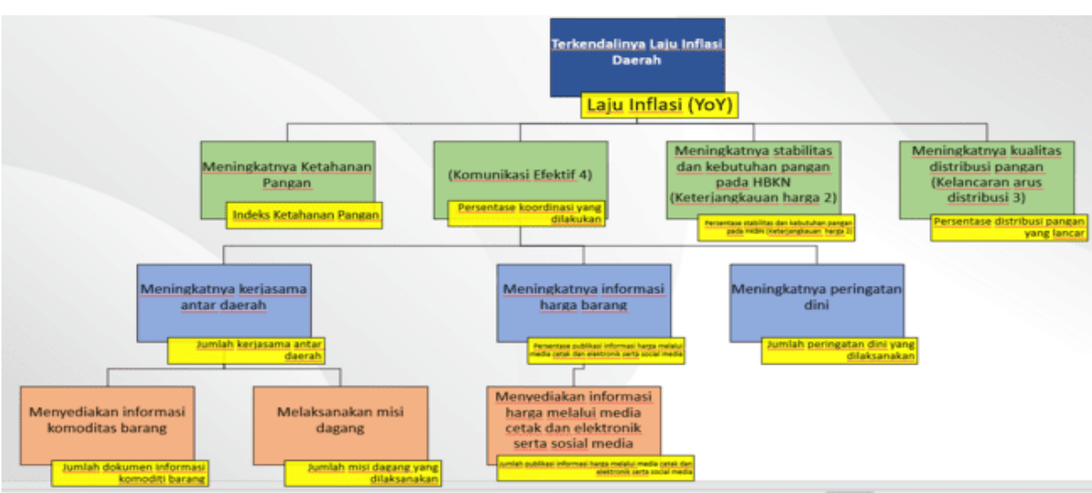
Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keterjangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meningkatnya kerjasama antar daerah
Jumlah kerjasama antar daerah
Meningkatnya informasi harga barang
Meningkatnya peringatan dini
Jumlah peringatan dini yang dilaksanakan
Menyediakan informasi komoditas barang
Jumlah dokumen informasi komoditi barang
Melaksanakan misi dagang
Jumlah misi dagang yang dilaksanakan
Menyediakan informasi harga melalui media cetak dan elektronik serta sosial media

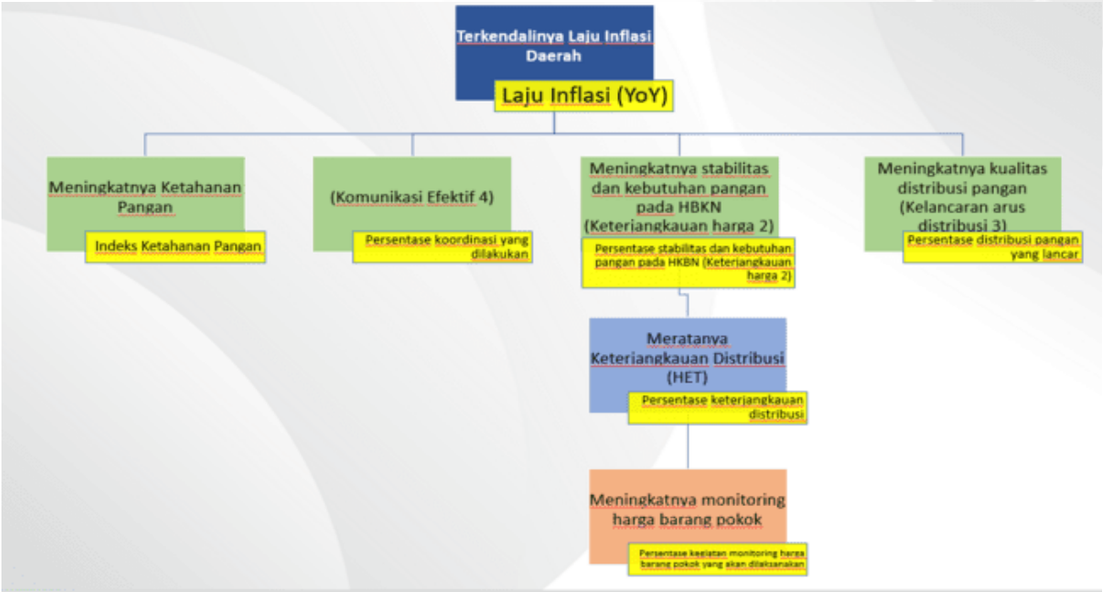
Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keteriangkauan harga 2)
Persentase stabilitas dan kebutuhan pangan pada HKBN (Keteriangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meratanya Keteriangkauan Distribusi (HET)
Persentase keterjangkauan distribusi
Meningkatnya monitoring harga barang pokok
Persentase kegiatan monitoring harga barang pokok yang akan dilaksanakan

Meningkatnya monitoring harga barang pokok
Persentase kegiatan monitoring harga barang pokok yang akan dilaksanakan
Melaksanakan monitoring harga barang pokok melalui sistem
Jumlah laporan monitoring harga barang pokok melalui sistem
Terlaksananya operasi pasar dan pasar murah
Jumlah operasi pasar dan pasar murah yang dilaksanakan
Terkendalinya harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Jumlah kegiatan pengendalian harga bahan pokok saat Hari raya keagamaan
Meningkatkan keamanan operasi pasar dan pasar murah
Jumah operasi pasar dan pasar murah yang aman

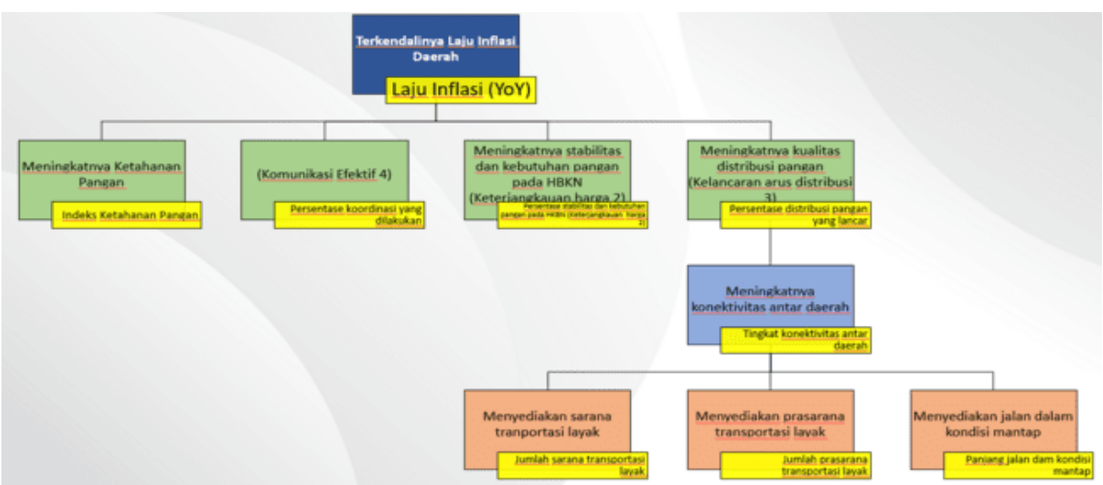
Terkendalinya Laju Inflasi Daerah
Laju Inflasi (YoY)
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan Pangan
(Komunikasi Efektif 4)
Persentase koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya stabilitas dan kebutuhan pangan pada HBKN (Keteriangkauan harga 2)
Persentase stabilitas dan kebutuhan pangan pada HKBN (Keteriangkauan harga 2)
Meningkatnya kualitas distribusi pangan (Kelancaran arus distribusi 3)
Persentase distribusi pangan yang lancar
Meningkatnya konektivitas antar daerah
Tingkat konektivitas antar daerah
Menyediakan sarana tranportasi layak
Jumlah sarana transportasi layak
Menyediakan prasarana transportasi layak
Jumlah prasarana transportasi layak
Menyediakan jalan dalam kondisi mantap
Panjang jalan dam kondisi mantap

Tabel 4.12
Dukungan Perangkat Daerah Dalam Pengendalian Inflasi

NO	PROGRAM		KEGIATAN	Keterangan
I.	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber daya Mineral**			
	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas
	2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan pupuk bersubsidi
	3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat untuk Pemberdayaan Industri Kecil
II.	**Dinas Perhubungan**			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Mudik Gratis untuk masyarakat
III.	**Dinas Kelautan dan Perikanan**			
	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Mesin kapal dan genset untuk Diserahkan kepada Masyarakat
				Alat penangkap ikan & GPS untuk Diserahkan kepada Masyarakat
				Alat penangkap ikan & sampan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Belanja Barang, benih dan pakan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
IV.	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**			
	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Belanja pupuk dan alsintan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Belanja pupuk dan benih untuk Diserahkan kepada Masyarakat
				Belanja ternak untuk Diserahkan kepada Masyarakat
	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Belanja Alat dan Mesin Peternakan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
	3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Belanja pestisida untuk Diserahkan kepada Masyarakat
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Belanja pupuk untuk Diserahkan kepada Masyarakat

V.	**Dinas Sosial**			
	1	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Paket Bantuan Sembako dan Paket Bantuan bagi Anak-Anak Sekolah
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Usaha Ekonomi Produktif
	3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama
	4	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
VI.	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**			
	1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Bantuan Benih dan Saprodi
	2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Bantuan Saprodi Budidaya Sayur Pekarangan
				Bantuan Benih dan Pupuk
	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Bantuan Jalan Usaha Tani
			Penataan Prasarana Pertanian	Bantuan Jaringan Irigasi
			Penataan Prasarana Pertanian	Bantuan Alat Mesin Pertanian
	4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Bantuan Benih Padi
VII.	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Bantuan bibit dan sarana untuk Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil
				Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Difabel, UMKM dan KUMKM

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah

menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara:

1. Penyusunan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta/BUMD untuk implementasi piloting PRKBI;
2. Implementasi kegiatan pembangunan ladang energi di Kawasan Danau Toba (Lokasi : Kabupaten Samosir) dan Penerapan Mobil Listrik untuk Transportasi Umum (Lokasi : Kota Medan) sebagai pilot project PRK sektor Energi;
3. Implementasi kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove (Lokasi : Kabupaten Langkat, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang) sebagai pilot project PRK sektor Blue Carbon;
4. Implementasi kegiatan Penerapan pertanian berketahanan iklim (lokasi : Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Labuhan Batu) sebagai pilot project PBI sektor Pertanian;
5. Implementasi kegiatan Perlindungan Kerentanan Wilayah Pesisir (Lokasi: Kabupaten Langkat) sebagai pilot project PBI sektor Kelautan dan Pesisir Konservasi mangrove dan keanekaragaman hayati pesisir; Konservasi Lahan Pesisir; Pemberdayaan UKM Pesisir; Konservasi Kepiting.

7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Provinsi Sumatera Utara Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai amanah dari Perpres tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB ditingkat Nasional telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGS sedangkan pada tingkat daerah telah disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGS. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGS, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai 2030. TPB/SDGS merupakan penyempurnaan dari Milenium Development Goals (MDGS)/Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). MDGS hanya berfokus pada 8 (delapan) tujuan global, sedangkan pada SDGS terdapat penambahan tujuan global lainnya berdasarkan isu terkini hingga mencakup 17 (tujuh belas) tujuan global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjalankan pembangunan berkelanjutan dan telah Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/133/KPTS/2021 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Tujuan Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya Perpres No. 59 Tahun 2017, maka diperlukan keselarasan antara indikator-indikator SDGS dengan perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam visi dan misi, serta prioritas pembangunan 2019 yang disusun sebagai embrio RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk percepatan pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2020 dan Tahun 2021, dimana dari 17 Tujuan dan 134 Indikator pada Dokumen RAD TPB/SDGS Provinsi Sumatera Utara yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdapat 74,6 Persen Target yang tercapai pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.
b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Universitas dan Akademisi untuk membangun Pusat SDGs (SDGs Center) Universitas Sumatera Utara sebagai wadah dan media *mainstreaming* TPB/SDGs di berbagai bidang keilmuan, media *transfer of knowledge and insights,* inovasi serta pendalaman kajian/analisis untuk implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan daerah.
c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan peningkatan kapasitas kepada seluruh *Stakeholder* untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah melalui sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi, serta persiapan data & informasi SDGs.

Tabel 4.13
Dukungan PD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencapaian Target *Sustainable Development Goals* (SDG's/TPB) Sumatera Utara

Goals/Tujuan	Target TPB	Indikator	Sumber Data
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL			
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan	BPS
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH	Dinas Sosial
	Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan

	memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan makro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas P3AKB
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR
		Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	Dinas PUPR
		Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Dinas Pendidikan
		Cakupan Akta Anak Usia 0-18 Tahun	Disdukcapil
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS/ Dinas Perindag, ESDM
	Pada Tahun 2030, membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial, BPBD
		Indeks Resiko Bencana	BPBD
		Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD
		Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD
TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Dinas Kesehatan
		Intervensi daerah rawan pangan (desa/kelurahan)	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara International untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak di bawah lima Tahun/Balita	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak di bawah dua Tahun/Baduta	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	Dinas Kesehatan
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak	Dinas Kesehatan

		pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	
		Prevalensi anemia pada Ibu hamil	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan, TPH
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization / UCI)	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV / Prevalensi HIV AIDS	Dinas Kesehatan
		Kejadian TB per 1.000 orang / Case Notification Rate (CNR) Program TB per 100.000 Penduduk	Dinas Kesehatan
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
		Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1.000 Penduduk (API)	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan
	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN/Kesbangpol
	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Dinas P3AKB
		Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi PUS	Dinas P3AKB
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas P3AKB

		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Dinas P3AKB
		Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P3AKB
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas P3AKB
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	Dinas Pendidikan
	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik./ Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas P3AKB
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 - 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas P3AKB
		Rasio kekerasan terhadap Anak (/10,000)	Dinas P3AKB
	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Dinas P3AKB

	pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas P3AKB
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas P3AKB
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas P3AKB
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas P3AKB
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas P3AKB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas P3AKB
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of The International Conference on Population and Development and The Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil Reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas P3AKB
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI			
TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	Rasio Elektrifikasi	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
		Konsumsi listrik per kapita	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	Bauran Energi Terbarukan	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	PDB Per Kapita	Bapenda
	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Ketenagakerjaan
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Ketenagakerjaan
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat Setengah Pengangguran	Dinas Ketenagakerjaan

	Melindungi hak - hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Dinas Ketenagakerjaan
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
TUJUAN 9 : INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Provinsi	Dinas PUPR
		Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan
	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
		Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian Perdagangan &ESDM
	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca.	Dinas LH dan Kehutanan
	Memperkuat riset ilmiah meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Bappelitbang
TUJUAN 10 BERKURANG KESENJANGAN	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	Indeks Gini	BPS
		Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Jumlah Desa Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil /BPS

		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil /BPS
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Dinas Sosial
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BKAD/BPS
	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Diskominfo
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN			
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR
		Kapasitas Prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PUPR
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas PUPR
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan /(monev.stbn.kemkes.go.id)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dinas PUPR
		Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Dinas PUPR / BMKG
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR
		Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BPHP, BPSKL, Dinas LH dan Kehutanan
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Dinas PUPR
	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas LH dan Kehutanan, BPDAS
		Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas LH dan Kehutanan, BPDAS
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Pengurangan luas Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rasio Rumah Layak Huni (%)	Dinas Perumahan dan Permukiman

	Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada pada situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua	Persentase pengguna Moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Indeks Resiko Bencana	BPBD
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Pengurangan timbunan sampah antar kabupaten / kota (TPA Regional)	Dinas LH dan Kehutanan / PUPR
TUJUAN 12 POLA KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal rangking BIRU.	Dinas LH dan Kehutanan
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas LH dan Kehutanan
	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	Dinas LH dan Kehutanan
	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-prakter berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas LH dan Kehutanan
	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas LH dan Kehutanan
TUJUAN 14 : EKOSISTIM LAUTAN	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Dinas LH dan Kehutanan

	darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas LH dan Kehutanan
	pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegrasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Luas Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Dinas LH dan Kehutanan/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
		Jumlah Kesatuan pengelolaan hutan	Dinas LH dan Kehutanan
	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas LH dan Kehutanan
PILAR EMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA			
TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Angka Kriminalitas yang tertangani	Bakesbangpol
	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Rasio kekerasan terhadap Anak	Dinas P3AKB
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akun tabel, dan transparan di semua tingkat	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) / Opini BPK	BKAD
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipasi dan representatif di setiap tingkatan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas P3AKB
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas P3AKB
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran / (Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Capil

4.4.2 Pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan

Mengacu pada pendekatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Sumatera menerapkan pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara

bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS).

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Strategi PUGIS juga menjadi bagian penting dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka kerja logis, di mana perspektif gender dan perspektif inklusi sosial diintegrasikan ke dalam Prioritas Nasional, serta terefleksi dalam berbagai program/kegiatan/rincian output di kementerian/lembaga terkait. Begitu juga di provinsi Sumatera Utara Pengarusutamaan Gender salah satu sasaran untuk mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia sehingga Perangkat Daerah Provinsi Sumatera utara berkontribusi terhadap pencapaian Target Pembangunan Gender di Provinsi Sumatera Utara. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap Perangkat Daerah mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun Gender Action Budget (GAB) dan melakukan penandaan (Taggingi) Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya di setiap kementerian/lembaga. Tagging Penganggaran Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Pengarusutamaan Gender

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	UPTDK RS Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
2	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan dan Pengawalan
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
4	Bakesbangpol	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Perumusan kegiatan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
		Program Peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan partai politik	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan partai politik
5	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura tanaman pangan dan perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani
		Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan pangan berbasis sumber lokal
6	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Alat Bantu
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				Pemulasaraan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemulangan ke Daerah Asal
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pan	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemulangan ke Daerah Asal
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluaraga

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Pelayanan dukungan psikososial
7	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
				Pengadaan obat bahan Medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman difasilitas kesehatan yang disediakan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan
8	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI
			Pelayanan dan informasi rawan bencana provinsi	Sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi rawan bencana provinsi
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Perbaikan rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) HA sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha
11	BPSDM	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
12	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan kinerja pemerintah daerah
				Pengawasan keuangan pemerintah daerah
				Review laporan kinerja
				Review laporan keuangan
				Pengawasan umum dan teknis kab/kota
				Kerjasama pengawasan internal
				Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat, evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI, dan evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi Di luar Kawasan Hutan Negara	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK,

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Kependudukan Dan Catatan Sipil Provsu	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
16	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Mudik Gratis Lebaran Tahun 2024 dan Nataru Tahun 2024)
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)
17	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
		Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja
				Perluasan Kesempatan Kerja
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
				Job Fair/Bursa Kerja
		Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
				Revitalisasi BLK
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Monitoring opini dan aspirasi publik
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan Provinsi	pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
			pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	pengawasan mutu dan peredaran benih holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan
20	Badan Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
				Pengelolaan Assesmen Center
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
21	Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
22	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
23	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan
		Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Museum	Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum
24	Biro Administrasi Pimpinan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara
				Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah
				Pengelolaan hubungan keprotokolan
25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
27	Biro Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
28	Biro Perekonomian	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, limbah dan Sanitasi
29	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Keuangan Daerah	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
30	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
31	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Pengarusutamaan Gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
				Advokasi kebijakan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi	Penyediaan data gender dan anak provinsi
				Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi
		Pemenuhan Hak Anak Dan Kualitas Keluarga	Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi
				Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Terselenggaranya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak
				Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
		Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Implementasi pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal pada jenjang SLTA-MA melalui sekolah siaga kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PK
		Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi
				Penyedia kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota
		Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan Provinsi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			Pengelolaan pelaksanaan desain Program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK
				Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi bencana
				Pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja
				Advokasi, sosialisasi dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)
			Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian pendudukan dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal	Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi seusai kearifan budaya lokal
				Fasilitas kerjasama dengan Stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program bangga kencana
				Penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi dan KIE program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal
				Pelaksanaan advokasi dan KIE program bangga kencana melalui mitra kerja
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam program bangga kencana
33	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan	

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
34	Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
		Pembinaan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
				Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) di UPT Kebakatan Olahraga
				Penyediaan Data Keolahragaan dan atlet berprestasi Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
35	BIRO ORGANISASI	Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
				Penataan Analisis Jabatan
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kinerja

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
36	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
37	UPTD RS. Haji Medan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kontensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
38	Bappelitbang	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
39	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitas Tugas DPRD, Penyerapan aspirasi masyarakat	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan, kunjungan kerja dalam daerah, pelaksanaan Reses
40	Biro Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
		Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Fasilitasi. Koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan
41	Biro Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	fasilitasi Bantuan Hukum	fasilitasi Penyelesaian Masalah Non litigasi dan HAM

2. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kegiatan pencapaian target TPB SDs secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan pengarusutamaan dan menggunakan sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.

Pemerintah Provinsi Sumatera memberikan dukungan besar terhadap pencapaian target TPB/SDGs dengan melakukan pendekatan berbasis Tematik dimana salah satunya pencapaian TPB/SDGs dengan pendekatan meliputi:

- Implementasi Serentak Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan
- Prinsip Pembangunan: Memberi Manfaat Untuk Semua, Tidak Ada Yang Tertinggal Dalam Pembangunan
- Fokus Pada Mencerdaskan Bangsa, Kesehatan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Pendidikan Berkualitas, Dan Pengentasan Kemiskinan

Pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh nonpemerintah dengan membentuk dan meningkatkan mekanisme pendanaan inovatif, yaitu pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berasal dari nonpemerintah, maupun pendanaan gabungan dari pemerintah dan nonpemerintah. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs melibatkan masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi. Penguatan data memanfaatkan sistem satu data dan penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan rencana Pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.4.3 Spasial

Pendekatan spasial adalah salah satu pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Pendekatan spasial berpedoman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. RPD memedomani RTRW melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah. Selain itu juga program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah provinsi lainnya.

1) **Pembangunan Daerah Tertinggal**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Ada 62 daerah yang ditetapkan tertinggal. Sebaran daerah tertinggal itu berada di sejumlah Provinsi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Dengan adanya Perpres ini maka Kemendes PDTT bakal merumuskan kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam

skala nasional. Daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Nias Selatan
3. Kabupaten Nias Utara
4. Kabupaten Nias Barat

Dukungan pemerintah terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu:

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Sumatera Utara
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan *Stakeholder* lainnya dalam penentuan program dan kegiatan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di kepulauan Nias
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan di daerah tertinggal yang ada di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.14
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
2.	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
3.	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial
4.	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
5.	Dinas Koperasi dan UKM	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
6.	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam I (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
8.	Dinas SDACKTR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dam Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada Gido Zebua Kec. Gido Kab. Nias

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha.

2) Pengembangan Wilayah/ Kawasan Sumatera Utara

Wilayah Sumatera yang berdekatan dengan negara-negara lain terutama Asia menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah Sumatera seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia– Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Pada tahun 2023 Pengembangan Wilayah Sumatera di Tahun 2023 diarahkan pada mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengembangan wilayah tersebut dengan menggunakan :

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;
2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
3. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi;

4. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

1. Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)

- Mempunyai Landasan Hukum Dalam Perpres 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (Medan, Binjai, Deli Sedang Dan Karo) Tanggal 20 September 2011
- Metropolitan Mebidangro Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sekaligus Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)
- aman, nyaman, produktif, berdaya, saing secara internasional, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional di bagian utara Pulau Sumatera;
- Menciptakan lingkungan perkotaan yang berkualitas dan keseimbangan tata air DAS; Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mebidangro.
  1) Pembangunan Light rail Transit
  2) Jalan Tol Kota Medan
  3) Pembangunan waduk lau si memey
  4) Revitalisasi jalan medan-Berastagi
  5) SPAM Regional (2200 I/detik)
  6) TPA Regional
  7) Sport Centre

2. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

- Pengembangan KEK Sei Mangkei tahap I seluas 104 Ha dan telah masuk pada tahap II, dengan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan seperti gedung pusat inovasi, jalan poros ROW 62 (3,4Km), jalan ROW 34 E (0,4Km), jalur KA (2,95 Km), Tank Farm (2 x 3.000 ton CPKO dan 1 x 5.000 ton CPO), Dry Port (2.300 TEUs, Tahap I), jaringan pipa gas 75 MMSCFD, jaringan listrik 150 KV/ 60 MVA, Unit pengolahan dan jaringan air minum (WTP) 250 m3/jam, Unit pengolahan dan jaringan limbah industri maupun domestik (WWTP) 250 M3/jam
- Dukungan fasilitas Perkotaan terhadap pengembangan KEK Sei Mangkei dan Rusunawa Terintegrasi KEK Sei Mangkei antara lain: penyediaan air minum, air limbah, persampahan, akses jalan permukiman, listrik, pasar, Rumah Sakit dan Sekolah Kejuruan dan fasilitas komersial (Hotel, SPBU, pertokoan
- PT. Kawasan Industri Nusantara (Pt. Kinra) merupakan anak perusahaan PTPN III yang menjadi Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Sei Mangkei;

3. Pembangunan Rusunawa Kek Sei Mangkei

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah, salah satunya ialah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Merujuk pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2018.

Permen PUPR No.1/2018 *adalah peraturan yang berlaku bagi pembangunan Rumah Susun yang memperoleh bantuan pembangunan dari pemerintah pusat melalui APBN. Namun, deskripsi penerima manfaat dalam peraturan ini dapat dijadikan rujukan untuk penentuan kebutuhan khusus untuk penyediaan ruun khusus dan* sebagai referensi, penerima manfaat pembangunan Rumah Susun Khusus ditujukan kepada:

a. Pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;

b. Masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
c. Masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini sudah memiliki 13 (tiga belas) tenant dari beberapa investor yang sangat membutuhkan pelayanan dasar dan salah satunya ialah penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Menyikapi kebutuhan dimaksud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisiasi untuk melakukan penyediaan lahan di sekitar KEK Sei Mangkei dan direncanakan untuk pembangunan Rusunawa bagi pekerja dan sekaligus diperuntukkan bagi relokasi masyarakat korban bencana maupun relokasi masyarakat terdampak program pembangunan Provinsi.

Skema KPBU Rusunawa Terintegrasi di sekitar KEK Sei Mangkei menjadi penting mengingat kondisi pekerja Sei Mangkei yang sangat membutuhkan perumahan yang dekat dengan area bekerja, rasa nyaman dan aman serta efektivitas waktu juga produktivitas semakin meningkat sementara saat ini para pekerja bertempat tinggal jauh dari KEK Sei Mangkei.

4) KSPN Danau Toba

- Merupakan daerah tujuan pariwisata sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 serta bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2014 Telah disahkan oleh Presiden per tanggal 13 Agustus 2014;
- Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Danau Toba telah diterbitkan Perpres No. 49 Tahun 2016 pada tanggal 13 Juni 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, dengan tugas utama Badan Otorita Danau Toba (BPODT) adalah sebagai Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas.
- Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai salah satu Geopark/Taman Bumi yang menggunakan konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan dengan penamaan Geopark Nasional Kaldera Toba.

4.5. Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

FRAKSI	Dibatalkan	Dikembalikan	Ditolak	Pengajuan Usulan	Usulan disetujui	Validasi Setwan	Verifikasi OPD	Verifikasi TAPD	Grand Total
DEMOKRAT	5	2	23			53	1	14	98
GERINDRA	2	34	257	17			38	157	505
GOLKAR	1	57	319				39	274	690
HANURA		20	158				40	226	444
NASDEM	3	17	69	8			8	114	219
NUSANTARA		12	36				12	78	138
PAN		7	201				5	278	491
PDI PERJUANGAN	1	50	290	9	1		23	434	808
PKS		5	52				63	79	199
Grand Total	12	204	1405	34	1	53	229	1654	3592

Tabel 4.16
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang Telah Diverifikasi Berdasarkan Prioritas Pembangunan

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
1.	Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bimbingan disabilitas	GOLKAR	1
		Penambahan Guru	NASDEM	1
		Pengadaan Ambulance	GERINDRA	2
			HANURA	1
			PAN	1
		Pengadaan Media Pendidikan SMA	HANURA	1
		Pengadaan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	GERINDRA	2
			NASDEM	1
			PDI PERJUANGAN	2
			PAN	1
		Diklat Bendahara Keuangan Daerah	GERINDRA	1
		Diklat Pelayanan Sosial	GERINDRA	5
		Diklat Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	GOLKAR	1
		Diklat Penyusunan profil Desa dan kelurahan	GOLKAR	1
		Diklat Teknis Tenaga Administrasi Sekolah SMA/SMK	PDI PERJUANGAN	1
		Kegiatan Pemetaan Konflik Sosial	GERINDRA	1
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	PDI PERJUANGAN	1
		Orientasi / pelatihan pengembangan kapasitas kemampuan intelijen dasar bagi aparat Kesbangpol provinsi, Kab/Kota se Sumatera Utara	GOLKAR	1
		Pemberantasan Narkoba	GERINDRA	3
			PDI PERJUANGAN	10
			NUSANTARA	1
			HANURA	1
			GOLKAR	11
			PAN	1
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PDI PERJUANGAN	1
		Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera utara	GERINDRA	2
			GOLKAR	4
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	PDI PERJUANGAN	1
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PDI PERJUANGAN	1
		Workshop bagi Camat	PKS	1
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa beserta perabotnya	GOLKAR	1
		Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotnya	GERINDRA	2
			PDI PERJUANGAN	3

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
		Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK Unggulan	GOLKAR	1
		Bantuan Sarana Prasarana Olahraga	GERINDRA	8
			GOLKAR	4
			HANURA	26
			NUSANTARA	1
			PAN	2
			PDI PERJUANGAN	6
			PKS	5
		Bantuan Untuk Rumah Ibadah	DEMOKRAT	10
			GERINDRA	35
			GOLKAR	48
			HANURA	76
			NASDEM	22
			NUSANTARA	25
			PAN	171
			PDI PERJUANGAN	139
			PKS	42
		Pembangunan Gedung Sekolah Baru	GERINDRA	5
			NASDEM	2
			PKS	3
			NUSANTARA	4
			PDI PERJUANGAN	1
			GOLKAR	7
		Pembangunan Lapangan Olahraga	GERINDRA	3
			GOLKAR	3
			HANURA	11
		Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya	GOLKAR	2
			PDI PERJUANGAN	3
		Pembangunan Ruang Belajar Sekolah	GERINDRA	4
			GOLKAR	3
			PKS	37
		Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya	NUSANTARA	3
			GERINDRA	3
			GOLKAR	5
			PKS	10
			PDI PERJUANGAN	5
		Pembangunan Ruang Penunjang beserta perabotnya	NUSANTARA	1
		Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA)	GOLKAR	3
			NASDEM	1
			PAN	1
			PKS	2
		Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	GERINDRA	1
		Pengadaan Mobiler Sekolah	PKS	7
			GERINDRA	1
			GOLKAR	5
			NASDEM	3
			PDI PERJUANGAN	1
2.	Prioritas Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Bantuan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian)	GERINDRA	17
			GOLKAR	11
			HANURA	15
			NASDEM	2
			NUSANTARA	1
			PKS	1
			PAN	3
			PDI PERJUANGAN	32
		Bantuan Bibit Tanaman	GERINDRA	4
			GOLKAR	4
			HANURA	5
			NUSANTARA	8
			NASDEM	5
			PDI PERJUANGAN	23
			PKS	1

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
		Bantuan Bibit Ternak	GERINDRA	2
			HANURA	14
			PAN	7
			NASDEM	1
			PDI PERJUANGAN	6
		Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	GERINDRA	3
			PAN	2
			PKS	2
			GOLKAR	3
		Bantuan perahu	GOLKAR	2
			NASDEM	1
		Bantuan Pakan Ikan	PAN	2
			GOLKAR	1
			NASDEM	1
		Bantuan Peralatan Dan Perlengkapan UMKM	DEMOKRAT	1
			GERINDRA	20
			GOLKAR	16
			HANURA	26
			NASDEM	6
			PAN	25
			NUSANTARA	3
			PDI PERJUANGAN	51
			PKS	5
		Bantuan Pupuk	DEMOKRAT	1
			GERINDRA	11
			GOLKAR	54
			HANURA	16
			NASDEM	20
			NUSANTARA	3
			PAN	1
			PDI PERJUANGAN	31
		Bantuan sapi	NASDEM	1
			NUSANTARA	2
			PAN	2
			PDI PERJUANGAN	4
			PKS	1
		Bantuan Sosial Lainnya	PDI PERJUANGAN	1
			GOLKAR	1
		Pemetaan mutu produk unggulan daerah	NUSANTARA	1
		Bantuan Ternak	PDI PERJUANGAN	13
			NUSANTARA	2
			HANURA	4
			GERINDRA	2
			PAN	6
			GOLKAR	4
			PKS	1
		Pengadaan Bibit	GERINDRA	2
			HANURA	2
			PDI PERJUANGAN	6
		Tambahan Modal Pembudidaya Ikan	HANURA	1
		Bantuan Alat Tangkap Ikan	PDI PERJUANGAN	6
			PAN	8
			NASDEM	1
			GOLKAR	2
		Pemugaran Rumah Adat	PDI PERJUANGAN	2
		Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	PDI PERJUANGAN	3
		Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner	GOLKAR	1
		Bantuan Alat Kesenian	PDI PERJUANGAN	6
			PAN	8
			PKS	1
		Bantuan Alat Kesenian Budaya	NUSANTARA	1
			PDI PERJUANGAN	4
			PAN	2
			GOLKAR	1

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
		Bantuan peralatan dan pelatihan	NUSANTARA	2
			GOLKAR	2
			PDI PERJUANGAN	1
			GERINDRA	2
			PKS	1
			NASDEM	1
		Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM)	GOLKAR	5
			GERINDRA	4
			HANURA	1
			NASDEM	8
		Pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM)	PDI PERJUANGAN	9
			PAN	2
3.	Prioritas Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	PKS	1
			PDI PERJUANGAN	1
			GOLKAR	2
		Benteng Penahan Banjir	GERINDRA	7
			NASDEM	1
			PDI PERJUANGAN	2
			HANURA	2
		Normalisasi Sungai	GOLKAR	6
			PAN	2
			GERINDRA	1
			PDI PERJUANGAN	1
			HANURA	1
			PKS	1
		Pemanfaatan Lahan Tidur	GOLKAR	1
			PDI PERJUANGAN	2
			GERINDRA	1
		Pembangunan Badan Jalan Produksi Perkebunan	GOLKAR	1
		Pembangunan Break Water / Bronjong	NUSANTARA	2
			GOLKAR	4
			PAN	6
			PDI PERJUANGAN	1
			HANURA	2
		Pembangunan Drainase	PDI PERJUANGAN	2
			GERINDRA	1
			PAN	1
			NASDEM	2
			HANURA	1
			GOLKAR	2
			DEMOKRAT	29
		Pembangunan Jalan	DEMOKRAT	24
			GERINDRA	3
			GOLKAR	9
			HANURA	5
			NASDEM	5
			PAN	8
			PDI PERJUANGAN	5
		Pembangunan Jalan Usaha Tani	GERINDRA	11
			GOLKAR	20
			HANURA	13
			NASDEM	4
			NUSANTARA	4
			PAN	7
			PDI PERJUANGAN	19
			PKS	11
		Pembangunan jaringan irigasi	NASDEM	2
		Pembangunan jaringan irigasi Pertanian	GERINDRA	5
			GOLKAR	8
			HANURA	1
			NASDEM	5
			NUSANTARA	2
			PAN	2
			PDI PERJUANGAN	11
			PKS	1

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
		Pembangunan Jembatan	GERINDRA	1
		Pembangunan Pagar, Taman, Kantin dan Drainase Sekolah	DEMOKRAT	1
			NUSANTARA	1
			GOLKAR	1
			GERINDRA	1
			HANURA	1
		Pembangunan sarana air minum di pemukiman rawan air	HANURA	4
			NUSANTARA	2
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PDI PERJUANGAN	3
			NASDEM	4
			GERINDRA	1
			GOLKAR	5
			HANURA	2
		Pembangunan Sumur Bor	DEMOKRAT	1
			PKS	1
			PAN	1
			GOLKAR	6
			HANURA	1
		Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan SLB	GERINDRA	2
			PDI PERJUANGAN	1
			HANURA	1
		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	GOLKAR	3
		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	NUSANTARA	1
			GERINDRA	2
			NASDEM	1
			PDI PERJUANGAN	1
			GOLKAR	3
		Pembuatan Rumah Sampah (Pupuk Kompos)	NUSANTARA	2
			PDI PERJUANGAN	3
			GOLKAR	2
			HANURA	7
		Pembuatan Tempat Parkir di Lokasi Wisata	PDI PERJUANGAN	1
		Penanganan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan Perusahaan	NASDEM	1
		Penerangan Jalan Umum (PJU)	HANURA	1
		Pengadaan jaringan listrik negara (PLN)	GERINDRA	1
			PAN	1
			NASDEM	1
			PDI PERJUANGAN	1
			GOLKAR	2
			PKS	1
		Pengadaan lampu penerangan di permukiman warga.	NASDEM	2
			GERINDRA	7
			GOLKAR	2
			NUSANTARA	1
			PDI PERJUANGAN	6
			HANURA	6
			PKS	1
			PAN	1
			DEMOKRAT	1
		Pengadaan Perangkat / Rambu-rambu Jalan	PDI PERJUANGAN	1
			NASDEM	1
			GOLKAR	5
		Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata.	PKS	1
			GOLKAR	2
			GERINDRA	1
			PDI PERJUANGAN	1
			NASDEM	2
		Peningkatan Drainase	PDI PERJUANGAN	1
		perbaikan dan pengaspalan jalan	GERINDRA	2
			GOLKAR	10
			HANURA	6
			NASDEM	2
			NUSANTARA	4
			PAN	3

NO	PRIORITAS	USULAN	FRAKSI	JUMLAH USULAN
			PDI PERJUANGAN	12
		Perbaikan tanggul kiri	PDI PERJUANGAN	1
			GERINDRA	2
			NUSANTARA	1
			HANURA	1
			GOLKAR	1
		Pintu Air Penahanan Banjir	PDI PERJUANGAN	1
			PAN	1
		Rehab Jalan	PDI PERJUANGAN	3
			GOLKAR	5
		Rehab Panti	NASDEM	1
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi	HANURA	5
			PAN	1
		Rehabilitasi Jembatan	PDI PERJUANGAN	1
		Revitalisasi Persawahan	GOLKAR	1
		Tembok penahan tanah/talud sungai.	GOLKAR	3
			PDI PERJUANGAN	4
			PAN	3
			PKS	3
		Rehab Jalan	GOLKAR	1
		Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	GOLKAR	1
	Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	-		
	Total Usulan yang divalidasi			1906

4.6 Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan inovasi daerah yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk: tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas capaian keberhasilan pembangunan Sumatera Utara perlu adanya dukungan berupa inovasi pada program dan kegiatan pembangunan daerah, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Inovasi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan inovasi di daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan terus mengalami pengembangan dan pembaharuan ke tingkat yang lebih baik, antara lain:

Daftar Inovasi Provinsi Sumatera Utara

1. E-Kinerja Sumut (Badan Kepegawaian Provsu)

Aplikasi berbasis elektronik e-Kinerja Sumut yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja Sumut adalah aplikasi berbasis web dan android yang digunakan dalam penyusunan SKP, pengisian aktivitas kerja, perekaman kehadiran, dan penilaian kinerja serta dapat memberikan informasi pendukung lainnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pegawai yang dinilai.

Manfaat utama dari inovasi teknologi dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah efisiensi. Dengan adopsi sistem manajemen kinerja berbasis teknologi, tugas-tugas rutin dapat diotomatisasi, membebaskan waktu pegawai untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif. Misalnya, dengan sistem kinerja dan disiplin secara digital, kinerja data diukur secara *real-time* tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu. Selain itu, teknologi memungkinkan pemantauan kinerja yang lebih akurat dan terukur. Dengan alat analitik yang canggih, setiap pegawai dapat teridentifikasi untuk pengembangan lebih lanjut. Ini membantu dalam memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan terfokus kepada pegawai, memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kinerja mereka secara progresif.

2. Fast Track Digitalisasi 1000 KUMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu)

Inovasi Fast Track Digitalisasi 1000 KUMKM dilaksanakan dalam upaya mendukung program pemerintah untuk digitalisasi KUMKM dengan memfasilitasi toko online, iklan dan konten untuk pemasaran di platform digital. Tujuan dan manfaatnya antara lain:

- Peningkatan mindset dan skill digital
- Realisasi KUMKM on boarding di platform pemasaran digital
- Pengelolaan media sosial yang efektif berorientasi pada pelanggan
- Terciptanya korporatisasi dan lapangan kerja
- Kenaikan nilai penjualan 30%

3. Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu)

Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda) Sumatera Utara adalah model pendidikan kritis untuk pemberdayaan perempuan akar rumput, sebagai wadah belajar untuk memberdayakan diri baik secara hukum, sosial, politik, dan ekonomi melalui proses pendidikan sepanjang hayat. KELAPA MUDA juga merupakan langkah untuk menuju/mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang saat ini dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KELAPA MUDA dilakukan dengan melibatkan multipihak (pemerintah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dunia usaha) guna memperkaya dan mengimplementasikan ilmu dalam rangka peningkatan kapasitas SDM perempuan khususnya di desa. Tujuan Penyelenggaraan KELAPA MUDA adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan bagi perempuan akar rumput agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya. Hasil Inovasi berupa Kelas Pembelajaran *Non Formal* guna menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, dan kecakapan hidup, sehingga lebih berdaya dalam menyelesaikan persoalan dirinya, keluarganya dan mampu ikut serta melakukan perubahan sosial di lingkungannya. Selain itu, dengan kerja sama berbagai pihak hal ini juga menimbulkan tanggung jawab sosial dalam melakukan pemberdayaan Perempuan.

4. Pengembangan E-Learning Sibermartabat Berupa E-Sertifikat (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu)

Setiap ASN memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun dan berhak mendapatkan sertifikat. Dalam pengembangannya, e-learning Sibermartabat mengeluarkan sertifikat secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis web bagi peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam mengikuti pelatihan ini. Hal inilah yang melatarbelakangi ide pengembangan inovasi e-learning sistem Sibermartabat di badan

pengembangan sumber daya manusia provinsi Sumatera utara dengan menambahkan e-sertifikat sebagai hasil dari pembelajaran. E-sertifikat merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Sertifikat elektronik sangat praktis karena kita tidak perlu membawa cukup banyak materiil untuk melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen, namun cukup membawa sebuah token ataupun dongle. Tempat penyimpanan yang fleksibel juga memungkinkan kita untuk menggunakan e-sertifikat di mana saja dan kapan saja. Misalnya, saat kita tiba-tiba membutuhkan sertifikat tertentu sebagai syarat administrasi dalam pemberkasan. Kita bisa dengan mudah mengakses *cloud storage* tanpa harus repot-repot pulang ke rumah. E-sertifikat juga lebih ramah lingkungan karena menghemat penggunaan kertas. Selain itu, sertifikat digital dapat didownload pada portal yang ada di WEB BPSDM Provsu ataupun juga bisa dikirimkan dengan cepat dan mudah melalui berbagai sarana komunikasi elektronik seperti email atau aplikasi *chatting*.

5. Portal Satu Data Indonesia (SADA INA) (Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu)

SADAINA Sumut merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara mengelola dan mempublikasikan data, sehingga data dapat diakses secara terbuka dalam berbagai visualisasi yang menarik. Inovasi Portal Satu Data Sumatera Utara atau SADAINA Sumut menghasilkan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengumpulan dan publikasi Data. Inovasi ini juga sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan Data yang akurat. Inovasi ini membantu Pemerintah memantau kinerja sektor-sektor kunci, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan lebih efektif. Data yang terkumpul dan tersedia secara terpadu memungkinkan analisis yang mendalam terhadap progres pembangunan di berbagai bidang dan dengan akses mudah ke Data yang relevan dan up-to-date, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan Data yang tersedia dan bagi Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari mana saja, kapan saja tanpa terhalang birokrasi dan geografis. Inovasi ini bertujuan sebagai berikut:

- Tersedianya sebuah sistem terintegrasi yang memudahkan dalam mengelola, menyimpan, dan mempublikasikan data sektoral dalam satu platform.
- Platform berbagi pakai data sektoral Sumatera Utara yang dapat dengan mudah di akses oleh siapa saja, kapan saja dan dari mana saja.

Tersedianya aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik melalui data yang disajikan dalam berbagai format visualisasi yang informatif dan menarik, sehingga mempermudah masyarakat dan *Stakeholder* lainnya dalam memahami dan menggunakan data tersebut.

6. RESPEK (Reformasi Pengawasan Spesialis Ketenagakerjaan) Sumut Hebat (Dinas Ketenagakerjaan Provsu)

Pengawasan Peralatan/Instalasi K3 di tempat kerja dalam setiap tahapan pengawasan mulai dari tahap penyusunan rencana kerja pengawasan, pelaksanaan pengawasan hingga pelaporan pengawasan Peralatan/Instalasi K3 harus dikelola dengan sistem manajemen yang terencana dan terukur. Namun, pelaksanaan pengawasan Peralatan/Instalasi K3 di tempat kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara belum bisa terwujud sebagaimana mestinya. Hal ini erat kaitannya dengan ketiadaan database peralatan/instalasi di tempat kerja yang akurat, lengkap dan mudah diakses, rendahnya partisipasi / kepatuhan perusahaan, luasnya cakupan wilayah kerja dan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Terobosan/inovasi yang dipilih adalah peningkatan pengawasan Peralatan/Instalasi K3 dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan nama aplikasi RESPEK. Aplikasi ini didesain dalam rangka meningkatkan pengawasan Peralatan/Instalasi K3 di tempat kerja dengan:

- Tersedianya database yang akurat, lengkap dan *update* yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan (dari manual menjadi digital).
- Penyederhanaan SOP dan mengantisipasi keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Pengawas Ketenagakerjaan.
- Peningkatan kepatuhan dan partisipasi perusahaan dalam pemenuhan syarat-syarat K3 terkait peralatan/instalasi.

7. SIAP BERSINAR (Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba) (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu)

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 1 Nomor 7 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya menugaskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam fasilitasi pencegahan Narkoba di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Badan Kesbangpol Provsu mengkoordinir dan mengarahkan agar pelaksanaan fasilitasi pencegahan NAPZA sesuai dengan target dan capaian seusia dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Maka diperlukan sebuah alat/sarana yang dapat membantu tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provsu, dalam rangka mencapai target fasilitasi pencegahan NAPZA, pemberdayaan relawan anti Narkoba, dan layanan rehabilitasi Narkoba bagi masyarakat yang tidak mampu dengan aplikasi SIAP BERSINAR (Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba).

Adapun manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan aplikasi SIAP BERSINAR (Sistem Informasi Antisipasi Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba) adalah sebagai berikut:

- Aplikasi cegah dan lapor Narkoba menuju Sumut Bersinar akan menjadi alat relawan anti Narkoba untuk melaporkan peredaran gelap Narkoba kepada aparatur penegakan hukum yang melindungi identitas diri dan keluarga;
- Memberikan layanan edukasi terhadap bahaya Narkotika di Masyarakat yang mudah untuk diakses dan up to date sehingga dengan adanya edukasi tersebut mampu memberikan wawasan tentang peran dari komponen masyarakat dalam hal pencegahan Narkoba;
- Menjadi alat/sarana untuk memfasilitasi masyarakat dalam informasi pelaksanaan rehabilitasi Narkoba

8. SIDAKSIAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan) (Inspektorat Provsu)

Aplikasi Berbasis Web SIDAKSIAP dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser web standar. Ini memungkinkan penggunaan yang fleksibel dan mudah diakses dari berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan ponsel cerdas. SIDAKSIAP menggunakan sistem basis data yang kuat untuk menyimpan dan mengelola semua informasi terkait laporan hasil pemeriksaan, tugas tindak lanjut, dan data pengguna. Hal ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien dan akurat. Antarmuka pengguna SIDAKSIAP dirancang dengan perhatian pada kegunaan dan kemudahan navigasi. Fitur-fitur seperti pencarian, filter, dan tata letak yang intuitif memastikan pengalaman pengguna yang baik dan efisien. SIDAKSIAP dilengkapi dengan sistem notifikasi otomatis yang memberi tahu pengguna tentang tugas-tugas yang ditugaskan, tenggat waktu yang mendekat, atau perubahan status dalam proses tindak lanjut.

Ini membantu memastikan respons yang cepat terhadap tugas-tugas yang diberikan. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam pengembangan SIDAKSIAP. Aplikasi ini menggunakan protokol enkripsi untuk melindungi data selama transmisi, serta menyediakan sistem otentikasi yang kuat untuk mengamankan akses ke platform. SIDAKSIAP dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk melacak kemajuan tindak lanjut, menganalisis data, dan membuat laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Aplikasi SIDAKSIAP dapat diakses dan digunakan melalui berbagai platform, termasuk sistem operasi Windows, macOS, dan Linux, serta berbagai browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. SIDAKSIAP dirancang untuk berintegrasi dengan sistem-sistem eksternal yang ada di dalam organisasi pemerintah, seperti sistem manajemen dokumen, sistem keuangan, atau sistem komunikasi internal. Ini memungkinkan pertukaran data yang mulus antara aplikasi yang berbeda dan meningkatkan efisiensi proses kerja.

9. SIMANTANGADIS (Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan Berkeselamatan Berbasis GIS) (Dinas Perhubungan Provsu)

Sistem Informasi Manajemen Transportasi Jalan Berkeselamatan Berbasis GIS (SIMANTANGADIS) dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi petugas lapangan yang melakukan survei fasilitas keselamatan yang ada di sepanjang ruas jalan provinsi Sumatera utara, sistem ini juga bermanfaat untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan kerusakan fasilitas keselamatan jalan melalui kanal aduan masyarakat pada website simantangadis. Tujuan inovasi ini adalah memberikan solusi teknologi informasi untuk memperoleh data yang akurat secara sistematis dan aplikatif dalam proses penyajian informasi dan survei kondisi *existing* dan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk informasi spasial.

10. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA) (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)

SIDBANKUMDA merupakan inovasi untuk akselerasi/percepatan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara. Manfaat inovasi ini antara lain:

- Masyarakat dapat mengakses bantuan hukum yang cepat, mudah dan gratis;
- Masyarakat dapat memilih OBH yang tersertifikasi untuk dapat menangani kasus yang sedang dihadapi;
- Masyarakat dapat dengan langsung berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprovsu terkait pelayanan hukum yang diberikan OBH.

11. Gerakan Gotong Royong Sumut Hebat Di Bidang Ketenagakerjaan (Dinas Ketenagakerjaan Provsu)

Optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Sumatera Utara untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidup dengan memberikan bantuan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan seperti pengendara betor, tukang bangunan, pedagang kecil, nelayan, pengurus tempat ibadah dan lain-lain. Pekerja rentan yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terlindungi dari resiko kerja meliputi Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua, Inovasi ini juga dalam rangka mencegah bertambahnya kemiskinan ekstrem. Dengan Inovasi ini sebanyak 41.570 pekerja rentan telah terlindungi dari resiko saat pekerja. Pekerja rentan yang terkena resiko kematian dan kecelakaan kerja telah mendapat manfaat berupa Santunan Kematian, Santunan Kecelakaan Kerja berupa biaya pengobatan, santunan cacat, santunan kematian dan beasiswa untuk 2 orang anak sampai jenjang pendidikan S1.

12. Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu)

Perkembangan teknologi panel surya yang makin maju menyebabkan peluang pemakaiannya yang lebih luas untuk sektor yang produktif seperti pompa air, *cold storage*, *Charge station*. Berdasarkan hal tersebut dinas ESDM mengkaji penggantian sumber energi untuk pompa air dari yang berbahan bakar minyak menjadi bersumber dari matahari.

Tujuannya:

- Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan mendukung upaya konservasi energi di Sumatera Utara.
- Menyediakan air bagi petani yang tidak memiliki irigasi, debit irigasinya tidak cukup lagi dan/atau menggunakan mesin diesel sebagai pompa air.
- Meningkatkan Bauran Energi Baru Terbarukan di Sumatera Utara.

Manfaatnya:

- Bauran energi terbarukan meningkat.
- Produktivitas pertanian meningkat.

13. Sistem Informasi Pemantauan Tenaga Lapangan (SiMantel) (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu)

SiMantel adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pendataan perumahan tidak layak huni di seluruh wilayah. Dengan menggunakan teknologi canggih dan pendekatan yang berbasis pada data, SiMantel menghadirkan solusi yang efisien dan efektif untuk mengatasi masalah perumahan yang tidak memadai. SiMantel memanfaatkan fitur-fitur canggih seperti pemetaan digital, analisis data spasial, dan integrasi dengan sistem informasi geografis (SIG) untuk memungkinkan pengguna melakukan survei dan pendataan perumahan tidak layak huni secara akurat dan terperinci. Melalui aplikasi ini, petugas lapangan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang lokasi, kondisi, dan karakteristik setiap perumahan yang perlu didata.

Salah satu keunggulan utama SiMantel adalah kemampuannya untuk menyediakan informasi real-time tentang kondisi perumahan yang tidak layak huni. Dengan demikian, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat segera merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau menggantikan perumahan yang tidak layak huni tersebut. Selain itu, SiMantel juga menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan masyarakat umum untuk melaporkan perumahan tidak layak huni secara langsung melalui aplikasi. Dengan demikian, partisipasi Masyarakat dalam pendataan dan pemantauan perumahan tidak layak huni dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan. SiMantel bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi juga merupakan bagian dari sebuah ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Dengan dukungan teknologi yang canggih dan komitmen untuk memberikan solusi yang berkelanjutan, SiMantel siap menjadi mitra yang handal dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan membangun lingkungan yang lebih baik untuk semua.

14. Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu)

Pusat edukasi pengelolaan sampah adalah bentuk implementasi dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. mendukung peraturan tersebut, telah terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada Pasal Pergub tersebut

disebutkan kebijakan dan Strategi Daerah. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Hal tersebut juga tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2020 tentang Gerakan Pengurangan Sampah Plastik di lingkungan perkantoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pusat Edukasi Pengelolaan Sampah lahir dari permasalahan global semakin tingginya laju emisi Gas Rumah Kaca dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditunjukkan dengan juga dengan kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sangat kritis. Hal ini menjadi indikator buruknya perilaku hidup kita terhadap sampah dan pengelolaannya. Dari hasil pengamatan, sebagian besar sampah di TPA adalah sampah plastik. salah satu penyumbang sampah plastik adalah di Perkantoran dan Masyarakat umum. oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen setiap individu untuk membatasi dan mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Keunggulan dari Rumah Edukasi Pengelolaan Sampah ini adalah aksi nyata dalam setiap kegiatan bisa disaksikan langsung dan masyarakat bisa ikut serta dalam pengelolaan sampah secara sukarela dan sadar. selain masyarakat teredukasi, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam mengelola sampah. hal ini ditunjukkan dengan kegiatan rumah edukasi yang beragam yaitu:

- mengadakan pelatihan *ecoenzym*
- pemanfaatan ecoenzym untuk kelestarian lingkungan
- pengembangan dan budidaya magot
- mengadakan sosialisasi8 budidaya magot
- mengadakan sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- Pelatihan *ecobrick* (pengolahan sampah plastik menjadi kursi/meja)
- Pengolahan sampah organik menjadi kompos melalui aplikasi magot dan tong komposter.
- Pelatihan cara mudah mendirikan Bank Sampah
- Operasional Bank Sampah lingkup warga ASN DLHSU
- Penjemputan Sedekah Sampah lintas OPD Provinsi Sumatera Utara

15. Aplikasi SEMERBAK

Adalah Aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tertib administrasi dan mempermudah proses penyaluran anggaran bantuan keuangan provinsi kepada Kab/kota dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akun tabel dan berintegritas.

Manfaat Aplikasi:

- Proses penyaluran yang akun tabel dan transparan;
- Mempercepat proses penyaluran;
- Arsip digital yang terjaga;
- Menghindari potensi korupsi;
- Efisiensi anggaran belanja.

Penyaluran anggaran belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota, meliputi:

- Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Kawasan Permukiman
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pertanian dan Irigasi
- Pariwisata
- Pemulihan Ekonomi
- Bidang Pemerintahan Umum

Siklus Penyaluran BKP Melalui Aplikasi SEMERBAK

Input Data Kontrak/ Pengadaan pada Aplikasi SEMERBAK oleh Perangkat Daerah Teknis Reviu Kesesuaian Data dan Dokumen Kegiatan oleh Inspektorat. Verifikasi Kelengkapan Data & Pengajuan Permohonan Penyaluran oleh BKAD Kabupaten/Kota dan selanjutnya BKAD Provinsi akan memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian data kegiatan serta menyalurkan BKP sesuai permohonan Kabupaten/Kota.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud Undang-undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di daerah provinsi tersebut.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap target dan sasaran pembangunan pemerintah maupun pemerintah provinsi diimplementasikan berdasarkan RPJMD/RPD Kabupaten/Kota melalui arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

5.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, perumusan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi kebijakan – kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara dalam menjabarkan tujuan penataan ruang yang telah dirumuskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman dan nyaman.
2. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berdaya saing.
3. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan penataan ruang provinsi yang inovatif.

Strategi penataan ruang Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah provinsi.
2. Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara.
3. Strategi peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya perwujudan tertib tata ruang untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman.

4. Strategi pengembangan kawasan permukiman dan kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
5. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar pusat pelayanan dan antar pusat pertumbuhan.
6. Strategi pengembangan kawasan pertanian untuk kemandirian pangan bagi Provinsi Sumatera Utara.
7. Strategi pengembangan ekonomi kelautan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. Strategi pengembangan kegiatan perkebunan yang berdaya saing tinggi.
9. Strategi pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan.
10. Strategi pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.
11. Strategi pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung.
12. Strategi pelestarian kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
13. Strategi untuk mewujudkan pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
14. Strategi mewujudkan pengembangan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.
15. Strategi mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Strategi mewujudkan pengembangan sistem investasi yang berkualitas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sistem perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 4 (empat) hierarki pusat pelayanan, yaitu:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat pelayanan ini terletak di kawasan perkotaan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo)
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara. PKW di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kisaran, Balige, Sidikalang, Sibolga, Padangsidimpuan, Rantau Prapat, dan Gunungsitoli.
c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSN di wilayah Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan
d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Kota-kota sebagai pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan.

Rencana sistem pusat permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)					
1	PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo	Eksisting dan Sedang Berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Provinsi Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional Pendidikan tinggi Industri
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)					
1	PKSN Medan	Kota Medan	Eksisting dan Sedang Berkembang	Pengembangan baru	Pusat pemerintahan Provinsi Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat distribusi dan kolektor barang & jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pusat transportasi darat, laut, dan udara regional Pendidikan tinggi Industri
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)					
1	PKW Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	Eksisiting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Perdagangan dan jasa
2	PKW Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar	Eksisiting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Perdagangan dan jasa Industri Pendidikan
3	PKW Kisaran	Asahan	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Industri pengolah hasil perkebunan dan pertanian tanaman pangan Perdagangan dan Jasa
4	PKW Balige	Toba	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Perdagangan Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil perikanan Pelayanan jasa pariwisata Pendidikan Tinggi
5	PKW Sidikalang	Dairi	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Industri pengolahan hasil pertanian Perdagangan
6	PKW Sibolga	Kota Sibolga	Eksisiting	Revitalisasi	Pemerintahan Kota Pusat perdagangan dan jasa regional Pusat pelayanan jasa pariwisata Pengolahan hasil perikanan Pusat transportasi laut Pusat pendidikan
7	PKW Padangsidimpuan	Kota Padangsidimpuan	Eksisiting	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hasil hutan Perdagangan dan Jasa
8	PKW Rantau Prapat	Labuhanbatu	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Perdagangan dan Jasa

No.	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
					Pengolahan hasil perkebunan
9	PKW Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli	Sedang berkembang	Revitalisasi	Pusat pemerintahan Kabupaten Pariwisata Bahari Pengolahan hasil perikanan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)					
1	PKL Pangkalan Brandan	Langkat		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertambangan Pengolahan hasil pertanian Perikanan
2	PKL Stabat	Langkat		Revitalisasi	Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Industri Pengolahan hasil Pertanian
3	PKL Perbaungan	Serdang Bedagai		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan Industri Perdagangan
4	PKL Sei Rampah	Serdang Bedagai		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan Pusat Pemerintahan Perdagangan dan Jasa
5	PKL Indrapura	Batu Bara		Pengembangan baru	Perikanan Pelabuhan Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
6	PKL Lima Puluh	Batu Bara		Pengembangan baru	Permukiman perkotaan Perdagangan dan Jasa
7	PKL Simpang Empat	Asahan		Pengembangan baru	Permukiman Perkotaan Pengolahan Hasil perikanan
8	PKL Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai		Revitalisasi	Pengolahan Hasil perikanan Pelabuhan Permukiman perkotaan
9	PKL Aek Kanopan	Labuhanbatu Utara		Revitalisasi	Pengolahan hasil perkebunan Pengolahan hasil pertanian
10	PKL Labuhan Bilik	Labuhanbatu		Revitalisasi	Industri Pengolahan hasil Perikanan Jasa
11	PKL Aek Nabara	Labuhanbatu		Pengembangan baru	Perkebunan pertanian tanaman pangan
12	PKL Kota Pinang	Labuhanbatu Selatan		Revitalisasi	Perkebunan pertanian tanaman pangan
13	PKL Berastagi	Karo		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan Pariwisata Agroindustri
14	PKL Kabanjahe	Karo		Revitalisasi	Agroindustri Pengolahan hasil perkebunan
15	PKL Merek	Karo		Revitalisasi	Pertanian tanaman pangan Perkebunan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
16	PKL Kuta Buluh	Karo		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Perkebunan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan
17	PKL Tiga Binanga	Karo		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Perkebunan
18	PKL Pematang Raya	Simalungun		Revitalisasi	Permukiman perkotaan Pendidikan
19	PKL Perdagangan	Simalungun		Pengembangan baru	Pengolahan Hasil Perkebunan Perdagangan

No.	Sistem Pusat Permukiman	Kabupaten/ Kota	Status Kota	Strategi	Fungsi yang Diarahkan
20	PKL Parapat	Simalungun		Revitalisasi	Pariwisata Perkebunan
21	PKL Saribu Dolok	Simalungun		Pengembangan baru	Pertanian tanaman pangan Pendidikan kejuruan
22	PKL Pangururan	Samosir		Pengembangan baru	Pariwisata Jasa Pengolahan Hasil pertanian
23	PKL Salak	Pakpak Bharat		Revitalisasi	Pertanian tanaman pangan Pendidikan kejuruan
24	PKL Dolok Sanggul	Humbang Hasundutan		Revitalisasi	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan Pengolahan Hasil perkebunan
25	PKL Porsea	Toba		Pengembangan baru	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan
26	PKL Tarutung	Tapanuli Utara		Revitalisasi	pertanian tanaman pangan Pengolahan hasil hutan Pengolahan Hasil perkebunan
27	PKL Siborongborong	Tapanuli Utara		Pengembangan baru	Pertanian Tanaman Pangan Pengolahan hasil perkebunan
28	PKL Pandan	Tapanuli Tengah		Pengembangan baru	Permukiman perkotaan Perdagangan dan Jasa
29	PKL Barus	Tapanuli Tengah		Pengembangan baru	Perikanan tangkap Perkebunan Jasa
30	PKL Sipirok	Tapanuli Selatan		Revitalisasi	Pengolahan hasil perkebunan dan hutan Pendidikan kejuruan
31	PKL Batang Toru	Tapanuli Selatan		Pengembangan baru	Pengolahan hasil perkebunan dan hutan Pendidikan kejuruan
32	PKL Gunung Tua	Padang Lawas Utara		Revitalisasi	Perkebunan pertanian tanaman pangan
33	PKL Sibuhuan	Padang Lawas		Pengembangan baru	Perkebunan pertanian tanaman pangan
34	PKL Natal	Mandailing Natal		Revitalisasi	Perikanan Pertanian tanaman pangan
35	PKL Siabu	Mandailing Natal		Pengembangan baru	Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
36	PKL Panyabungan	Mandailing Natal		Revitalisasi	Pengolahan Hasil Hutan dan perkebunan Pertanian tanaman pangan
37	PKL Kotanopan	Mandailing Natal		Revitalisasi	Pengolahan hasil pertanian Pendidikan kejuruan
38	PKL Gido	Nias		Pengembangan baru	Pusat pemerintahan Kabupaten Pengolahan hasil perikanan Perkebunan
39	PKL Lotu	Nias Utara		Pengembangan baru	Perikanan perkebunan Peternakan
40	PKL Lahomi	Nias Barat		Pengembangan baru	Perikanan tangkap Perkebunan
41	PKL Teluk Dalam	Nias Selatan		Revitalisasi	Perikanan tangkap Pariwisata Bahari
42	PKL Pulau Telo	Nias Selatan		Pengembangan baru	Pariwisata Bahari Perikanan tangkap

5.1.1. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan – ketentuan dan tipologi kawasan strategis provinsi maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan kepentingan:

a. Pertumbuhan ekonomi;
b. Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan;
c. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.1.2 Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
   a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi;
      1) Merek, Kabupaten Karo;
      2) Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
      3) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
      4) Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
      5) Harian, Kabupaten Samosir;
      6) Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
      7) Sitinjo, Kabupaten Dairi;
      8) Siempatrube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
      9) Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara – Asahan meliputi;
   1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan
   2) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun - Batubara
   3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
   4) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
   5) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi:
      a) Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal;
      b) Kawasan Labuan Angin – Sibolga
   6) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

2. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut:
   a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Mebidangro, Meliputi:
      1) Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang
      2) Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
      3) Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
   b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara;
   c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
   d. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
   e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit.

3. Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
   a) Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
   b) Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
   c) Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

5.2 Pengembangan Kewilayahan Provinsi Sumatera Berdasarkan Kelompok Kabupaten/Kota

Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 Arah kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan wilayah Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global dengan mengimplementasikan Misi 6 yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah dan Misi 7 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah yang dilihat dari susunan sebaran pusat kegiatan, karakteristik pola pergerakan lalu-lintas wilayah, lokasi *hub* logistik dan prioritas industri, serta jarak posisi wilayah administrasi, Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 6 (enam) kelompok wilayah kabupaten/kota. Enam

kelompok wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi dasar pembagian Provinsi Sumatera Utara menjadi 6 wilayah pengembangan (WP), yaitu:

1. **Wilayah Pengembangan (WP) Utara** meliputi: Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat. Kota Medan berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat distribusi utama. Kota Medan adalah pusat ekonomi dan logistik utama yang mendukung berbagai sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Deli Serdang, juga berstatus PKN, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan lalu lintas industri yang signifikan, menjadikannya *hub* logistik regional yang mendukung produk pertanian dan industri. Kota Binjai, yang juga PKN, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas komuter. Kota ini berfungsi sebagai dukungan untuk industri lokal. Kabupaten Karo, berstatus PKN, menunjukkan pola lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian dan pariwisata, mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata. Kabupaten Langkat, memiliki pusat kegiatan lokal (PKL) di Pangkalan Brandan dan Stabat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan fokus pada lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

2. **Wilayah Pengembangan (WP) Timur** meliputi: Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Asahan memiliki pusat kegiatan wilayah (PKW) di Kisaran menjadikan kabupaten ini dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian. Kabupaten Labuhanbatu, juga memiliki PKW di Rantau Prapat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal. Kota Tebing Tinggi, dengan statusnya sebagai PKW memiliki volume lalu lintas tinggi dan berperan sebagai koridor transportasi utama, kota ini berfungsi sebagai *hub* logistik regional yang mendukung manufaktur ringan dan perakitan. Kota Tanjungbalai, yang berstatus PKL, memiliki volume lalu lintas sedang dengan lalu lintas pelabuhan yang signifikan, mendukung pengolahan ikan dan seafood. Kabupaten Batu Bara, memiliki PKL di Indrapura dan Lima Puluh, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas industri dan pelabuhan, mendukung industri berat dan manufaktur untuk ekspor. Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki PKL di Perbaungan dan Sei Rampah, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan dominasi lalu lintas campuran industri dan pertanian, mendukung pengolahan makanan dan manufaktur ringan. Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, keduanya memiliki PKL di Aek Kanopan dan Kota Pinang, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal.

3. **Wilayah Pengembangan (WP) Selatan** meliputi: Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kota Padangsidimpuan berstatus PKW dengan volume lalu lintas tinggi dan dominasi lalu lintas pertanian, berfungsi sebagai *hub* logistik regional yang mendukung pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan. Di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, tersebar PKL di Sipirok, Batang Toru, Gunung Tua, Sibuhuan, Natal, Siabu, Panyabungan, dan Kotanopan,

kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata.

4. **Wilayah Pengembangan (WP) Barat** meliputi: Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Toba. Kota Sibolga berstatus PKW dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pelabuhan, berfungsi sebagai *hub* logistik regional yang mendukung pengolahan ikan dan seafood. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tersebar PKL di Barus, Pandan, Tarutung, Siborongborong, dan Dolok Sanggul, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata. Samosir juga memiliki PKL di Pangururan dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pariwisata, mendukung pariwisata dan pengolahan hasil pertanian. Kabupaten Toba memiliki PKW di Balige, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pariwisata, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

5. **Wilayah Pengembangan Kepulauan Nias** meliputi: Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias. Kota Gunungsitoli berstatus PKW dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas antar-pulau dan pariwisata, berfungsi sebagai *hub* logistik utama untuk Kepulauan Nias, mendukung perikanan dan pariwisata. Di Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias, tersebar PKL di Teluk Dalam, Pulau Telo, Lotu, Lahomi, dan Gido, kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas antar-pulau, mendukung industri lokal dan pariwisata.

6. **Wilayah Pengembangan Tengah** meliputi: Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Kota Pematangsiantar berstatus PKW dengan volume lalu lintas tinggi dan berperan sebagai koridor transportasi utama, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan hasil pertanian dan manufaktur ringan. Kabupaten Simalungun memiliki PKL di beberapa lokasi yaitu di Pematang Raya, Perdagangan, Parapat, dan Saribu Dolok, memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, berfungsi sebagai *hub* logistik Sei Mangkei yang mendukung bioindustri, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata. Kabupaten Dairi yang memiliki PKW di Sidikalang dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan PKL-nya di Salak, keduanya memiliki volume lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal dan pariwisata.

5.3. Pembangunan Berdasarkan Arah Kebijakan 4 (Empat) Wilayah/Zona

Berdasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 4 (empat) zona antara lain: (1) Pantai Timur; (2) Pantai Barat, (3) Dataran Tinggi dan (4) Kepulauan Nias. Wilayah Timur dengan kondisi wilayah yang relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan Wilayah Barat merupakan dataran bergelombang, Dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang berbukit-bukit dan pegunungan dan wilayah Kepulauan Nias merupakan wilayah kepulauan. Pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 didasarkan pada kebutuhan yang berbeda di tiap wilayah dengan

memprioritaskan (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif; (3) Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif.

5.3.1.Wilayah Pantai Timur

Wilayah Pantai Timur terdiri dari 12 Kabupaten/Kota meliputi:

1) Kabupaten Langkat,
2) Kabupaten Deli Serdang,
3) Kabupaten Serdang Bedagai,
4) Kabupaten Batubara,
5) Kabupaten Asahan,
6) Kabupaten Labuhanbatu Utara,
7) Kabupaten Labuhanbatu,
8) Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
9) Kota Binjai,
10) Kota Medan,
11) Kota Tebing Tinggi,
12) Kota Tanjung Balai,

Rencana Kegiatan Unggulan Tahun 2025 di Wilayah Pantai Timur Berdasarkan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Pelaksanaan SMA "Terbuka" di 7 Kabupaten/Kota yaitu Medan, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Asahan, Serdang Bedagai dan Binjai;
2) Pembangunan Ruang Kelas Baru "RKB" pada 22 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
3) Pembangunan Titik Baca Digital Sumut "Tiba di Sumut" sebanyak 42 Titik Baca pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
4) Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "Emak" melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya "Kelapa Muda" dan Toko Online Perempuan "Top Sumut" sebanyak 166 Orang dan 6 Lembaga di Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai dan Kabupaten Langkat, Asahan;
5) Pemberian Makanan Pendamping Asi Balita "Pelita Sumut" untuk 2.500 Balita pada 3 Kabupaten/Kota di Pantai Timur yaitu Kota Tanjung Balai, Medan, dan Kabupaten Asahan, Labuhan Batu dan Labuhanbatu Selatan.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

1) Pemberian Bantuan Usaha Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Produktif **"MAPRO"** sebanyak 150 Kelompok Usaha Bersama **"KUBE"** dan 168 Usaha Ekonomi Perorangan **"UEP"** pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
2) Pelaksanaan kegiatan *Enterpreneurs Produktif, Adaptif, Kolaboratif* **"PROAKTIF"** melalui inkubasi 650 Wirausahawan Baru pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
3) Fasilitasi **"Klinik Bisnis"** bagi 300 Koperasi, UMKM/IKM pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur melalui pelatihan dan pendampingan UMKM Digital (*Go-Digital/Go-Export*), Fasilitasi Sertifikasi Haki, Industri Rumah Tangga, Halal dan BPOM serta akses permodalan melalui Fasilitasi Jaminan Kredit Berbunga Rendah oleh PT. Jamkrida Sumut;

4) Pengembangan Investasi Sumut Hebat **"ISBAT"** melalui pelaksanaan *North Sumatera Investment Business Forum* yang menghasilkan *Letter Of Intent (LoI)* dalam rangka peningkatan Investasi Sumatera Utara dengan melibatkan pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
5) Peningkatan Pariwisata Sumut dengan gagasan **"HEBAT"** (Heritage, Berkelanjutan dan Atraktif) melalui pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
6) Penetapan *Calender Of Event* Pariwisata dan *Travel Pattern* **"Raon-Raon di Sumut Aja"**;
7) Gerakan Sumut Menanam **"Gema"** melalui pemberian bantuan benih padi sebanyak 250 ton pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur, bantuan benih jagung sebanyak 20 ton pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan, bantuan benih cabai sebanyak 120 hektare benih cabai pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhanbatu, Labuhan Batu Selatan, Kota Medan, Binjai dan Tanjung Balai, Bantuan Benih Bawang Merah sebanyak 40 ton pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Kota Binjai, Medan dan Tebing Tinggi, Bantuan Benih Kedelai sebanyak 15 ton pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Binjai, Selanjutnya bantuan pupuk organik sebanyak 100 ton pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur serta pemberian alsintan sebanyak 250 unit pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
8) Pembinaan Petani Muda Milenial **"PMM"** melalui modernisasi sistem pertanian, pemberdayaan dan pemberian Kredit Usaha Mikro sebanyak 380 petani pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara;
9) Peningkatan Produksi Hasil Ternak **"Tanduk Ternak"** melalui pemberian bibit ternak sapi potong sebanyak 90 ekor pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Batubara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan, bibit ternak kambing sebanyak 160 ekor pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Labuhanbatu, Asahan, dan Labuhanbatu Selatan, bibit ternak domba sebanyak 160 ekor Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Asahan, bibit ternak ayam sebanyak 20 ribu ekor pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Langkat, Labuhanbatu Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu Selatan, bibit ternak itik sebanyak 16 ribu ekor pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Langkat, Labuhanbatu Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu Selatan, dan bantuan sarana peternakan sebanyak 30 unit pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Langkat, Labuhanbatu Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu Selatan;
10) Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan "**Induksi Perkebunan**" melalui pemberian 16 ribu batang benih kelapa pandan wangi dan kakao di 8 Kabupaten Zona Pantai Timur, 8 ribu batang benih kelapa genjah pada Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Batubara, dan Labuhanbatu Selatan, 18 ribu batang benih pinang dan 18 ton pupuk pada Kabupaten Asahan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai serta 30 ribu batang benih aren dan 30 ton pupuk pada Kabupaten Batubara, Deli Serdang dan Langkat, serta 60 unit sarana perkebunan pada

Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Langkat, Labuhanbatu Utara, Asahan, Batubara, Labuhanbatu Selatan;

11) Kampanye Publik Gerakan Pembangunan Hijau Sumatera Utara *Green Growth Movement* **"GGM"** melalui rehabilitasi lahan seluas 141, 1 ha pada Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Kota Binjai serta pengembangan 17 Kampung Iklim pada Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Labuhanbatu, Kota Medan, dan Tanjung Balai;

12) Peningkatan Kawasan Konservasi Kelautan serta Budidaya Perikanan melalui Penanaman Mangrove sebanyak 9 ribu batang di Kabupaten Serdang Bedagai, Penetapan Kawasan Konservasi Kelautan Di Kabupaten Langkat, Pemberian Bantuan Sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat tangkap ikan sebanyak 247 unit di Kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuhanbatu dan Kota Medan, sampan bermotor beserta kelengkapannya sebanyak 16 unit di Kabupaten Asahan, Langkat, Batubara dan Kota Medan serta perlindungan nelayan melalui Asuransi Nelayan sebanyak 3.500 jiwa bagi 500 jiwa di Kabupaten Asahan, 400 jiwa di Kabupaten Langkat, 500 jiwa di Kabupaten Deli Serdang, 400 jiwa di Kabupaten Serdang Bedagai, 300 jiwa di Kabupaten Batubara, 300 jiwa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 400 jiwa di Kabupaten Labuhanbatu, 400 jiwa di Kota Medan dan 300 jiwa di Kota Tanjungbalai. Selain itu, sarana dan prasarana budidaya perikanan berupa benih ikan sebanyak 1 juta ekor (ikan nila, gurame, dan lele) dan pakan ikan sebanyak 120 ton untuk 12 Kabupaten/Kota pada Zona Pantai Timur, serta 1 unit alat pengolahan ikan di Kabupaten Batubara, dan 1 Unit *Cold Storage* di Kota Tanjung Balai.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

1) Pembangunan Jalan Terhubung **"Jantung"** melalui peningkatan struktur jalan sepanjang 17,80 Km di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Utara; Pemeliharaan Berkala sepanjang 126 Km pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;

2) Integrasi Sistem Irigasi **"Istri"** melalui peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 12 unit pada Daerah Irigasi Namorambe dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Medan Krio Kabupaten Deli Serdang, Daerah Irigasi Suka Makmur, Daerah Irigasi Serbangan, Daerah Irigasi Cinta Maju/Cinta Damai, Daerah Irigasi Purwodadi Kabupaten Batubara, Daerah Irigasi Panca Arga Kabupaten Asahan, dan Daerah Irigasi Pekan Kemis Kabupaten Serdang Bedagai dengan total panjang penanganan Jaringan Irigasi 26.873 meter;

3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tangguh Bencana **"Istana"** melalui sosialisasi dan pelatihan, kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 450 orang pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;

4) Pembangunan Hunian Nyaman dan Ekonomis **"Humanis"** melalui penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi seluas 478,81 hektar dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan dan kualitas Kawasan Pemukiman, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 30 unit di Kabupaten Labuhanbatu, 18 unit di Kabupaten Deli Serdang, 22 unit di Kota Tanjungbalai, 22 unit di Kota Tebing Tinggi, 20 unit di Kota Medan dan 53 unit di Kabupaten Langkat.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

1) Pembentukan *Planning Innovation Corner* **"P I C"** melalui *Coaching Clinic Inovasi* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif pada 12 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Timur;
2) *Event North Sumatera Innovation Forum* melalui kegiatan Lomba Inovasi, *Sharing*, *Co-Creation And Innovation Meetup*, Diskusi Inovasi dan Pameran Inovasi dalam rangka membangun budaya inovasi serta pemberdayaan masyarakat inovatif.

5.3.2 Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota meliputi:

1) Kabupaten Tapanuli Tengah
2) Kabupaten Tapanuli Selatan
3) Kabupaten Mandailing Natal
4) Kabupaten Padang Lawas
5) Kabupaten Padang Lawas Utara
6) Kota Sibolga
7) Kota Padangsidimpuan

Rencana Kegiatan Unggulan Tahun 2025 di Wilayah Pantai Barat Berdasarkan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Pelaksanaan **"SMA Terbuka"** di 3 (Tiga) Kabupaten/Kota yaitu Padang Lawas, Tapanuli Tengah dan Padangsidimpuan;
2) Rehabilitasi Sekolah pada 18 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padangsidimpuan;
3) Pembangunan Titik Baca Digital Sumut **"Tiba di Sumut"** sebanyak 11 (sebelas) titik pada seluruh Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
4) Optimalisasi Layanan Mobil Kesehatan Mental "**Dr. Ildrem Menyapa"** bagi Peserta Didik Menengah dan Masyarakat pada 4 Kabupaten/Kota yaitu Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Padangsidimpuan dan Sibolga;
5) Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **(Emak)** melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya **(Kelapa Muda)** dan Toko Online Perempuan **(Top Sumut)** sebanyak 140 orang pada 7 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
6) Pemberian Makanan Pendamping Asi Balita **(Pelita Sumut)** pada 3.300 Balita di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Padangsidimpuan.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

1) Pemberian Bantuan Usaha Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Produktif **"MAPRO"** sebanyak 75 Kelompok Usaha Bersama **"KUBE"** dan 84 Usaha Ekonomi Perorangan **"UEP"** di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal dan Kota Sibolga;
2) Pelaksanaan Kegiatan *Entrepreneurs* Produktif, Adaptif, Kolaboratif **"Proaktif"** melalui Inkubasi 100 Wirausahawan Baru di 7 Kabupaten/ Kota sekawasan Pantai Barat;
3) Fasilitasi **"Klinik Bisnis"** bagi 120 Koperasi, UMKM/IKM di 7 Kabupaten/Kota sekawasan Pantai Barat melalui Pelatihan dan

Pendampingan UMKM Digital (***Go-Digital/Go-Export***), Fasilitasi Sertifikasi Haki, Industri Rumah Tangga, Sertifikasi Halal dan BPOM serta Akses Permodalan melalui Fasilitasi Jaminan Kredit Berbunga Rendah oleh PT. Jamkrida Sumut;

4) Pengembangan Investasi Sumut Hebat **"ISBAT"** melalui Pelaksanaan *North Sumatra Investment Business Forum* yang menghasilkan *Letter Of Intern* (Loi) dalam rangka peningkatan Investasi Sumatera Utara dengan melibatkan 7 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
5) Peningkatan Pariwisata Sumut dengan Gagasan **"Hebat"** (*Heritage*, Berkelanjutan dan Atraktif) melalui pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya pada 7 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
6) **Raon Raon di Sumut Aja**, meliputi penyusunan *Kalender Of Event* dan *Travel Pattern*, Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi di Sumut Aja, Pelaksanaan Travel *Fair,* Pelaksanaan Event Nasional dan Internasional;
7) Gerakan Sumut Menanam **(Gema)** melalui pemberian bantuan benih padi sebanyak 200 ton dan bibit cabai untuk 25 hektar pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan, bantuan benih jagung 6 ton pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal, benih kedelai sebanyak 4 ton pada Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, benih bawang merah 35 ton Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Dan Kota Padangsidimpuan, bantuan pupuk organik 120 ton pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan serta pemberian alsintan sebanyak 224 unit pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan;
8) Pembinaan Petani Muda Milenial **(PMM)** melalui Modernisasi Sistem Pertanian, Pemberdayaan dan Pemberian Kredit Usaha Mikro sebanyak 120 Petani pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan;
9) Peningkatan Produksi Hasil Ternak **(Tanduk Ternak)** melalui pemberian bibit ternak sapi potong sebanyak 200 ekor pada Kawasan Pantai Barat, bibit ternak kambing sebanyak 300 ekor pada Kawasan Pantai Barat, bibit ternak domba sebanyak 300 ekor pada Kawasan Pantai Barat, bibit ternak itik 1.200 ekor pada Kawasan Pantai Barat;
10) Kampanye Publik Gerakan Pembangunan Hijau Sumatera Utara *Green Growth Movement* **(GGM)** melalui rehabilitasi lahan seluas 263,8 ha pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Kota Sibolga dan Padangsidimpuan, serta pengembangan 10 Kampung Iklim pada Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan;
11) Peningkatan Kawasan Konservasi Kelautan serta Budidaya Perikanan melalui penanaman mangrove sebanyak 500 batang di Kabupaten Tapanuli Tengah, rehabilitasi terumbu karang buatan sebanyak 350 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta pembangunan 1 unit *Cold Storage* di Kota Sibolga.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

1) Pembangunan Jalan Terhubung **"Jantung"** melalui peningkatan struktur jalan sepanjang 49 Km di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Mandailing Natal;

2) Integrasi Sistem Irigasi **"Istri"** melalui peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 79 unit pada Daerah Irigasi Mombang Boru Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Irigasi Roburan Maga Kabupaten Mandailing Natal dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Siborna Kabupaten Padang Lawas, Daerah Irigasi Pandurungan/Sitandingan Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Irigasi Sigorbus Kabupaten Padang Lawas, Daerah Irigasi Padang Garugur dan Daerah Irigasi Balakka Sitongkon Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Daerah Irigasi Terusan Kabupaten Mandailing Natal dengan total panjang penanganan Jaringan Irigasi 13.355 meter;
3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tangguh Bencana **"Istana"** melalui Sosialisasi dan Pelatihan, Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dengan target 350 orang di 20 Desa pada 7 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
4) Pembangunan Hunian Nyaman dan Ekonomis **"Humanis"** melalui Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi seluas 259,21 hektar dalam bentuk Peningkatan Jalan Lingkungan dan Kualitas Kawasan Pemukiman, dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 50 unit di Kabupaten Padang Lawas Utara, 47 unit di Kota Padangsidimpuan, dan 50 unit di Kota Sibolga.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

1) Pembentukan *Planning Innovation Corner* **"P I C"** melalui *Coaching Clinic Inovasi* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif pada 7 Kabupaten/Kota di Zona Pantai Barat;
2) *Event North Sumatera Innovation Forum* melalui kegiatan Lomba Inovasi, *Sharing*, *Co-Creation And Innovation Meetup*, Diskusi Inovasi dan Pameran Inovasi dalam Rangka Membangun Budaya Inovasi Serta Pemberdayaan Masyarakat Inovatif.

5.3.3. Wilayah Dataran Tinggi

Wilayah Dataran Tinggi terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota meliputi:

1) Kabupaten Karo
2) Kabupaten Dairi
3) Kabupaten Pakpak Bharat
4) Kabupaten Humbang Hasundutan
5) Kabupaten Samosir
6) Kabupaten Tapanuli Utara
7) Kabupaten Toba
8) Kabupaten Simalungun
9) Kota Pematang Siantar

Rencana Kegiatan Unggulan Tahun 2025 di Wilayah Dataran Tinggi Berdasarkan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Pelaksanaan "**SMA Terbuka"** pada Kabupaten Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Simalungun;
2) Pembangunan Ruang Kelas Baru **"RKB"** sebanyak 5 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan pada Kabupaten Simalungun, Humbang Hasundutan Dan Tapanuli Utara serta Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 6 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan pada Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Simalungun;

3) Pembangunan Titik Baca Digital Sumut **"Tiba di Sumut"** sebanyak 16 Titik pada Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi, Toba dan Pematang Siantar;
4) Pemberian Makanan Pendamping Asi Balita Sumut **"Pelita Sumut"** untuk 1.100 Balita pada Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi dan Toba;
5) Optimalisasi Layanan Mobil Kesehatan Mental "**Dr. Ildrem Menyapa"** bagi peserta Didik Menengah pada Kabupaten Karo, Pakpak Bharat Dan Samosir;
6) Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak **"Emak"** melalui Portal Edukasi dan Layani **(Peduli Kamu)** sebanyak 280 orang pada Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

1) Pelaksanaan kegiatan *Enterpreneurs Produktif, Adaptif, Kolaboratif* **"Proaktif"** melalui Inkubasi 40 Wirausahawan Baru di 9 Kabupaten/Kota sekawasan Dataran Tinggi;
2) Pembentukan 58 **"Klinik Bisnis"** bagi Koperasi pada Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Kota Pematang Siantar;
3) Pengembangan Investasi Sumut Hebat **"Isbat"** melalui pelaksanaan *North Sumatra Investment Business Forum* yang menghasilkan *Letter Of Intern (Loi)* dalam rangka peningkatan investasi Sumatera Utara dengan melibatkan 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi;
4) Peningkatan Pariwisata Sumut dengan gagasan **"Hebat"** (Heritage, Berkelanjutan Dan Atraktif) melalui pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya pada Kabupaten Simalungun, Karo. Pelaksanaan Event Internasional pada Kabupaten Toba, Samosir, Dairi, Karo Dan Simalungun dan Pelatihan SDM Pariwisata pada Kabupaten Karo, Simalungun, Toba Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Kota Pematang Siantar;
5) Penetapan *Calender Of Event* Pariwisata dan Travel Patern **"Raon-Raon Di Sumut Aja"**;
6) Gerakan Sumut Menanam **"Gema"** melalui pemberian bantuan benih padi sebanyak 120 ribu kg pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi, bantuan benih jagung 20.250 kg, benih bawang merah 70 ton, benih cabai 700 *sachet* pada Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi dan Pakpak Bharat, Bantuan Benih Kentang seluas 60 ha pada Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun dan Humbang Hasundutan, bantuan benih jahe seluas 35 ha pada Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir dan Humbang Hasundutan, Bantuan Benih Kunyit seluas 20 ha pada Kabupaten Simalungun dan Samosir, bantuan benih pupuk organik 180 ton pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi serta pemberian alsintan sebanyak 420 unit pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi dan Pengembangan *Urban Farming* pada Kota Pematang Siantar;
7) Pembinaan Petani Muda Milenial **"PMM"** melalui Modernisasi Sistem Pertanian, Pemberdayaan dan Pemberian Kredit Usaha Mikro sebanyak 85 petani pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi;
8) Peningkatan Produksi Hasil Ternak **"Tanduk Ternak"**, melalui pemberian bibit ternak sapi potong sebanyak 10 ekor, bibit ternak kerbau 10 ekor pada Kabupaten Humbahas, bibit ternak kambing 10 ekor, bibit ternak ayam 1.600 ekor pada Kabupaten Dairi, bibit ternak itik 1.200 ekor pada Kabupaten Dairi dan Toba, bibit ternak babi 20 ekor di Kabupaten Simalungun dan bantuan alsintan sebanyak 2 unit serta

Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Ternak Sapi Perah Terintegrasi pada Kabupaten Karo;

9) Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan **"Induksi Perkebunan"**, melalui pemberian 150 ribu batang benih kopi dan pupuk pada Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan, 60 ribu batang benih kakao dan pupuk pada Kabupaten Dairi dan Karo, 5 ribu batang benih pinang dan pupuk pada Kabupaten Simalungun, 245 ribu kg pupuk tembakau pada Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Karo dan Simalungun, serta alsintan sebanyak 26 unit pada Kabupaten Samosir, Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan dan Toba;
10) Kampanye Publik Gerakan Pembangunan Hijau Sumatera Utara *(**Green Growth Movement**)* **"GGM"** melalui rehabilitasi lahan seluas 458,75 ha pada Kabupaten Karo, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, dan pengembangan 30 Kampung Iklim pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

1) Pembangunan Jalan Terhubung **"Jantung"** melalui peningkatan struktur jalan sepanjang 46,9 Km pada Kabupaten Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat;
2) Integrasi Sistem Irigasi **"Istri"** melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam bentuk rehabilitasi intek, saluran pengatur dan pengukur sebanyak 10 unit pada Kabupaten Simalungun dan Humbang Hasundutan, Operasi Pemeliharaan pada Jaringan Primer sepanjang 38.102 meter dan Jaringan Sekunder sepanjang 26.470 meter pada Kabupaten Simalungun dan Humbang Hasundutan, serta pembinaan bagi Kelompok Petani Pengguna Pemakai Air (P3A) sebanyak 85 kelompok pada Kabupaten Simalungun dan Humbang Hasundutan;
3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tangguh Bencana **"Istana"** melalui sosialisasi dan pelatihan, kesiapsiagaan terhadap bencana pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi;
4) Pembangunan Hunian Nyaman, Sehat, dan Ekonomis **"Humanis"** melalui penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Seluas 226,33 ha dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan dan kualitas kawasan pemukiman pada Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat dan Toba.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

1) Pembentukan *Planning Innovation Corner* **"PIC"** melalui *Coaching Clinic* Inovasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif Pada 9 Kabupaten/Kota di Zona Dataran Tinggi;
2) *Event North Sumatera Innovation Forum* melalui kegiatan Lomba Inovasi, *Sharing, Co-Creation And Innovation Meetup*, Diskusi Inovasi dan Pameran Inovasi dalam rangka membangun budaya inovasi serta Pemberdayaan Masyarakat Inovatif;
3) Mempertahankan WTP selama 10 kali berturut **"Ten Times, Still Flys" WTP;**
4) Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Terpadu **"Sumut Prima"** melalui pembangunan Sistem Perkantoran Terpadu Kantor Gubernur.

5.3.4. Kepulauan Nias

Kepulauan Nias terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan Kota meliputi:

1) Kabupaten Nias
2) Kota Gunungsitoli
3) Kabupaten Nias Utara
4) Kabupaten Nias Barat
5) Kabupaten Nias Selatan.

Rencana Kegiatan Unggulan Tahun 2025 di Wilayah Kepulauan Nias berdasarkan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1) Pelaksanaan **"SMA Terbuka"** pada Kabupaten Nias Selatan;
2) Pembangunan Ruang Kelas Baru **"RKB"** dan Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 4 Sekolah Menengah Atas pada Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan;
3) Pembangunan Titik Baca Digital Sumut **"Tiba di Sumut"** sebanyak 4 Titik pada Kota Gunungsitoli;
4) Pemberian Makanan Pendamping Asi Balita Sumut **"Pelita Sumut"** untuk 2.200 balita pada Kabupaten Nias dan Nias Selatan;
5) Optimalisasi Layanan Mobil Kesehatan Mental "**Dr. Ildrem Menyapa"** bagi peserta Didik Menengah pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

1) Pelaksanaan kegiatan *Enterpreneurs Produktif, Adaptif, Kolaboratif* **"Proaktif"** melalui inkubasi 12 Wirausahawan Baru di 5 Kabupaten/Kota sekawasan Kepulauan Nias;
2) Pembentukan **"Klinik Bisnis"** bagi 15 Koperasi, UMKM/IKM di 5 Kabupaten/Kota sekawasan Kepulauan Nias melalui Pelatihan dan Pendampingan UMKM Digital ***(Go-Digital/Go-Export),*** Fasilitasi Sertifikasi Haki, Industri Rumah Tangga, Halal dan BPOM serta akses permodalan melalui fasilitasi Jaminan Kredit Berbunga Rendah oleh PT. Jamkrida Sumut;
3) Pengembangan Investasi Sumut Hebat **"Isbat"** melalui pelaksanaan North Sumatra Investment Business Forum yang menghasilkan *Letter Of Intern (Loi)* dalam rangka peningkatan Investasi Sumatera Utara dengan melibatkan 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
4) Peningkatan Pariwisata Sumut dengan gagasan **"Hebat"** *(Heritage, Berkelanjutan dan Atraktif)* melalui pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
5) Penetapan *Calender Of Event* Pariwisata dan Travel Patern **"Raon-Raon Di Sumut Aja"**;
6) Gerakan Sumut Menanam **"Gema"** melalui pemberian bantuan benih padi sebanyak 107 ribu kg, dan benih cabai sebanyak 250 sachet pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias, bantuan benih jagung 6 ribu kg pada Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan, bantuan benih pupuk organik 100 ton pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias serta pemberian alsintan sebanyak 187 unit 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
7) Pembinaan Petani Muda Milenial **"PMM"** melalui Modernisasi Sistem Pertanian, Pemberdayaan dan Pemberian Kredit Usaha Mikro sebanyak 150 Petani Muda pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
8) Peningkatan Produksi Hasil Ternak **"Tanduk Ternak"**, melalui pemberian bibit ternak sapi potong sebanyak 20 ekor pada Kabupaten

Nias dan Nias Selatan, bibit ternak kambing 20 ekor pada Kabupaten Nias, dan bibit ternak babi 20 ekor di Kabupaten Nias;

9) Kampanye Publik Gerakan Pembangunan Hijau Sumatera Utara *(**Green Growth Movement**)* **"GGM"** melalui rehabilitasi lahan seluas 54,69 ha pada 5 Kabupaten, dan pengembangan 1 lokasi Kampung Iklim pada Kabupaten Nias Utara;
10) Peningkatan Kawasan Konservasi Kelautan serta Budidaya Perikanan melalui pemberian 1 unit *Cold Storage* pada Kabupaten Nias;
11) Pemberian Bantuan Usaha Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Produktif **"MAPRO"** sebanyak 85 Kelompok Usaha Bersama **"KUBE"** dan 92 Usaha Ekonomi Perorangan **"UEP"** di Kota Gunungsitoli.

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

1) Pembangunan Jalan Terhubung **"Jantung"** melalui peningkatan struktur jalan sepanjang 20.1 Km pada Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat;
2) Integrasi Sistem Irigasi **"Istri"** kewenangan provinsi melalui peningkatan sarana dan prasarana dalam bentuk pembuatan Pintu Penguras, Perbaikan Bangunan Pengatur dan Pembuatan Lining Saluran sepanjang 1800 meter pada Daerah Irigasi Gido Zebua di Kepulauan Nias;
3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Tangguh Bencana **"Istana"** melalui Sosialisasi dan Pelatihan, Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
4) Pembangunan Hunian Nyaman, Sehat, dan Ekonomis **"Humanis"** melalui penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi seluas 95,90 ha dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan dan kualitas Kawasan Pemukiman, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 50 unit pada Kepulauan Nias.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif

1) Pembentukan *Planning Innovation Corner* **"PIC"** melalui *Coaching Clinic Inovasi* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif pada 5 Kabupaten/Kota di Zona Kepulauan Nias;
2) *Event North Sumatera Innovation Forum* melalui Kegiatan Lomba Inovasi, *Sharing*, *Co-Creation And Innovation Meetup*, Diskusi Inovasi dan Pameran Inovasi dalam rangka membangun budaya inovasi serta pemberdayaan Masyarakat Inovatif.

5.4 Proyeksi Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya disparitas kemajuan pembangunan antar daerah. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk Kabupaten/Kota difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah melalui beberapa indikator makro.

Tabel 5.2 Proyeksi Target Makro Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	GINI RATIO (POIN)	KEMISKINAN (%)	IPM (POIN)
		2025	2025	2025	2025	2025
1	GUNUNGSITOLI	5.70 – 5.96	3.65 – 3.58	0,307 - 0,297	12.50 - 10.56	71.70 - 72.00
2	NIAS	5.42 – 5.65	1.97 – 1.59	0,277 - 0,267	12.96 - 11.50	65.10 - 65.40
3	NIAS BARAT	4.72 – 4.88	0.78 – 0.75	0,207 - 0,197	19.90 - 18.64	64.30 - 64.80
4	NIAS SELATAN	3.76 – 3.86	3.25 – 3.03	0,260 - 0,250	15.53 - 14.81	65.00 - 65.50
5	NIAS UTARA	4.87 – 5.05	1.59 – 0.96	0,47 - 0,227	18.96 - 16.38	64.60 - 64.90
6	KARO	4.35 – 4.49	3.07 – 3.39	0,239 - 0,229	6.93 - 4.99	76.30 - 76.60
7	DAIRI	3.98 – 4.10	1.11 – 1.03	0,240 - 0,230	6.94 - 5.08	74.00 - 74.50
8	PAKPAK BHARAT	5.66 – 5.91	0.35 – 0.23	0,250 - 0,240	5.97 - 4.55	69.90 - 70.30
9	TAPANULI UTARA	4.11 – 4.24	1.16 – 1.05	0,261 - 0,251	6.98 - 5.60	75.50 - 76.00
10	HUMBANG HASUNDUTAN	4.80 – 4.97	0.63 – 0.48	0,255 - 0,245	7.94 – 6.58	71.30 - 71.70
11	SIMALUNGUN	5.26 – 5.47	5.19 – 5.05	0,294 - 0,284	6.97 – 5.41	74.80 - 75.20
12	TOBA	3.85 – 3.95	1.10 - 1.00	0,294 - 0,284	7.01 – 6.03	76.80 - 77.10
13	SAMOSIR	5.60 – 5.85	1.01 – 0.88	0,250 - 0,240	10.21 – 9.17	72.80 - 73.10
14	PEMATANGSIANTAR	4.73 – 4.90	7.55 - 6.52	0,328 - 0,318	6.09 - 5.03	81.20 - 81.50
15	LANGKAT	5.13- 5.33	6.26 – 6.23	0,256 - 0,246	7.60 – 6.78	73.30 - 73.80
16	BINJAI	4.90 - 5.08	5.84 – 5.58	0,317 - 0.307	3.30 – 2.36	78.20 - 78.70
17	MEDAN	6.07 – 6.37	8.45 – 8.23	0,372 - 0,362	7.41 - 6.87	82.60 - 82.90
18	DELI SERDANG	5.20 – 5.41	8.26 – 7.97	0,294 - 0,284	2.90 – 1.80	77.70 - 78.10
19	SERDANG BEDAGAI	5.05 - 5.24	4.69 - 4.62	0,224 - 0,214	6.13 - 5.89	72.70 - 73.00
20	TEBING TINGGI	4.82 – 5.00	6.09 - 5.94	0,316 - 0,306	8.40 - 7.90	77.30 - 77.60
21	BATU BARA	3.57 – 3.66	5.75 - 5.52	0,254 - 0,244	10.20 - 9.58	70.80 - 71.20
22	TANJUNG BALAI	5.39 – 5.62	4.26 – 4.00	0,237 - 0,227	10..51 – 9.29	71.00 - 71.50
23	ASAHAN	5.39 - 5.61	5.99 – 5.85	0,259 - 0,249	6.70 – 5.32	72.40 - 72.90
24	LABUHAN BATU UTARA	5.51 - 5.74	4.29 – 3.96	0,237 - 0,227	8.11 – 7.19	73.80 - 74.20
25	LABUHAN BATU	5.09 – 5.29	5.54 – 5.41	0,243 - 0,233	6.75 – 5.65	74.00 - 74.50
26	LABUHAN BATU SELATAN	5.42 – 5.65	3.10 - 2.76	0,230 - 0,220	7.10 - 6.54	73.20 - 73.70
27	TAPANULI TENGAH	4.33 - 4.47	7.65 - 7.49	0,240 - 0,230	9.76 – 8.22	71.40 - 71.90
28	SIBOLGA	4.80 - 4.97	6.32 – 5.79	0,245 - 0,235	10.11 – 9.43	75.80 - 76.30
29	TAPANULI SELATAN	7.25 – 7.68	3.10 – 2.79	0,218 - 0,208	5.70 - 4.50	72.00 - 72.50
30	PADANGSIDIMPUAN	4.93 - 5.12	7.38 – 7.19	0,266 - 0,256	5.40 – 4.80	77.10 - 77.60
31	PADANG LAWAS UTARA	6.13 – 6.43	4.31 – 4.25	0,240 - 0,230	7.21 - 6.17	71.90 - 72.30
32	PADANG LAWAS	6.05 – 6.34	5.60 – 5.45	0,224 - 0,214	6.32 – 5.34	70.90 - 71.30
33	MANDAILING NATAL	5.86 – 6.13	7.26 – 7.07	0,248 - 0,238	7.48 – 6.50	69.20 - 69.60
SUMATERA UTARA		**5.20 - 5.40**	**5.56 - 5.27**	**0.305-0.303**	**6.96 - 7.46**	**75.39**

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

BAB VI
RENCANA KERHJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pembangunan daerah tahun 2025 merupakan penjabaran pada tahun kedua RPD Tahun 2024-2026 dengan kebijakan pembangunan tahun 2025 yang diarahkan pada tema "Peningkatan kualitas Pembangunan Dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan" dengan prioritas daerah pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai berikut:

a. **Prioritas I**. dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b. **Prioritas II**. dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja mendukung keselarasan prioritas nasional dan prioritas pembangunan daerah;
c. **Prioritas III**. dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	Tahun 2023 LRA Unaudited (Rp)	Tahun 2024 APBD (Rp)	Tahun 2025 Proyeksi (Rp)
Pendapatan Daerah	**2.669.305.845.332**	**4.609.337.519.358**	**5.261.864.726.570**
Pendapatan Asli Daerah	7.226.109.603.501	8.972.327.385.958	9.507.662.949.275
Pajak Daerah	6.667.891.089.708	8.057.906.541.491	8.654.662.949.275
Retribusi Daerah	33.234.330.583	36.959.862.067	43.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	299.801.727.761	331.891.359.887	450.000.000.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	225.182.455.449	545.569.622.513	360.000.000.000
Pendapatan Transfer	5.443.196.241.831	5.637.010.133.400	5.754.201.777.295
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.948.851.959	25.568.000.000	23.568.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	1.076.160.606.521	300.000.000.000	200.000.000.000
Total Penerimaan	**13.745.466.451.852**	**14.909.337.519.358**	**15.461.864.726.570**
Dikurangi			
Belanja	**7.871.328.469.064**	**9.831.826.988.478**	**10.611.789.172.916**
Belanja Pegawai	3.291.794.526.060	3.621.079.486.865	3.674.668.365.169
Belanja Hibah	1.801.731.896.760	3.252.854.579.353	3.317.620.807.747
Belanja Bantuan Sosial	15.820.000.000	15.612.000.000	20.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	57.501.409.671	142.280.922.260	199.500.000.000

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.704.480.636.573	2.800.000.000.000	3.400.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	**4.698.000.000**	**100.000.000.000**	**50.000.000.000**
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**5.869.439.982.789**	**4.977.510.530.880**	**4.800.075.553.654**

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, obligasi daerah, dana umat, serta hibah.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD/ KPBU/CSR/Hibah/Pinjaman

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya.

6.1.1. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatra Utara yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2025 yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2-5,4 persen, tingkat kemiskinan 6,96-7,46, TPT sebesar 5,27-5,56 persen, IMM sebesar 0,53, Rasio Gini 0,303-0,305 dan Intensitas Gas Rumah Kaca sebesar 1 persen. Selain Intervensi Prioritas Nasional di Provinsi Sumatera Utara, dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025, terdapat pula rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 diinput dalam Aplikasi Krisna Selaras. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2024 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara pada bidang :

I. Bidang Dak Fisik Tahun 2025:
   1. Bidang Pendidikan
      - Sub Bidang SMA (Dinas Pendidikan)
      - Sub Bidang SMK (Dinas Pendidikan)
      - Sub Bidang SLB (Dinas Pendidikan)
   2. Bidang Kesehatan dan KB
      - Sub Bidang Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan (RS Haji dan RS Jiwa Ildrem)

3. Bidang Konektivitas
   - Sub Bidang Jalan - Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri (Dinas PUPR)
   - Sub Bidang Jalan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) (Dinas PUPR)
   - Sub Bidang Transportasi Perairan - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) (Dinas Perhubungan)
4. Bidang Air Minum
   - Sub Bidang Air Minum (Dinas PUPR)
5. Bidang Irigasi
   - Sub Bidang Irigasi (Dinas PUPR)
   - Sub Bidang Irigasi - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) (Dinas PUPR)
6. Bidang Pangan Akuatik
   - Sub Pangan Akuatik - Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) (Dinas Kelautan dan Perikanan)
7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
   - Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas P3AKB)

II. Jenis Dak Non Fisik Tahun 2025:
1. Jenis Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) (Dinas Koperasi dan UMKM)
2. Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya (UPT Museum dan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
3. Jenis Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah)
4. Jenis Bantuan Operasional Kesehatan (Dinas Kesehatan)
5. Jenis Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (Dinas P3AKB)
6. Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas P3AKB)
7. Jenis Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral)

6.1.2. Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan. Daftar Proyek KPBU di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Proyek Prioritas Nasional degan Strategi KPBU

Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Sumber
Jalan Tol Trans Sumatera	Sumatera utara	KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun)	KPBU
Perbaikan aksesibilitas, atraksi dan Amenitas DPP Danau Toba dan sekitarnya		KPBU
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan APBN)	Sumatera utara	KPBU
Pembangunan Jalur KA Pematang Siantar - Danau Toba (Dukungan KPBU)	Sumatera utara	KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Sumatera Utara	KPBU
Pengembangan Sistem Angkutan Umum massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:		KPBU
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Rel (KPBU) berbasis Rel (perkotaan)	WM Medan	KPBU
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Medan Berbasis Jalan (KPBU) berbasis jalan (perkotaan)	WM Medan	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera (Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-Medan) yang dibangun (km)	Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara	KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera (Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-Pekanbaru) yang dibangun (km))	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	KPBU
Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	KPBU
Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	WM Medan, Provinsi Sumatera Utara	KPBU
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Sumatera Utara		KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera (Panjang Jalan Tol Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga yang dibangun (km)	Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara	KPBU

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah memedomani RPD Provinsi Sumatera Utara dan telah dikelompokkan berdasarkan Bidang urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan serta Unsur Pemerintahan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh Perangkat Daerah pada Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2025, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kegiatan strategis daerah. Adapun rencana program prioritas Perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

1. Dinas Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Urusan Kesehatan

2. Dinas Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. UPTDK. RSU Haji Medan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. UPTDK. RSJ. Prof. DR.M. ILDREM

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c. Program Penataan Bangunan Gedung
d. Program Penyelenggaraan Jalan
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

6. Perumahan dan Kawasan Permukiman

6.1 Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan
b. Program Kawasan Permukiman
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

6.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
d. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
e. Program Penatagunaan Tanah

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program Penanggulangan Bencana

9. Dinas Sosial

Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
c. Program Rehabilitasi Sosial
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Penanganan Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

10. Dinas Ketenagakerjaan

10.1 Urusan Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
d. Program Hubungan Industrial
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

10.2 Urusan Transmigrasi

a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

11.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
f. Program Perlindungan Khusus Anak

11.2 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

12. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

12.1 Urusan Pangan

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

12.2 Urusan Pertanian

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
d. Program Penyuluhan Pertanian

13. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

13.1 Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
i. Program Pengelolaan Persampahan

13.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
a. Program Pengelolaan Hutan
b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

14.1 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Program Pendaftaran Penduduk
b. Program Pencatatan Sipil
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

14.2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
a. Program Penataan Desa
b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

15. Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan
a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
b. Program Pengelolaan Pelayaran
c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

16.1 Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

16.2 Urusan Statistik
a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

16.3 Urusan Persandian
a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
b. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
d. Program Pengembangan UMKM
e. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Penanaman Modal
a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b. Program Promosi Penanaman Modal
c. Program Pelayanan Penanaman Modal

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

19. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

20. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

20.1 Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan
b. Program Pembinaan Sejarah
c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
e. Program Pengelolaan Permuseuman

20.2 Urusan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b. Program Pemasaran Pariwisata
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

21. Dinas Perpustakaan Dan Arsip

21.1 Urusan Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

21.2 Urusan Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip
b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

C. Urusan Pilihan

22. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
d. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan
e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

23. Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Urusan Pertanian

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
e. Program Perizinan Usaha Pertanian
f. Program Penyuluhan Pertanian

24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

24.1 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

24.2 Urusan Bidang Perdagangan

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
c. Program Pengembangan Ekspor
d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
f. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
g. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
h. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
i. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

24.3 Urusan Bidang Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

25. Sekretariat Daerah

25.1 Biro Umum

a. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

25.2 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

a. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

25.3 Biro Perekonomian

a. Program Perekonomian Dan Pembangunan

25.4 Biro Kesejahteraan Rakyat

a. Program Kesejahteraan Rakyat

25.5 Biro Organisasi

a. Program Penataan Organisasi

25.6 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa

a. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

25.7 Biro Administrasi Pembangunan

a. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

25.8 Biro Hukum

a. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

25.9 Biro Administrasi Pimpinan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

26. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

28. Badan Keuangan Dan Aset Daerah

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

29. Badan Pendapatan Daerah
a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

30. Badan Kepegawaian
a. Program Kepegawaian Daerah,

31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

32. Badan Penghubung
a. Program Pelayanan Penghubung

33. Inspektorat Daerah Provinsi
a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

F. Unsur Pemerintahan Umum

34. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Di samping program-program yang menjadi tupoksi Perangkat Daerah, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan pendukung operasional Perangkat Daerah.

Alokasi Pagu Indikatif Pagu Indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2025, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 (Jumlah Program, kegiatan, sub kegiatan pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi).

Tabel 6.2
Rencana Pagu Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Nama OPD	Jumlah			PAGU
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	DINAS PENDIDIKAN	3	11	32	3.782.824.772.955
2	DINAS KESEHATAN	5	19	98	805.298.824.307
3	UPTDK RSU HAJI MEDAN				214.321.641.890
4	UPTDK RSJ Prof. Dr. M. Ildrem				79.204.376.199
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	25	106	2.417.008.441.057

No.	Nama OPD	Jumlah			PAGU
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9	19	47	86.192.739.864
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	12	43	66.566.541.520
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	2	11	46	37.948.716.192
7	DINAS SOSIAL	7	19	46	113.802.201.759
8	DINAS KETENAGAKERJAAN	7	23	46	75.305.230.854
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	10	22	50	26.647.435.212
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	7	17	37	261.756.359.108
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14	23	83	164.158.846.781
12	DUNAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATAATAN SIPIL	9	20	51	42.131.416.897
13	DINAS PERHUBUNGAN	4	13	21	102.964.944.218
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	12	45	67.963.517.972
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH	5	10	23	65.266.679.675
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	14	30	27.785.898.726
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	4	13	39	287.795.255.822
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	9	24	62	83.557.789.066
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6	17	52	47.854.622.787
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	19	50	61.545.594.832
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	7	17	29	98.074.016.793

No.	Nama OPD	Jumlah			PAGU
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	12	23	30	89.205.177.882
23	SETDA PROVSU	17	67	155	803.820.542.356
a.	BIRO UMUM	2	10	27	341.857.183.009
b.	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2	7	16	6.017.236.034
c.	BIRO PEREKONOMIAN	2	7	17	5.609.756.215
d.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	3	13	408.767.274.941
e	BIRO ORGANISASI	2	10	19	6.002.561.899
f.	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2	6	15	5.829.914.530
g.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2	7	15	4.757.503.915
h.	BIRO HUKUM	2	7	15	6.079.111.813
i.	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1	8	18	18.900.000.000
26	SEKRETARIAT DPRD	2	14	34	543.040.728.736
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	13	45	80.829.006.592
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	14	82	4.296.743.535.015
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	8	23	457.257.489.865
30	BADAN KEPEGAWAIAN	2	11	42	42.850.517.838
31	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	9	31	37.158.348.735
32	BADAN PENGHUBUNG	2	8	25	42.291.703.212
33	INSPEKTORAT	3	12	44	82.432.268.731
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	11	37	87.352.561.211
TOTAL					15.285.432.726.570

Dalam Mewujudkan tercapainya Prioritas Pembangunan Sumatera Utara, program-program prioritas tersebut dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dimana rencana pagu pendanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Pagu pendanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2025

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)	PAGU	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan SMA/SMK	50.000.000.000	Dinas Pendidikan
Pembangunan ruang kelas baru "RKB" SMA/SMK	16.606.080.000	
Rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK	32.140.800.000	
Pembangunan SMA Plus Tebing Tinggi	10.000.000.000	
Pelaksanaan SMA Terbuka	3.406.387.390	
Implementasi Teaching factory Link and Match Vokasi dan penguatan pendidikan universal berbasis kerjasama	2.000.000.000	
	-	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /EMAK /Edukasi Perempuan dan Anak	3.792.275.229	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Optimalisasi Penurunan Stunting	2.000.000.000	
Pembangunan Titik baca Digital Sumut "TIBADISUMUT"	11.731.501.138	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pengembangan sarana dan prasarana serta layanan kesehatan	30.000.000.000	UPTDK. RSU. Haji Medan
Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	20.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Pengembangan daya saing keolahragaan	50.000.000.000	
Pengembangan sarana prasarana olahraga kawasan Sport Centre	70.000.000.000	
Pengembangan Daya saing atlet paralympic	10.000.000.000	
Pemberian makanan pendamping ASI " PELITA SUMUT"	12.409.409.815	Dinas Kesehatan
Optimalisasi Penurunan Stunting	20.000.000.000	
Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi	223.794.705.161	
Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	12.159.473.867	
Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak	6.650.105.606	
Bantuan Operasional Kesehatan	14.759.528.000	
Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	5.850.000.033	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Optimalisasi upaya Penurunan Bahaya Narkoba pada usia remaja	5.000.000.000	
Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi	6.108.000.420	
KUBE UEP	-	
Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin / MAPRO	15.100.000.567	Dinas Sosial
Penurunan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	25.000.000.000	
Peningkatan Pencapaian Penilaian Pembangunan Daerah	1.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan,

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)	PAGU	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Reformasi Birokrasi RB	1.000.000.000	Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan Nilai SAKIP	2.000.000.000	
Peningkatan Capaian Indeks Inovasi Daerah	3.000.000.000	
Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.000.000	
Pembinaan Dan Pengawasan	8.600.000.000	Inspektorat Daerah Provinsi
SPIP		
MCP KPK	1.000.000.000	
Peningkatan nilai SAKIP	1.500.000.000	
Peningkatan nilai RB	1.000.000.000	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.000.000.000	
Indeks Integritas Nasional	1.500.000.000	
Pengendalian Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah	2.000.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan enterpreneur PROAKTIF (Produktif, Adaptif dan Kolaboratif)	8.250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
Optimalisasi Peran Difabel dalam dunia kerja	2.000.000.000	
IPRO *Revitalisasi BLK*	7.053.125.000	
Pelaksanaan Kegiatan enterpreneur PROAKTIF (Produktif, Adaptif dan Kolaboratif) KUMKM	28.250.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Klinik Bisnis Koperasi	3.000.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan enterpreneur PROAKTIF (Produktif, Adaptif dan Kolaboratif) IKM	4.600.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu	10.258.502.000	
Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	5.023.083.190	
Pameran Penang Fair dan Inacraft	2.400.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan IKM	6.000.000.000	
Tanduk Ternak	18.506.275.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Induksi Perkebunan	7.000.000.000	
Pembinaan PMM (Petani Muda Milenial)	4.000.000.000	
Gerakan SUMUT Menanam (GEMA) Melalui Pemberian Bantuan Benih	32.233.754.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pemberian Alsintan	35.683.600.000	
Pembangunan Rumah Kompos	5.200.000.000	
Bantuan APPO	793.000.000	
Bantuan Kendaraan Angkut Roda 3	962.000.000	
Pembangunan/ rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Kwartir	24.000.000.000	
Peningkatan Jalan Usaha Tani	19.600.000.000	
Pembinaan PMM (Petani Muda Milenial)	2.553.500.000	
PARIWISATA SUMUT DENGAN GAGASAN "HEBAT" (HERITAGE, BERKELANJUTAN DAN ATRAKTIF) Melalui Penataan Cagar Budaya	2.100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan event internasional F1 H2O	1.032.355.100	
Pelaksanaan event internasional Aqua Bike	10.449.625.700	

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)	PAGU	PERANGKAT DAERAH
CALENDER OF EVENT PARIWISATA DAN TRAVEL PATERN **"RAON-RAON" DI SUMUT AJA** Melalui Travel Fair, Calender Of Event dan Digitalisasi Promosi Pariwisata	2.358.602.388	
Pameran Event Internasional, Nias Pro, Arung Jeram, Paralayang dan Festival Danau Toba International	4.216.499.000	
Dukungan event kab/Kota	1.000.000.000	
iklan pariwisata dan Pengadaan Bahan Promosi	2.805.017.000	
Iuran Tourism Promotion Organization (TPO)	51.000.000	
Pemajuan Kebudayaan	2.000.000.000	
Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata	8.710.000.000	
Pengembangan Pokok pikiran kebudayaan daerah dan road map pengembangan ekonomi kreatif	500.000.000	
Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sadar Wisata)	1.915.000.000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.550.000.000	
Pengembangan Desa Wisata	2.000.000.000	
Strategi Penyiapan dan Penyusunan IPRO Pembangunan/ Pengembangan Proyek Investasi Strategi Provsu	3.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengembangan Investasi SUMUT HEBAT (ISBAT) melalui penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum dan Business Matching	500.000.000	
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	1.351.151.000	
Pemeliharaan Jalan	63.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di kawasan strategis provinsi (Pembangunan Jalan Terhubung- Jantung)	416.030.000.000	
Pengembangan SPAM MEBIDANG dan Perencanaan SPAM SERITI	36.000.000.000	
Pembangunan Kantor Gubernur	150.000.000.000	
Integrasi Sistem Irigasi (ISTRI)	100.000.000.000	
Penataan Sungai Perkotaan yang bersih dan indah	10.000.000.000	
Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Pasca Bencana	50.000.000.000	
Perbaikan rumah tidak layak huni	22.860.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Hunian Nyaman dan Ekonomis melalui peningkatan jalan lingkungan dan kualitas kawasan pemukiman	17.241.300.000	
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman	14.236.415.000	
Pengembangan satu data digital	1.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	9.000.000.000	
Penguatan Jaringan Intra Pemerintah	5.000.000.000	
Optimalisasi Pengamanan Sistem	1.000.000.000	
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Teknologi	7.000.000.000	
Sosialisasi dan pelatihan, kesiapsiagaan terhadap bencana (Sumut Tangguh Bencana)	1.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)	PAGU	PERANGKAT DAERAH
Rehabilitasi lahan	15.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengembangan Kampung iklim	10.400.000.000	
Penurunan Emisi GRK	7.500.000.000	
Faskes	25.000.000.000	Dinas Perhubungan
Mudik Lebaran dan Nataru	4.000.000.000	
Rehab Terminal	9.000.000.000	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (rehabilitasi mangrove)	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembangunan cold storage	3.000.000.000	
Asuransi Nelayan	3.000.000.000	
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	8.000.000.000	
Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	4.000.000.000	
Konservasi Kelautan dan KJA	5.236.666.712	
Mempertahankan Pencapaian WTP	2.000.000.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Klinik RB	1.150.000.000	Biro Organisasi
Peningkatan Nilai SAKIP	1.000.000.000	
Pelatihan ASN dalam dan luar negeri	2.000.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Assesmen Centre	3.000.000.000	Badan Kepegawaian
Beasiswa ASN Pintar (Program Doktor)	3.000.000.000	
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	5.000.000.000	Badan Pendapatan Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20.000.000.000	
Pengendalian Inflasi	1.000.000.000	Biro Perekonomian
Hibah Bansos	400.000.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat

6.2.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan daerah Sumatera Utara Dalam Dukungan Pencapaian Target Indikator Makro Pembangunan

Pencapaian target indikator makro pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 diselaraskan dalam rangka dukungan daerah yang disesuaikan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah terhadap pencapaian target makro pembangunan Nasional.
Berikut dukungan program prioritas Perangkat daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 terhadap pencapaian target indikator makro pembangunan Sumatera Utara.

1. Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 6.4
Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	1.500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
3	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	688.155.000	Dinas Ketenagakerjaan
4	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	111.371.000	Dinas Ketenagakerjaan
5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	2.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.980.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	1.365.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	1.365.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	11.600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	13.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	29.300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
20	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
22	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
23	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.682.824.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	405.348.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.999.912.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800.092.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.681.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Penetapan Cagar Budaya	390.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
31	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pelindungan Cagar Budaya	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
33	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pemanfaatan Cagar Budaya	500.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
34	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Provinsi	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	900.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
35	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	6.710.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
36	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.700.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	300.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
38	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
39	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
41	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	3.305.017.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
42	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	18.608.082.188	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
43	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	320.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
44	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	1.800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	766.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
46	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	287.250.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
47	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	478.750.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
48	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	383.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
49	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.067.333.811	Dinas Perkebunan dan Peternakan
50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
52	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.772.745.798	Dinas Perkebunan dan Peternakan
53	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.772.745.798	Dinas Perkebunan dan Peternakan
54	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.362.248.815	Dinas Perkebunan dan Peternakan
55	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.362.248.815	Dinas Perkebunan dan Peternakan
56	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	124.999.790	Dinas Perkebunan dan Peternakan
57	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	197.212.574	Dinas Perkebunan dan Peternakan
58	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.990.164.456	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
59	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	984.933.640	Dinas Perkebunan dan Peternakan
60	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	296.100.495	Dinas Perkebunan dan Peternakan
61	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	806.563.243	Dinas Perkebunan dan Peternakan
62	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.620.124.806	Dinas Perkebunan dan Peternakan
63	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	203.539.332	Dinas Perkebunan dan Peternakan
64	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	243.669.624	Dinas Perkebunan dan Peternakan
65	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	59.999.750	Dinas Perkebunan dan Peternakan
66	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	948.860.868	Dinas Perkebunan dan Peternakan
67	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2.673.099.690	Dinas Perkebunan dan Peternakan
68	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	99.999.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
69	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
70	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
71	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
72	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
73	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
74	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
75	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
76	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
77	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	925.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
78	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	2.000.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
79	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Mutu Produk	91.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
80	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	180.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
81	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
82	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
83	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
84	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
85	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
86	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
87	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.403.650.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
88	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	855.196.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
90	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
91	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
92	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.067.333.811	Dinas Perkebunan dan Peternakan
93	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
94	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
95	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
96	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.990.164.456	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
97	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	984.933.640	Dinas Perkebunan dan Peternakan
98	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	295.281.788	Dinas Perkebunan dan Peternakan
99	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	243.669.624	Dinas Perkebunan dan Peternakan
100	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2.673.099.690	Dinas Perkebunan dan Peternakan
101	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	99.999.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
102	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.499.548.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.499.548.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.499.548.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.499.548.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	7.499.548.573	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
109	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
111	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
116	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
117	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
119	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
122	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
125	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
127	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.690.926.359	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
130	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
131	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
132	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
133	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
134	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
135	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
136	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
137	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
138	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
142	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
143	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	153.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
144	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
145	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
146	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
147	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
148	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
149	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
151	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
152	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
153	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
154	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
155	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
156	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
157	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
158	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jembatan	7.464.355.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
159	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
160	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
161	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
162	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
163	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
164	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
165	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
166	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
167	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
168	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
169	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
170	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
171	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
172	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
173	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
174	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
175	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
176	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
177	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
178	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
179	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
181	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
183	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
184	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
185	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
186	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
187	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
188	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
189	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
191	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
192	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
194	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
196	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ‘

Tabel 6.5
Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH
1	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.682.824.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	-	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
5	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	Dinas Ketenagakerjaan	UPTD Balai Latihan Kerja
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
7	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	1.500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
10	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	600.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PERANGKAT DAERAH
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Sibolga
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Rantau Prapat
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Pematangsiantar
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Kisaran
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan
20	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.043.606.091	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
21	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	123.870.016.192	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
22	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	498.735.980.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
23	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	7.034.271.550	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

3.Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Persentase Kemiskinan

Tabel 6.6
Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Persentase Kemiskinan

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	150.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	200.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
3	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	250.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
4	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.450.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
5	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
6	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem	Dinas Sosial
7	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang	Dinas Sosial
8	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi	Dinas Sosial
9	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
10	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
11	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem	Dinas Sosial
12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang	Dinas Sosial
13	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi	Dinas Sosial
14	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	8.092.749.600	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial
15	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	34.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial
16	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	493.091.028	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
17	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	493.091.028	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem	Dinas Sosial
18	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	493.091.028	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang	Dinas Sosial
19	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	493.091.028	UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi	Dinas Sosial
20	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	493.091.028	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
21	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.346.196.540	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
22	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.346.196.540	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo - Huta Salem	Dinas Sosial
23	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.346.196.540	UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang	Dinas Sosial
24	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.346.196.540	UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi	Dinas Sosial
25	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.346.196.540	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial
26	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	382.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial
27	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Tebing Tinggi	Dinas Sosial
28	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	300.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
29	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	3.672.483.840	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
30	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	3.672.483.840	UPTD Pelayanan Sosial Anak Sidikalang - Kabanjahe	Dinas Sosial
31	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	3.672.483.840	UPTD Pelayanan Sosial Anak Padang Sidempuan - Panyabungan	Dinas Sosial

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
32	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	3.672.483.840	UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli	Dinas Sosial
33	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	835.072.348	UPTD Pelayanan Sosial Anak Sidikalang - Kabanjahe	Dinas Sosial
34	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
35	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
36	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	3.722.207.040	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
37	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	482.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat	Dinas Sosial
38	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	482.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
39	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	482.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	Dinas Sosial
40	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	482.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
41	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.428.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
42	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.428.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat	Dinas Sosial

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
43	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.428.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	Dinas Sosial
44	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.428.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
45	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	11.500.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	Dinas Sosial
46	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	93.500.000	UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar	Dinas Sosial
47	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	93.500.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran - Rantau Prapat	Dinas Sosial
48	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	93.500.000	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	Dinas Sosial
49	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	93.500.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong	Dinas Sosial
50	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	150.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
51	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	105.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai	Dinas Sosial
52	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	15.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan	Dinas Sosial

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
53	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan	Dinas Sosial
54	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.158.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
55	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.407.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
56	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.700.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
57	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
58	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.500.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
59	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	300.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
60	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.550.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
62	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
63	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.403.650.000	UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
64	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	855.196.000	UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
65	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
66	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000	UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
67	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	9.221.352.551	UPTD Rumah Sakit Khusus Mata	Dinas Kesehatan
68	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	9.221.352.551	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
69	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	9.221.352.551	UPTD Rumah Sakit Khusus Paru	Dinas Kesehatan
70	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	9.221.352.551	UPTD Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
71	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	9.221.352.551	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Dinas Kesehatan
72	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	997.543.780	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
73	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	993.147.514	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
74	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
75	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	966.027.691	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
76	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	966.027.691	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Dinas Kesehatan
77	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	224.518.957.852	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
78	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	224.518.957.852	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Dinas Kesehatan
79	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.423.054.764	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
80	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	124.999.790	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
81	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	-	UPTD Perbenihan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
82	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	580.147.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan dan Peternakan
83	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	2.500.000.000	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sibolga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	5.000.000.000	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.238.901.744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.700.000.000	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Sidempuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
88	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dolok Sanggul	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunung Tua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunungsitoli	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
94	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Sidempuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
96	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
97	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sidikalang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Nopan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
99	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sibolga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.690.926.359	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Binjai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.405.468.300	UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	2.035.730.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	NAMA SKPD
106	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
107	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
108	Program Hubungan Industrial	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan

4.Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 6.7
Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.236.103.603	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	242.045.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	2.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	2.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	2.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	2.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	Dinas Pendidikan
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Sibolga	Dinas Pendidikan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan	Dinas Pendidikan
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe	Dinas Pendidikan
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Kisaran	Dinas Pendidikan
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam	Dinas Pendidikan
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Stabat	Dinas Pendidikan
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Balige	Dinas Pendidikan
18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Rantau Prapat	Dinas Pendidikan
20	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Gunung Tua	Dinas Pendidikan
21	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam	Dinas Pendidikan
22	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.862.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Pematangsiantar	Dinas Pendidikan
23	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.360.379.115	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
24	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	48.466.115.493	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
25	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	606.866.340.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
26	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Sibolga	Dinas Pendidikan
27	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Gunung Tua	Dinas Pendidikan
28	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Rantau Prapat	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
29	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Pematangsiantar	Dinas Pendidikan
30	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe	Dinas Pendidikan
31	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Kisaran	Dinas Pendidikan
32	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Stabat	Dinas Pendidikan
33	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Padangsidimpuan	Dinas Pendidikan
34	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
35	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	Dinas Pendidikan
36	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam	Dinas Pendidikan
37	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam	Dinas Pendidikan
38	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.412.000.000	Cabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan	Dinas Pendidikan
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.043.606.091	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
40	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	123.870.016.192	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
41	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	498.735.980.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
42	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.030.596.920	Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah	Dinas Pendidikan
43	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.030.596.920	Cabang Dinas Pendidikan Kisaran	Dinas Pendidikan
44	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.030.596.920	Cabang Dinas Pendidikan Stabat	Dinas Pendidikan
45	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.099.999.812	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
46	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	7.034.271.550	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
47	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	21.398.310.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
48	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	198.427.232.452	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
49	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	997.543.780	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
50	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	993.147.514	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
51	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.000.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
52	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	502.667.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
53	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.000.000.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
54	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	199.108.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
55	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	224.518.957.852	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	224.518.957.852	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Dinas Kesehatan
57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	628.544.900	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
58	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	88.865.900	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
59	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.006.004.791	UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	Dinas Kesehatan
60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.006.004.791	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	NAMA SUB UNIT	Perangkat Daerah Penanggungjawab
61	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.006.004.791	UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Dinas Kesehatan
62	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	289.315.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
63	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	365.356.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
64	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.149.501.400	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
65	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	272.546.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
66	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

5. Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Indeks Gini dan Menjaga Tingkat Inflasi

Tabel 6.8
Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Indeks Gini dan Menjaga Tingkat Inflasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
1	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.682.824.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10.999.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
3	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10.999.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
4	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10.999.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
5	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10.999.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	10.999.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
7	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
8	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
9	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
10	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
11	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
12	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10.192.868.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
13	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
14	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
15	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	500.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	260.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
19	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	32.233.754.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	2.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
23	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	2.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.980.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.980.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.980.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
28	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	1.365.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
29	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	1.365.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
30	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
31	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
32	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
34	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	7.875.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
35	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
36	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	2.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
37	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.067.333.811	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
38	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.428.883.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.772.745.798	Dinas Perkebunan dan Peternakan
41	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6.772.745.798	Dinas Perkebunan dan Peternakan
42	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.362.248.815	Dinas Perkebunan dan Peternakan
43	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13.362.248.815	Dinas Perkebunan dan Peternakan
44	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	124.999.790	Dinas Perkebunan dan Peternakan
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	197.212.574	Dinas Perkebunan dan Peternakan
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.990.164.456	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
47	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	984.933.640	Dinas Perkebunan dan Peternakan
48	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	296.100.495	Dinas Perkebunan dan Peternakan
49	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	806.563.243	Dinas Perkebunan dan Peternakan
50	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.620.124.806	Dinas Perkebunan dan Peternakan
51	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	531.879.250	Dinas Perkebunan dan Peternakan
52	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	580.147.450	Dinas Perkebunan dan Peternakan
53	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	295.281.788	Dinas Perkebunan dan Peternakan
54	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	243.669.624	Dinas Perkebunan dan Peternakan
55	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
56	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
57	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.550.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
63	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	600.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
65	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
		Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
66	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.403.650.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
67	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	855.196.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
68	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
69	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
70	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
71	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
72	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
73	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	150.000.000	Dinas Sosial
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	200.000.000	Dinas Sosial
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	250.000.000	Dinas Sosial
77	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.450.000.000	Dinas Sosial
78	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	Dinas Sosial
79	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	Dinas Sosial
80	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
81	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
		3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
83	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
		3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
90	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	16.146.864.742	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
94	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
95	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
96	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	56.018.287.441	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
97	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
99	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	9.589.267.360	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jembatan	94.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
131	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
132	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
133	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
134	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
135	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	61.108.657.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
137	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
138	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
143	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
144	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB
145	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
146	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
147	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
149	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
150	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
151	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
152	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
153	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pembangunan Jalan	860.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6. Kebijakan dan Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tabel 6.9
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	55.716.606	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	110.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.085.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	280.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
11	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
21	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
23	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
34	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
35	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
37	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
38	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
40	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
41	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.143.567.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
46	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
47	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
49	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
50	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
51	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
52	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
53	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
55	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
56	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
57	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
58	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
59	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
60	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
61	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
62	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
63	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
64	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
65	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
66	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
67	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
68	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
69	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1.477.999.340	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
70	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
71	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
72	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
73	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
74	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
75	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
76	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
77	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
78	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
79	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
80	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
81	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
82	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
83	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
84	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
85	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
86	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
87	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.070.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
88	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
89	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
90	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
91	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Perbenihan Tanaman Hutan	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
92	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	85.696.321	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
93	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
94	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
95	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
96	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
97	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
98	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
99	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
101	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
102	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
103	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
104	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
105	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
106	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
107	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
108	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
109	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
110	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
111	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
112	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

7. Dukungan program Kegiatan terhadap Penurunan Stunting Tahun 2025

Tabel 6.9
Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Penurunan Stunting

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14,176,091,893	Dinas Kesehatan
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2,780,156,000	Dinas Kesehatan
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	202,666,750	Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7,405,071,080	Dinas Kesehatan
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	191,247,700	Dinas Kesehatan
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6,968,395,038	Dinas Kesehatan
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	213,894,553,464	Dinas Kesehatan
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan *Surveilans* Kesehatan	628,544,900	Dinas Kesehatan
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	304,617,627	Dinas Kesehatan
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	336,716,000	Dinas Kesehatan

11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	272,546,000	Dinas Kesehatan
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	381,721,800	Dinas Kesehatan
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	599,855,000	Dinas Kesehatan
14	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	767,676,600	Dinas Sosial
15	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	307,089,200	Dinas Sosial
16	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	535,412,650	Dinas Sosial
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	790,041,100	Dinas Sosial
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	63,953,801,400	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	32,130,649,177	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	281,606,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/ Kota	149,550,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	63,140,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	42,680,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	13,290,000,000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
26	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	"Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha "	11,380,000,000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	7,192,953,980	Dinas Perkebunan Dan Peternakan
28	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,521,871,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil

29	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5,077,420,449	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	220,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
31	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	638,692,500.00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
32	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	637,539,000.00	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
33	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	702,389,540	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	850,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral
35	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan dan Sumber Daya Industri	536,137,271	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral

36	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	205,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
37	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	179,860,500	BAPPELITBANG
38	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	212,580,500	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
39	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	121,543,500	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
40	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	560,528,900	Dinas Pendidikan

8. Dukungan program Kegiatan terhadap Penurunan Kemiskinan Tahun 2025

Tabel 6.10
Dukungan Perangkat daerah Terhadap Penurunan Kemiskinan

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	DINAS SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	767.676.600,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	535.412.650,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70.510.320,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.000.000,00
		PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.496.242.162,00
		PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	790.041.100,00
		PENANGANAN BENCANANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	694.587.970,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	82.000.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	9.500.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	274.956.540,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	679.554.852,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	247.899.156,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	95.040.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	46.200.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	587.540.928,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	358.841.772,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	164.285.232,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	314.786.656,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	27.000.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	37.500.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	7.500.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	13.500.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	182.064.150,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	465.319.081,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	31.920.000,00
		PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	397.602.621,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	33.133.292,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	843.510.240,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	915.242.400,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	1.276.686.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	637.045.200,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	27.844.350,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	109.026.076,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	170.002.645,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	75.301.260,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	98.091.028,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	261.548.629,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	127.952.326,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	30.857.706,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	54.113.094,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	314.629.200,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.039.284.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.570.550.400,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	3.221.532.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	1.946.754.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	192.969.466,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	44.044.035,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	200.901.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	169.007.528,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	59.100.000,00
		PENANGANAN BENCANANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	60.750.000,00
		PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	182.684.500,00
		PEMBERDAYAAN SOSIAL		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.149.416.318,00
		PEMBERDAYAAN SOSIAL		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	474.350.250,00
		PEMBERDAYAAN SOSIAL		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	229.879.000,00
		REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	41.647.401,00
2	DINAS PERKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	890.926.359,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	266.040.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.417.054.985,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.072.921.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	18.481.214.826,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	349.890.540,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.507.031.495,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	482.116.100,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	631.119.340,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.297.285.739,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	637.469.580,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.777.752.627,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.498.288.560,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	432.400.880,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	617.831.520,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	905.805.080,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	30.750.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	777.461.460,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	10.796.337.077,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.156.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	61.797.001.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	5.200.000.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.555.297.844,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.393.157.001,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai	12.900.000.000,00
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1.016.398.326,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	252.302.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	629.357.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	164.065.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	160.782.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyediaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	279.740.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.713.706.134,00
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	230.000.000,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	99.999.950,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	13.408.730.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	424.999.944,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.365.195.590,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	840.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	439.996.644,00
6	DINAS KESAHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (Dinas Kesehatan)	6.933.658.076,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPTD RS. Khusus mata)	365.242.150,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)-Dinas Kesehatan (UPTD RS Khusus Paru)	105.958.050,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPTD Laboratorium Kesehatan)	286.282.925,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	902.564.492,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	213.894.553.464,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	648.963.521,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	656.531.516,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.405.071.080,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	240.205.000,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU KECIL	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	549.968.400,00
				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.130.954.046,00
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Laut	2.094.134.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	523.450.000,00
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	971.703.161,00
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1.610.525.000,00
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.173.172.250,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	700.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	700.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	800.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	48.418.263.586.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.001.427.600.00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8.648.000.000.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	8.679.940.600.00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	13.876.000.000.00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	430.000.000.00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	7.400.000.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani - UPT. Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian	450.000.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.124.228.922,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.537.667.448,00
			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	80.000.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	74.000.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.292.500.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.455.000.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	79.998.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.404.999.100,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	79.942.912,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.192.500.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	699.999.900,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	79.950.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.345.000.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.395.000.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.615.000.000,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.170.000.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	826.136.921,00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	69.999.600.00
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	30.000.000.00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	123.890.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	117.740.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	42.930.000,00
				Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	24.382.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	188.977.050,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	265.030.020,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	228.229.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	43.020.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	42.680.000,00
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	580.147.450.00
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.067.333.811,00
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	5.289.091.450,00
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	11.074.066.202,00
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	984.933.640,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		PENYULUHAN PERTANIAN	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	2.673.099.690,00
		PENYULUHAN PERTANIAN	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	99.999.800,00
13	UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	47.017.800,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	24.293.404,00
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	15.908.318.737,00
15	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	606.866.340.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	498.735.980.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	21.398.310.000,00

NO	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
16	DINAS KETENAGAKERJAAN	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kab/kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.024.000.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	384.999.868,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.975.250.994,00
					1.720.193.115.471,00

9. Dukungan program Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
1	UPTDK RS JIWA PROF. MUHAMMAD ILDREM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembelian celana, baju, celana dalam pasien, pembalut wanita yang diperlukan untuk pasien rawat inap	270.302.441

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
2	Satpol PP	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan dan Pengawalan	Keterlibatan personel perempuan dalam patroli - Peningkatan keamanan dan ketertiban bagi kaum perempuan	4.999.999.614
3	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan khusus	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Seleksi Lomba Olahraga dan Seni Siswa Jenjang Pendidikan Khusus	1.099.999.812
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Bimtek ROOTS Bidang SMA	55.440.421.220
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Link and Match	1.059.272.985
4	Bakesbangpol	Penguatan Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	Perumusan kegiatan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Sosialisasi Wawasan kebangsaan dengan keterlibatan kaum perempuan sebagai peserta dan narasumber	600.000.000
		Peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan partai politik	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan partai politik	Pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kepada ormas perempuan dan PKK	700.000.000.000
5	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura tanaman pangan dan perkebunan	Pemberian bibit benih dengan pelibatan kelompok perempuan	34.437.759.108
		Penyuluhan Pertanian	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Penyuluhan terhadap petani dan penyuluh pertanian lapangan dengan pelibatan kelompok perempuan	7.400.000.000
		Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyediaan pangan berbasis sumber lokal	Penyaluran bibit benih dengan pelibatan kelompok perempuan	700.000.000
6	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan		9.906.450.000
				Penyediaan Sandang		802.500.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		2.500.000.000
				Penyediaan Alat Bantu		802.500.000
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		697.150.666
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		882.750.000
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		100.000.000
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas		50.000.000
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		50.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		100.000.000
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		50.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		200.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan		418.200.000
				Penyediaan Permakanan		3.710.700.000
				Penyediaan Sandang		510.000.000
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		2.500.000.000
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		357.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		510.000.000
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		100.000.000
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		50.000.000
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		250.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		100.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		50.000.000
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti		50.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		50.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan		3.365.775.000
				Penyediaan Sandang		513.000.000
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		2.500.000.000
				Penyediaan Alat Bantu		150.000.000
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		650.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		700.000.000
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari		250.000.000
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar		50.000.000
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		50.000.000
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		150.000.000
				Pemulasaraan		150.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		150.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan		2.217.375.000
				Penyediaan Sandang		250.000.000
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		2.000.000.000
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		200.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		550.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		100.000.000
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		200.000.000
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		100.000.000
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		100.000.000
				Pemulangan ke Daerah Asal		100.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		50.000.000
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pan	Penyediaan Permakanan		2.759.400.000
				Penyediaan Sandang		377.000.000
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		1.000.000.000
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		226.200.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		600.000.000
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		50.000.000
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		565.500.000
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak		100.000.000
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		50.000.000
				Pemulangan ke Daerah Asal		250.000.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		50.000.000
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Bantuan untuk keluarga miskin ekstrem dengan pelibatan kaum perempuan	790.041.100
				Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Bantuan KUBE dengan pelibatan kelompok perempuan	2.496.242.162

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
		Penanganan Bencana	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Pelayanan dukungan psikososial	Pelatihan kepada tenaga siaga bencana dengan pelibatan perempuan	694.587.970
7	DINAS KESEHATAN	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	pendampingan kesehatan usia produktif terhadap calon pengantin	502.667.000
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pemberian susu ibu hamil, pemberian makanan tambahan	20.000.000.000
				Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	melaksanakan pelatihan terkait penanganan krisis kesehatan	251.516.250
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	membayarkan iuran jaminan kesehatan	224.138.705.161
				Pengelolaan Pelayanan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	membutuhkan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di lapangan atau di tempat KLB	648.963.521
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik dan pemberdayaan masyarakat	6.994.105.606
				Pengadaan obat bahan Medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman difasilitas kesehatan yang disediakan	Sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GEMA CERMAT)	100.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Workshop perencanaan dan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan di Provsu	336.716.000
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sewa Gerai Ladiest UPTD Bapenda Medan Utara	200.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Penyempurnaan Ruang Laktasi pada Bapendasu	200.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga keamanan	14.891.500.000
9	BPBD	Penanggulangan Bencana	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan logistik kebencanaan sesuai kebutuhan gender dan kelompok rentan	2.000.000.000
		Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI	Penyediaan data terpilah berdasarkan gender, disabilitas dan inklusi sosial	100.000.000
			Pelayanan dan informasi rawan bencana provinsi	Sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi rawan bencana provinsi	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dengan	1.350.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
					mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan	
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15(LIMA BELAS) HA	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rembuk warga untuk calon penerima manfaat RTLH dengan melibatkan kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya	86.092.800
				Perbaikan rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) HA sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha	Perbaikan rumah Tidak Layak Huni sesuai kebutuhan penerima manfaat (Gender dan Disabilitas)	21.000.000.000
11	BPSDM	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	1. Diklat Gender Equality Social Inklusi (GESI)	140.0000.000
					2. Diklat Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	100.000.000
					3. TOT Duta ASI (laki-laki dan perempuan)	180.000.000
					4. E-Learning parenting	65.000.000
12	INSPEKTORAT	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor	penyetaraan personel tenaga pendukung	4.121.372.254
		Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	melaksanakan pengawasan kinerja terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	4.630.045.000
				Pengawasan keuangan pemerintah daerah	melaksanakan pengawasan keuangan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	1.833.568.000
				Review laporan kinerja	melaksanakan review kinerja terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	1.211.150.000
				Review laporan keuangan	melaksanakan review laporan keuangan terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	110.250.000
				Pengawasan umum dan teknis kab/kota	melaksanakan pengawasan umum dana teknis terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender di kab/kota	3.336.809.000
				Kerjasama pengawasan internal	melaksanakan kerjasama pengawasan internal terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	1.685.656.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat, evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI, dan evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP	melaksanakan Monev TLHP terkait kegiatan Pengarusutamaan Gender	2.826.288.000
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	PENGELOLAAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin dengan keberpihakan bagi Kepala Keluarga perempuan	7.800.000.000
		PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk pompanisasi pertanian dengan keberpihakan kepada petani perempuan	4.300.000.000
		PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan dan fasilitasi kepada kelompok Perempuan	1.200.000.000
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan Kampung Iklim dengan keterlibatan perempuan	379.999.760
		Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi Di luar Kawasan Hutan Negara	Pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	Sosialisasi dan pemberian bantuan kepada kelompok tani hutan perempuan	200.000.000
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVSU	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	676.459.250
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK	Pemberdayaan pendidikan kesehatan, ekonomi, perempuan dan keluarga melalui Tim Penggerak PKK	4.000.000.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Pelatihan pelaksanaan dan kelurahan dengan melibatkan admin kaum perempuan	890.686.544
16	Dinas Perhubungan	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	keikutsertaan perempuan dalam Forum OPD	599.143.980
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	sosialisasi kedisiplinan berlalu lintas pada Ojek Online dengan keterlibatan kaum perempuan	2.000.000.000
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	penyediaan mudik gratis bagi masyarakat dengan Bus khusus	2.000.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Mudik Gratis Lebaran Tahun 2024 dan Nataru Tahun 2024)	perempuan (Ladiest BUS) dan penyediaan Bus ramah Disabilitas	
				Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)	Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe B dengan memperhatikan sarana prasarana dan aksesibilitas perempuan dan disabilitas	9.047.500.000
17	Dinas Ketenagakerjaan	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	pendidikan pelatihan kejuruan bagi perempuan (tata rias pengantin dan pengolahan hasil pertanian)	10.204.500.000
		PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja	penempatan tenaga kerja perempuan dan difabel di sektor formal dan informal	250.000.000
				Perluasan Kesempatan Kerja	fasilitasi calon wirausaha baru bagi kaum perempuan dan kelompok difabel	8.250.000.000
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	informasi pasar tenaga kerja bagi kelompok perempuan dan difabel	500.000.000
				Job Fair/Bursa Kerja	penyediaan informasi lowongan pekerjaan melalui event Job fair bagi kau perempuan dan kelompok difabel	500.000.000
		HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan bukan penerima upah (BPU)	9.999.360.000
		PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pekerja perempuan (pengawasan apakah perusahaan telah menyediakan ruang laktasi, hak cuti perempuan, dsb.)	602.746.400
				Revitalisasi BLK		7.053.125.000
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	forum perangkat daerah	33.000.000
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Monitoring opini dan aspirasi publik	Dialog interaktif di Televisi siaran dengan tematik perempuan dan Stunting	11.865.000
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Mengikut sertakan kaum perempuan dalam bimbingan teknis pemantauan/pengendalian OPT komoditas perkebunan	580.147.450

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
					Memberi peralatan perbanyakan agens hayati dan pestisida	
		Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Memotivasi laki-laki dan perempuan untuk membentuk petani kopi milenial	948.860.868
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Memotivasi laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam kelompok tani	99.999.800
		Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan Provinsi	pengendalian penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	pemberian bantuan ternak, bimbingan teknis budidaya ternak dan pengolahan pakan ternak bagi laki-laki dan perempuan	11.074.066.202
			pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	pemberian bantuan benih tanaman perkebunan, bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan bagi laki-laki dan perempuan	5.289.091.450
20	Badan Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	pelaksanaan pengadaan CASN bagi masyarakat umum, difabel dan dengan keterlibatan perempuan	1.577.106.000
			Pengembangan Kompetensi ASN	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi terkait jabatan fungsional dengan keterlibatan perempuan	210.309.678
				Pengelolaan Assesmen Center	Assesmen kompetensi bagi ASN untuk menilai potensi dan kompetensi ASN dengan keterlibatan perempuan	219.233.400
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tugas belajar bagi ASN dengan keterlibatan perempuan	1.561.166.000
21	Biro Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	sosialisasi terkait pengendalian APBN provinsi dan kab/kota dengan keterlibatan perempuan	480.000.000
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	sosialisasi Pergub petunjuk teknis perjalanan dinas dengan keterlibatan perempuan	495.000.000
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	rapat koordinasi pengendalian wilayah kab/kota dengan keterlibatan perempuan	700.000.000
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	rapat koordinasi Tim teknis aplikasi PRP2Sumut dengan keterlibatan perempuan	370.000.000
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	FGD rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah (Forum OPD) dengan keterlibatan narasumber dan peserta perempuan	250.000.000
22	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa, E-Katalog Lokal (peserta	984.914.530

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
		PENGADAAN BARANG DAN JASA			rapat dengan keterlibatan peserta perempuan)	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	mengutamakan perempuan sebagai petugas piket dalam menerima pendampingan Coaching Clinic	480.000.000
23	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pagelaran Seni Budaya dalam Penyambutan tamu-tamu (melibatkan penari laki-laki dan perempuan)	903.786.000
					Gita Bahana Nusantara (GBN) / pemilihan peserta Paduan Suara	170.000.000
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Sumatera Utara (melibatkan laki-laki dan perempuan)	680.997.020
		PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata	574.525.000
		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pelatihan SDM Usaha Pariwisata	310.000.000
					Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2025	480.000.000
		PENGELOLAAN MUSEUM	Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap museum	Lomba cerdas cermat Museum	155.000.000
					malam kreatif museum	415.000.000
24	Biro Administrasi Pimpinan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi acara dengan keterlibatan perempuan	1.100.000.000
				Fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan keterlibatan perempuan	2.720.000.000
				Pengelolaan hubungan keprotokolan	pelaksanaan keprotokolan dengan keterlibatan petugas protokol perempuan	3.400.000.000
25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Penyempurnaan sarana prasarana ruang bermain anak, ruang laktasi dan difabel	25.000.000
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	sarana untuk pendaftaran anggota perpustakaan baik secara offline maupun online	133.416.825

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	#pelayanan mobil perpustakaan keliling #pelayanan mobil pelayanan terpadu perpustakaan sekolah #gebyar Literasi Sumatera utara #gerakan permasyarakatan minat baca #sosialisasi budaya baca dan Literasi #diskusi Literasi	2.160.000.000
27	Biro Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana arena bermain Anak dan perempuan, penyediaan pembatas untuk tempat ibadah musholah di Mess Pemprovsu	200.000.000
28	Biro Perekonomian	Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Stakeholder lain oleh Biro Perekonomian dengan keterlibatan kelompok perempuan	600.874.000
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, limbah dan Sanitasi	Seleksi Direksi dan Pengawas Perumda Tirtanadi Provsu	312.124.600
29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN DAERAH	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Pembinaan dan koordinasi terhadap BKAD Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD yang terintegrasi dengan Isu Gender dalam bentuk kunjungan lapangan, Coaching Clinic, Sosialisasi dan Fasilitasi	899.999.600
					Monitoring dan Pembinaan pada Kabupaten/Kota	294.420.400
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Sosialisasi pengelolaan dan penataan Barang Milik Daerah (BMD) dengan keterlibatan kelompok perempuan	1.169.663.596
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap	Pelatihan, Bimtek, Pemberian Bantuan berupa ikan, bibit ikan, pangan ikan dan Prasarana perikanan dengan keterlibatan perempuan	5.500.000.000
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pelatihan, Bimtek, Pemberian Bantuan berupa ikan, bibit ikan, pangan ikan dan Sarana perikanan dengan keterlibatan perempuan	3.500.000.000
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	6.616.747.520

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
		PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Para Petugas Pengamat Pos Hidrologi dan Hidrometri di Lapangan, jumlahnya hampir seimbang antara pria dan wanita	1.362.791.918
32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	PENGARUSUTAMAAN GENDER	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahunan	105.708.900
				Advokasi kebijakan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Penguatan kapasitas SDM melalui pendalaman konsep GESI dan PPRG	265.241.001
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas SDM Melalui pembentukan Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara	210.680.000
					Peningkatan Kapasitas SDM Melalui pelatihan fasilitator daerah Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Sumatera Utara	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kapasitas SDM bagi industri rumahan melalui pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan Toko Online Perempuan	274.500.000
		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Penguatan kapasitas SDM bagi lembaga masyarakat yang bergerak pada bidang perempuan dan anak	84.952.164
		PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi	Penyediaan data gender dan anak provinsi	Penguatan forum data terpilah provinsi	24.382.000
				Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi	Penguatan kelembagaan data gender dan anak melalui pelatihan penyajian dan pemanfaatan data	42.928.000
		PEMENUHAN HAK ANAK DAN KUALITAS KELUARGA	Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	Meningkatkan pemahaman SDM terhadap KLA	147.662.000
				Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi	Penguatan kapasitas SDM forum anak daerah Sumatera utara	38.370.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Terselenggaranya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak	Meningkatkan SDM bagi ibu PKK terhadap pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota	19.350.000
					Meningkatkan pemahaman terhadap sosialisasi informasi layak anak bagi anak sekolah di Kabupaten/Kota	116.670.000
				Penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Penguatan kapasitas SDM bagi lembaga melalui penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga	88.700.000
					Penguatan kapasitas SDM melalui penguatan rumah ibadah ramah anak	58.150.000
					Penguatan kapasitas SDM melalui penguatan ruang bermain ramah anak	58.150.000
		PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Implementasi pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal pada jenjang SLTA-MA melalui sekolah siaga kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PK	Sosialisasi implementasi pendidikan kependudukan bagi sekolah SMA/SMK sederajat dengan sasaran Guru dan Siswa/i	426.050.000
					Sosialisasi isu kependudukan (khususnya Stunting) bagi sekolah SMA/SMK sederajat dengan sasaran siswa/i	
					Pengembangan pojok kependudukan di SSK binaan Provinsi Sumatera Utara	
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	Rapat gugus tugas tindak pidana perdagangan orang Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50.847.500
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Bimbingan teknis manajemen kasus kekerasan terhadap perempuan kepada unit penyedia layanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan	34.508.750
				Penyedia kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam kondisi rentan di tingkat Kabupaten/Kota	188.977.050
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat Kabupaten/Kota	133.623.900
		PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus	50.655.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
			lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota			
			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan Provinsi	Bimbingan teknis manajemen kasus kekerasan terhadap anak kepada unit penyedia layanan perlindungan kekerasan terhadap anak	34.508.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Layanan pengamanan kantor berbasis gender yang disediakan	100.000.000
			Pengelolaan pelaksanaan desain Program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	Pemberian sosialisasi terhadap orang tua yang memiliki anak di bawah 3 tahun	40.464.850
				Sosialisasi dan pembinaan remaja tentang generasi bencana	Pemberian informasi 3 zero (tidak kawin muda, tidak hubungan seks, tidak pakai narkoba) dan generasi berencana kepada remaja putra dan putri di sekolah dan masyarakat	42.679.700
				Pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja	Pemberian informasi 3 zero (tidak kawin muda, tidak hubungan seks, tidak pakai narkoba) dan generasi berencana kepada remaja putra dan putri di sekolah, masyarakat dan keluarga yang memiliki remaja	40.934.900
				Advokasi, sosialisasi dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyampaian hasil program kegiatan OPD Kab/Kota dalam menjalankan program bangga kencana	44.999.850
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Memberikan penguatan program kepada layanan keluarga dalam komunikasi yang efektif dalam keluarga dan masyarakat	52.121.623
				Fasilitas kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatkan peningkatan ekonomi keluarga tidak mampu dan pembentukan kelompok kerja	40.649.923
			Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian pendudukan dan keluarga berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal	Pengembangan strategi operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi sesuai kearifan lokal	40.050.000
				Fasilitas kerjasama dengan Stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program bangga kencana	Sosialisasi kepada Stakeholder dan mitra kerja tentang program bangga kencana	29.863.023
				Penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi dan KIE program	Talkshow di TVRI tentang program bangga kencana	94.890.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal		
				Pelaksanaan advokasi dan KIE program bangga kencana melalui mitra kerja	Pembinaan dan sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan tentang program bangga kencana	120.624.315
			Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam program bangga kencana	Edukasi pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya percepatan penurunan Stunting	107.235.000
					Seminar peran organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi peran Hari Keluarga Nasional (Harganas)	
					Fasilitasi jejaring kemitraan dalam program Bangga Kencana	
33	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pemberdayaan UMKM	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Vokasional Eco Point bagi Wirausaha Pemula dengan keterlibatan Perempuan	275.860.515
					Pelatihan Vokasional Jahit, Bordir dan Payet bagi Pelaku UKM dengan keterlibatan perempuan	168.227.530
					Pelatihan Vokasional Makanan Olahan bagi Wirausaha Pemula di Provinsi Sumatera Utara dengan keterlibatan Perempuan	161.487.862
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN		Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Perilaku Menyimpang pada Generasi Muda dengan keterlibatan perempuan	1.270.888.846
		PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Perilaku Menyimpang pada Generasi Muda dengan keterlibatan perempuan	1.270.888.846
					Seleksi dan Pemilihan Pemuda dan Pemudi Pelopor Tingkat Nasional dan Provinsi	245.936.791
					Pelatihan Satgas Tanggap Bencana bagi Pemuda Pemudi di Provinsi Sumatera Utara	750.000.000
					Seleksi dan Pelatihan Peserta Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara	1.500.000.000
					Seleksi Pendidikan Kader Pemimpin Muda Nasional dengan keterlibatan perempuan	1.000.000.000

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
		Pembinaan Daya Saing Keolahragaan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dengan keterlibatan Perempuan	1.534.057.404
					Pelatihan keterampilan di bidang otomotif, jahit-menjahit, komputer, Design grafis, start up dan barista kopi (pengelolaan kopi) dengan keterlibatan Perempuan	2.367.449.698
					Seleksi dan Pelatihan Pemuda Kreativesia dengan keterlibatan perempuan	1.500.000.000
					Rencana Aksi Daerah (RAD) Layanan Kepemudaan dengan keterlibatan perempuan	2.500.000.000
					Sosialisasi Penumbuhan Minat Kewirausahaan bagi Pemuda dengan keterlibatan Perempuan	500.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Kegiatan Pelaksanaan Rakerda dan Musprov BAPOPSI Sumatera Utara dengan keterlibatan perempuan	295.000.000
					Kegiatan Sosialisasi Sport Development Index (SDI) dengan keterlibatan perempuan	500.000.000
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kejuaraan Olahraga Disabilitas Pelajar dengan keterlibatan perempuan	600.000.000
				Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	seleksi dan Pengiriman Kontingen POPNAS	5.000.000.000
					Seleksi dan pengiriman Kontingen PEPARPENAS	2.000.000.000
					Pengiriman Kontingen POSPENAS	3.000.000.000
				Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Festival Olahraga Tradisional	500.000.000
					Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	450.000.000
					Kegiatan Olahraga dalam Rangka Hari Jadi Provinsi	500.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga	Kegiatan Upacara dan pemberian Penghargaan HAORNAS	675.000.000
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) di UPT Kebakatan Olahraga	Pembinaan Atlet PPLP	21.119.765.920

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
				Penyediaan Data Keolahragaan dan atlet berprestasi Kabupaten/Kota	Pendataan Tenaga Keolahragaan dan atlet berprestasi Kabupaten/Kota	75.125.000
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Skoting) (2 kegiatan)	225.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	Bimtek Standarisasi Organisasi Tenaga Keolahragaan (2 kegiatan)	563.047.000
					Penataran Pelatih/wasit/juri bersertifikat daerah dan nasional (5 kegiatan)	1.500.741.500
		PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Kemah Pramuka	1.000.000.000
35	BIRO ORGANISASI	Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Coaching Clinic terkait SOTK dan Tupoksi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan keterlibatan Perempuan	250.000.000
				PENATAAN ANALISIS JABATAN	Pelaksanaan Coaching Clinic terkait Peta Jabatan dan Kebutuhan SDM di Perangkat Daerah dengan keterlibatan perempuan	250.000.000
			FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	PEMBINAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Pelaksanaan Coaching Clinic terkait AKIP, Pohon Kinerja di OPD Provinsi dengan Keterlibatan Perempuan	1.150.000.000
				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan Coaching Clinic terkait SAKIP di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan keterlibatan perempuan	1.200.000.000
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kinerja	Pelaksanaan Coaching Clinic Festival Budaya Kerja Nasional dengan keterlibatan perempuan	250.000.000
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Pelaksanaan Coaching Clinic sistem Kerja dengan keterlibatan perempuan	250.000.000
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan keterlibatan perempuan	400.000.000
36	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan keterlibatan Perempuan	600.000.000
37	UPTD RS Haji Medan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembelian Celana, Baju, Celana Dalam Pasien, Pembalut Wanita yang Diperlukan Untuk Pasien Rawat Inap	270.302.441

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktifitas	Anggaran (Sub Kegiatan)
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	renovasi toilet disabilitas	125.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan kursi tunggu untuk pasien lansia dan disabilitas	350.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kontensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Diklat dan Bimtek melibatkan perempuan	4.000.000.000
38	BAPPELITBANG	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	333.634.000
				FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI	Pelaksanaan Coaching Clinic terkait SOTK dan Tupoksi dengan keterlibatan Perempuan	400.000.000
39	SEKRETARIAT DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Melakukan pendampingan Anggota Dewan dengan keterlibatan kelompok Perempuan	18.354.683.308
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Fasilitas Tugas DPRD, Penyerapan aspirasi masyarakat	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan, kunjungan kerja dalam daerah, pelaksanaan Reses	Melakukan pendampingan Anggota Dewan dengan keterlibatan kelompok Perempuan	144.652.110.908
40	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Pemberian bantuan Beasiswa bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi dan difabel di Provinsi Sumatera Utara	322.524.029.200
		Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Fasilitasi. Koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Pemberian bantuan beasiswa bagi seluruh mahasiswa/ mahasiswi dan difabel di provinsi Sumut	3.222.524.029.200
41	BIRO HUKUM	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	fasilitasi Bantuan Hukum	fasilitasi Penyelesaian Masalah Non litigasi dan HAM	Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten/Kota dengan keterlibatan Perempuan	135.000.000

6.3 Rencana Kegiatan Strategis Daerah (KSD)/*Major Project*

Dalam mewujudkan target capaian dari sasaran prioritas pembangunan dilakukan melalui penganggaran yang berbasis prioritas (*Money follow priority*). Dalam mendukung tercapainya 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara dilaksanakan melalui 40 (Empat puluh) Kegiatan Strategis Daerah.

Tabel 6.10
Rencana Kegiatan Strategis Daerah (Major Project) Tahun 2025

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus			Dinas Pendidikan
	a. Pembangunan prasarana sekolah yaitu ruang kelas baru pada Unit Sekolah Baru yang di bangun pada tahun 2019-2023	35 RKB	USB (SMA dan SMKN) yang di bangun pada periodisasi Tahun 2019-2023.	
	b. Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus merupakan proses pembaruan, peremajaan, penyempurnaan Sarana dan Prasarana sekolah dalam rangka revitalisasi dan pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah			
	- Pemeliharaan Ruang Kelas	25 Ruang Kelas	SMA dan SMKN kewenangan Provinsi Sumatera Utara	
	- Pemeliharaan Perlengkapan Ruang Kelas (Meja/Kursi/Papan Tulis) dengan target 32 Sarana Ruang Kelas	112 Sarana Ruang Kelas	SMA dan SMKN kewenangan Provinsi Sumatera Utara	
	2. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama			Dinas Pendidikan
	- Menghadirkan mentor/ guru bantu dari DUDI sesuai dengan kebutuhan pasar	20 sekolah	Berdasarkan Kab/Kota dengan Peringkat Nilai Angka Partisipasi Murni 10 terbawah	
	- Melatih guru ke DUDI untuk meningkatkan kemampuan mengajar yang berorientasi bisnis di DUDI	20 sekolah		
	3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “EMAK” (Edukasi Perempuan dan Anak)			Dinas P3AKB
	a) Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan edukasi terhadap perempuan usia 18 Thn ke atas di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada lembaga pemberdayaan perempuan			
	- Penguatan kapasitas perempuan marginal melalui Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) melalui Pembentukan lembaga Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA)	3 Lembaga	Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	- Pembekalan Fasilitator Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) Kabupaten/Kota dengan target	-	-	
	- Penguatan Kelas Pemberdayaan Perempuan Mandiri Berbudaya (KELAPA MUDA) yang telah dibentuk pada Kabupaten/Kota dalam bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi.	-	-	
	- Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Toko Online Perempuan (TOP) SUMUT	245 Orang	Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	
	b) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan layanan khusus bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus			
	- Pembentukan Tim Layanan Khusus perlindungan Perempuan dan Anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan target	-	-	Dinas P3AKB
	- Pemberian bantuan/advokasi bagi perempuan dan anak dalam kondisi darurat dan khusus dengan	-		
	4. Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e- Library			
	- Koordinasi bersama Dispusip Kab/Kota Perihal lokasi dan izin penempatan Titik Baca	32 titik baca	Kabupaten Nias, Nias Selatan , Karo, Dairi, Simalungun, Langkat, Batubara, Labuhan batu selatan, Tapanuli Selatan, Kota Medan, Tebing Tinggi (Penentuan lokus berdasarkan Lokasi yang sudah di bentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB)	
	- Penyediaan E-Book untuk Penambahan Konten Titik Baca dengan	32.000 Eksemplar Buku Digital (E-Book)		
	- Penyediaan Tugu (Totem) QR Code Titik Baca	32 tugu		
	- Penyediaan Banner QR Code Titik Baca	-	-	
	5. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan			
	a. Pengembangan Sarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana gedung Rumah Sakit dengan Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2022-2023 dan Rencana Pembangunan Gedung			

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	Rawat Jalan Tower 2 Tahun 2025 pada Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat			
	- Penyusunan dokumen untuk mendukung Pembangunan Gedung Tower 2 yaitu Dokumen Masterplan, DED, Feasibility Study, Amdal	4 Dokumen	UPTD Khusus RS. Haji Medan	UPTD Khusus RS. Haji
	- Peningkatan dan pengembangan gedung rumah sakit dengan Pemeliharaan/ renovasi Poliklinik dan ruangan lainnya	1 gedung		
	b. Pengembangan Prasarana sebagai upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Peralatan/ perlengkapan Rumah Sakit dengan telah dibangunnya Ruang rawat Inap Tower 1 pada tahun 2023 Rumah Sakit Haji Medan			
	- Pengembangan Prasarana tersebut maka dilakukan Penyediaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Tower yang telah dibangun	1 paket	UPTD Khusus RS. Haji Medan	UPTD Khusus RS. Haji
	c. Pengembangan layanan Rumah Sakit Haji Medan merupakan upaya dalam menyediakan dan meningkatkan layanan-layanan unggulan yang telah didukung oleh Kementerian Kesehatan dengan Kepmenkes ataupun layanan unggulan lokal Rumah Sakit Haji Medan yang merupakan inovasi.			
	- Peningkatan Kapasitas/ Pelatihan Petugas Medis dan Non Medis (untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi-Nefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Diabets Melitus/DM, Tuberkulosis/TB dan Respiratori, Gastrohepatologi serta Orthopedi	30 orang	UPTD Khusus RS. Haji Medan	UPTD Khusus RS. Haji
	j. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut)			
	- Penyediaan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita usia 6-9 bulan	4.400 balita	11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinkes
	7. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;			
	- Pembiayaan kontribusi iuran PBI JKN dan PBI Provinsi	6 Kabupaten/ |Kota	3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dinkes

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	8. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)			
	- Penyediaan media KIE baik media cetak dan elektronik dalam rangka peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	100 Persen	33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	
	9. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui:			
	a) Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak "Dr. Muhammad Ildrem Menyapa"			
	- Melakukan MOU dengan Kab/kota berdasarkan kajian rekam medis di RSJ	3 MoU	Kab. Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli serdang, Langkat, dan Kota Padang Sidempuan, Binjai, Tebing Tinggi, Medan	UPTD. Khusus Rs. Jiwa Prof. Ildrem Provsu
	- Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa dan mental bergerak berupa promosi, pemeriksaan medis dan pemberian obat serta memberikan rujukan pelayanan kesehatan lanjutan bila diperlukan	-		
	- Monitoring dan evaluasi	-		
	b) Bus Kesehatan Bergerak			
	- Menyelenggarakan layanan kesehatan bergerak yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan menggunakan mobil/bus medis kesehatan	33 Kab/Kota	Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara	Dinkes
	10. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA			
	a. Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara harus sukses dari segi Prestasi			
	- Prestasi Provinsi Sumatera Utara pada PON XXI Tahun 2024, dengan: Penyaluran peralatan olahraga kepada Pemprov Cabang olahraga, Penyaluran bantuan hibah kepada, KONI, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga single event dan multi event XXI Tahun 2024	-	Provinsi Sumatera Utara	
	b. Prasarana dan Sarana Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera	-	-	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	Utara harus dapat dimanfaatkan dengan baik Pasca Pelaksanaan PON XXI Tahun 2024			
	b. SUMUT JUARA adalah peningkatan atlet nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi	-	-	
	- Meningkatkan atlet berprestasi provinsi, melalui : - Penyelenggaraan kejuaraan single event dan multi event. - Pembinaan atlet pelajar melalui PPLP/D. - Kegiatan pelatihan pelatih, wasit dan juri.	1181 atlet dan 120 pelatih/wasit/juri	Provinsi Sumatera Utara.	
	10. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi mental dan Nilai-nilai Demokrasi;			Bakesbangpol
	a. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai berdasarkan demokrasi Pancasila dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada			
	- Pelaksanaan dialog kebangsaan dan deklarasi pemilu dan Pemilukada damai dengan target menghasilkan 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara dan Penguatan 300 orang antara Forkopimda, tokoh masyarakat, agama, partai politik, DPD untuk suksesnya Pemilu dan Pemilukada.			
	Pelaksanaan dialog kebangsaan dan deklarasi pemilu dan Pemilukada damai dengan target menghasilkan 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara dan Penguatan 300 orang antara Forkopimda, tokoh masyarakat, agama, partai politik, DPD untuk suksesnya Pemilu dan Pemilukada.			
	b. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dengan meminimalisir konflik sosial di masyarakat terkait Pemilu dan Pemilukada			

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	- Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat terhadap pemilih pemula dan pemilih perempuan			
	- Pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada			
	c. Edukasi pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi merupakan pemberian pengetahuan terkait pemahaman wawasan kebangsaan, revolusi mental dan nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk meminimalisir konflik sosial			
	- Sosialisasi untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD 1945	300 Orang	Provinsi Sumatera Utara.	
	- Sosialisasi untuk menggerakkan perubahan dalam cara berpikir, dan cara hidup masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila	300 Orang	Provinsi Sumatera Utara.	
	11. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)			
	- Penurunan kawasan rawan narkoba kategori bahaya, dengan kategori bahaya yang diturunkan. 245 Kel/Des melalui aplikasi siap BERSINAR yang mendapatkan penguatan melalui 4.500 Relawan, 2 lembaga yang menerima hibah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, bantuan dana rehabilitasi narkoba bagi penyalahgunaan dari masyarakat tidak mampu	491 Orang	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Bakesbangpol
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	1. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO)			
	- Pembinaan dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin	350 0rang (30 KUBE dan 200 UEP	Kab. Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Batubara, Labura, Samosir, Labusel , Padang lawas dan kota Tj Balai.	Dinsos
	2. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);			
	- Penentuan Lokasi (PENLOK) dan Penyusunan Studi Kelayakan Feasibility Studi (FS)	-	-	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan Penguatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;			
	- Rehab bangunan asrama instruktur dan ruangan pelatihan	Gedung UPTD. BLK	Gedung UPTD. BLK Kab. Simalungun	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	20.000 Orang	Sumatera Utara	
	- Pembukaan lowongan pekerjaan dan penempatan bagi calon pencari kerja melalui pelaksanaan Job Fair	3.500 Orang		
	4. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran			
	- Melaksanakan sertifikasi Standarisasi Produk UMKM melalui: Kurasi calon peserta dari Kab/Kota Bimtek seputar sertifikasi Halal, HaKI Merk dan BPOM Proses auditing dan penerbitan sertifikat	700 UMKM	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	
	- Pelaksanaan pelatihan untuk 8 kejuruan antara lain: kejuruan las, menjahit, desain grafis, tata rias pengantin, barista, teknisi HP, teknisi sepeda motor, tata boga	660 Orang	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Seleksi calon peserta magang luar negeri dan dalam negeri	905 Orang (502 Org PDN dan 403 Orang PLN		Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Rekrut, seleksi, dan pembekalan calon wirausaha baru dan pemberian bantuan sarana usaha	625 Orang		Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara
	- Melaksanakan dukungan pemasaran secara digital melalui: Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana berupa Barang	200 UMKM	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	
	- Melaksanakan fasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	50 IKM (sertifikasi halal dan merk), 5	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Dinas ESDM, Perindag Provinsi Sumatera Utara

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
		IKM (izin edar BPOM)		
	- Bimtek Literasi Digital dalam rangka peningkatan Akses Pasar	target 50 IKM		
	- Monev terhadap IKM	110 IKM		
	5. Pembangunan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani		Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	
	- Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dengan target Bantuan Benih Padi seluas 13.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 13.000 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)	Bantuan Benih Padi seluas 13.000 Ha, Bantuan Benih Jagung seluas 13.000 Ha		Dinas TPH, Disbunnak
	- Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman hortikultura dengan target pemberian bantuan Saprodi Bawang Merah seluas 120 Ha, Bantuan Saprodi Cabai Merah seluas 150 Ha (pengembangan kawasan pertanian terpadu dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian sebanyak 2 kawasan)	Bantuan Saprodi Bawang Merah seluas 120 Ha Bantuan Saprodi Cabai Merah seluas 150 Ha	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	
		2 Kabupaten		
		2 Kabupaten		
	6. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;		Kab. /Kota di Sumatera Utara.	Dinas TPH dan Disbunnak
	- Pembentukan/pengembangan petani muda dengan umur 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi	300 ; 45 orang		
	- Termanfaatkannya lahan sawah yang tidak optimal	250 Ha		Dinas TPH

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	- Peningkatan mekanisasi pertanian	675 Unit; 372 Unit; 18 Unit		Dinas TPH dan Disbunnak
	7. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;			
	- Pelaksanaan Travel Fair di dalam dan luar negeri dengan: Pembuatan paket wisata, tiket pesawat, tiket objek wisata serta perlengkapan berwisata; Event travel fair joined biro/agen perjalanan, ticketing, hotel, bank dengan target	4 kali	Negara Jerman, Provinsi Bali, Provinsi Yogyakarta, dan Kota Bandung	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
	- Penyelenggaraan event promosi wisata pada PON XXI dengan: Paket tour wisata peserta PON beserta Stakeholder; Mapping spot objek wisata saat pagelaran PON; Sosialisasi maskot PON XXI Aceh-Sumut 2024 bernama Matra (Harimau Sumatera)	1 event	Aceh-Sumatera Utara	
	8. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event;			
	- Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event, melalui : Dukungan event Pesta Danau Toba, Triathlon, Traditional Music Festival, Arung Jeram, Festival Paralayang serta Nias Pro ; Calendar of event	2 kegiatan	Kab/Kota di Sumatera Utara	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
	9. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;			
	Pengembangan Geopark kaldera Toba, dengan target 4 Geosite: - Restrukturisasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark; - Penataan Kawasan Geosite di Toba Caldera UNESCO Global Geopark; - Pengusulan destinasi pariwisata menjadi standar pariwisata berkelanjutan internasional (UNESCO)	4 Geosite	Kabupaten Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark	
	Pengembangan desa untuk menjadi tempat wisata	10 desa wisata	Kab/Kota	
	10. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah & Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;		Kab/Kota	
	Penyusunan dokumen PPKD	1 Dokumen		

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	Penyusunan dokumen Roadmap pengembangan ekonomi kreatif Provsu	1 Dokumen		
	11. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum and Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional			
	- Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agroindustri Nasional	4 Letter of Intent	Dalam Negeri dan Luar Negeri	Dinas PMPTSP
Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi	76,61 persen	Lokasi ruas jalan yang meningkatkan konektivitas Sentra Produksi Pangan, Pariwisata Bahari, Kawasan Industri, Perikanan, Perkebunan dan Perkotaan di zona Pantai Timur, yaitu : Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kab. Labuhan Batu Lokasi ruas jalan yang mengurangi disparitas wilayah pantai barat melalui pengembangan konektivitas Wisata Bahari, kawasan Industri, Perkebunan dan Perkotaan, yaitu : Kab. Madina, Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Sibolga Padang Sidempuan, Padang Lawas Lokasi ruas jalan yang mendukung konektivitas Kawasan Perbatasan, yaitu: Kab. Mandailing Natal, Kab. Labuhan Batu dan Kab. Padang Lawas.	Dinas PUPR
	2. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi	1.000 Ha.	Kab. Simalungun, Kab. Batubara dan Kab. Asahan	
	3. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman			Dinas Perkim
	Verifikasi Teknis Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha dan Legislasi RP3KP Provinsi Sumatera Utara	23 Dokumen	Kab./Kota se-Sumatera Utara (untuk Rencana Aksi a) 16 Kabupaten/Kota (untuk Rencana Aksi b) Kab. Deli Serdang, Labuhanbatu, Langkat, Simalungun, Labuhanbatu Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan. (untuk Rencana Aksi c) Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Langkat, Kota Binjai, Kab. Padanglawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal,	

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
			Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Selatan. (untuk Rencana Aksi d). 18 Kabupaten/Kota. (untuk Rencana Aksi e).	
	Pembinaan Keswadayaan Calon Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	500 Rumah Tangga		
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha yang telah ditangani.	500 Rumah Tangga 9 Kelompok Masyarakat		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha	23 Laporan		
	Pendataan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 Ha.	18 Sistem Informasi		
	4. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang		Kec. STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang	
	5. Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias			
	6. Pengembangan SPAM Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) dan Pembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi)			
	7. Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah		Sungai Deli Kota Medan dan Sungai Bingei Kota Binjai (untuk Rencana Aksi a s.d. b).	Dinas PUPR
	8. Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu	3.625 rumah tangga	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Dinas Perindag ESDM
	9. Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Pariwisata	3 EBT	Kabupaten Samosir, Batu Bara, Humbang Hasundutan	
	10. Pembangunan Satu Data Digital Daerah	1.000 Metadata	Medan	Dinas Kominfo

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	11. SUMUT TANGGUH BENCANA	54 Desa	Kabupaten di Sumatera Utara.	BPBD
	12. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan "SUMUT HIJAU"	28,61 Juta Ton CO2Eq	Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	DLHK
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	1. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			
	- Meningkatkan kualitas Opini BPK Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akun tabel	WTP	Medan	BPKAD
	2. Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Klinik RB;			
	Peningkatan pelaksanaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	BB (70)	Provinsi Sumatera Utara	Biro Organisasi
	3. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASN di dalam dan luar negeri;			
	Pelatihan Pengembangan Pariwisata berbasis Kearifan Lokal	40 orang		
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	40 orang		
	Pelatihan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	40 orang		
	Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah	40 orang		
	Pelatihan Aset dan Barang Milik Daerah	40 orang		
	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1	40 orang		
	Pelaksanaan pelatihan ASN Pemprovsu di luar Negeri	40 orang		
	MoU dengan Negara tujuan untuk pelaksanaan pelatihan di luar Negeri dengan target 2 MoU	2 MoU		

Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Target	Keterangan Indikasi Lokasi	PD Penanggungjawab
	4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui: ● Planning and Innovation Corner (PIC)			
	Melakukan coaching clinic terkait perencanaan pembangunan	34 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Bappelitbang
	Melakukan coaching clinic IID, Bimtek inovasi daerah, Innovation Day, Forum CSR, lomba inovasi (inotek)	33 Kab./Kota		
	● Event “North Sumatera Innovation and Achievement Summit”			
	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan perkantoran terpadu.			Dinas PUPR
	Pembangunan/perluasan kantor Gubernur SUMUT dengan metode Design and Build t	1 unit	Jalan R.A. Kartini (Eks Medan Club), No.36, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Kota, Kota Medan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1 Indikator Kinerja Makro Provinsi Sumatera Utara

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pertumbuhan ekonomi, IPM, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Inflasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Sumatera utara selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional. Target indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 untuk IPM dan Inflasi ditetapkan berdasarkan target RPD dan capaian 2023 dan 6 (enam) indikator lainnya merupakan pembahasan hasil Rakortekrenbang dan pemutakhiran indikator makro yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Mengacu dan memedomani pemutakhiran indikator makro hasil Rakortekrenbang, target indikator makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO	Indikator	Capaian 2023	Target RPD	Target RKPD
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,01	5,20 - 5,40	5,20- 5,40
2.	IPM	75,13	73,10 - 73,40	76,00
3.	Persentase Kemiskinan	8,15	8,20 - 8,00	7,46-6,96
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,89	5,50 - 5,20	5,27- 5,56
5.	Inflasi	2,25	2,75±1%	2,75±1%
6.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		-	1,00
7.	Indeks Gini	0,309	0,322	0,303-0,305
8.	IMM		-	0,53
9.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta Ton CO2eq)	25,16	30,16	30,16

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)		TARGET KINERJA
			TARGET	REALISASI	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1.	IPM	Poin	68,65-69,15	75,13	76,00
2.	Indeks Pendidikan	Poin	68,75-69,25	70,18	71,37
3.	Indeks Kesehatan	Tahun	75,70-76,20	82,57	83,10
4.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.77	91,31	91,50
5.	LPE	Persen	4,00 – 5,00	5,01	5,20-5,40
6.	Inflasi	Persen	2,25	2,25	2,75±1
7.	Gini Rasio	Poin	0,311	0,309	0,305-0,303
8.	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90-7,90	8,15	7,46-6,96
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,4 - 5,4	5,89	5,56-5,27
10.	NTP	Poin	114,41	129,04	134,50
11.	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	7.10	2,11	7,25
12.	Indeks Infrastruktur	Poin	0,74	0,75	0,759
13.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta Ton CO2eq	31,06	29,05	30,16
14.	Persentase Jalan Mantap	Persen	78,55	76,5	**78,61**
15.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	-	70,95	74,36
16.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	60	54,85	57,10
17.	Indeks Williamson	Poin	-	0,416	0.384
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,20	72,80	**77,20***
19.	Indeks Risiko Bencana	Poin	143,51	140,73	140,00
20.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat	70,00 (BB)	75,18 (BB)	81,10 (A)
21.	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
22.	Nilai SAKIP	Poin Predikat	78,55	68,85(B)	72,00 (BB)
23.	Indeks Pelayanan Publik	Poin Predikat	4,01(A-)	3,51	4,1(A-)
24.	Indeks Inovasi Daerah	Poin Predikat	-	53,76	57,50-60,00 (inovatif)
25.	Peringkat PPD	Peringkat	-	12	12

Sumber : Bappelitbang Provsu Tahun 2024, data diolah

7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKU PD/IKK)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian	Rakortek Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,73	5,01	5,20-5,40	5,20-5,40	Seluruh PD
2	Laju Inflasi	Persen	2,00	2,25	1,75 – 3,75	2,75±1%	Seluruh PD
3	Indeks Gini	Poin	0,326	0,309	0,303 – 0,305	0,303 – 0,305	Seluruh PD
4	Indeks Williamson	Poin	0,416	0,560	Tidak Dibahas	0,384	Seluruh PD
5	Persentase Kemiskinan	Persen	8,33	8,15	6,96 – 7,46	7,46-6,96	Seluruh PD
6	Jumlah Penduduk Miskin	orang	1.262 .090	1.239.710	Tidak Dibahas	1.229.710	Seluruh PD
7	Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	Poin	72,77	75,13	Tidak Dibahas	75,50-76,50 (76,00)	Seluruh PD
8	Indeks Pendidikan	Poin	69,34	70,18	Tidak Dibahas	70,10-72,64 (71,37)	Dinas Pendidikan
9	Indeks Kesehatan	Poin	76,32	82,57	Tidak Dibahas	82,90-83,30 (83,10)	Dinas Kesehatan
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,06	91,31	91.98	91,4	Dinas P3 AKB
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,33	69,18	Tidak Dibahas	70,16	Dinas P3 AKB
12	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	9,82	Tidak Dibahas	10,01	Dinas Pendidikan
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,48	Tidak Dibahas	13,68	Dinas Pendidikan
14	APK SM Sederajat	Persen	105,0 7	107,4	Tidak Dibahas	99,44	Dinas Pendidikan
15	APM SM Sederajat	Persen	71,72	74,75	Tidak Dibahas	77,15	Dinas Pendidikan
16	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,61	73,67	Tidak Dibahas	73,50-74,52 (74,01)	Dinas Kesehatan
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,75	71,06	Tidak Dibahas	74,12	Dinas Ketenagakerja an
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,16	5,89	5,50 – 5,20	5,56-5,27	Dinas Ketenagakerja an
19	Jumlah Penganggur	Jiwa	413.0 00	472000	Tidak Dibahas	419.780-397.885	Dinas Ketenagakerja an
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
II.A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**						
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	Persen	54,30	47.34	Tidak Dibahas	57.4	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	41.75	Tidak Dibahas	43.4	Dinas Pendidikan
2	**KESEHATAN**						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	/1.000 KH	2,19	3,61	Tidak Dibahas	3,08	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	Persen	12,98	10,10	Tidak Dibahas	9,72	Dinas Kesehatan

2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	79,40	72,46	118	61,87	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi *Stunting*	Persen	21,10	18,90	13	17,5 – 15,5	Dinas Kesehatan
2.5	Capaian *Average Length of Stay* (ALOS) Rumah Sakit Jiwa	Hari	67,25	60	Tidak Dibahas	35	RS. Jiwa M. Ildrem
2.6	Capaian Persentase BOR (*Bed Occupancy Rate)* Rumah Sakit Jiwa	Persen	83,69	89	Tidak Dibahas	75	RS. Jiwa M. Ildrem
2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Jiwa	Persen	NA	-	Tidak Dibahas	85	RS. Jiwa M. Ildrem
2.8	Persentase *Bed Occupancy Rate* BOR) Rumah Sakit Haji	Persen	67	79	Tidak Dibahas	70	RS. Haji Medan
2.9	*Length Of Stay* (LOS) Rumah Sakit Haji	Hari	4	4	Tidak Dibahas	4	RS. Haji Medan
2.10	Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Haji	Persen	85,02	85,20	Tidak Dibahas	87	RS. Haji Medan
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Indeks Infrastruktur	Poin	0,767	0,75	Tidak Dibahas	0,759	Dinas PUPR
3.2	Persentase panjang jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	80,46	78,13	84,5	78,61	Dinas PUPR
3.3	Persentase panjang jembatan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persen	86,05	83,45	Tidak Dibahas	86.48	Dinas PUPR
3.4	Nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Pemprovsu	Persen	54,19	54,85	Tidak Dibahas	57,10	Dinas PUPR
3.5	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	58,16	58,62	Tidak Dibahas	62,18	Dinas PUPR
3.6	Nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi	Persen	75,61	-	Tidak Dibahas	85,61	Dinas PUPR
3.7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	Persen	15,22	16,52	Tidak Dibahas	25,02	Dinas PUPR
3.8	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional	Persen	-	NA	Tidak Dibahas	9,47	Dinas PUPR
3.9	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses Pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional	Persen	5,87	NA	Tidak Dibahas	17,47	Dinas PUPR
4	**PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**						
4.1	Akses Rumah Tangga terhadap hunian yang layak	Persen	67,26	70,95	74,36	74,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	**KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97	100	Tidak Dibahas	100	Satpol PP
5.2	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75	100	Tidak Dibahas	100	Satpol PP
5.3	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Politik	Orang	600	2160	Tidak Dibahas	800	Bakesbangpol
5.4	Jumlah Ormas yang terbina dan Aktif	Jumlah Ormas	120	112	Tidak Dibahas	60	Bakesbangpol

5.5	Jumlah Kawasan Bahaya Narkoba menjadi Kawasan Waspada	Desa	272		Tidak Dibahas	210	Bakesbangpol
5.6	Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik	Peringkat Provinsi	8	8	Tidak Dibahas	7	Bakesbangpol
5.7	Jumlah Masyarakat yang menerima Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Revolusi Mental	Orang	1.550	2160	Tidak Dibahas	1700	Bakesbangpol
5.8	Indeks Risiko Bencana	Poin	142.51	140,73	Tidak Dibahas	140,00	BPBD
5.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten/Kota	3	4	Tidak Dibahas	4	BPBD
5.10	Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana (Kabupaten/Kota)	Kabupaten/Kota	NA	5	Tidak Dibahas	2	BPBD
6	**SOSIAL**						
6.1	Persentase PSKS yang dikelola oleh Penyelenggara Sosial.	Persen	5.759 Orang	N/A	Tidak Dibahas	34,03 % (1.960 orang)	Dinas Sosial
6.2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis dan PMKS lainnya yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dalam Panti.	Persen	100 (1.954 orang)	100 % (2025 orang)	100	1,24 % (2.794 orang)	Dinas Sosial
6.3	Persentase Keluarga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial (keluarga miskin 1.344.860 orang)	Persen	0,14 %	0,37% (31680)	Tidak Dibahas	0,12 % (350 orang)	Dinas Sosial
6.4	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat provinsi yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
II.B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**						
1	**TENAGA KERJA**						
1.1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,047	0,34	75%	1,11	Dinas Ketenagakerjaan
1.2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	10,12	60,25	Tidak Dibahas	60,75	Dinas Ketenagakerjaan
1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	7,85	11,55	Tidak Dibahas	11,65	Dinas Ketenagakerjaan
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	50,95	67,54	Tidak Dibahas	53,43	Dinas Ketenagakerjaan
1.5	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	93,33	87.88	Tidak Dibahas	100	Dinas Ketenagakerjaan
1.6	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Persen	25,32	25,32	Tidak Dibahas	12,66	Dinas Ketenagakerjaan
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**						
2.1	Persentase implementasi PPRG (Perencanaan dan	Persen	94	-	Tidak Dibahas	-	Dinas P3AKB

	Penganggaran Responsif Gender) di tingkat Provinsi						
2.2	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	/100.000	6	N/A	Tidak Dibahas	15	Dinas P3AKB
2.3	Rasio kekerasan terhadap Anak	/100.000	19	19	Tidak Dibahas	2,7	Dinas P3AKB
2.4	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	Persen	38	38	Tidak Dibahas	77	Dinas P3AKB
2.5	TFR/ *Total Fertility Rate* (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,95	2,39	2,30	2,36	Dinas P3AKB
3	**KETAHANAN PANGAN**						
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,20	N/A	92,7	88,70	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	**LINGKUNGAN HIDUP**						
4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	Poin	74,11	72,8	77,20	77,20	Dinas LH & Kehutanan
4.2	Indeks Kualitas Udara	poin	89,69	90,9	Tidak Dibahas	82,20	Dinas LH & Kehutanan
4.3	Indeks Kualitas Air	poin	61,20	60,27	Tidak Dibahas	75,80	Dinas LH & Kehutanan
4.4	Indeks Kualitas Lahan	poin	48,69	49,77	Tidak Dibahas	71,05	Dinas LH & Kehutanan
4.5	Indeks Kualitas air laut	poin	85,19	68,56	Tidak Dibahas	68,67	Dinas LH & Kehutanan
4.6	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	25,16	29,05	19,04	-	Dinas LH & Kehutanan
4.7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	NA	NA	0,562		Dinas LH & Kehutanan
5	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
5.1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	persen	84,75	88,86		98	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.2	Persentase Penerbitan KIA dalam pelayanan Adminduk	Persen	25	38,5	62	60	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.3	Persentase Jumlah OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	Persen	85,71	100	Tidak Dibahas	100	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.4	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah	1.322	1071	Tidak Dibahas	950	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.5	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah	3.046	3132	Tidak Dibahas	3.196	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.6	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	31	72	(0,18%)	80	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	Jumlah	25	28	(3,36%)	11	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil
5.8	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	Jumlah	187	253	Tidak Dibahas	76	Dinas Pemdes, Kependuduka n & Capil

5.9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	Persen	30 (3650 LKD)	58% (9425 LKD)	Tidak Dibahas	5,23%	Dinas Pemdes, Kependudukan & Capil
6	**PERHUBUNGAN**						
6.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	60,63	70,24	Tidak Dibahas	59,04	Dinas Perhubungan
6.2	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,565	N/A	0,626	0,644	Dinas Perhubungan
6.3	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan jalan	Persen	23,08 (3Termina)	30,77	Tidak Dibahas	46,15 (1 Terminal)	Dinas Perhubungan
6.4	*On Time Performance* Layanan Transportasi	Persen	83,33	N/A	Tidak Dibahas	83,61	Dinas Perhubungan
7	**KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN**						
7.1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional	Persen	77,20	N/A	85	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan meta data sektoral sesuai standar	Persen	90	92,8	Tidak Dibahas	92	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.3	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persen	NA	N/A	10	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.4	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber	Orang	NA	N/A	Tidak Dibahas	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik	Poin	2,81	3,21	3,45	3,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.6	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	5,9	5,9	6	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
8.1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen		NA	4	120 unit	Dinas Koperasi UKM
8.2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen		NA	5,2	4,6	Dinas Koperasi UKM
8.3	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	80 unit		Tidak Dibahas	3,6	Dinas Koperasi UKM
8.4	Persentase UMKM yang didukung Pemasarannya	Persen	7,87	7,87	Tidak Dibahas	5	Dinas Koperasi UKM
8.5	Pertumbuhan Wirausaha	Jumlah	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil & 21 Usaha Menengah	167 Usaha Mikro, 88 Usaha Kecil dan 21 Usaha Menengah	0,03 %	0,01	Dinas Koperasi UKM

8.6	Jumlah Usaha Kecil yang Menyelesaikan Sertifikasi (HaKI, Halal, Ijin Edar Produk dan lain – lain)	Jumlah Usaha Kecil	164	164	Tidak Dibahas	30	Dinas Koperasi UKM
9	**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**						
9.1	Jumlah Investor PMDN	Investor	9.146	17.278	Tidak Dibahas	16.908	Dinas PMPTSP
9.2	Jumlah Investor PMA	Investor	1.613	3.036	Tidak Dibahas	2919	Dinas PMPTSP
9.3	Nilai Investasi PMDN	Rp. Triliun	22,78	21,57	Tidak Dibahas	22,69	Dinas PMPTSP
9.4	Nilai Investasi PMA	Rp. Triliun	18,88	17,48	Tidak Dibahas	19,68	Dinas PMPTSP
9.5	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMDN	Orang	25.682	60.373	Tidak Dibahas	39828	Dinas PMPTSP
9.6	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia PMA	Orang	6.702	8.857	Tidak Dibahas	8692	Dinas PMPTSP
9.7	Jumlah izin yang terbit	Dokumen	1.565	2.086	Tidak Dibahas	1771	Dinas PMPTSP
10	**KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**						
10.1	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga berprestasi	Persen	96,87	92,31	Tidak Dibahas	98,46	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
10.2	Persentase Pembinaan Atlet Muda (atlet pelajar)	Persen	51,06	51,67	Tidak Dibahas	79,27	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
10.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	52,50	N/A	Tidak Dibahas	55,70	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
11	**KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						
11.1	Persentase Peningkatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen	12,42	12,42	Tidak Dibahas	17,88	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
11.2	Persentase Cagar Budaya dan warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	48,54	48,54	51,73	51,73	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
11.3	Indeks Pembangunan Pariwisata	Poin	3,80	-	Tidak Dibahas	4,00	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
11.4	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pariwisata	Persen	51,60 %	51,60%	Tidak Dibahas	84%	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
11.5	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	29.963.680.000	N/A	32.091.101.280	32.091.101.280	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
11.6	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi Makan dan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7,18	6,57	Tidak Dibahas	7,25	Disbudpar dan Ekonomi Kreatif
12	**PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**						
12.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	19,41	16,5	62	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.2	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	49	50	Tidak Dibahas	54	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.3	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	86	103	Tidak Dibahas	120	Dinas Perpustakaan dan Arsip
12.4	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Persen	39,95	67	71,5	71,5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
13	**PERTANIAN**						
13.1	*Jumlah Produksi Tanaman Pangan*						

	1. Padi (ton GKG)	Ton GKG	3.992.474	4.049.438	2.178.002	4.029.552	Dinas Ketapang, TPH
	2. Jagung (ton pipilan kering)	Ton pipilan kering	1.813.518	1.898.955	2.053.567	1.816.683	Dinas Ketapang, TPH
	3. Kedelai (ton)	Ton	8.248	15.693	13.000	8.314	Dinas Ketapang, TPH
13.2	*Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan*						
	1. Padi (ton/Ha)	Ton/Ha	5,26	5,32	Tidak Dibahas	5,37	Dinas Ketapang, TPH
	2. Jagung (ton/Ha)	Ton/Ha	6,26	6,23	Tidak Dibahas	6,27	Dinas Ketapang, TPH
	3. Kedelai (ton/ha)	Ton/Ha	1,59	1,59	Tidak Dibahas	1,60	Dinas Ketapang, TPH
13.3	*Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura*						
	1. Bawang Merah	Ton Umbi Basah	64.473	65,526	65.871	33.766	Dinas Ketapang, TPH
	2. Cabai	Ton	220.085	205,96	292.462,60	204.616	Dinas Ketapang, TPH
	3. Sayur-sayuran	Ton	1.247.355	1232583	Tidak Dibahas	1.066.232	Dinas Ketapang, TPH
	4. Buah-buahan	Ton	1.377.864	1547654	Tidak Dibahas	1.265.291	Dinas Ketapang, TPH
	5. Lada	Ton	N/A	243,09	254,75	N/A	Dinas Ketapang, TPH
	6. Karet	Ton	N/A	310.100	324.972,84	N/A	Dinas Ketapang, TPH
13.4	*Produktivitas Tanaman Hortikultura*						
	1. Bawang Merah (ton)	Ton/Ha	15,10	8,28	Tidak Dibahas	13,93	Dinas Ketapang, TPH
	2. Cabai (ton)	Ton/Ha	14,77	10,36	Tidak Dibahas	10,81	Dinas Ketapang, TPH
13.5	Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)	Persen	2,02	0,0106	Tidak Dibahas	2,57	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.6	Persentase Peningkatan Produktivitas komoditas perkebunan rakyat (%)	Persen	1,89	N/A	Tidak Dibahas	2,42	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.7	NTP Sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin	147,36	N/A	Tidak Dibahas	159,93	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.8	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	Persen	13,20	N/A	Tidak Dibahas	13,46	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.9	NTP Sub sektor Peternakan	Poin	106,05	94,66	Tidak Dibahas	102,01	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.10	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Persen	1,20	N/A	Tidak Dibahas	1,32	Dinas Perkebunan dan Peternakan

13.11	Persentase Peningkatan Produksi Telur	Persen	2,16	N/A	Tidak Dibahas	2,16	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.12	Persentase Peningkatan Produksi susu	Persen	2,70	N/A	Tidak Dibahas	3,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13.13	Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	Ha	57,054	54,35	Tidak Dibahas	54,054	Dinas LH dan Kehutanan
13.14	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	200 Ha/Tahun	275,050	271,056	207	274,750	Dinas LH dan Kehutanan
13.15	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	0,60	0,72	Tidak Dibahas	0,62	Dinas LH dan Kehutanan
13.16	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Ton	667.517,20	701.341,21	Tidak Dibahas	690.820,91	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.17	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	449.571,70	482.343,21	298.107,31	461.559,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.18	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	217.945,50	218.998	229.260,76	229.260,76	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.19	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/Th	49,15	51,32	50,96	50,34	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.20	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	106,39	108,36	Tidak Dibahas	109,58	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.21	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	Persen	97,73	97,30	Tidak Dibahas	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
13.22	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	Persen	NA	NA	Tidak Dibahas	27.348,57	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	**PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM**						
14.1	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	100	100	Disperindag & ESDM
14.2	Persentase Desa yang teraliri Listrik	Persen	99,52	98,89	100	99,10	Disperindag & ESDM
14.3	Persentase Usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Peraturan	Persen	80,16	64,12	Tidak Dibahas	87,50	Disperindag & ESDM
14.4	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Persen	1,43	5.42	Tidak Dibahas	4.65	Disperindag & ESDM
14.5	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	Persen	1,80	3,54	Tidak Dibahas	2.17	Disperindag & ESDM
III	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KELITBANGAN**						
1.1	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	67,83 (B)	68,85(B)	Tidak Dibahas	72,00 (BB)	Bappelitbang
1.2	Indeks Inovasi Daerah	Poin	54,36	53,76	Tidak Dibahas	57,50-60,00 (inovatif)	Bappelitbang
1.3	Peringkat Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Peringkat	18	12	Tidak Dibahas	12	Bappelitbang
2	**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**						
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	Tidak Dibahas	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.2	Penetapan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Dibahas	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Dibahas	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.4	Persentase laporan Aset daerah yang disusun	Persen	75	100	Tidak Dibahas	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.5	Persentase SK Gubernur Sumatera Utara atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persen	70	NA	Tidak Dibahas	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	**PENDAPATAN DAERAH**						
3.1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	57,63	56,82	Tidak Dibahas	62,39	Bapenda
3.2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	12,60	-0,0147	Tidak Dibahas	9,75	Bapenda
3.3	Persentase kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya	Persen	16,15	0,1264	Tidak Dibahas	1,2	Bapenda
3.4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	Persen	297,46	-0,278	Tidak Dibahas	2,0	Bapenda
3.5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya	Persen	14,74	-0,0214	Tidak Dibahas	10,80	Bapenda
3.6	Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya	Persen	6,70	N/A	Tidak Dibahas	4,88	Bapenda
3.7	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	BB	3,51	3,57	4,1(A-)	Bapenda
4	**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						
4.1	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	Persen	NA	NA	Tidak Dibahas	35 (8.750 orang)	BPSDM
4.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (persen)	Persen	132 (477 Orang)	83	Tidak Dibahas	N/A	BPSDM
4.3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	Persen	148 (12643org)	106	Tidak Dibahas	N/A	BPSDM
5	**KEPEGAWAIAN**						
5.1	Nilai Sistem Merit	Poin	333,5 (Sangat Baik)	333,5	Tidak Dibahas	345 (Sangat Baik)	Badan Kepegawaian
6	**PENGAWASAN**						
6.1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini	WTP	WTP	Tidak Dibahas	WTP	Inspektorat
6.2	Nilai SAKIP	Nilai (Kategori)	67,83 (B)	68,85(B)	Tidak Dibahas	72,00 (BB)	Inspektorat
6.3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persen	74,67	81,67	Tidak Dibahas	82	Inspektorat
6.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Inspektorat

	Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara						
6.5	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Skor	Level 3	Level 3	Tidak Dibahas	3,60	Inspektorat
6.6	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Skor	Level 3	Level 3	Tidak Dibahas	3,2	Inspektorat
6.7	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	79	83	Tidak Dibahas	85	Inspektorat
6.8	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit	Persen	64,90	54,55	Tidak Dibahas	72,5	Inspektorat
7	**PENGHUBUNG**						
7.1	Nilai Kepuasan Pelayanan	Poin	89,32	90,97	Tidak Dibahas	91,00	Badan Penghubung
8	**SEKRETARIAT DPRD**						
8.1	Persentase fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	95	100	Tidak Dibahas	100	Sekretariat DPRD
8.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen	45	45	Tidak Dibahas	50	Sekretariat DPRD
8.3	Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	Persen	40	40	Tidak Dibahas	60	Sekretariat DPRD
9	**SEKRETARIAT DAERAH**						
9.1	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Predikat	2,7	2,93	Tidak Dibahas	2,9	Sekretariat Daerah
9.2	Persentase Kerja sama yang difasilitasi	Persen	100	N/A	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.3	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Persen	70	96	Tidak Dibahas	75	Sekretariat Daerah
9.4	Proposal Permohonan Belanja Hibah yang Ditindaklanjuti	Persen	70	N/A	Tidak Dibahas	75	Sekretariat Daerah
9.5	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi	Produk Hukum	48 Produk Hukum	N/A	Tidak Dibahas	30 Produk Hukum	Sekretariat Daerah
9.6	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Produk Hukum	883 Produk Hukum	N/A	Tidak Dibahas	700 Produk Hukum	Sekretariat Daerah
9.7	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja sama dan Naskah Hukum Lainnya yang di eksaminasi	Produk Hukum	720 Produk Hukum	N/A	Tidak Dibahas	850 Produk Hukum	Sekretariat Daerah
9.8	Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provsu.	Produk Hukum	30 Produk Hukum	NA	Tidak Dibahas	30 Produk Hukum	Sekretariat Daerah

9.9	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	31 Perkara	NA	Tidak Dibahas	25 Perkara	Sekretariat Daerah
9.10	Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Kasus	14 Kasus	NA	Tidak Dibahas	15 Kasus	Sekretariat Daerah
9.11	Persentase perumusan kebijakan lingkup perekonomian yang diimplementasikan	Persen	100	NA	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.12	Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	71,43	NA	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.13	Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persen	NA	NA	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.14	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.15	Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Kabupaten/Kota	NA	Tidak Dibahas	10 Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
9.16	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah	18	NA	Tidak Dibahas	20	Sekretariat Daerah
9.17	Persentase Realisasi Fisik dan non fisik pada perangkat daerah	Persen	95	NA	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.18	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai SAKIP	67,83	68,85	Tidak Dibahas	72,00 (BB)	Sekretariat Daerah
9.19	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	3,99(B)	3,51	Tidak Dibahas	4,1(A-)	Sekretariat Daerah
9.20	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	N/A	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.21	Nilai capaian pelaporan kinerja	Predikat	11,25	N/A	Tidak Dibahas	12,00	Sekretariat Daerah
9.22	Persentase Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Persen	100	N/A	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.23	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu	Persen	98,45		Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.24	Persentase Fasilitasi materi pimpinan	Persen	100	N/A	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
9.25	Persentase Pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Sekretariat Daerah
IV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	NTP	Poin	114,41	129,04	Tidak Dibahas	134,50	Dinas Ketapang dan Hortikultura, Disbunak, Dinas Kelautan & Perikanan
1.1	NTP Tanaman Pangan	Persen	95,44	100,68	Tidak Dibahas	100,64	Dinas Ketapang dan TPH
1.2	NTP sub sektor Tanaman Perkebunan	Poin	147,36	172,85	Tidak Dibahas	159,93	Dinas Perkebunan dan Peternakan

1.3	NTP Hortikultura	Persen	93,15	101,6	Tidak Dibahas	100,10	Dinas Ketapang dan TPH
1.4	NTP Perikanan/Kelautan	Persen	106,39	106	Tidak Dibahas	105,79	Dinas Kelautan Perikanan
1.5	NTP sub sektor Peternakan	Poin	106,05	94,66	Tidak Dibahas	102,01	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	Indeks Infrastruktur	Persen	0,767	0,75	Tidak Dibahas	0,759	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM
4	Jumlah Izin yang terbit	Jumlah izin	1.565	2086	Tidak Dibahas	1771	Dinas PMTSP
5	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	Orang	11.153		Tidak Dibahas		Dinas Ketenagakerjaan
6	Angkatan Kerja (ribu orang)	Orang	7.874		Tidak Dibahas		Dinas Ketenagakerjaan
7	Persentase Guru SMA/SLB bersertifikasi	Persen	54,30	47,34	Tidak Dibahas	57.4	Dinas Pendidikan
8	Persentase Guru SMK bersertifikasi	Persen	49,77	41,75	Tidak Dibahas	43.4	Dinas Pendidikan
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin (Predikat)	B	75,18 (BB)	Tidak Dibahas	81,10 (A)	Biro Organisasi, Inspektorat, BPKAD, Bappelitbang
10.	Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	Persen	79,53	80,34	82,58 – 85,83 kiranya bisa disepakati	81,24	Bakesbangpol
11.	Aspek Kebebasan	Skor	88,51	N/A	Tidak Dibahas	88,65	Bakesbangpol
12.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	142,51	140,7	Tidak Dibahas	140,00	BPBD
V	**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**						
1	**Pendidikan**						
1.1	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Dinas Pendidikan
1.2	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**						
2.1	Persentase Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.2	Persentase Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						

3.1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	63,77	Tidak Dibahas	100	Dinas PUPR
3.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	N/A	Tidak Dibahas	100	Dinas PUPR
4	**Perumahan Rakyat**						
4.1	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	0	Tidak Dibahas	100	Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	0	Tidak Dibahas	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98	67,26	74,36	N/A	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada di Provinsi	Persen	100	100	Tidak Dibahas	100	Satpol PP
6	**Sosial**						
6.1	Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.2	Persentase Jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.3	Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.4	Persentase Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial
6.5	Persentase Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	Dinas Sosial

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2024

Catatan:

1. Indikator kinerja daerah provinsi yang termuat di dalam dokumen RPD Provinsi Sumatera Utara tidak semua dibahas pada Rakortek Tahun 2024;
2. Pembahasan indikator pada Rakortek Tahun 2024 adalah yang menjadi indikator kinerja kementerian/lingkungan

7.4 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Indikator kinerja program prioritas pada Perangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Program
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
DINAS PENDIDIKAN			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	%
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%
DINAS KESEHATAN			
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	/100.000 KH
		Prevalensi Stunting Pada Balita	%
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana	%
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Per 100.000 Kelahiran Hidup
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Minimal Memiliki 9 (Sembilan) Jenis Tenaga Kesehatan	%
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	%
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP			
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	%
BADAN KEPEGAWAIAN			
8	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	%
BAPENDA			
9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%
10	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%
DINAS SOSIAL			
11	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Bagi PPKS	Persentase PPKS Yang Menerima Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%
12	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%
13	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran/ Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	%
DINAS PERHUBUNGAN			
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi	%
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan Pelayaran	Terlaksananya Konektivitas Simpul Transportasi di Provinsi Sumatera Utara	Rasio
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikan	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan	Kg/kap/ tahun
17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Yang Tersedia	%
18	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau - Pulau Kecil	Persentase Rekomendasi Izin Perikanan Tangkap Atau Pemanfaatan Ruang Laut Yang Terbit	%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Diawas	%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
20	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	%
21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	%
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI PENDUDUK DAN PENCATATAN			
22	Program Penataan Desa	Persentase Kabupaten/Kota Yang Desanya Tertata Dengan Baik	%
23	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi Kerja sama Desa	%
24	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Desa Dengan Pengelolaan Administrasi Sesuai Standar	%
25	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kabupaten/Kota Yang Memiliki Desa Dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%
26	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna Yang Melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	%
27	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Target Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Dukcapil	%
INSPEKTORAT			
28	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan	
29	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Terselenggaranya Penyusunan PKPT Dan Penilaian Tata Kelola Pemerintahan	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
30	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Kebijakan Yang Tidak Saling Bertentangan Dan Menghambat	%
31	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Dengan Kepatuhan Baik Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal	%
32	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Moda	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Investasi	
33	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kesepakatan LO	
34	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Data Calon Investor Untuk Kegiatan Forum Bisnis	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
35	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%
36	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/Pengelola Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	%
37	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi	%
38	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pelayanan Pemberdayaan Dan Perlindungan	%
39	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pelaku Usaha Kecil Yang Telah Mengikuti Pelatihan Pemasaran	%
		Persentase Usaha Kecil Yang Bermitra Dan Meningkat Omzetnya	%
		Persentase Usaha Kecil Yang Mampu Menyelesaikan Proses Standarisasi Kualitas	%
40	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru Yang Meningkat Omzetnya Pasca Pelatihan	%
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
41	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin
42	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Poin
43	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menyediakan Dan Menggunakan Data Statistik Sektoral	%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
44	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	%
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA			
45	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Skor
46	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan Dan Gizi	%
47	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan	%
48	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	%
49	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Yang Berhasil Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani.	%
		Persentase Kelompok Tani Dengan Peningkatan Kelasnya	%
50	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%
		Persentase terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	%
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			
51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Yang Difasilitasi Ketersediaan Sarana Perkebunan (Ha)	Ha
		Persentase Kenaikan Rata-rata Produksi Ternak (Persen)	%
		Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Perkebunan Dan Peternakan Yang Diawasi Dan Dibina (Persen)	%
52	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kenaikan Rata-rata Populasi Ternak (Persen)	%
52	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	%
53	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Yang Dikendalikan Dan Ditangani (Ha)	Ha
54	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Perkebunan Dan Peternakan Yang Diawasi Dan Dibina (Persen)	%
56	Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapat Penyuluhan Pemberdayaan	%
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
59	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Pengembangan Perumahan	
60	Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Dengan Luas 10 Ha Sampai Dengan Di bawah 15 Ha	
61	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum	Meningkatnya PSU Permukiman	
62	Program Bidang Pertanahan	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	
		Koordinasi dalam rangka penataan *asset reforma* agraria	KK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
63	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG**)**	
64	Program Perlindungan Perempuan	Rate/Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (Per 100.000 Penduduk Perempuan	
65	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	
66	Program Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Gender Dan Anak	
67	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%
68	Program Perlindungan Khusus Hak Anak	Rate/Angka Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Penduduk Usia Anak)	%
69	Pengendalian Penduduk		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
		Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk	
70	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR)	%
		Menurunnya Angka Kelahiran Pada Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
71	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan	%
BADAN PENANGGUNGALAN BENCANA DAERAH			
72	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
73	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lahan	Persentase Titik Sampling Badan Air Yang Memenuhi Baku Mutu	%
74	Program Pengendalian B3 Dan Limbah B3	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)	%
75	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha/Dan Atau Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	%
76	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga Yang Berperan Aktif Dalam Program Penyelamatan Lingkungan	%
77	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan Kepada Masyarakat	%
78	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Yang Ditindaklanjuti Terhadap Penanganan Kasus Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup	%
79	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kinerja Pengelolaan Persampahan	poin
80	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		Persentase terlaksananya pengendalian emisi gas rumah kaca	%
81	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Regulasi Instrumen Penataan Lingkungan Hidup Yang Tersusun	%
82	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	poin
83	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha
84	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Cakupan Perlindungan Dan Konservasi Pada Unit Pengelolaan Hutan	%
85	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Cakupan Pengelolaan DAS	
86	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Cakupan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
DINAS KETENAGAKERJAAN			
87	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%
88	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	%
89	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam/luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	%
90	Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	%
91	Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan	%
92	Pembangunan kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI, DAN SUMBERDAYA MINERAL			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
92	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%
93	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri Yang Difasilitasi	%
94	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri Yang Tersedia	%
95	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan SKA Yang Tepat Waktu	%
96	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pusat Distribusi Regional/Provinsi Yang Difasilitasi	
97	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%
97	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%
99	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%
100	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Negeri Yang Difasilitasi	
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN			
101	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%
102	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%
103	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Tingkat Provinsi	%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
104	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Perda
		Terlaksananya koordinasi fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat masuk fasilitasi	Perkada
105	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	%
106	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	%
107	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	
108	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%
109	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional	
110	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terbangunnya Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
111	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Luas Permukiman Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Yang Terlayani	
112	Program Pengembangan Permukiman	Persentase akses rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat	%
113	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Instansi Pemerintah Yang Mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Gedung	%
114	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Peningkatan Luas Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Pada KSP	
115	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	%
RUMAH SAKIT JIWA			
116	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%
117	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Yang Kompeten	%
118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Sesuai Dengan Standar	%
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
119	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana	%

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)	Satuan
1	*2*	*3*	*4*
120	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%
BIRO HUKUM			
121	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	%
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTORITA DAERAH			
122	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Dalam Penataan Penyelenggaraan Di Provinsi Sumatera Utara	%
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL			
123	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemberian Bantuan/Hibah	%
BIRO PEREKONOMIAN			
124	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	%
BIRO PENGADAAN JASA			
125	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang Dan Jasa	%
126	Program Penataan Organisasi	Persentase Penataan Kelembagaan Yang Tepat Ukuran Dan Tepat Fungsi	%

Sumber : Bappelitbang Provsu, 2024

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, yang mana program kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2025 memuat program dan kegiatan pembangunan yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

- Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- Sistem Pengendalian yang dilakukan meliputi: pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, terpadu lintas sektor, inovatif berbasis pada riset dengan pendekatan *money follow programme priority* dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menjadi pedoman dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025. Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya kami berharap sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menuju Sumatera Utara Emas.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd.

A. FATONI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002